

JURNAL ANALISIS SOSIAL

VOL
20
NO
1 & 2
Edisi
Khusus
2016

Pemuda Desa, Peralihan Antar-Generasi dan Perubahan Sosial



Pemuda Desa, Peralihan Antargenerasi dan Perubahan Sosial

JURNAL **ANALISIS SOSIAL**

Vol. 1 & 2, Edisi Khusus 2016



AKATIGA
Pusat Analisis Sosial

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Volume 20 Nomor 1 & 2, Edisi Khusus 2016

Penanggung Jawab	Fauzan Djamal (Direktur Eksekutif AKATIGA)
Editor in Chief	Benjamin White (Profesor Emeritus Sosiologi Perdesaan, International Insitute of Social Studies, Den Haag)
Redaktur Pelaksana	Acep Muslim
Anggota Redaksi	Charina Chazali Santi Cahya Pratiwi
Penyunting Bahasa	M. Irfan Hidayatullah
Penerjemah	Rasus Budhyono
Penata Letak	Santi Cahya Pratiwi
Perancang Sampul	Santi Cahya Pratiwi
Foto Sampul	Rasmita Yulia

ISSN 1411 – 0024

Terbit Sejak 1995

Diterbitkan oleh

YAYASAN AKATIGA

Jalan Tubagus Ismail II/2
Bandung, 40134 Indonesia
Telp. 022 2502303
Faks. 022 2535824
akatiga@indo.net.id
www.akatiga.org

Dicetak di Bandung, Indonesia, Desember 2017

This publication has been made possible through the support of Knowledge Sector Initiative (KSI). The articles in this publication do not necessarily reflect the views of KSI. Commercial use of all media published by the KSI is not permitted without the written consent of the KSI.

Publikasi ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI). Meskipun demikian, artikel yang dipublikasikan tidak mencerminkan pendapat dari KSI. Dilarang menggunakan materi publikasi untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis dari KSI.

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Analisis Sosial (JAS) kali ini hadir dalam edisi khusus yang memuat dua nomor sekaligus (Volume 20, Nomor 1 dan 2) dengan mengangkat tema *Pemuda Desa, Peralihan Antargenerasi, dan Perubahan Sosial*. Edisi khusus ini disunting oleh Prof. Benjamin White, profesor emiritus dari International Institute of Social Studies, Belanda.

Lebih banyak dari biasanya, JAS kali ini memuat tiga belas tulisan (termasuk editorial) dan ditulis oleh sembilan belas penulis yang berlatar belakang peneliti dan pengajar dari berbagai universitas dan lembaga penelitian baik dalam maupun luar negeri. Artikel-artikel yang diterbitkan ini di antaranya dipilih dari lebih dari lima puluh naskah yang masuk ke meja redaksi melalui *call for papers*.

Kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas penerbitan JAS edisi khusus ini. Terima kasih kami sampaikan kepada *editor in chief* Prof. Benjamin White dan seluruh penulis yang melalui tulisan-tulisan dan gagasan-gagasannya dalam jurnal ini telah memberikan kontribusi intelektual penting dalam kajian kepemudaan dan perdesaan di Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada *Knowledge Sector Initiative (KSI)* yang berkat dukungannya penerbitan jurnal edisi ini dapat terlaksana.

Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca!

Bandung, Desember 2017

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
EDITORIAL	
Rural Youth, Intergenerational Transition, and Social Change <i>Ben White</i>	xi - xxii
Pemuda Desa, Peralihan Antargenerasi dan Perubahan Sosial <i>Ben White</i>	xiii - xxxv
BAHASAN UTAMA	
1. Pemuda dan Pertanian di Indonesia <i>Aprilia Ambarwati, Isono Sadoko, Charina Chazali & Ben White</i>	1 – 22
2. Diskursus Pemuda dalam Pembangunan Perdesaan <i>Gutomo Bayu Aji</i>	23 – 42
3. Ketergusuran Antargenerasi di Zona Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia <i>Tania Murray Li</i>	43 – 72
4. Impian yang Kandas? Pengalaman Kaum Muda terkait Perubahan Agraria di Wilayah Saïss Maroko <i>Lisa Bossenbroek, Jan Douwe van der Ploeg, & Margreet Zwarteveen</i> ..	73 – 88
5. Melawan Cengkraman Isolasi dan Kemiskinan: Kewirausahaan Anak Muda Papua di Kampung-Kampung Terpencil Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat <i>I Ngurah Suryawan</i>	89 – 102
6. Pemuda Kritis, Pemuda Membangun: Pendidikan Pembebasan kepada Pemuda sebagai Upaya Pembebasan Desa <i>Pinurba Parama Pratiyudha</i>	103 – 123
7. Pemuda Desa dan Karang Taruna: Bertani Kolektif di Kulon Progo	

	<i>Hanny Widjaya, Ben White, Aprilia Ambarwati, & Charina Chazali.....</i>	124 – 145
8.	Migrasi Kelompok Muda di Nusa Tenggara Timur <i>Viesda Desi Pithaloka.....</i>	146 – 164
9.	Adaptasi Strategis dan Kewirausahaan Para Pekerja Migran Indonesia di Desa Asalnya <i>Paulus Rudolf Yuniarto.....</i>	165 – 182
10.	Pemuda Desa di Wilayah Industri: Studi Kasus pada Wilayah Industri Semen di Kabupaten Tuban <i>Vandy Yoga Swara.....</i>	183 – 196
11.	Pemuda, Identitas dan Resiliensi Komunal: Catatan atas Transformasi Sosial di Periurban Bandung <i>Angga Dwiartama & Tatang Suheri.....</i>	197 – 215
12.	Orang Betawi sebagai Kelas Pekerja? Autoetnografi Transformasi Pemuda Betawi <i>Wahyudi Akmaliah.....</i>	216 – 229

TINJAUAN BUKU

	Generating Development: A Relational Approach to Children, Youth and Development <i>Oki Rahardianto Sutopo</i>	230 – 234
--	--	-----------

DAFTAR TABEL

Pemuda dan Pertanian di Indonesia

Aprilia Ambarwati, Charina Chazali, Isono Sadoko, dan Ben White

Tabel 1 Total Luas Lahan Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanaman (000 Ha)	4
Tabel 2 Luas Usaha Tani Skala Kecil pada 2013	4
Tabel 3 Umur dan Gender ‘Kepala Rumah Tangga Petani’ di Pertanian Skala Kecil, 2013	9

Diskursus Pemuda dalam Pembangunan Perdesaan

Gutomo Bayu Aji

Tabel 1 Persentase Pemilihan Lokasi Sekolah Orang Tua kepada Anaknya...	38
Tabel 2 Mutu Sekolah Pemuda Menurut Orang Tua Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	38
Tabel 3 Mata Pelajaran yang Disukai oleh Murid di Perdesaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	40
Tabel 4 Profesi Menarik untuk Masa Depan Menurut Guru Berdasarkan Persepsi Murid	40

Pemuda Desa dan Karang Taruna: Bertani Kolektif di Kulon Progo

Hanny Widjaya, Ben White, Aprilia Ambarwati, Charina Chazali

Tabel 1 Komposisi Pemuda di Dusun Kepuh	129
---	-----

Adaptasi Strategis dan Kewirausahaan Para Pekerja Migran Indonesia di Desa Asalnya

Paulus Rudolf Yuniarto

Tabel 1 Jenis-Jenis Usaha TKI Pulang Kampung yang Diwawancara.....	169
--	-----

**Pemuda, Identitas, dan Resiliensi Komunal: Catatan Atas Transformasi Sosial
di Periurban Bandung**

Angga Dwiartama dan Tatang Suheri

Tabel 1 Karakteristik Masyarakat yang Menjamin Terbangunnya Resiliensi

Komunitas 200

DAFTAR GAMBAR

Impian yang Kandas? Pengalaman Kaum Muda Terkait Perubahan Agraria di Wilayah Saïss di Maroko

Lisa Bossenbroek, Jan Douwe van der Ploeg & Margreet Zwarteveen

Gambar 1 Menegosiasikan Ruang melalui Mobilisasi Kompetensi dan Sumber Daya yang Diraih: Driss.	81
Gambar 2 Menegosiasikan Ruang dengan Mobilisasi Kompetensi dan Sumber Daya yang Diraih Samira	85

Melawan Cengkraman Isolasi dan Kemiskinan: Kewirausahaan Anak Muda Papua di Kampung-Kampung Terpencil Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat

I Ngurah Suryawan

Gambar 1 Jalan Papan Menuju Kampung Sarbe, Distrik Kuri, Kabupaten Bintuni.....	93
Gambar 2 Aktivitas Warga Kampung Sarbe, Distrik Kuri, Kabupaten Bintuni Mencari Uang dan Kepiting untuk Kemudian Dijual ke Bintuni	94
Gambar 3 Kelompok Usaha Kecil dan Menengah Binaan dari Bank Mandiri Pimpinan Yance Kareth di Kampung Korano Jaya, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni	101

DAFTAR GRAFIK

Pemuda dan Pertanian di Indonesia

Aprilia Ambarwati, Charina Chazali Isono Sadoko & Ben White

Grafik 1 Proporsi Tenaga Kerja Usia 15-34 Tahun di Sektor Pertanian dan Industri

8

EDITORIAL

RURAL YOUTH, INTERGENERATIONAL TRANSITION, AND SOCIAL CHANGE

Ben White

Emeritus Professor of Rural Sociology, International Institute of Social Studies, The Hague

white@iss.nl

Abstract

This article introduces the special issue of Jurnal Analisis Sosial focusing on rural youth. It offers a reflective view of key issues in the study of rural youth, and the key concepts which we need to use to explore these issues. It comments also on some ethical dilemmas involved in research about young people. The article concludes by explaining the main contribution of each of articles in the issue.

Keywords: *Rural youth, Social change, Youth studies*

Understanding Young Rural Lives: Frameworks and Guiding Concepts¹

Understanding young rural people's lives means that we must look both at how rural youth (kepemudaan) is *constructed* (imagined and represented as a meaningful social, economic and political category), and also how it is actually *experienced* by young people themselves. The sometimes wide gap between construction and experience is one key to the understanding of young people's lives.

The social and scientific construction of youth (kepemudaan) tends to see it as typically a period of "transition"—from child to adult, from education to employment, from family of origin to family of destination (e.g. Lloyd, 2005; Roberts, 2009). This is also the case with the policy literature; an example of this is the World Bank's report on youth, *Development and the Next Generation* (World Bank, 2006) which sees youth in terms of these three interlinked transitions. The "transition" perspective is also inherent in the vision of young people as "human capital", an idea which increasingly permeates everyday language as well as policy discourse. However, just as "human capital" becomes part of our everyday thinking about young people, it is becoming increasingly clear that human capital theory is itself a fallacy. People and governments continue to believe that education is reliable source of economic growth and upward social mobility, but the real experience of young, educated young people shows that "[Human capital theory's] underlying premise – that education

¹ This section has drawn, with some changes, on White (2016).

increases employability – is not based on credible evidence” (Bessant et al. 2017: 91).

It is also important to understand that young people do not necessarily see themselves in this (“transitional”) way, or only in this way. Often they are busy developing youth cultures and identities in their own right; trying to be successful now, as youth (*pemuda*), in the eyes of their peers rather than trying to prepare themselves to be successful future adults. We can better explore how these two dimensions—“being young” vs. “growing up”, or more simply “being” vs. “becoming” (“*jadi*” vs. “*menjadi*”)—coexist in dynamic tension, as in Minza’s (2014) study of young people in Pontianak.

The study of young people has been approached in many interesting and mainly complementary ways: youth as action, youth as cultural practice, youth as cultural production, youth as identity, and youth as transition (Jones, 2009). While all of these approaches are useful, we suggest that the key basic approach to understanding rural youth should be a *relational* approach, seeing youth first and foremost in terms of the dynamics of their relationship with others (adults), in larger structures of social reproduction. The notions of *intersectionality*, *generation*, and *social reproduction* are central to this approach.

Key Guiding Concepts

In exploring and comparing intergenerational relations in rural societies, we need to combine core concepts from the interdisciplinary fields of agrarian studies and youth studies. Agrarian studies helps us to better understand and compare the differentiated structure of rural societies; at micro level it helps us to understand developmental cycles of rural households and the logic of smallholder farmer survival in capitalist contexts. A youth studies perspective helps us to understand the position of young men and women in the agrarian structures just mentioned, their paradoxical (apparent) turn away from farming in this era of mass rural un(der)employment, and the problems faced by those who do aspire to farming futures. It focuses attention on the generational dimensions of the social reproduction of rural communities, and also provides an important reminder of young peoples’ “right to be properly researched” (Beazley et al., 2009), not as objects, but as subjects and where possible as participants in research.

Bringing these two perspectives together should put us in a better position to understand the intergenerational tensions that we see almost everywhere in rural communities. These tensions all reflect the general structural context of rural Indonesian society, with among its key features agrarian inequality, corporate penetration of the agri-food sector, patriarchy and gerontocracy, in varying degrees.

Agrarian political economy allows us to depict and compare “the social relations and dynamics of production and reproduction, property and power in agrarian formations and their processes of change, both historical and contemporary” (Bernstein, 2010: 1), as well as the special characteristics of smallholder farming (van der Ploeg, 2013).

In the analysis of agrarian structures and their dynamics, key concepts include

commodification, agrarian differentiation and agrarian *labour regimes* and labour processes, and the *social divisions of labour* related to these processes. Social divisions of labour involve dimensions of class, gender and other factors, and the *intersectionality* of these. These are the abstract concepts which prompt us to ask—and help us to understand the answers to—the concrete, down-to-earth questions on which agrarian political economy can be analysed and compared: “who owns what? who does what? who gets what? What do they do with it?” (Bernstein 2010: 22) and “what do they do to each other?”²

Besides individuals and agrarian classes, basic building blocks within these agrarian structures include agrarian *households*. These often combine distinct and only partly overlapping units of production, consumption and accumulation, which include the possibility of surplus transfer mechanisms between household members based on hierarchies of age and gender, as well as wage transactions within households (Guyer & Peters, 1987; White 1989: 22). Households are also “moving targets” which require a dynamic perspective on their *developmental cycles*—their formation, expansion, dispersal, fission and replacement—and the changing age and labour composition of households in the course of these cycles (Chayanov, 1966 [1925], Ch. 1; Fortes 1966; White, 1980: 16-22).

Every family, depending on its age, is in its different phases of development a completely distinct labour machine as regards labour force, consumer-worker ratio, and the possibility of applying the principles of complex cooperation (Chayanov, 1966 [orig. 192]: 60).

Key concepts which we draw from the “new” *youth studies* include first, the idea of *youth as “generation”*, a social category defined—like class and gender—as “relationship” rather than “thing”; and youth as *social* (and cultural, and political) *construction*. The age-based categories in common use by UN agencies (“child” as 0-17, “adolescent” as 10-19, “youth” as 15-24) are of little use as analytical tools. Different countries define “youth” in widely differing ways in their national youth laws or youth policies; ‘youth’ starts, for example, at age 12 in Mexico, 13 in the UK, 16 in Indonesia and 18 in Bolivia, and it ends at age 19 in the UK, 29 in Mexico, 35 in Tanzania and 40 in Malaysia.

Many children and young people in Indonesia would not see themselves fitting in these categories and constructions. Many young Indonesians in their middle teens do not consider themselves “children”, and defining all people under the age of 18 as “child” risks infantilizing those approaching the upper age limit; the only thing that binds 0 to 17 year olds together being their lack of full legal and political standing. Similarly, extending the boundaries of “youth” to age 30 or above—even to age 40 according to the Indonesian National Youth Committee (KNPI, 2005), or to age 45 in the regulations for the Indonesia-wide youth organization Karang Taruna (Permensos 2010, Pasal 9 [1])—risks “juvenilizing” young adults as something less than full members of society, less than full citizens. The

² The fifth question is added to capture the relational and political side of the property and labour regimes, labour processes and structures of accumulation which Bernstein’s four questions explore.

extended definition identifies an age-group many of whose members have already passed the main markers of “transition to adulthood”, being already married, out of school and employed in the labour force. This supports the notion that the main basis for the extended definition is political.

Central to young people’s understandings (and often adult understandings) of youth is the idea of “dependence”—relying on others for essentials such as food and shelter—as well as subordination: both governments and the adult world generally maintain an implicitly hierarchical and patriarchal understanding of how society ought to work, in which young people are normatively subordinate to adult authority.

The importance of “generation” in social change processes was highlighted in Mannheim’s 1928 essay *The Problem of Generations* (1952). It has inspired much subsequent work on youth and social change; it was for example one of the ideas guiding Koning’s pioneering dissertation on “generations of change” in a Javanese village (Koning 1997 & 2005). “Generation” is a fundamental concept for the study of youth, on a par with concepts of class, gender, and ethnicity in the social sciences. It provides a way to capture the structures that set young people apart from other social groups, and constitute them as a social category through relations of division, difference and inequality between this and other categories.³ Unlike gender, class and ethnicity however, “generation” is by definition a moving target: we pass through the generations as we get older, and when we speak of changing generations or generational relations we are not talking of changes happening to a defined group of people, but changes between one generational group and the next. Consider for example the fascinating and rapid shifts in the experiences, lifestyles and identities of urban *kampung* youth which Patrick Guinness observed over three decades (Guinness, 2009: Ch. 5). These shifts are not about “young people changing” but about “youth” (*kepemudaan*) itself changing as succeeding generations follow each other into, and out of, the “youth” slot.

“Generation, then, is to (biological) age more or less what gender is to (biological) sex. We thus need to study the social organization of generational relations between younger and older generations, and their role in the *social reproduction*⁴ of agrarian communities. Youth studies also sees *youth as identity* (Jones, 2009: Ch. 3), remembering that young people are not only young, but have multiple identities: they are young men or women (gendered), and also in most rural contexts members of distinct social classes, often also distinct ethnic groups, and sometimes also disabled or divided by other markers like religion.⁵ Youth and generation must therefore be seen as intersecting with other important social categories. *Intersectionality* therefore points to the dynamic, links and tensions between different, cross-cutting (“intersecting”) axes of identity and difference (for example between gender,

³ Paraphrasing Alanen (2001: 13) on childhood as generational relation.

⁴ *Social reproduction*: “the material and discursive practices which enable the reproduction of a social formation (including the relations between social groups) and its members over time” (Wells 2009).

⁵ Paraphrasing Alanen (2016, p. 159) on intersectionality of childhood.

ethnicity, class, and generation).

“Youth” today may be seen as experiencing both prolongation and contraction, as (social) adulthood is in some ways postponed, and in others accelerated. On the one hand, in most countries rural young people remain enrolled in education longer than their parents did, their average age at first marriage is rising, as is also their age of entry into labour markets. But at the same time, particularly through the spread of internet and social media, young people no longer rely on adults (parents, teachers, religious or other community leaders) for their knowledge of, and links to, the outside world, and they engage with globalization and modernity at increasingly younger ages, and independently of parents or other adults. These trends highlight the differences between “being” and “becoming” as two faces of youth which co-exist in tension with each other, as already discussed above.

Youth studies also sees *youth as actors* in social and economic renewal, rather than passive objects of adult control and socialization (Jones, 2009). This relates to another meaning of “generation”, and one with great historical and political relevance in Indonesia, that is: Mannheim’s notion of a generation that becomes a meaningful social and political category. This occurs when significant numbers of young people develop and express a consciousness of themselves as “youth” by first, living through the same historical and social events and experiencing them as significant for themselves, and second, by acting upon this consciousness (Mannheim, 1952). This notion is implicit in the Indonesian concept of “*angkatan*” as applied to the generations of young people who have been active in major political upheavals (the national revolution, the downfall of the Soekarno and the Soeharto regimes as well as lesser convulsions like Malari in the early Soeharto years): these have been labeled the *Angkatan 45*, *Angkatan 65–66*, *Angkatan 98* and so on in accord with the year of the relevant convulsion. It is a common theme in research on Indonesian politics, since Anderson’s classic study of the role of *Pemuda* in the early Indonesian revolution (Anderson, 1972).

Following Mannheim, while “the older generation tends to act as a conservative force, ...each new generation has a radically fresh contact with prevailing conditions that leads towards novel solutions and new trends” (Spencer, 1990: 20). A youth-centred (rather than transition-centered) view of young people, therefore, sees them not just as “learners”, but as ‘makers and breakers’ (Honwana & van der Broeck [eds], 2005), “vandals and vanguards” (Abbink & van Kessel [eds.], 2005), creators and renewers of culture—a s we can see for example in young people’s creation of new language, new modes of dress and bodily adornment, and new life styles. At the same time, actor-oriented approaches need also to understand the power of structural environments which limit young people’s agency and room for maneuver; like all other social groups they exercise “constrained agency”. Young people, like adults, can be both victims (or beneficiaries) of structures, and simultaneously individual or collective agents of resistance and change in those structures.

On the one hand, youth are the most active group in movements of major political

renewal, in which sometimes, but not always, youth also take leadership. Youth have often been in the forefront, not only in all of Indonesia's major national political convulsions, but also in routine national and local election campaigns, including the most recent (2014) parliamentary and presidential elections. On the other hand, when such campaigns and convulsions are over, young activists often face the reality that they have failed to achieve major social changes, improvements in corruption and the justice system, etc. This highlights a key paradox of young people's involvement in political process: although youth may be defined as a group who tend to challenge authority as the "vanguard of change", once authority has been successfully challenged and a new regime installed, the new regime itself becomes the new authority, and sees youth as a political vehicle that should no longer challenge but now legitimize and defend the new regime. Their critical activism is no longer welcome; the question then becomes one of how to contain the 'excesses' of youth (Baulch, 2007: 19; Ryter, 2002: 134, cf. Ryter, 1998: 58). Many as a result lose interest and faith in the capacity of these processes to respond to their interests. For some young people, political pessimism and disillusionment together with the new consumerism have promoted a new, non-political cultural identity, as argued by Nilan in the early years of *reformasi*:

We could argue that since 1998, the generation of young people in Indonesia has lost the definable sense of a generation 'for itself' (*pemuda*) and has become more of a generation 'in itself' (*remaja*, ABG) linked mainly by temporal similarity rather than by shared political knowledge and purpose (Nilan 2004:190).

For others, the same frustrations may lead them into quite ugly modes of youth organization, such as the Indonesian National Youth Committee (KNPI) established in the early years of the Suharto regime in 1973, or the *Pemuda Pancasila* which by the 1980s had become an important political presence throughout Indonesia, with a physical headquarters at every level, each coordinating the level below it (Ryter, 2002: 5). In the decentralized post-Soeharto era, young people are regularly recruited by local elites and bosses into ethnic and religious movements, electoral politics, and also into urban vigilante groups. *Pemuda Pancasila* and other youth organizations such as Golkar's "Association of Functional Youth Groups" IPK have been active participants in the political gangsterism, extortion and thuggery of Indonesia's new local democracies (Hadiz, 2011: 88-142).

These two dimensions of Indonesian youth – as the vanguard of political and social change, and at the same time as dangerous threat to social and political stability – coexist uneasily in both popular and academic understandings of youth.

Young People and the “Right to be Properly Researched”

One important generational relationship involving youth is the relationship between young people and the (nearly always) adult professional researchers—like the authors of the articles in this issue—who study them. Among the many rights that young people should have, one that is not often mentioned is “the right to be properly researched”. This is another aspect of

the generational relationships, often involving power and status differences, between young people and the adults who study them as part of their professional lives.

As researchers we need to ask ourselves: will young people be objects, subjects, or participants in my research? Will information on young people's situation and experiences be obtained directly from them, or by proxy (from adults - particularly parents, and teachers—supplying information about them)? Survey research in particular has tended to follow the proxy approach with young people, while there is plenty of evidence that the best source of information about issues pertinent to young people—even young children—is themselves (Scott, 2000).

The ethical protocols of research agencies, sponsors and professional associations commonly include the principles of “informed consent”, privacy, confidentiality and (sometimes) respect for those we study. “Those interviewed or observed should give their permission in full knowledge of the purpose of the research and the consequences for them of taking part” (Piper & Simons, 2005: 56). This sounds very good, but how possible is it to achieve this in real research situations, involving issues that can be sensitive, illegal or publicly disapproved of (for example: sexuality, drink or drugs, parental violence or other generational tensions)? And when the social gulf/power relation between researcher and subjects is large—as it often is between adult researchers and young people—how real is the consent given? How important will be pressures from peers and “gatekeepers” (for example the village officials, community leaders, school teachers or parents). Sometimes “privacy” is impossible for purely practical reasons: in crowded rural and urban settlements it is not easy to find a place where a young (male, female) respondent can talk alone to an adult researcher without the presence of others (whether parents, teachers, or peers). “Informed consent”, “privacy”, and “confidentiality” therefore often need to be contextualized, and the boundaries between what is and is not acceptable are extremely fuzzy.

Young people are also quite capable of becoming key actors in the process of research itself, if we are willing to do research “with” young people, not “about” them. (and thus take the notion of “youth-centred” and “participatory” research beyond rhetoric).

Contributors to This Edition

The 12 articles in this issue all, explicitly or implicitly, reflect the ideas and frameworks which we have introduced above.

The article by AKATIGA researchers on *Pemuda dan Pertanian di Indonesia* reflects on the changing place of young rural men and women in Indonesia's agrarian structures, focusing on the age and gender of farmers, the modes of intergenerational transfer of land, patterns of rural youth mobility, and (the lack of) institutions representing rural youth interests. Gutomo Bayu Aji's article on *Diskursus Pemuda dalam Pembangunan Perdesaan* focuses on the changing social construction of youth, exploring the changing discourse on

youth from the Old Order to the New Order period and how amidst the change rural young people lost their opportunities to establish their own identities.

Tania Li's article on *Intergenerational Displacement in Indonesia's Oil Palm Plantation Zone* highlights the long-term intergenerational dynamics related to displacement from land and from opportunities to find decent employment. As revealed by an elder in the village that Li observed in the province of West Kalimantan: "when the company came we thought our land was as big as the sea". But more companies came. Now his children and grandchildren are landless. They are marooned in a sea of oil palms in which they have no share, and no means of gaining a share, since the price of land in the enclaves and residual pockets of non-plantation land is far beyond their means. This theme – the transformation of rural youth from landowners to landless, in the space of one or two generations, is also a focus of Wahyudi Akmaliah's article on *Transformasi Pemuda Betawi*, and Angga Dwiartama and Tatang Suheri's article on *Pemuda dan Transformasi Sosial di Wilayah Periurban Bandung*.

Lisa Bossenbroek et al.'s study on the experiences of young people in the Saïss (Morocco) is a good example of how, by highlighting only four cases of young men (Driss and Anas) and young women (Samira and Mona), this brief article can make us understand not only the ways in which these four farming family children negotiate space by mobilizing their competence and the limited resources they have, but also the frustration they feel in their relationship with their parents in the patriarchal Moroccan society.

I Nguh Suryawan, in his article on rural young generation in Teluk Bintuni (West Papua), describes how Papuan young people struggle to free themselves from the manacles of poverty and isolation. With financial support from a private bank, they started to develop some shrimp and crab business, fishing and distributing them, along with different types of farm produce, to a market in Bintuni. Through this case, we can see the important role of the Village Head (Ketua Kampung), who, together with the head of the local branch of the bank, can see the hidden potentials of the region. From this article we also learn how people from the transmigrant villages and, in turn, Papuan *mamas* started to join the business.

In his article *Pemuda Kritis, Pemuda Membangun Pinurba Parama Pratiyudha* raises the issue of rural young people's alienation from the dimensions of social change and self-identity and, looking at several examples of how liberating education is adopted in the UK, the US, and South Africa, highlights liberating education as a solution.

A legacy of the Old Order regime, Karang Taruna, the only youth organization that reaches out down to the level of villages and hamlets, has been criticized as a corporatocratic organization that, rather than fostering youth's political maturity and creativity, promotes youth depolitization instead. Hanny Widjaya et al., in their article *Pemuda Desa dan Karang Taruna* explore the case of a relatively dynamic hamlet-level (dusun) Karang Taruna. The members of the organization, most of whom had no experience of helping their parents in the fields, took an initiative to rent their village's reserve rice fields and cultivate them together. By exploring the dynamics of both their internal and external relations, Hanny et al. underline

some of the tensions felt in the organization, particularly among others, those that exist in the organization's top-down dynamics, youth agency, and in the patriarchal characteristics of the interaction among members.

Two other articles focus on rural youth migration. One views it from the perspective of decision making process to migrate, and the other from the perspective of return migrants in their home village. Based on her research in Flores, Timor, and Sumba islands, Viesda Pithaloka concludes that although migration is an individual choice, it does not result from an individual decision making process. The decision to migrate is a structured freedom. The individual's social class, gender, family, and the prevailing socio-cultural dynamics contribute to the decision making process. Paulus Rudolf Yuniarto on the "strategic adaptation" of return migrants in their home village (in Malang, East Java) who then start a new business reveal that the trend of young migrant who return to their home village and invest their savings in farm land and different types of business has been prevalent for at least two generations. This is the strategy by which the village middle class reproduces itself, and the next generation, in the same middle-class position in society.

In his article on *Pemuda di Wilayah Industri*, Vandy Yoga Swara delves into the characteristics and dynamics of youth in the area of cement industry in Tuban (East Java). In the article, Karang Taruna is viewed as an important space of youth communication as well as a facilitator that enables community members to express their aspiration for both the government and the cement industry. Village youth can use Karang Taruna as a vehicle to fight for three rights, namely the right to employment opportunities, the right to a healthy environment, and the right to business opportunities. The active engagement of village youth will in turn be an arena in which the older and younger generations compete to develop their village.

The last two articles illustrate the process of marginalization experienced by periurban youth, a situation where locals turn from land owners to landless people only within a span of one or two generations. In their article on *Pemuda, Identitas, Resiliensi Komunal*, Angga Dwiartama and Tatang Suheri highlight Sekepicung Village in Upper Dago area (Bandung) whose people shift from an agrarian community into a community of precarious, daily, or contract workers amidst the mushrooming development of luxurious real estates, golf courses, and fancy cafés. In the prevalent context of vulnerability and loss of social identity, a young married couple established an organization called PASSER which, among others, aims to prevent youth from being drawn into alcoholism, foster the community's, particularly its youth's, resilience, strengthen the sense of social awareness and bond, nurture cultural values, and organize social activities for village people aged 17 to 40.

In the next article, Wahyudi Akmaliah takes an ethnographic and oral history approach to trace and explore the experience of his own family in a Betawi village in Bekasi, who experience a transition from a family of landowners to a working-class family within three generations. While the Generation 1 was able to accumulate land, build houses for rent, open

(wedding) party equipment rental business, and sell clothing, those belonging to Generation 2 each received a house and business capital, but not everyone was successful and their assets were all sold gradually. The economic stagnation or even regression experienced by Generation 2 resulted in the fact that many of those belonging to Generation 3 ended up being employed in informal sectors as mini-shop owners, prepaid top up sellers, illegal transport brokers near toll gates, online motorcycle taxi riders, cleaning service workers, or precarious daily workers.

In the final article, Oki Rahadianto writes a review on the book of *Generating Development: A Relational Approach to Children, Youth, and Development* (edited by Roy Huijsmans, 2016). The book provides an alternative in understanding “the relation between the child and youth studies and development studies”. By seeing youth from relational approach, hopefully the discourse on Indonesian youth is more nuanced and no longer limited to white and black.

Hopefully the articles in this Special Issue will help readers to a better understanding of the dynamics and dilemmas faced by Indonesia’s rural young people today.

References

- Abbink, J. & J. van Kessel (eds.). (2005). *Vanguard or Vandals: Youth, Politics and Conflict in Africa*. Leiden: Brill.
- Alanen, Leena. (2001). Explorations in Generational Analysis. In Alanen, Leena & Berry Mayall (eds.), *Conceptualizing Child-Adult Relations* (pp. 11-21), Ch. 2. London: Routledge.
- Anderson, Benedict. (1972). *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell University Press.
- Baulch, Emma. (2007). *Making Scenes: Reggae, Punk, and Death Metal in 1990s Bali*. Durham: Duke University Press.
- Beazley, Harriot, Sharon Bessell, Judith Ennew & Roxana Waterman. (2009). The Right to be Properly Researched: Research with Children in a Messy, Real World. *Children’s Geographies*, 7 (4), 365-378.
- Bernstein, Henry. (2010). *Class Analysis of Agrarian Change*. Agrarian Change and Peasant Studies Series, Halifax: Fernwood Press.
- Bessant, Judith, Rys Farthing, & Rob Watts eds. (2017). *The Precarious Generation: A Political Economy of Young People*. London: Routledge.
- Chayanov, Alexander. (1967 [orig. 1929]). Peasant Farm Organization. In Thomas, D., Basile, Kerblay, & R. Smith (eds.), *A.V. Chayanov on the Theory of Peasant Economy*. Homewood: American Economic Association.
- Fortes, Meyer (1966). Introduction. In Goody, Jack (ed.), *The Developmental Cycle in*

- Domestic Groups* (pp. 1-14). Cambridge: University Press.
- Guinness, Patrick. (2009). *Kampung, Islam, and State in Urban Java*. Singapore: NUS Press and Leiden: KITLV Press.
- Hadiz, Vedi. (2011). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Singapore: ISEAS Press.
- Honwana, Alcinda and Filip de Boeck (eds.) (2005). *Makers and Breakers: Children and Youth in Postcolonial Africa*. Oxford: James Currey.
- Jones, Gill. (2009). *Youth*. Key Concepts Series, Cambridge: Polity Press.
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). (2005). *Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia*.
<http://knpikarangampel.files.wordpress.com/2009/11/anggaran-rumah-tanggal.pdf>.
 Accessed 3 August, 2011.
- Koning, Juliette. (1997). *Generations of Change: a Javanese Village in the 1990s*. PhD thesis, University of Amsterdam.
- Koning, Juliette. (2005). The Impossible Return? The Post-migration Narratives of Young Women in Rural Java. *Asian Journal of Social Science*, 33 (2), 165-185.
- Lloyd, Cynthia (ed.). (2005). *Growing up Global: the Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries*. Washington DC: The National Academies Press.
- Mannheim, Karl. (1952 [orig. 1928]) The Problem of Generations. In Kecskemeti, P. (ed.), *Karl Mannheim: Essays on the Sociology of Knowledge* (pp. 276-320). London: Routledge.
- Minza, Wenty M. (2014). *Growing Up and Being Young in an Indonesian Provincial Town*. Ph.D. dissertation, Amsterdam Institute of Social Science Research, University of Amsterdam.
- Nilan, Pamela. (2004). The Risky Future of Youth Politics in Indonesia. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 38 (1), 173-94.
- Permensos. (2010). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 / HUK/ 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Piper, Heather & Helen Simons. (2004). Ethical Responsibility in Social Research. In Somekh, Bridget & Cathy Lewin (eds.), *Research Methods in the Social Sciences* (pp.56-73). London: Sage.
- Roberts, Ken. (2009). *Youth in Transition: Eastern Europe and the West*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Ryter, L. (2002). *Youth, Gangs and the State in Indonesia*. PhD Dissertation, University of Washington.
- Ryter, Loren. (1998). Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's order?. *Indonesia*, 66, 44-73.

- Scott, Jacqueline. (2000). Children as Respondents: The Challenge for Quantitative Methods. In Christensen, Pia & Allison James (eds.), *Research with Children: Perspectives and Practices* (pp. 98–119). London: Routledge Falmer.
- Spencer, Paul. (1990). The Riddled Course: Theories of Age and its Transformations. In Spencer, Paul (ed.) *Anthropology and the Riddle of the Sphinx: Paradoxes of Change in the Life Course* (pp. 1-34). London: Routledge.
- Van der Ploeg, Jan Douwe. (2013). *The Art of Peasant Farming: A Chayanovian Manifesto*. Agrarian Change and Peasant Studies Series. Halifax: Fernwood Publishing.
- Wells, Karen. (2009). *Childhood in a Global Perspective*. Cambridge: Polity Press.
- White, Ben. (1980). Rural Household Studies in Anthropological Perspective. In Binswanger, H.P., R.E. Evenson, C.A. Fiorencio & B. White (eds.), *Rural Household Studies in Asia* (3-25). Singapore: Singapore University Press.
- White, Ben. (2016). Generation and social change: Indonesian youth in comparative perspective. In Robinson, Katherine (ed.), *Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia* (pp. 4-22). Leiden: Brill.
- World Bank. (2006). *Development and the Next Generation: World Development Report 2007*. Washington DC: The World Bank.

EDITORIAL

PEMUDA DESA, PERALIHAN ANTARGENERASI, DAN PERUBAHAN SOSIAL¹

Ben White

Profesor Emeritus Sosiologi Perdesaan, International Institute of Social Studies,

Den Haag

white@iss.nl

Abstrak

Artikel ini merupakan pengantar edisi khusus Jurnal Analisis Sosial yang berfokus pada isu pemuda desa (rural youth). Artikel ini menyajikan pandangan reflektif mengenai isu-isu kunci dalam kajian mengenai pemuda desa (rural youth), serta konsep-konsep kunci yang diperlukan untuk mengeksplorasi isu-isu ini. Artikel ini juga mengomentari beberapa dilema etis yang dihadapi dalam penelitian mengenai pemuda. Tulisan ini ditutup dengan pemaparan mengenai kontribusi artikel-artikel dalam edisi ini.

Kata kunci: *Pemuda desa, Perubahan sosial, Kajian kepemudaan*

Memahami Kehidupan Pemuda Perdesaan: Kerangka dan Konsep Panduan²

Untuk memahami kehidupan pemuda perdesaan (laki-laki dan perempuan), kita harus melihat bagaimana kepemudaan *dikonstruksi* (dibayangkan dan direpresentasi sebagai kategori sosial, ekonomi, dan politik yang berarti), serta bagaimana sebenarnya kepemudaan *dialami* oleh para pemuda sendiri. Kesenjangan yang terkadang lebar antara konstruksi dan pengalaman merupakan salah satu kunci untuk memahami kehidupan pemuda.

Konstruksi sosial dan ilmiah kepemudaan cenderung melihat kepemudaan secara tipikal sebagai masa “transisi”—dari kanak-kanak ke dewasa, dari pendidikan ke pekerjaan, dari keluarga asal ke keluarga tujuan (misalnya: Llyod, 2005; Roberts, 2009). Begitu pula dengan literatur kebijakan yang ada; misalnya laporan Bank Dunia mengenai kepemudaan, *Development and the Next Generation* (World Bank, 2006), yang melihat pemuda

¹ Versi awal artikel ini ditulis dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Rasus Budiyono

² Bagian ini diambil, dengan beberapa perubahan, dari White (2016).

berdasarkan tiga transisi yang saling terkait. Perspektif “transisi” juga melekat pada visi tentang pemuda sebagai “modal manusia” (*human capital*), gagasan yang semakin merasuk ke dalam bahasa sehari-hari dan diskursus kebijakan. Meski demikian, seiring masuknya gagasan mengenai “modal manusia” ke dalam pemikiran sehari-hari kita tentang pemuda, semakin jelas bahwa teori modal manusia sendiri merupakan kekeliruan. Masyarakat dan pemerintah terus meyakini bahwa pendidikan merupakan sumber penting bagi pertumbuhan dan peningkatan mobilitas sosial, akan tetapi apa yang secara nyata dialami pemuda terdidik menunjukkan bahwa “Premis dasar [teori modal manusia]—bahwa pendidikan meningkatkan peluang kerja—tidak dilandaskan pada bukti yang sah” (Bessant et al., 2017: 91).

Penting pula dipahami bahwa pemuda tidak selalu memandang diri mereka sendiri dengan perspektif (“transisional”) ini, atau hanya dengan cara ini. Seringkali mereka sibuk membangun budaya dan identitas dengan cara mereka sendiri; berkiprah menjadi sukses sekarang sebagai pemuda di mata rekan sebaya, alih-alih menyiapkan diri untuk menjadi orang dewasa sukses di kemudian hari. Kita dapat dengan lebih baik menggali bagaimana dua dimensi ini—“menjadi muda” vs. “tumbuh”, atau secara lebih sederhana “jadi” vs. “menjadi”—sama-sama hadir dalam tegangan dinamis, sebagaimana dalam kajian Minza (2014) mengenai pemuda di Pontianak.

Studi mengenai pemuda dilakukan dengan menggunakan banyak pendekatan yang menarik dan terutama saling melengkapi: kepemudaan sebagai tindakan, kepemudaan sebagai praktik kultural, kepemudaan sebagai produksi kultural, kepemudaan sebagai identitas, dan kepemudaan sebagai transisi (Jones, 2009). Semua pendekatan tersebut berguna, namun kami menyarankan bahwa pendekatan dasar yang menjadi kunci untuk memahami kepemudaan desa adalah pendekatan *relasional*, yang utamanya melihat kepemudaan dari aspek dinamika hubungan mereka dengan orang lain (orang dewasa), dalam struktur-struktur reproduksi sosial yang lebih besar. *Interseksionalitas (keberirisan)*, *generasi*, dan *reproduksi sosial* merupakan konsep-konsep sentral dalam pendekatan ini.

Konsep-Konsep Kunci

Dalam menggali dan membandingkan relasi antargenerasi pada masyarakat perdesaan, kita perlu memadukan konsep-konsep dari bidang-bidang interdisipliner kajian agraria dan kepemudaan. Kajian agraria membantu kita untuk memahami lebih baik dan membandingkan struktur yang terbedakan (*differentiated structure*) pada masyarakat perdesaan; pada tataran mikro, hal ini membantu kita untuk memahami siklus perkembangan keluarga perdesaan dan logika keberlanjutan (*survival*) petani kecil (*smallholder*) dalam konteks kapitalis. Perspektif kajian kepemudaan membantu kita memahami posisi pemuda, laki-laki dan perempuan, dalam struktur-struktur agraria tersebut, keberpalingan paradoksikal (yang tampak) mereka dari pertanian di era (setengah) menganggur (*un[der]employment*) massal di perdesaan, dan masalah yang dihadapi mereka yang bercita-cita bertani kelak. Perspektif ini memusatkan

perhatian pada dimensi generasional dari reproduksi sosial masyarakat perdesaan, dan menjadi pengingat pentingnya akan “hak (pemuda) untuk diteliti sepatutnya” (Beazley et al., 2009), tidak sebagai objek, namun sebagai subjek, dan jika memungkinkan sebagai peserta dalam penelitian.

Pemaduan dua perspektif ini akan menempatkan kita pada posisi yang lebih baik untuk memahami tegangan antargenerasi yang kita lihat ada di hampir semua masyarakat perdesaan. Semua tegangan ini mencerminkan konteks struktural (umum) masyarakat perdesaan Indonesia, yang di antaranya bercirikan ketimpangan agraria, penetrasi korporasi di sektor pertanian pangan (*agri-food*), patriarki dan gerontokrasi, yang hadir dalam beragam tingkatan.

Ekonomi politik agraria memungkinkan kita untuk menggambarkan dan membandingkan “relasi sosial dan dinamika produksi dan reproduksi, kepemilikan dan kuasa dalam formasi agraria dan proses-proses perubahannya, baik secara historis maupun kontemporer” (Bernstein, 2010: 1), serta karakteristik-karakteristik khusus pertanian skala kecil (van der Ploeg, 2013).

Analisis struktur agraria dan dinamikanya mencakup konsep-konsep kunci seperti *komodifikasi*, *diferensiasi agraria*, rezim ketenagakerjaan agraria dan proses ketenagakerjaan, serta pembagian atas kerja terkait proses-proses ini. Pembagian sosial kerja melibatkan dimensi kelas, gender, dan faktor-faktor lain, serta *keberirisan* semua ini. Ini semua merupakan konsep-konsep abstrak yang memicu kita untuk menanyakan—dan membantu kita memahami jawaban atas—pertanyaan-pertanyaan konkret dan membumi mengenai ekonomi politik agraria mana yang dapat dianalisis dan dibandingkan: “siapa memiliki apa? siapa melakukan apa? siapa mendapatkan apa? apa yang mereka lakukan dengannya?” (Bernstein, 2010: 22) dan “apa yang mereka lakukan terhadap satu sama lain?”³

Selain individu dan kelas-kelas agraria, unsur-unsur pokok dasar dalam struktur-struktur agraria meliputi rumah tangga pertanian (*agrarian households*). Unsur-unsur ini kerap memadukan unit-unit produksi yang berbeda dan sebagian tumpang tindih, konsumsi, dan akumulasi, yang mencakup kemungkinan mekanisme alih surplus antara anggota rumah tangga berdasarkan hierarki usia dan jenis kelamin, serta transaksi upah dalam rumah tangga (Guyer & Peters, 1987; White 1989: 22). Rumah tangga juga adalah “target bergerak” yang memerlukan perspektif dinamis atas *siklus perkembangannya*—pembentukan, ekspansi, pemecaran, pemecahan, dan penggantian—dan perubahan umur serta komposisi tenaga kerja dalam rumah tangga sepanjang siklus tersebut (Chayanov, 1966 [1925], Bab 1; Fortes, 1966; White, 1980: 16-22).

Every family, depending on its age, is in its different phases of development a completely distinct labour machine as regards labour force, consumer-worker ratio, and the possibility of

³ Pertanyaan kelima ditambahkan untuk menangkap sisi relasional dan politik rezim kepemilikan dan ketenagakerjaan, proses-proses ketenagakerjaan, dan struktur-struktur akumulasi, yang digali oleh keempat pertanyaan Bernstein.

Every family, depending on its age, is in its different phases of development a completely distinct labour machine as regards labour force, consumer-worker ratio, and the possibility of applying the principles of complex cooperation (Chayanov, 1966 [orig. 192]: 60).

Konsep-konsep kunci yang kita tarik dari *kajian kepemudaan (Youth Studies)* “baru” di antaranya adalah pertama, gagasan mengenai *pemuda sebagai “generasi”*, sebuah kategori sosial—seperti kelas dan gender—didefinisikan sebagai “hubungan” alih-alih “sesuatu”; dan pemuda sebagai *konstruksi sosial* (dan kultural serta politis). Kategori-kategori berbasis umur yang lazim digunakan oleh badan-badan PBB (“anak” dengan kisaran umur 0-17, “remaja” 10-19, “pemuda” 15-24) tidak banyak berguna sebagai alat analisis. Berbagai negara mendefinisikan “pemuda” dengan banyak cara berbeda dalam undang-undang kepemudaan atau kebijakan kepemudaan nasional mereka; sebagai contoh, seseorang disebut “pemuda” saat memasuki umur 12 di Meksiko, 13 di Inggris, 16 di Indonesia, dan 18 di Bolivia, dan tidak lagi menjadi pemuda setelah melewati umur 19 di Inggris, 29 di Meksiko, 35 di Tanzania, dan 40 di Malaysia.

Banyak anak dan pemuda di Indonesia tidak melihat diri mereka masuk ke dalam kategori dan konstruksi tersebut. Banyak pemuda Indonesia di tengah usia belasan, mereka tidak lagi menganggap diri mereka sebagai “anak-anak”, dan menggolongkan semua orang yang berumur di bawah 18 tahun sebagai “anak-anak” berisiko menginfantilkan mereka yang sudah mendekati batas atas umur; satu-satunya hal yang menyamakan orang berumur 0-17 tahun adalah lemahnya kedudukan hukum dan politik mereka secara sepenuhnya. Sebaliknya, menaikkan batas umur “pemuda” hingga angka 30 atau lebih—bahkan hingga umur 40 menurut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI, 2005) atau hingga umur 45 berdasarkan peraturan organisasi Karang Taruna yang ada di seluruh Indonesia (Permensos 2010, Pasal 9 [1])—berisiko “memudakan” orang dewasa muda sehingga mereka tidak dianggap sebagai warga masyarakat dan warga negara secara penuh. Perluasan definisi ini mengidentifikasi suatu kelompok umur yang banyak anggotanya telah melampaui penanda-penanda utama “transisi menuju kedewasaan” karena mereka sudah menikah, keluar sekolah, dan dipekerjakan dalam angkatan kerja. Ini menguatkan pandangan bahwa landasan utama perluasan definisi ini bersifat politis.

Yang penting bagi pemahaman pemuda (dan acap kali pemahaman orang dewasa) mengenai kepemudaan adalah pandangan mengenai “kebergantungan”—kebergantungan pada orang lain dalam hal-hal mendasar seperti pangan dan papan—serta subordinasi: baik pemerintah maupun dunia orang dewasa pada umumnya mempertahankan pemahaman yang secara implisit bersifat hirarkis dan patriarkal mengenai bagaimana masyarakat seharusnya berjalan, yakni pemuda secara normatif memiliki posisi subordinat terhadap otoritas orang dewasa.

Pentingnya “generasi” dalam proses-proses perubahan sosial disorot dalam esai Mannheim tahun 1928 berjudul *The Problem of Generations* (1952). Esai ini menginspirasi banyak tulisan setelahnya mengenai pemuda dan perubahan sosial; esai ini misalnya merupakan salah satu pandangan yang mengarahkan disertasi rintisan Koning mengenai “generasi perubahan” di sebuah desa di Jawa (Koning, 1997 & 2005). “Generasi” adalah

konsep mendasar bagi studi tentang kepemudaan, yang sejajar dengan konsep kelas, gender, dan etnisitas pada ilmu-ilmu sosial. Konsep ini membuka jalan untuk melihat struktur-struktur yang memisahkan pemuda dari kelompok-kelompok sosial lain, dan mengelompokkan mereka sebagai suatu kategori sosial melalui relasi pembagian, perbedaan dan ketimpangan (*inequality*) antara kategori ini dan kategori-kategori lainnya.⁴ Akan tetapi, berbeda dengan gender, kelas, dan etnisitas, “generasi” berdasarkan definisinya adalah sebuah target bergerak: kita melewati beberapa generasi seiring bertambahnya umur, dan ketika kita berbicara tentang generasi yang berubah atau relasi generasional, kita tidak berbicara tentang perubahan yang terjadi pada sekelompok orang tertentu, namun tentang perubahan antara satu kelompok generasi dan kelompok generasi lainnya. Pertimbangkanlah misalnya pergeseran cepat yang menakjubkan pada pengalaman, gaya hidup, dan identitas pemuda *kampung* perkotaan yang diamati Patrick Guinness selama tiga dekade (Guinness, 2009: Bab 5). Pergeseran-pergeseran tersebut bukanlah tentang “pemuda yang berubah” namun tentang “kepemudaan” yang sendirinya berubah seiring generasi yang silih berganti masuk atau keluar dari selot “kepemudaan”.

Dengan demikian, perbandingan antara “generasi” dan umur (biologis) kurang lebih serupa dengan perbandingan antara gender dan kelamin (biologis). Oleh karena itu kita perlu mengkaji organisasi sosial dari relasi generasional antara generasi yang lebih muda dan yang lebih tua, serta peran mereka dalam *reproduksi sosial*⁵ masyarakat agraria. Kajian kepemudaan juga melihat *kepemudaan sebagai identitas* (Jones, 2009: Bab 3), mengingat bahwa pemuda tidak saja muda umurnya, namun mereka memiliki identitas majemuk: mereka adalah laki-laki atau perempuan muda (bergender), dan dalam kebanyakan konteks perdesaan, mereka adalah anggota kelas sosial tertentu, atau anggota kelompok etnis tertentu, dan ada kalanya juga mereka memiliki (dis)abilitas atau terkelompok berdasarkan penanda-penanda lain seperti agama.⁶ Oleh karena itu, kepemudaan dan generasi harus dilihat dari segi keberirisannya dengan kategori-kategori sosial penting lainnya. *Keberirisan* dengan demikian mengarah pada dinamika, tautan, dan tegangan antara berbagai poros identitas dan perbedaan yang saling berisisan (misalnya antara gender, etnisitas, kelas, dan generasi).

“Kepemudaan” saat ini dapat dikatakan mengalami perpanjangan sekaligus pemendekkan karena kedewasaan (sosial) di satu sisi ditunda dan di sisi lain dipercepat. Di satu sisi, di kebanyakan negara pemuda desa tetap menempuh pendidikan lebih lama dari pada orang tua mereka, rata-rata umur mereka saat pernikahan pertama naik, begitu juga umur mereka saat masuk ke pasar tenaga kerja. Akan tetapi pada saat yang sama, terutama melalui penyebaran internet dan media sosial, pemuda tidak lagi mengandalkan orang dewasa (orang tua, guru, pemimpin agama atau masyarakat) untuk memperoleh pengetahuan mengenai dan tautan ke dunia luar, dan mereka bergulat dengan globalisasi dan modernitas pada usia yang semakin muda, tanpa bergantung pada orang tua atau orang dewasa lainnya.

⁴ Diparafrase dari Alanen (2001: 13) tentang masa kanak-kanak sebagai relasi generasional.

⁵ *Reproduksi sosial*: ‘praktik-praktik material dan diskursif yang memungkinkan reproduksi formasi sosial (termasuk hubungan antar kelompok sosial) dan para anggotanya dalam kurun waktu tertentu (Wells, 2009).

⁶ Diparafrase dari Alanen (2016: 159) tentang keberirisan masa kanak-kanak.

Kecenderungan ini menggarisbawahi perbedaan antara “mengada” (*being*) dan “menjadi” (*becoming*) sebagai dua wajah kepemudaan yang *co-exist* dalam tegangan satu sama lain, sebagaimana dibicarakan di atas.

Kajian-kajian kepemudaan juga melihat *pemuda sebagai pelaku* dalam pembaharuan sosial dan ekonomi, alih alih sebagai objek pasif kendali dan sosialisasi orang dewasa (Jones, 2009). Hal ini terkait dengan makna lain dari “generasi”, yang memiliki relevansi historis dan politis sangat kuat di Indonesia, yakni: gagasan Mannheim tentang generasi yang menjadi sebuah kategori sosial dan politis yang bermakna. Ini terjadi ketika sejumlah besar pemuda mengembangkan dan mengekspresikan kesadaran tentang diri mereka sendiri sebagai “pemuda” dengan pertama-tama hidup melalui peristiwa sejarah dan sosial yang sama dan mengalaminya sebagai hal yang besar bagi mereka, dan kedua, dengan bertindak atas kesadaran tersebut (Mannheim, 1952). Pandangan ini tercermin secara implisit dalam konsep *angkatan* di Indonesia, yang dilekatkan kepada generasi-generasi pemuda yang terlibat aktif dalam gejolak politik besar (revolusi nasional, kejatuhan rezim Soekarno dan Soeharto, dan gerakan yang lebih kecil seperti Malari di awal kekuasaan Soeharto): mereka dilabeli sebagai *Angkatan 45, Angkatan 65-66, Angkatan 98*, dan seterusnya menurut tahun terjadinya setiap gejolak. Hal ini merupakan tema lazim dalam penelitian mengenai politik Indonesia sejak kajian klasik Anderson mengenai peran *pemuda* di awal revolusi Indonesia (Anderson, 1972).

Sejalan dengan Mannheim, sementara “generasi yang lebih tua cenderung bertindak sebagai kekuatan konservatif, ... setiap generasi baru (*new generation*) menjalin persentuhan yang segar dan radikal dengan kondisi-kondisi yang ada dan mengarah kepada solusi-solusi mutakhir dan kecenderungan-kecenderungan baru” (Spencer, 1990: 20). Dengan demikian, pandangan terhadap pemuda yang berfokus pada kepemudaan (alih-alih pada transisi) memandang pemuda tidak semata-mata sebagai “pembelajar”, namun sebagai “pencipta dan pembobok” (*makers and breakers*) (Honwana & van der Broeck (ed.), 2005), “pembongkar dan pelopor” (*vandal and vanguards*) (Abbink & van Kessel (ed.), 2005), pencipta dan pembaharu kebudayaan—sebagaimana dapat kita lihat pada kiprah pemuda dalam penciptaan bahasa baru, mode pakaian dan riasan tubuh baru, dan gaya hidup baru. Pada saat yang sama pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada aktor juga perlu memahami kekuatan lingkungan struktural yang membatasi agensi dan ruang pemuda untuk bermanuver; seperti kelompok-kelompok sosial lainnya, mereka mempraktikkan “agensi terkendala”. Pemuda, sebagaimana orang dewasa, dapat menjadi korban (atau penerima manfaat) dari struktur, maupun, pada saat yang sama, merupakan agen individu atau kolektif dari resistensi dan perubahan pada struktur-struktur tersebut.

Di satu sisi, pemuda adalah kelompok paling aktif dalam gerakan-gerakan pembaharuan politik utama dan ada kalanya, meski tidak selalu, mereka juga mengambil peran kepemimpinan. Pemuda sering ada di garis depan, tidak hanya dalam gejolak-gejolak politik nasional besar di Indonesia, namun juga dalam kampanye rutin pemilu daerah maupun nasional, termasuk dalam pemilu parlemen dan pilpres terakhir (2014). Di sisi lain, setelah

kampanye dan gejolak tersebut berakhir, aktivis pemuda sering menghadapi kenyataan bahwa mereka gagal mencapai perubahan sosial besar, perbaikan dalam sistem pemberantasan korupsi dan peradilan, dan lain-lain. Hal ini menyorot paradoks penting mengenai keterlibatan pemuda dalam proses politik: meskipun pemuda dapat didefinisikan sebagai kelompok “pelopor perubahan” yang cenderung menentang otoritas, di saat otoritas tersebut berhasil ditumbangkan digantikan oleh rezim baru, regim baru itu sendiri pun menjadi otoritas baru, yang melihat pemuda sebagai kendaraan politik yang tidak lagi menentang namun kini melegitimasi dan membela rezim baru tersebut. Aktivisme kritis mereka tidak lagi disambut; pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya membendung “ekses” pemuda ini (Ryter, 2002:134, bandingkan dengan Ryter, 1998: 58, Baulch 2007: 19). Sebagai akibatnya, banyak yang kehilangan minat dan keyakinan terhadap kapasitas proses-proses tersebut dalam merespon kepentingan mereka. Bagi sebagian pemuda, pesimisme dan kekecewaan politik, begitu juga konsumerisme baru, telah mencuatkan identitas kultural non-politis baru, sebagaimana dikemukakan oleh Nilan pada tahun-tahun awal *reformasi*:

We could argue that since 1998, the generation of young people in Indonesia has lost the definable sense of a generation ‘for itself’ (*pemuda*) and has become more of a generation ‘in itself’ (*remaja*, ABG) linked mainly by temporal similarity rather than by shared political knowledge and purpose (Nilan 2004:190).

Bagi kelompok pemuda lainnya, kekecewaan yang sama dapat menggiring mereka kepada bentuk-bentuk negatif organisasi-organisasi kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang didirikan di awal kekuasaan rezim Soeharto pada 1973, atau Pemuda Pancasila yang pada 1980an telah menjadi aktor politik penting di seluruh Indonesia dengan kehadiran fisik markas-markasnya di setiap tingkat, yang masing-masing mengoordinasi tingkat di bawahnya (Ryter, 2002: 5). Pada era desentralisasi pasca-Soeharto, pemuda banyak direkrut oleh kelompok elit dan bos-bos lokal ke dalam gerakan-gerakan etnis dan keagamaan, politik pilkada, dan kelompok-kelompok *urban vigilante*. Pemuda Pancasila dan organisasi-organisasi kepemudaan lain seperti Ikatan Pemuda Karya (IPK) Golkar terlibat aktif dalam *political gangsterism*, pemerasaan, dan premanisme dalam demokrasi lokal di Indonesia (Hadiz, 2011: 88-142). Kedua dimensi kepemudaan Indonesia ini—sebagai pelopor perubahan politik dan sosial, dan pada saat yang sama sebagai ancaman berbahaya bagi stabilitas sosial dan politik—berkoeksistensi secara rumit dalam pemahaman populer maupun akademik mengenai kepemudaan.

Pemuda dan “Hak untuk Diteliti secara Layak”

Salah satu relasi generasional penting yang melibatkan pemuda adalah hubungan antara pemuda dan (hampir selalu) dengan peneliti profesional dewasa—seperti para penulis artikel dalam jurnal ini—yang meneliti mereka. Di antara banyak hak yang seharusnya dimiliki pemuda, salah satu yang kurang banyak disebut adalah “hak untuk diteliti secara layak”. Ini

adalah aspek lain relasi generasional, yang sering berkenaan dengan perbedaan status antara pemuda dan orang dewasa yang meneliti pemuda sebagai bagian dari kehidupan profesional mereka.

Sebagai peneliti, kita harus bertanya kepada diri sendiri: apakah pemuda akan menjadi objek, subjek, atau partisipan dalam penelitian saya? Apakah informasi mengenai situasi dan pengalaman pemuda akan diperoleh langsung dari mereka, atau diwakili (oleh orang dewasa—terutama orang tua dan guru—yang memberikan informasi tentang mereka)? Penelitian survey secara khusus cenderung mengikuti pendekatan tidak langsung terhadap pemuda, padahal banyak bukti bahwa sumber informasi terbaik mengenai isu-isu mengenai pemuda—bahkan anak-anak—adalah mereka sendiri (Scott, 2000).

Protokol etika lembaga penelitian, sponsor, dan asosiasi profesional umumnya memasukkan prinsip *informed consent*, privasi, kerahasiaan, dan (terkadang) penghargaan terhadap mereka yang dikaji. “Persetujuan harus diberikan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang diwawancarai atau diamati setelah mereka mengetahui sepenuhnya tujuan penelitian dan konsekuensi keikutsertaan mereka” (Piper & Simons, 2005: 56). Prinsip ini terdengar bagus, namun bagaimana prinsip ini dapat dipenuhi dalam situasi penelitian sebenarnya yang terkait dengan isu-isu yang mungkin sangat sensitif, ilegal, atau tidak diterima oleh masyarakat (misalnya seksualitas, miras dan narkoba, kekerasan orang tua, atau tegangan generasional lainnya)? Dan ketika kesenjangan sosial/ relasi kuasa antara peneliti dan subjek penelitian demikian lebar—sebagaimana yang sering terdapat antara peneliti dewasa dan pemuda—seberapa sungguhkah persetujuan yang diberikan? Seberapa pentingkah tekanan dari kelompok sebaya dan “*gatekeepers*” (misalnya pejabat desa, pemimpin masyarakat, guru, atau orang tua)? Ada kalanya “privasi” tidak mungkin diwujudkan murni karena alasan-alasan praktis: di permukiman-permukiman padat perkotaan, tidaklah mudah mencari tempat bagi seorang responden pemuda, laki-laki atau perempuan, untuk berbicara sendiri kepada seorang peneliti dewasa tanpa kehadiran orang lain (orang tua, guru, atau rekan sebaya). “Persetujuan termaklum” (*informed consent*), “privasi”, dan ‘kerahasiaan’ dengan demikian harus dikontekstualisasikan, dan batas-batas antara apa yang diterima dan tidak diterima sangatlah kabur.

Pemuda juga cukup mampu menjadi pemain kunci dalam proses penelitian itu sendiri, jika kita bersedia melakukan penelitian “bersama” pemuda, bukan “tentang” pemuda (dan karenanya memilih penelitian yang “berpusat pada pemuda” dan “partisipatoris” bukan retorika belaka).

Kontributor Edisi Kali Ini

Artikel-artikel dalam terbitan ini secara eksplisit atau implisit mencerminkan gagasan dan kerangka yang telah disampaikan di atas.

Artikel yang ditulis para peneliti AKATIGA mengenai *Pemuda dan Pertanian di Indonesia* merupakan refleksi atas perubahan tempat pemuda, laki-laki dan perempuan, perdesaan dalam struktur-struktur agraria di Indonesia. Artikel ini berfokus pada umur dan gender petani, bentuk peralihan tanah antargenerasi, pola-pola mobilitas pemuda desa, dan (kurangnya) lembaga yang merepresentasi minat pemuda desa. Artikel Gutomo Bayu Aji mengenai *Diskursus Pemuda dalam Pembangunan Pedesaan* memusatkan perhatian pada perubahan konstruksi sosial kepemudaan dengan menguraikan perubahan diskursus tentang pemuda dari Orde Lama ke Orde Baru, dan bagaimana dengan perubahan ini pemuda desa menjadi kehilangan kesempatan untuk menemukan jati dirinya.

Artikel Tania Li tentang *Ketegusuran Antargenerasi di Zona Perkebunan Kelapa Sawit* menyorot dinamika jangka panjang antargenerasi terkait ketegusuran dari lahan dan dari peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak. Sebagaimana diungkapkan seorang tetua di desa penelitian Li di Kalimantan Barat: “saat perusahaan sawit pertama kali datang, kami mengira lahan kami seluas samudera”. Namun semakin banyak perusahaan masuk, kini anak-cucunya tidak memiliki tanah. Mereka terdesak di lautan perkebunan sawit tanpa memiliki atau berkesempatan memiliki sebagian karena harga tanah di kantung-kantung atau lahan-lahan non perkebunan yang tersisa terlampaui tinggi di luar kemampuan mereka. Tema ini—transformasi pemuda desa dari pemilik lahan menjadi bukan-pemilik lahan dalam kurun satu atau dua generasi—juga menjadi perhatian utama dalam artikel Wahyudi Akmaliah tentang *Transformasi Pemuda Betawi*, dan artikel Angga Dwiartama dan Tatang Suheri tentang *Pemuda dan Transformasi Sosial di Wilayah Periurban Bandung*.

Artikel Lisa Bossenbroek dkk. tentang pengalaman kaum muda-mudi di wilayah Saïss (Maroko) adalah contoh yang bagus bagaimana dalam artikel yang singkat dan dengan mengangkat hanya empat kasus pemuda laki-laki (Driss dan Anas) dan perempuan (Samira dan Mona), kita bisa mengerti bagaimana keempat anak petani ini menegosiasikan ruang melalui mobilisasi kompetensi dan sumber daya terbatas yang mereka miliki, serta frustrasi yang mereka alami dalam hubungan dengan generasi orang tua dalam masyarakat patriarkis Maroko.

I Ngruh Suryawan, dalam artikelnya tentang generasi muda Papua di perdesaan Teluk Bintuni (Papua Barat) menggambarkan bagaimana mereka berusaha dengan berbagai cara untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan isolasi. Dengan bantuan bank swasta mereka bergabung membangun usaha mencari dan mendistribusikan udang dan kepiting dan hasil-hasil kebun yang dijual ke pasar Bintuni. Dalam kasus ini kita bisa melihat pentingnya peranan Ketua Kampung bekerjasama dengan Kepala Cabang Pembantu bank setempat, dalam melihat potensi yang tersimpan di wilayah ini, mulai dari kampung transmigrasi dan pada gilirannya *mama-mama* Papua yang ingin bergabung untuk berbisnis.

Dalam artikel *Pemuda Kritis, Pemuda Membangun* Pinurba Parama Pratiyudha mengangkat masalah alienasi pemuda desa dari dimensi perubahan sosial dan identitas diri,

dan melihat potensi pendidikan pembebasan sebagai solusi dengan merujuk beberapa contoh penerapan pendidikan kebebasan tersebut dari Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan.

Karang Taruna, sebagai satu-satunya organisasi pemuda yang berada di seluruh Indonesia sampai ke tingkat desa dan dusun, sering menjadi sorotan kritis sebagai organisasi korporatis warisan Orde Baru yang tidak merangsang kedewasaan politik dan kreativitas pemuda, bahkan justru mendukung depolitisasi warga muda. Hanny Widjaja dkk. dalam artikel *Pemuda Desa dan Karang Taruna* menjelajahi kasus sebuah Karang Taruna tingkat dusun yang relatif dinamis, yang antara lain mengambil inisiatif untuk menyewa sawah Kas Desa untuk dikelola oleh sesama muda-mudi (yang pada umumnya tidak pernah membantu orang tua mereka sendiri di sawah). Dengan melihat dinamika hubungan intern dan hubungan keluar, Widjaja dkk. menunjukkan beberapa tegangan yang terdapat dalam Karang Taruna, antara dinamika *top-down* dan agensi pemuda, juga dalam ciri-ciri patriarki dalam dinamika interaksi antaranggotanya.

Dua artikel selanjutnya memfokuskan diri pada migrasi pemuda desa, satu dari segi proses pengambilan keputusan untuk migrasi dan satu dari perspektif kaum migran yang kembali ke desa asal. Berdasarkan penelitian di Pulau Flores, Timor, dan Sumba, Viesda Pithaloka berkesimpulan bahwa pengambilan keputusan bermigrasi tidak dilakukan secara individu saja; meskipun pilihan bermigrasi akhirnya merupakan pilihan sendiri, namun kebebasan pilihan tersebut merupakan kebebasan yang terstruktur, dipengaruhi oleh posisi kelas sosial dan gender, pengaruh keluarga, dan dinamika sosial budaya masyarakat.

Artikel Paulus Rudolf Yuniarto tentang “adaptasi strategis” para migran yang kembali ke desa asal (di Malang, Jawa Timur) dan membuka usaha baru, menunjukkan bahwa proses migrasi kaum muda, yang kemudian pulang kampung dan menanam modal hasil tabungan mereka dalam tanah pertanian dan usaha wiraswasta, telah berjalan setidaknya selama dua generasi. Ini merupakan strategi golongan menengah di desa untuk mereproduksi diri (dan generasi berikutnya) sehingga tetap berada di dalam posisi “kelas menengah” di desa.

Dalam artikel *Pemuda Desa di Wilayah Industri*, Vandy Yoga Swara melihat karakteristik dan dinamika kepemudaan di wilayah industri semen di Tuban (Jawa Timur). Dalam artikel ini, Karang Taruna dilihat sebagai ruang komunikasi penting bagi pemuda, juga sebagai fasilitator masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun industri semen. Melalui Karang Taruna, pemuda desa memperjuangkan setidaknya tiga macam hak (untuk kesempatan kerja, lingkungan yang sehat, dan peluang berusaha). Keaktifan pemuda pada gilirannya menjadi sumber pertarungan antara generasi muda dan generasi tua dalam pengelolaan pembangunan desa.

Dua artikel selanjutnya menggambarkan proses marjinalisasi pemuda di daerah pinggiran kota di mana masyarakat lokal beralih dari pemilik tanah menjadi tak-bertanah dalam masa satu atau dua generasi saja. Dalam artikel *Pemuda, Identitas, dan Resiliensi Komunal*, Angga Dwiartama dan Tatang Suheri menyoroti kampung Sekepicung di wilayah

Dago atas (Bandung) yang penghuninya beralih dari masyarakat agraris menjadi kelas buruh lepas dan karyawan kontrak, sejalan dengan pesatnya pembangunan perumahan mewah, lapangan golf, dan café. Dalam konteks kerentanan dan kehilangan identitas sosial yang terjadi, sepasang suami-isteri muda mendirikan organisasi PASSER yang, selain melawan terjebaknya pemuda dalam minuman keras, berusaha membangun resiliensi komunitas, khususnya generasi muda. Hal ini dilakukan dengan mempererat silaturahmi, mempertebal rasa sosial, melestarikan nilai budaya dan menyelenggarakan kegiatan sosial bagi warga yang rata-rata berumur antara 17-40 tahun.

Dalam artikel selanjutnya Wahyudi Akmaliah mengandalkan pendekatan autoetnografi dan sejarah lisan—dalam hal ini, melacak dan mengkaji pengalaman keluarganya sendiri di daerah Betawi, Bekasi, yang mengalami transisi dari tuan tanah menjadi kelas pekerja dalam masa tiga generasi. Jika Generasi pertama sempat mengakumulasi tanah, membangun rumah kontrakan, menyewakan alat hajatan, dan berdagang pakaian, maka generasi kedua masing-masing diberikan rumah dan modal dagang, namun tidak semuanya sukses dan lama kelamaan aset-aset mereka satu-persatu terjual. Kemandegan atau kemunduran ekonomi generasi kedua ini pada gilirannya mengakibatkan banyak anggota Generasi ketiga akhirnya menjadi pekerja di sektor informal, sebagai pedagang warung, jualan pulsa, calo di sekitar pintu masuk jalan tol, tukang ojek *online*, tukang bersih-bersih (*cleaning service*), ataupun buruh lepas harian.

Dalam artikel terakhir, Oki Rahadianto menulis tinjauan atas buku yang disunting oleh Roy Huijsmans yang berjudul *Generating Development: A Relational Approach to Children, Youth, and Development (2016)*. Buku tersebut menyajikan cara pandang relasional yang dapat menjadi alternatif untuk memahami hubungan antara kajian anak dan kepemudaan dengan kajian pembangunan. Rahadianto menyampaikan bahwa dengan memahami pemuda secara relasional, maka diharapkan ke depan wacana mengenai pemuda di Indonesia tidak lagi terjebak pada pertanyaan-pertanyaan hitam putih.

Semoga artikel-artikel yang tersaji dalam Edisi Khusus ini dapat membuka jalan bagi pembaca untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika dan dilema yang dihadapi pemuda desa saat ini.

Daftar Rujukan

- Abbink, J. and J. van Kessel (eds.). (2005). *Vanguard or Vandals: Youth, Politics and Conflict in Africa*. Leiden: Brill.
- Alanen, Leena. (2001). Explorations in Generational Analysis. In Alanen, Leena & Berry Mayall (eds.), *Conceptualizing Child-Adult Relations* (pp. 11-21), Ch. 2. London: Routledge.

- Anderson, Benedict. (1972). *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell University Press.
- Baulch, Emma. (2007). *Making Scenes: Reggae, Punk, and Death Metal in 1990s Bali*. Durham: Duke University Press.
- Beazley, Harriot, Sharon Bessell, Judith Ennew & Roxana Waterman. (2009). The Right to be Properly Researched: Research with Children in a Messy, Real World. *Children's Geographies*, 7 (4), 365-378.
- Bernstein, Henry. (2010). *Class Analysis of Agrarian Change*. Agrarian Change and Peasant Studies Series, Halifax: Fernwood Press.
- Bessant, Judith, Rys Farthing, & Rob Watts eds. (2017). *The Precarious Generation: A Political Economy of Young People*. London: Routledge.
- Chayanov, Alexander. (1967 [orig. 1929]). Peasant Farm Organization. In Thomas, D., Basile. Kerblay, & R. Smith (eds.), *A.V. Chayanov on the Theory of Peasant Economy*. Homewood: American Economic Association.
- Fortes, Meyer. (1966). Introduction. In Goody, Jack (ed.), *The Developmental Cycle in Domestic Groups* (pp. 1-14). Cambridge: University Press.
- Guinness, Patrick. (2009). *Kampung, Islam, and State in Urban Java*. Singapore: NUS Press and Leiden: KITLV Press.
- Hadiz, Vedi. (2011). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Singapore: ISEAS Press.
- Honwana, Alcinda and Filip de Boeck (eds.) (2005). *Makers and Breakers: Children and Youth in Postcolonial Africa*. Oxford: James Currey.
- Jones, Gill. (2009). *Youth*. Key Concepts Series, Cambridge: Polity Press.
- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). (2005). *Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia*.
<http://knpikarangampel.files.wordpress.com/2009/11/anggaran-rumah-tanggal.pdf>.
 Diakses pada 3 Agustus, 2011.
- Koning, Juliette. (1997). *Generations of Change: a Javanese Village in the 1990s*. PhD thesis, University of Amsterdam.
- Koning, Juliette. (2005). The Impossible Return? The Post-migration Narratives of Young Women in Rural Java. *Asian Journal of Social Science*, 33 (2), 165-185.
- Lloyd, Cynthia (ed.). (2005). *Growing up Global: the Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries*. Washington DC: The National Academies Press.
- Mannheim, Karl. (1952 [orig. 1928]) The Problem of Generations. In Kecskemeti, P. (ed.), *Karl Mannheim: Essays on the Sociology of Knowledge* (pp. 276-320). London: Routledge.

- Minza, Wenty M. (2014). *Growing Up and Being Young in an Indonesian Provincial Town*. Ph.D. dissertation, Amsterdam Institute of Social Science Research, University of Amsterdam.
- Nilan, Pamela. (2004). The Risky Future of Youth Politics in Indonesia. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 38 (1), 173-94.
- Permensos. (2010). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 / HUK/ 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Piper, Heather & Helen Simons. (2004). Ethical Responsibility in Social Research. In Somekh, Bridget & Cathy Lewin (eds.), *Research Methods in the Social Sciences* (pp.56-73). London: Sage.
- Roberts, Ken (2009). *Youth in Transition: Eastern Europe and the West*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Ryter, L. (2002). *Youth, Gangs and the State in Indonesia*. PhD Dissertation, University of Washington.
- Ryter, Loren. (1998). Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's order?. *Indonesia*, 66, 44-73.
- Scott, Jacqueline. (2000). Children as Respondents: The Challenge for Quantitative Methods. In Christensen, Pia & Allison James (eds.), *Research with Children: Perspectives and Practices* (pp. 98–119). London: Routledge Falmer.
- Spencer, Paul. (1990). The Riddled Course: Theories of Age and its Transformations. In Spencer, Paul (ed.) *Anthropology and the Riddle of the Sphinx: Paradoxes of Change in the Life Course* (pp. 1-34). London: Routledge.
- Van der Ploeg, Jan Douwe. (2013). *The Art of Peasant Farming: A Chayanovian Manifesto*. Agrarian Change and Peasant Studies Series. Halifax: Fernwood Publishing.
- Wells, Karen. (2009). *Childhood in a Global Perspective*. Cambridge: Polity Press.
- White, Ben. (1980). Rural Household Studies in Anthropological Perspective. In Binswanger, H.P., R.E. Evenson, C.A. Fiorenco & B. White (eds.), *Rural Household Studies in Asia* (3-25). Singapore: Singapore University Press.
- White, Ben. (2016). Generation and social change: Indonesian youth in comparative perspective. In Robinson, Kathryn (ed.), *Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia* (pp. 4-22). Leiden: Brill.
- World Bank. (2006). *Development and the Next Generation: World Development Report 2007*. Washington DC: The World Bank.

PEMUDA DAN PERTANIAN DI INDONESIA

Aprilia Ambarwati, Isono Sadoko, Charina Chazali

Peneliti AKATIGA-Pusat Analisis Sosial

apriliambarwati@gmail.com

Ben White

Profesor Emeritus Sosiologi Perdesaan, Institute of Social Studies (ISS)

white@iss.nl

Abstract

This article reflects on the changing place of young men and women in Indonesian agriculture, based on available secondary sources and some preliminary local-level studies. To understand the position of young people in agriculture we first provide a general picture of agrarian structures. The main body of the article then summarises what we know about the changing position of young men and women within these structures, including: the age and gender of farmers; modes of intergenerational transfer of farm land and property; young people's apparent turn away from agriculture; patterns of rural youth labour mobility; agricultural education; institutions representing rural youth interests, and some concluding reflections on policy.

Keywords: *Youth, Farming, Indonesia*

Abstrak

Artikel ini merupakan refleksi atas pergeseran tempat laki-laki dan perempuan muda dalam pertanian di Indonesia berdasarkan sumber-sumber sekunder dan kajian awal tingkat lokal yang ada. Untuk memahami posisi kaum muda di pertanian, kita harus terlebih dahulu memperoleh gambaran umum mengenai struktur-struktur agraria yang ada. Bagian utama artikel ini merangkum apa yang kami ketahui tentang perubahan posisi laki-laki dan perempuan muda dalam struktur-struktur tersebut, termasuk: umur dan jender petani; modus alih lahan dan properti; berpalingnya kaum muda dari pertanian; pola-pola mobilitas kerja kaum muda; pendidikan pertanian; lembaga-lembaga yang mewakili minat kaum muda perdesaan, dan beberapa refleksi simpulan mengenai kebijakan.

Kata kunci: *Pemuda (kepemudaan), Pertanian, Indonesia*

Latar Belakang

Artikel ini¹ merupakan refleksi atas pergeseran posisi laki-laki dan perempuan muda dalam pertanian di Indonesia berdasarkan sumber-sumber sekunder dan kajian awal tingkat lokal yang ada. Pertanian penting di Indonesia, tidak saja berperan sebagai penyedia pangan bagi 255 juta jiwa penduduk, namun juga sebagai satu penyedia lapangan kerja terbesar di negeri ini. Sekitar 34% dari tenaga kerja yang ada (38,2 juta orang) dan dalam proporsi lebih tinggi tenaga kerja di pedesaan, bekerja di bidang pertanian. Mereka kebanyakan bekerja di sektor pertanian tanaman pangan (53% dari keseluruhan tenaga kerja)²; di tengah meluasnya diversifikasi dan penghidupan sektor majemuk, pertanian, terutama sektor tanaman pangan, masih merupakan kegiatan utama penghidupan di pedesaan Indonesia. Berlawanan dengan persepsi atau harapan umum terhadap kaum muda, pertanian masih mempekerjakan proporsi tenaga kerja muda yang jauh lebih tinggi daripada industri atau sektor lainnya (selain jasa), dan proporsi ini relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Hingga saat ini masih sedikit penelitian mengenai kaum muda dan pertanian, dan sebagian besar dari penelitian yang ada pun masih belum beranjak jauh dari temuan

bahwa laki-laki dan perempuan muda di pedesaan mengharapkan masa depan di luar sektor pertanian. Untuk memahami posisi kaum muda pedesaan dan (kemungkinan) masa depan mereka di bidang pertanian, diperlukan penelitian yang komprehensif. Pertanyaan-pertanyaan yang kami anggap penting terangkum di bawah ini.³

Konteks agraria

Pola dan tren umum kepemilikan lahan pertanian, akses, luas pertanian, dan penggunaan tenaga kerja seperti apa sajakah yang ada? Sejauh apakah perubahan harga tanah pertanian yang terjadi? Siapa mendapatkan apa dalam pertanian di Indonesia? Bagaimanakah tren struktur umur populasi pertanian (*farming population*)?

Menjadi petani muda

Bagaimana kaum muda sampai menjadi petani? Sumber-sumber daya apa yang mereka perlukan dalam prosesnya? Bnetuk khas pengalihan lahan pertanian dan properti apa saja yang terjadi antar-generasi? Bagaimana pembagian sumber-sumber dilakukan terhadap anak laki-laki dan perempuan? Jenis jejaring sosial apa saja yang mereka andalkan dan jenis dukungan apa yang mereka peroleh dari jejaring tersebut? Bagaimana petani perempuan muda menjalankannya? Tantangan apa yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mengatasinya? Bagaimana mereka mengatasi hambatan sosial, ekonomi, dan lainnya

¹ Artikel ini ditulis berdasarkan laporan tidak diterbitkan berjudul 'Preliminary review and research plan, Indonesia' yang disusun oleh AKATIGA untuk proyek kerja sama penelitian *Menjadi Petani Muda: Jalan Kaum Muda Menuju Pertanian di Empat Negara*. Proyek penelitian 'Menjadi petani muda', yang didukung oleh *Canadian Social Science and Humanities Research Council* (SSHRC) tengah dilakukan di Kanada, Cina, India, dan Indonesia. Naskah diterjemahkan oleh Rasmus Budhianto (Pengajar Jurusan Sastra Inggris Universitas Padjadajaran, Bandung)

² Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, 2014.

³ Pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang merupakan sebagian pertanyaan-pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam proyek '*Becoming a young farmer*', diadaptasi dari White (2015).

untuk menjadi petani atas kemauan sendiri?

Petani muda dan inovasi

Bagaimana sikap petani muda terhadap praktik-praktik pertanian konvensional? Apakah petani muda secara umum dan pendatang baru secara khusus, lebih lentur dan inovatif dalam hal bertani dibandingkan petani yang lebih tua atau petani penerus? Peran apa yang dimainkan teknologi yang relatif baru seperti telepon genggam, internet dan media sosial dalam proses dan penyebarluasan inovasi?

Petani muda dalam kebijakan dan agenda-setting

Bagaimana kebijakan-kebijakan agraria dan perdesaan berdampak pada kaum muda dalam bertani? Kebijakan apa saja yang menyulitkan atau memudahkan kaum muda untuk bertani? Jenis dukungan spesifik seperti apa saja yang ada bagi petani muda? Bagaimana kiprah kaum muda untuk memengaruhi kadar dan bentuk dukungan tersebut? Apakah para petani muda terorganisasi? Bagaimana keterlibatan mereka dalam serikat, asosiasi dan/ atau partai politik yang ada, dan/ atau dalam organisasi petani muda, dan modus-modus jejaring baru di kalangan petani muda (dengan perhatian khusus pada media sosial)? Bagaimana mereka turut memengaruhi partai politik dan pembuat kebijakan, serta sejauh mana tingkat keberhasilannya?

Dalam artikel pendek ini kami tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan tersebut.

Untuk memahami posisi petani muda di bidang pertanian, terlebih dahulu kami memaparkan gambaran umum struktur-struktur agraria yang ada. Bagian berikutnya merangkum apa yang kami ketahui tentang perubahan posisi laki-laki dan perempuan muda dalam struktur-struktur tersebut, termasuk umur dan gender petani; modus alih lahan dan properti; berpalingnya kaum muda dari pertanian; pola-pola mobilitas kerja kaum muda; pendidikan pertanian; dan lembaga-lembaga yang mewakili minat kaum muda perdesaan. Artikel ini ditutup dengan beberapa refleksi mengenai kebijakan.

Struktur Agraria

Secara historis, Indonesia pasca-kolonial tidak mewarisi kelas tuan tanah besar yang juga mendominasi politik regional dan/ atau nasional (bandingkan misalnya dengan daerah-daerah di Filipina atau India). Namun Indonesia memang memiliki warisan sejarah perkebunan skala besar (yang menghasilkan karet, tembakau, tebu, teh, kopi, dan, yang lebih terkini, kelapa sawit). Perkebunan-perkebunan tersebut adalah milik negara (banyak perusahaan Belanda dan Belgia dinasionalisasi di bawah rezim Soekarno pada akhir 1950an), milik konglomerat dalam negeri, dan milik bersama dalam-dan-luar negeri. Sebagaimana tampak pada **Tabel 1** di bawah, beberapa lahan tanaman perkebunan meluas dan yang lain menyusut dalam kurun waktu 20 tahun, namun semuanya tampak kecil bila dibandingkan dengan pesatnya perluasan dan luas total perkebunan kelapa sawit.

Tabel 1 Total Luas Lahan Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanaman (dalam ribuan hektar)

Tahun	Karet	Kelapa Sawit	Kokoa	Kopi	Teh	Kina	Tebu	Tembakau	Total
1995	472	992	125	49	81	5	497	9	2231
2000	549	2991	158	63	90	1	388	5	4246
2005	512	3593	86	53	82	3	382	5	4716
2010	497	5162	92	48	66	3	437	3	6307
2014	543	6404	82	48	66	0.5	210	3	7357

Sumber: BPS (2007)⁴

Tabel 2 Luas Usaha Tani Skala Kecil pada 2013

Luas usaha (ha.)	Jumlah (jutaan)	% dari total
<0,1	*4,3	17
0,1-0,19	3,6	12
0,2-0,49	6,7	26
0,5-0,99	4,6	18
1,0-1,99	3,7	14
2,0-2,99	1,6	6
≥ 3,0	1,6	6
Total	26,1	100

Sumber: BPS 2013

* Jumlah pertanian dengan lahan lebih kecil dari 0,1 ha diyakini terlalu kecil pada Sensus Pertanian 2013 karena ada perubahan definisi. Pada 2003, angka untuk kategori serupa—dengan definisi ‘keluarga tani’ yang berbeda—adalah 9,4 juta.

⁴ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1665>

Berbeda dengan di atas, produksi makanan pokok dan hortikultura didominasi oleh pertanian kecil dan terdapat pula sebagian kecil pertanian yang menanam tanaman ekspor baik secara mandiri maupun di bawah (sistem) kontrak. Luas usaha tani skala kecil cenderung sangat kecil: pada 2013, tiga-perempat dari keseluruhan pertanian kecil memiliki luas di bawah 1,0 ha dan hampir separuhnya kurang dari 0,5 ha (**Tabel 2**).

Kajian AKATIGA (2014 – 2016) atas 20 desa penghasil beras di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Lampung menemukan beragam tingkat konsentrasi tanah dan ketakbertanahan (*landlessness*). Kepemilikan lahan besar (pada jenis desa semacam ini) tidak berakibat pada besarnya lahan pertanian, namun pada naiknya tingkat penyewaan (terutama bagi hasil) di mana para pemilik besar mempetak-petakan lahannya untuk para petani sewa dan bagi hasil (*sharescroppers*) (Ambarwati dkk., 2016).

Di luar wilayah-wilayah padat penduduk di Jawa, Bali, dan sebagian wilayah di pulau-pulau lain yang menggunakan pertanian irigasi, sekitar dua-per-tiga dari total luas tanah Indonesia diklaim oleh Kementerian Perhutanan (KLHK) berada di bawah yurisdiksinya.⁶ Di wilayah-wilayah tersebut, keluarga petani menempati lahan lewat sistem pemilikan tanah secara adat yang bersifat rentan (*insecure*).

Tidak ada hambatan formal (dan di sebagian besar Indonesia tidak ada hambatan adat) bagi kepemilikan dan pewarisan tanah untuk perempuan. Namun di sisi lain ada berbagai hambatan ‘kultural’ (pada birokrasi maupun masyarakat perdesaan) bagi pengakuan diskursif dan material perempuan sebagai petani. Meski demikian, 11 persen dari “petani utama” yang disajikan dalam tabel (petani primer yang di pertanian keluarga tani yang mendefinisikan diri mereka sebagai petani) adalah perempuan, sebagaimana tersaji pada **Tabel 3** di bawah ini; angka tersebut tidak diragukan lagi mengesalkan kenyataan sebenarnya sebagai akibat dari hambatan kultural diskursif yang disebutkan di atas.

Harga tanah di Indonesia, sebagaimana di banyak bagian lain di dunia, naik pesat, tidak hanya di daerah urban dan periurban, namun juga di wilayah-wilayah perdesaan yang “sebenarnya”. Tanah merupakan investasi yang aman dan di banyak daerah di Indonesia investasi spekulatif dan kepemilikan *absentee* semakin lazim. Membeli tanah menjadi pilihan yang semakin tidak realistis kecuali bagi mereka yang memang sudah kaya. Di 12 desa penghasil beras yang dikaji AKATIGA, harga satu hektar sawah beririgasi berkisar antara sekitar Rp100 ribu dan Rp1,5 Miliar. Upah pekerja pertanian umumnya sekitar Rp45.000 per hari (2015), sementara penghasilan sektor informal biasanya tidak lebih dari Rp1 juta per bulan.

⁶ Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. BAPPENAS, 2017. Rapat Kerja Nasional KLHK 2017: Sumber Daya Alam untuk Keadilan Melalui Agenda Nasional Pembangunan Ekonomi Berkeadilan. http://puslitbanghut.or.id/data_content/attachment/MENKO_PEREKONOMIAN.pdf. Diakses pada 2 Agustus 2017.

Upah pekerja migran di pabrik atau di perkebunan kelapa sawit di Malaysia adalah sekitar Rp2,5 per bulan. Karena itu, meskipun seorang berusia muda dapat menabung Rp500 ribu per bulan dari penghasilan yang diterimanya, akan perlu waktu antara tujuh tahun (di lokasi termurah di Sulawesi Selatan) dan 100 tahun (di lokasi termahal di Jawa Tengah) untuk membeli sawah seluas hanya 0,4 hektar. Gambaran kasar ini menggaris bawahi kenyataan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki tanah, “menabung untuk membeli tanah” bukan lagi sebuah prospek yang realistis kecuali jika mereka memiliki akses peluang bermigrasi untuk meraup peluang menguntungkan di luar negeri.

Dibandingkan dengan periode “revolusi hijau” Indonesia pada 1970an dan awal 1980an, pertanian kecil di Indonesia kurang didukung oleh pemerintah dan sebagian besar dukungan yang tersedia tidak mencapai petani kecil. Koperasi-koperasi yang disponsori pemerintah secara umum gagal, dan pelaku pertanian kecil menghadapi oligopoli pasar perdagangan dari sisi input maupun output. Skema-skema kredit bersubsidi pertanian kecil sudah tidak ada dan asuransi gagal panen (yang semakin penting dalam konteks perubahan iklim dan pertanian berinput tinggi) masih dalam tahap sangat awal.⁷

⁷ Baru-baru ini Menteri Pertanian, lewat perusahaan asuransi negara JASINDO memulai program asuransi tanaman (tani) untuk pemilik atau petani bagi hasil tanah beririgasi. Akan tetapi, di kalangan umum skema ini masih sangat terbatas. Muthmainah, Dinda Audriene, *CNN Indonesia*, 2017. Membaca Masa Depan Asuransi Pertanian di Tangan Jasindo.

“Pluriaktivitas” (pluriactivity) mata pencaharian keluarga yang dibangun oleh kombinasi kegiatan pertanian dan non-pertanian sudah lazim dilakukan sejak lama, setidaknya di daerah-daerah padat penduduk, oleh petani besar, kecil, maupun keluarga buruh tani tanpa tanah. Secara umum, petani berskala lebih besar mengalihkan surplus dengan menginvestasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan nonpertanian berkeuntungan tinggi seperti berdagang, membuka toko, pemrosesan hasil pertanian, dan transportasi. Sementara itu, petani kecil dan pekerja pertanian yang tidak memiliki tanah mengalihkan kerja tanpa modal kepada kegiatan-kegiatan berkeuntungan kecil (yang kerap menghasilkan upah lebih kecil per hari dibandingkan upah pertanian), seperti perdagangan kecil-kecilan, kerajinan, dan lain-lain. Alexander dkk. (ed. 1991) memberikan contoh-contoh historis pola ini dari penghujung periode kolonial; White dan Wiradi (1989) memberikan beberapa contoh yang terjadi di Jawa pada masa “revolusi hijau”

Siapa Mendapatkan Apa dalam Pertanian di Indonesia?

Melihat beragamnya komoditas pertanian, kami akan memberikan gambaran awal terhadap pertanyaan Bernstein (2010) “siapa mendapatkan apa?”

Di wilayah-wilayah lumbung padi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, hingga 30% keluarga tani tidak memiliki tanah atau memiliki hanya secuil lahan pertanian. Mereka bekerja sebagai petani bagi hasil

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017120093212-84-256780/membaca-masa-depan-asuransi-pertanian-di-tangan-jasindo/>. Diakses pada 21 November 2017.

(pemaro) atau murni sebagai buruh upahan. Mayoritas keluarga perdesaan di wilayah-wilayah tersebut masih harus membeli beras untuk keluarga mereka sendiri pada beberapa bulan dalam satu tahun (dengan kata lain, mereka adalah *nett buyer* bukan penjual bersih). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penghasilan mereka diperoleh dari beragam sumber, baik kegiatan pertanian maupun nonpertanian. Pekerjaan memanen masih memberikan pemasukan yang paling menjanjikan sebagai pendapatan kerja.

Di sektor kopi dan tembakau, pemain-pemain utamanya sendiri sudah merupakan perusahaan besar, dan bagi mereka tanah bukanlah sumber penting akumulasi modal. Karena pasarnya sendiri relatif sempit, jalur-jalur pemasaranlah yang menjadi kuncinya. Pemain-pemain besar belum tentu para pemilik lahan, namun merekalah yang menentukan harga. Mereka pula yang memberikan para petani kecil input dan pelatihan, menentukan bagaimana caranya menanam. Petani-petani kecil memperoleh laba yang kecil dari pemrosesan sementara laba besarnya diraup para pemain besar.

Petani kecil di wilayah-wilayah produksi sayuran bernilai tinggi seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara menghadapi situasi yang sama dengan yang dihadapi petani padi, namun mereka lebih bergantung pada perantara atau bandar untuk pemasaran, sementara risikonya lebih besar. Meski demikian, pada musim bagus, keuntungannya lebih besar daripada keuntungan yang didapat dari beras. Kaum muda perkotaan dan kelompok-kelompok pecinta lingkungan (*green groups*) yang tertarik pada pertanian sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Banyak contoh yang menarik, namun pro-

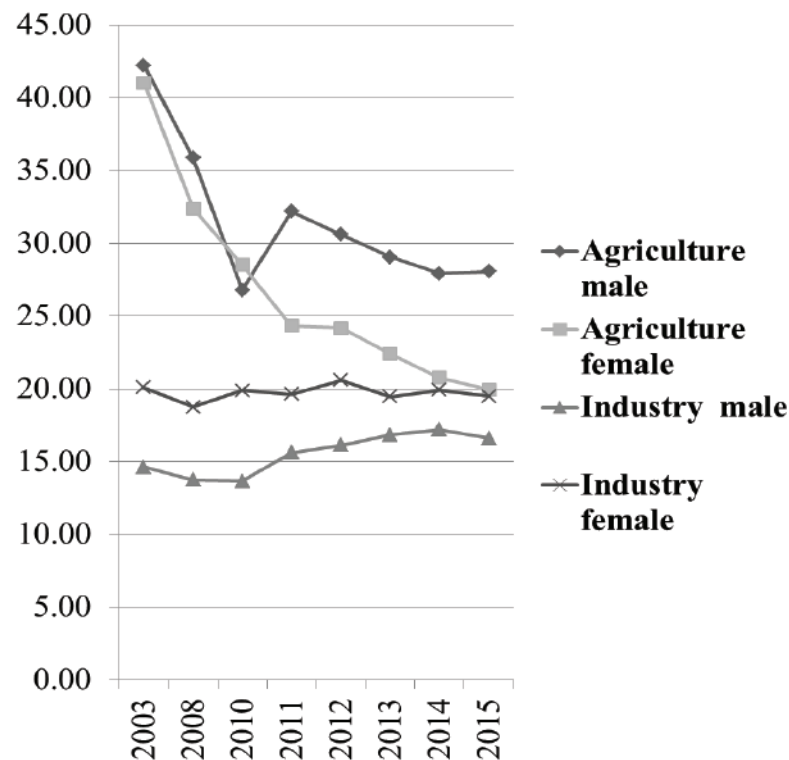
duksinya secara keseluruhan masih kurang signifikan.

Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia (yang perkebunannya kini mencakup lebih dari 10 juta hektar lahan terutama di Kalimantan dan Sumatera, belum lagi target pemerintah yang mencapai 29 juta ha)⁸. Perusahaan-perusahaan besar telah “merebut” sejumlah besar lahan tempat beradanya warga yang tidak memiliki sertifikat tanah resmi dan tanahnya ada di bawah yurisdiksi Kementerian Kehutanan (lihat di atas). Meskipun sebelumnya ditempati oleh petani kecil, sebagian besar “lahan yang direbut” tersebut secara resmi digolongkan sebagai “zona hutan” atau “desa non-administratif” (secara *de facto* desa, namun dalam peta administrasi pemerintahan digolongkan sebagai hutan tak berpenghuni atau tanah cadangan pemerintah). Secara formal maupun informal, sebagian besar perkebunan kelapa sawit ada di bawah pengawasan para pemain perkebunan besar, yang kadang beroperasi di jalur perkebunan lazimnya, dan kadang menggabungkan skema ini dengan skema-skema pertanian kontrak skala kecil. Sekitar 10 juta orang (2 juta pekerja beserta keluarga mereka) kini tinggal di zona-zona perkebunan kelapa sawit dan menggantungkan penghasilannya pada perkebunan jika *land frontier* baru ditutup. Jumlah lapangan kerja yang tersedia ini (hanya satu pekerja per 5 hektar) sangatlah rendah, bahkan jika dibandingkan dengan perkebunan lainnya, misalnya karet, rasionya mendekati 1:1 (lihat tulisan Tania Li di jurnal ini).

⁸ Lihat tulisan Tania Li dalam jurnal ini

Kaum Muda dan Pertanian

Grafik 1. Proporsi Tenaga Kerja Usia 15-34 Tahun di Sektor Pertanian dan Industri



Sumber : BPS (2016) dan Pusdatin (2014)

Perbandingan tenaga kerja muda (15-34 tahun) yang bekerja di pertanian stabil pada angka 28% selama dua tahun terakhir 2014-2015 (artinya, secara absolut jumlahnya terus tumbuh perlahan), sementara di industri persentase kenaikannya berkisar antara 10 hingga 15%. Di sisi lain, jelas bahwa banyak kaum muda pedesaan bercita-cita atau berkeinginan untuk bekerja di luar pertanian, dan banyak orang tua yang berambisi sama dengan anak mereka. Sebuah laporan yang dibuat LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada 2015 telah memperingatkan mengenai “krisis regenerasi” di sektor pertanian.⁹

⁹ LIPI. (2016). LIPI: Krisis Regenerasi Petani, Masalah Serius di Pedesaan.

Sepanjang pengetahuan kami, hampir tidak ada studi mengenai petani muda di Indonesia selain (1) studi pemaparan tentang kaum muda pedesaan oleh AKATIGA di 12 desa penghasil beras (Nugraha & Herawati 2015) dan (2) studi oleh LIPI mengenai “krisis regenerasi pertanian” di tiga desa di Jawa Tengah (LIPI 2016)¹⁰. Kedua studi tersebut lebih berfokus pada cita-cita kaum muda dan keberpalingan (*turn away*) nyata

<http://lipi.go.id/lipimedia/single/lipi:-krisis-regenerasi-petani-masalah-serius-di-pedesaan/10832>. Diakses pada 5

Oktober 2015.

¹⁰ AKATIGA baru-baru ini telah memulai satu studi yang lebih besar bertajuk “Becoming a Young Farmer” di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Flores namun hasil dari studi ini baru akan tersedia pada 2018 (lihat footnote 1)

mereka dari pertanian, alih-alih pada pencarian terhadap kaum muda yang ingin (atau sudah) menjadi petani.

Umur dan Gender ‘Petani Utama’

Data mengenai struktur umur dan gender ‘petani utama’ (‘kepala’ tani yang dilaporkan) di Indonesia pada Sensus Pertanian 2013 terangkum dalam **Tabel 3**. Data tersebut menyiratkan bahwa

1. 23% seluruh ‘petani’ yang dilaporkan, namun hanya 11% dari “kepala rumah tangga tani” adalah perempuan.
2. persentase perempuan di antara para “kepala rumah tangga tani” berbanding lurus dengan umur petani,
3. populasi “kepala rumah tangga petani” relatif masih muda; 39% dari

mereka berusia di bawah 45 tahun dan hanya 33% yang di atas 55 tahun.

4. meski demikian hanya 1% kepala rumah tangga petani berumur di bawah 25 tahun dan 12% berumur 25-43.

Kecilnya persentase kepala rumah tangga petani muda dapat mencerminkan (i) keengganan kaum muda untuk bertani, (ii) kesulitan atau ketidakmungkinan kaum muda untuk memperoleh akses ke pertanian (terutama tanah) ketika mereka masih muda, atau (iii) kombinasi keduanya.

Sayangnya, data mengenai umur petani utama tidak tercatat pada sensus-sensus pertanian sebelumnya sehingga kami tidak dapat menarik simpulan kecenderungannya selama ini.

Tabel 3. Umur dan Gender ‘Kepala Rumah Tangga Petani’ di Pertanian Skala Kecil, 2013

Kelompok umur	% keseluruhan kepala rumah tangga tani	% laki-laki	% Perempuan	Total (juta)
< 15	*	86	14	**
15-24	1	91	9	0,23
25-34	12	94	6	3,13
35-44	26	93	7	6,89
45-54	28	89	11	7,33
55-64	20	85	15	5,23
65+	13	79	21	3,33
Total	100	89	11	26,14

Sumber BPS 2013

* kurang dari 0,1

** 0,0003% (3.291)

Bentuk-Bentuk Peralihan (Kepemilikan) Tanah Pertanian dan Properti Antargenerasi

Di sebagian besar Indonesia, ahli waris laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi tanah dan properti keluarga lainnya. Warisan biasanya dibagi sama rata meski terkadang anak perempuan menerima lebih kecil dari pada anak laki-laki.

Di Kupang (Nusa Tenggara Timur) anak laki-laki mendapatkan warisan tanah lebih luas daripada anak perempuan. Setelah menikah, anak perempuan masih dapat memiliki tanah yang mereka garap namun jika ia meninggal tanah tersebut dialihkan kepada orang tua, saudara laki-laki, atau keturunannya (Ruwiastuti dkk., 1997: 30). Di Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat) aturan waris mengikuti sistem *Nina Nyenon Mama Melembah* (perempuan membawa satu beban di atas kepala, laki-laki membawa dua beban di pikulan). Artinya, pewaris laki-laki menerima dua kali bagian yang diterima pewaris perempuan (bandingkan dengan prinsip yang sama yakni '*sepikul segendong*' yang merupakan adat yang dipraktikkan di beberapa daerah Jawa namun tidak selalu diikuti). Pada beberapa kasus ketika penguasaan tanah terlalu kecil untuk dibagi lebih lanjut, anak perempuan tidak menerima bagian namun bergantung pada (para) pewaris laki-laki yang memberi mereka sebagian hasil panen (*ibid*).

Kami belum menemukan studi etnografi rinci mengenai proses pengalihan pertanian antargenerasi melalui penyerahan tanah sebelum kematian pemilik (hibah) atau setelahnya (warisan). Studi AKATIGA di 12 desa penghasil beras di Jawa dan Sulawesi Selatan menemukan bahwa tanah dapat

dialihkan ketika seorang anak laki-laki/perempuan menikah atau saat orang tua sakit atau terlalu lemah untuk terus bertani, atau ketika orang tua meninggal. Anak-anak yang menunggu warisan tanah dapat tinggal di desa dan membantu bertani atau (yang lebih lazim) beralih ke beragam pekerjaan non-pertanian. Jarang ada kasus ketika anak-anak sudah dapat menjadi petani mandiri (alih-alih membantu-bantu di pertanian) ketika orang tua mereka masih hidup. Ketika anak yang sudah dewasa membantu di pertanian orang tua, orang tua dapat memberi mereka sebagian hasil panen (Nugraha & Herawati, 2015: 33-34)

Di negara-negara lain, transfer atau peralihan lahan pertanian dan aset, dan pembagian di antara (calon) pewarisnya, merupakan sumber ketegangan antargenerasi dan/ atau antara anak-anak, dan kadang merupakan hal yang tabu yang hampir tidak mungkin didiskusikan secara terbuka dalam keluarga. Sejauh pengetahuan kami, di Indonesia hingga saat ini belum ada studi tentang dinamika tersebut, yang memerlukan studi etnografis untuk menelitinya.

Kaum Muda—Berpaling dari Pertanian?

Sebagaimana di banyak negara lain, penelitian yang ada mengungkapkan bahwa menjadi petani bukanlah pilihan utama bagi kaum muda perdesaan Indonesia (White, 2012). Begitu pula dengan studi AKATIGA di 12 desa penghasil beras, meskipun studi ini juga menggarisbawahi pentingnya melihat preferensi tersebut dalam konteks struktur agraria, yang artinya bahwa banyak (sering pula kebanyakan) kaum muda tidak memiliki harapan mewarisi tanah dan tidak

memiliki prospek mendapatkan tanah orang tua saat mereka masih muda (lihat di bawah). Studi yang sama juga mencatat—meskipun informasi mengenai hal ini terbatas—bahwa banyak petani berusia lebih tua sebelumnya pun pernah memilih untuk bermigrasi, pulang ke desa dan kembali bertani hanya ketika tanah tersedia (Nugraha & Herawati, 2015).

Studi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh *Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan* dan Oxfam di berbagai daerah menunjukkan bahwa secara umum orang tua usaha tani padi cenderung tidak menginginkan anaknya menjadi petani, sementara petani hortikultura menginginkan anaknya menjadi petani. Perbedaan keinginan akan regenerasi di kalangan orang tua ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan oleh keuntungan bersih per musim (hortikultura). Selain itu, baik responden anak usaha tani padi maupun hortikultura cenderung tidak tertarik pada pertanian.¹¹ Meski demikian, studi ini mengambil loncatan logika klasik dengan berasumsi bahwa preferensi anak-anak tersebut merepresentasikan kenyataan di masa depan. Ketidaksukaan yang jelas di kalangan kaum muda terhadap ide masa depan bertani sebagian terkait dengan citra bertani sebagai pekerjaan serta citra kehidupan perdesaan secara umum, namun isu-isu ekonomi dan struktural tentunya juga merupakan penyebab yang penting. Para peneliti AKATIGA telah mengamati isu-isu tersebut sejak 2013 di 12 desa penghasil

beras di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Kami berbicara dengan kaum muda di rentang umur 13 dan 30 dari beragam latar belakang. Sebagian dari mereka adalah anak-anak pemilik tanah, dan yang lain berasal dari kalangan petani kecil, petani penyewa atau keluarga yang tidak memiliki tanah. Ketika kami mengamati dari dekat pandangan dan harapan kaum muda perdesaan ini, gambaran yang kami lihat cukup kompleks seperti yang kami rangkum di bawah ini.

Di kebanyakan desa penghasil beras ini, struktur kepemilikan lahan menunjukkan bahwa kebanyakan kaum muda tidak memiliki harapan realistis untuk menjadi petani, setidaknya pada saat mereka masih muda. Kondisi ketakbertanahan menyebar luas dan kurang dari separuh petani memiliki tanah yang mereka garap (Harahap & Ambarwati, 2015). Yang memiliki peluang untuk memiliki tanah di usia muda hanyalah mereka yang berasal dari keluarga kaya yang memiliki tanah. Namun biasanya mereka kuliah dan mengincar masa depan dengan pekerjaan aman yang bergaji. Orang tua mereka juga memiliki sumber daya untuk menempatkan mereka pada pekerjaan semacam itu. Mereka mungkin berharap mewarisi dan memiliki tanah, namun untuk disewakan sebagai sumber penghasilan; mereka tidak tertarik untuk bertani.

Sementara itu, kaum muda yang tumbuh di keluarga tani kecil mungkin akhirnya akan mewarisi sepetak tanah, namun tanah orang tua mereka terlalu kecil untuk diberikan sebagiannya kepada anak-anak mereka ketika mereka masih muda. Mungkin pada umur empat puluh atau lima puluh tahunanlah mereka akhirnya mewarisi tanah

¹¹ KRKP, 2017. Laporan Kajian Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Regenerasi Petani. <http://keadaultanpangan.net/2016/08/laporan-kajian-mengenai-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-regenerasi-petani/>. Diakses pada 10 Agustus 2016.

dari orang tua mereka. Dan bagi banyak kaum muda yang orang tuanya tidak memiliki tanah, yang ada hanyalah harapan menjadi petani pemaro atau buruh tani, kecuali jika mereka dapat mengupayakan jalan lain untuk mengakses tanah. Bagi kaum muda ini, satu-satunya cara yang mungkin untuk menjadi petani adalah dengan terlebih dahulu bekerja di luar pertanian (dan kerap di luar desa) serta berharap dapat menabung cukup uang untuk membeli atau menyewa tanah.

Karena kerentanannya atau rendahnya penghasilan, pertanian skala kecil tidaklah menarik, bahkan meskipun tingkat pendapatan sebenarnya yang didapat dari pekerjaan-pekerjaan di perkotaan belum tentu lebih baik. Melihat kondisi mayoritas petani kecil Indonesia saat ini, dapat dipahami bahwa reproduksi pertanian kecil sulit adanya dan pertanian tidak begitu menarik bagi kaum muda. Namun di sisi lain, keberadaan mafia spekulasi keuangan dan perdagangan di pertanian menjadi persoalan tersendiri. Pasar produk tani yang berkembang menyiratkan bahwa pertanian berpotensi menawarkan masa depan yang menjanjikan bagi pertanian kecil jika ada dukungan pemerintah. Namun, kondisi dan tren saat ini jelas tidak berpihak kepada petani muda. Sulit bagi (calon) petani muda untuk menjadi petani mandiri yang memiliki tanah sendiri, kecuali mereka terlebih dahulu mampu mengumpulkan modal dari sektor atau kegiatan lain.

Maka tidaklah mengherankan jika begitu banyak laki-laki dan perempuan muda perdesaan yang memutuskan untuk beralih ke beragam jenis pekerjaan bergaji atau pekerjaan sektor informal, kadang di daerah

lain atau bahkan hingga ke Malaysia. Namun, keputusan kaum muda untuk bertani atau tidak bertani, dan untuk menetap atau meninggalkan desa, bukanlah keputusan yang permanen. Saat ini banyak petani berusia lebih tua yang pernah merantau dan kembali pulang setelah mereka menabung cukup uang atau saat ada tanah yang bisa digarap.

Sementara itu, sektor perkebunan berskala besar menawarkan sedikit lapangan kerja atau peluang karir yang menarik bagi kaum muda. Tingkat upah dan kondisi kerja di sektor ini biasanya sangat buruk. Hingga saat ini, baru ada satu studi yang berfokus pada prospek kaum muda di sektor ini (Li, di urai ini). Studi Li menyimpulkan bahwa ketika daerah *land frontier* baru tertutup, peluang untuk kerja upahan di perkebunan akan sangat terbatas, dan perusahaan tidak akan lagi menyediakan lahan atau pekerjaan untuk generasi selanjutnya.

[...] upah murah, keluarga yang termiskinkan dan bercerai-berai sepertinya akan menjadi wujud masa mendatang jika perkebunan kelapa sawit terus berekspansi di Indonesia. Masa depan 20-30 juta hektar lahan kelapa sawit, yang sebagian besar ditanami melalui modus-modus perkebunan, memang suram. Perspektif antar-generasi dapat menjelaskan mengapa banyak orang yang tinggal di zona-zona perkebunan berada dalam keputusasaan, dan memburuknya kondisi sosial terbentang di hadapan mata kecuali juga ada perubahan arah secara radikal. Perspektif antargenerasi ini juga memaparkan mengapa istilah “pembangunan berkelanjutan” [...] secara mendasar tidak sejalan dengan ekspansi perkebunan. (Li, dalam Jurnal edisi ini).

Daerah-daerah perkebunan teh juga tidak banyak menawarkan masa depan bagi petani muda lokal. Tanah biasanya dimiliki

oleh perusahaan negara atau swasta, dan warga desa hanya menjadi penduduk informal di tengah pertanian, di keterpencilan. Administrasi dan pembangunan infrastruktur tidak dikelola oleh pemerintah daerah. Karena itu, kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada pengelola perkebunan. Mereka kebanyakan adalah penduduk miskin yang memiliki akses yang sangat terbatas ke sumber-sumber penghasilan.

Pola-Pola Mobilitas Kaum Muda Perdesaan

Setelah lulus dari sekolah menengah atau pendidikan yang lebih tinggi, kaum muda miskin perdesaan (yang tidak atau nyaris tidak bertanah) mulai merambah beragam pilihan peluang nonpertanian. Perempuan muda dapat mencoba bekerja di pabrik, perdagangan kecil-kecilan, sebagai penjaga toko di perkotaan atau sebagai PRT di dalam maupun luar negeri. Laki-laki tidak begitu tampak di sektor pabrik dan perdagangan, namun mereka banyak ditemukan di sektor konstruksi.

Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah kajian AKATIGA baru-baru ini, baik laki-laki maupun perempuan muda cenderung sering berganti pekerjaan untuk memperoleh pengalaman dan mengakses peluang yang lebih baik.¹² Sementara sebagian mungkin melihat gejala ini sebagai cerminan dari “etika kerja buruk” kaum muda yang tidak loyal pada satu pekerjaan, pada kenyataannya, strategi ini penting agar

mereka dapat memperoleh peluang kerja terbaik. Mereka yang cerdas dan beruntung akan berhenti berganti-ganti pekerjaan ketika mereka mendapatkan peluang yang baik. Studi AKATIGA menemukan misalnya seorang perempuan yang memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai pengasuh anak di rumah seorang ekspatriat. Ia kemudian mencoba belajar bahasa Inggris seraya melebarkan jejaringnya di antara sesama PRT di rumah orang-orang ekspatriat dan memetakan peluang (karena majikannya mungkin tidak akan berada di Indonesia untuk jangka waktu lama) dll. Seorang perempuan muda lain yang mendapat pekerjaan sebagai perawat berusaha menjadi lebih profesional dan menjadi bagian dari sebuah agensi perawat. Seorang laki-laki muda yang berjualan kain berwarna untuk batik dan busana Muslim mencoba mempelajari dan memahami pasar dengan lebih baik dan menyesuaikan produk yang dijualnya. Itu adalah contoh-contoh kaum muda yang menemukan pekerjaan berpenghasilan layak dan dapat menabung dari penghasilan mereka. Modal mereka akan diinvestasikan di kampung, terutama untuk membeli tanah, rumah, atau ternak sebagai bentuk tabungan; ternak akan dijual sebelum liburan hari raya saat mereka perlu uang dan harga ternak tinggi). Tanah, rumah, dan/ atau ternak dipelihara oleh keluarga yang masih tinggal di desa (saudara perempuan, istri, atau orang tua). Ketika perempuan menikah dan beranjak tua atau mendapatkan bahwa pekerjaan yang baik sulit diperoleh, mereka pulang kampung dan memanfaatkan tabungan mereka untuk menjadi petani atau membiayai kegiatan lain (misalnya membuka toko sembako kecil, berjualan pakaian

¹² Studi Evaluasi II Akatiga mengenai program Bantuan Tunai Bersyarat dari Pemerintah Indonesia, PKH (2015)

yang dibeli dari kota, atau kegiatan nonpertanian lainnya). Sering ditemukan laki-laki muda yang bekerja di kota dan meninggalkan anak dan/ atau istri di desa. Ada pula perempuan muda yang pergi ke luar negeri meninggalkan anak dan/ atau suami di desa.

Sementara itu, kaum muda dari keluarga pemilik tanah atau petani kaya cenderung mewarisi tanah dari orang tua mereka, namun biasanya mereka sendiri tidak tertarik menjadi petani. Alih-alih menjadi petani, mereka menjadi tuan tanah, memetak-metak tanah mereka dan menyewakannya secara bagi hasil. Meskipun sumber awal akumulasi harta mereka adalah pertanian, sejalan dengan waktu sumber utamanya tidak lagi berasal dari pertanian. Pada kasus ini, penghasilan dari bertani atau tanah lebih merupakan penghasilan tambahan, yang merupakan tabungan dalam bentuk tanah atau sebagai penyangga bagi usaha-usaha mereka yang lainnya. Sumber-sumber utama penghasilan mereka dapat meliputi kegiatan memasok berbagai produk dan jasa di desa: kebutuhan input dan peralatan pertanian, bahan bangunan, penyewaan alat-alat modal (penyewaan mesin), toko sembako besar, angkutan (membeli truk untuk mengangkut barang ke daerah lain), dll. Mereka juga ada yang melakukan bisnis spekulatif seperti jual beli tanah. Pemilik tanah besar cenderung dapat memperluas kepemilikan tanah dengan biaya yang relatif rendah, karena para pemilik tanah yang lebih miskin dan sedang memerlukan uang (untuk kebutuhan darurat medis, membiayai kepindahan, dll.) akan menjual atau mengagunkan

tanah mereka kepada tuan tanah kaya dengan harga yang relatif rendah.¹³

Pendidikan dan Jalan Masuk Menuju/ Keluar dari Pertanian

Pendidikan sering dipandang sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi kaum muda perdesaan serta untuk masa depan (di sektor) pertanian yang lebih baik. Akan tetapi, pendidikan dan pelatihan pertanian secara umum tidak menghasilkan generasi baru petani muda. Misalnya, banyak lulusan Institut Pertanian Bogor (perguruan tinggi pertanian terkemuka di Indonesia) tidak menjadi petani atau menemukan/ memilih pekerjaan dalam bisnis yang berkaitan dengan pertanian; mereka kebanyakan menemukan/ memilih kerja di sektor finansial di kota-kota besar yang menjanjikan gaji lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Lulusan yang terlibat di sektor pertanian cenderung lebih terlibat dalam perdagangan dan pemrosesan hasil tani di wilayah perkotaan.¹⁴

Terdapat sekitar 300 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian di Indonesia, dengan jumlah siswa keseluruhan mencapai sekitar 220.000 orang (2014). Biaya sekolahnya relatif murah, dan pada Oktober 2014 Kementerian Pendidikan mengumumkan bahwa semua siswa SMK Pertanian akan menerima beasiswa sebesar Rp1 juta per tahun sebagai insentif untuk menarik minat lebih banyak siswa.¹⁵ Kebanyakan siswanya

¹³ Informasi ini didasarkan pada berbagai evaluasi program pengentasan kemiskinan (PNPM) oleh Akatiga.

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan dua profesor IPB.

¹⁵ MetroTVNews.com 23 Oktober 2014.

memang anak-anak petani kecil. Kurikulum sekolah tersebut mencakup wajib magang tiga bulan yang memerlukan biaya cukup tinggi (hingga Rp5 juta). Meski demikian, kebanyakan lulusan sekolah vokasi pertanian (baik SMK maupun pesantren) yang kami kunjungi (di Jawa dan Flores) juga tidak bekerja sebagai petani, meskipun sekolah telah membekali mereka dengan banyak pengalaman lapangan, magang, dan pelibatan sesungguhnya dalam kegiatan-kegiatan bisnis pertanian. Kebanyakan mereka masuk sekolah tersebut sebagai batu loncatan untuk mengakses peluang-peluang pendidikan yang lebih tinggi, atau untuk mencari kerja di pabrik serta sektor jasa di daerah semi-perkotaan yang kebanyakan tidak terkait langsung dengan pertanian.

Ada pula sekolah-sekolah politeknik pertanian di tingkat perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Pertanian), yang berfokus pada cabang-cabang disiplin tertentu. Contohnya adalah “Palm Oil University” INSTIPER – Institut Pertanian Stiper (Sekolah Tinggi Perkebunan) di Yogyakarta dan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi di Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut didirikan setelah melihat pertumbuhan pesat industri kelapa sawit dan kebutuhan yang terus ada terhadap staf teknis tingkat rendah seiring dibukanya perkebunan-perkebunan baru. Mereka bekerjasama dengan sejumlah perusahaan sawit untuk menyalurkan lulusannya agar bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Kementerian Pertanian memiliki sebuah program yang dinamakan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) di beberapa kota seperti Bogor, Yogyakarta, Magelang, Malang, dan Medan, dan memberikan pula

beasiswa pada 2016 untuk siswa ekstensi pertanian atau vokasi swasta/ negeri untuk melanjutkan sekolah di STTP.

Kementerian Pemuda dan Olah Raga meluncurkan program Petani Muda pada 2016. Program ini menyoal kaum muda yang memiliki minat terhadap pertanian dan dapat menularkan minat ini kepada kaum muda lainnya. Dalam program ini, kaum muda akan dilatih untuk mengelola lahan dan untuk semakin produktif. Meski demikian, tidak ada sumber atau dokumen yang menjelaskan bagaimana program tersebut dijalankan.

Di samping program-program dari pemerintah, beberapa organisasi petani independen dan NGO pun memiliki sekolah atau program-program pendidikan untuk mendorong para pemuda untuk belajar tentang pertanian. Sayangnya tidak ada informasi sistematis tentang inisiatif-inisiatif program seperti itu. Salah satu contoh program tersebut adalah seperti yang dilakukan Serikat Petani Pasundan (SPP) yang telah membangun “sekolah pertanian”—sekolah untuk para petani lokal dan anak-anak mereka. Mereka memberikan beasiswa bagi anak-anak petani dan sebagian lulusannya dilibatkan dalam regenerasi aktivis SPP. Adapun contoh dari inisiatif NGO dalam hal ini dilakukan oleh *Plan Indonesia* melalui program *Youth Economic Empowerment* (YEE) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemuda yang rentan, terutama perempuan (80%) untuk mendapatkan pekerjaan layak atau membangun usaha mandiri yang berkelanjutan. Di beberapa daerah perdesaan, program ini telah membantu kaum muda sasaran serta masyarakat sekitar mereka

dalam membangun pertanian hortikultura.¹⁶ Dalam skala lebih kecil, Sunspirit di NTT merupakan contoh bagaimana NGO lokal menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan potensi para pemuda dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian. Mereka menyelenggarakan pelatihan teknik-teknik bertani dan memperkenalkan bank benih (*seed bank*) dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok petani setempat. Adapula program kompetisi “Young Farmers” Innovation Community” yang didukung oleh AgriProFocus Indonesia yang baru-baru ini meluncurkan kompetisi gelombang keduanya untuk memilih sepuluh “Duta Petani Muda”. Tujuan dari program ini adalah untuk “mempromosikan pertanian dan agribisnis di antara kaum muda sebagai bidang (pekerjaan) yang menjanjikan”. Kompetisi yang sama juga pernah digelar pada tahun 2014¹⁷

Jenis dan Gaya Pertanian Baru

Meskipun masih terbatas, ada dua jenis ‘pertanian baru’ yang berbeda dengan pola-pola tradisional. Keduanya (menurut kami) kebanyakan melibatkan laki-laki dan perempuan muda. Jenis yang pertama adalah pertanian organik. Jenis pertanian ini cenderung digagas oleh orang-orang yang lebih terdidik di perkotaan, dan sebagian berakar pada gerakan LSM hijau (*Green NGOs*), meskipun kita pun bisa menemukan beberapa contoh serupa di beberapa daerah pedesaan dalam skala kecil. Produk-produk pertanian organik dijual di pasar-pasar swalayan besar di kota-kota besar, namun secara

umum produksinya masih sangat kecil (kecuali untuk ekspor kopi Arabika). Di bidang utama produksi pangan intensif, pertanian organik murni tidak mudah dilaksanakan terutama karena air tanah sering telah tercemar oleh Nitrogen atau bahan kimia lainnya.

Bentuk pertanian baru lainnya adalah pertanian kota (*urban farming*). Mengikuti tren global, pertanian perkotaan cukup sering dibicarakan di sosial media, dan jenis pertanian ini terkait dengan gerakan daur ulang. Acap kali sepetak tanah perkotaan kecil digunakan untuk memperkenalkan anak-anak sekolah di perkotaan kepada kegiatan-kegiatan lingkungan (*green activities*) dan pertanian. Meskipun terdapat lusinan komunitas yang dibentuk atas nama kegiatan pertanian perkotaan seperti “Komunitas 1000 Kebun”, “Jakarta Berkebun”, “Komunitas Hijau Bogor”, dan lain-lain yang melibatkan banyak kegiatan pendidikan dan diskusi, luas lahan perkotaan yang digarap tidaklah signifikan. Sementara itu, pertanian perkotaan sesungguhnya yang masih ada 10 hingga 15 tahun yang lalu—yang digarap oleh penduduk miskin di tepi-tepi sungai di perkotaan—kini telah lenyap.

Terkait pertanian perkotaan, beberapa studi yang ada, terutama dari wilayah Jakarta, berargumen bahwa pertanian perkotaan terkait dengan kemiskinan, misalnya, ketika penduduk tergusur akibat kebijakan pembangunan kota seperti pembangunan mal-mal/ pusat perbelanjaan. Di satu sisi sebagian orang menyebut pertanian perkotaan sebagai pilihan alternatif anti-kemiskinan, yang menghasilkan daya lenting (*resilience*) tinggi saat dihantam krisis ekonomi (lihat misalnya Purnomohadi,

¹⁶ Kerangka Acuan (ToR) Pola Migrasi Kaum Muda di Nusa Tenggara Timur, 2016, tidak diterbitkan.

¹⁷ Dari laman website www.agriprofocus.com

2000; Siregar, 2001 & 2006, Suryana, 2006). Sebaliknya, dalam riset disertasinya di empat lokasi perbatasan kota di Jakarta Timur, Semiarto Aji Purwanto (2010) berpendapat bahwa kasus petani perkotaan memunculkan pertanyaan mengenai perbedaan kota-desa. Wilayah-wilayah demikian, menurut Purwanto, memerlukan perhatian kita untuk dapat lebih memahami kompleksitas hubungan perkotaan-perdesaan. Petani pinggir kota (periurban) yang pindah dari daerah perdesaan sering kemudian pulang ke kampung asal dan mempertahankan hubungan sosial di sana, sehingga membuat mereka tidak dapat dikatakan sebagai migran “penuh”.

Lembaga-Lembaga yang Menyalurkan Minat Kaum Muda

Syarat lain untuk meningkatkan peluang kaum muda di sektor pertanian adalah adanya lembaga demokratis dan berakar yang dapat dimanfaatkan oleh (calon) petani muda untuk mewujudkan minat dan menguatkan posisi tawar mereka. Tidak seperti di negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina, puluhan juta petani dan pekerja pertanian—satu kelompok pekerjaan terbesar di negeri ini—tidak memiliki gerakan, organisasi, maupun partai politik yang merepresentasikan kepentingan mereka. Padahal 50 tahun yang lalu Barisan Petani Indonesia (BTI) dan Sarikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) secara total mengklaim memiliki hampir delapan juta anggota.¹⁸ Setelah pengambilalihan kekuasaan

¹⁸ White, Ben. Tribunal 1965, 2015. <http://www.tribunal1965.org/rememering-the->

an oleh Soeharto, BTI dan organisasi petani independen lainnya dilebur dan diganti dengan satu organisasi tunggal dukungan pemerintah yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang secara resmi memiliki mandat untuk mendukung kepentingan para petani kecil dan buruh tani. Namun, selama 45 tahun masa keberadaannya, HKTI hampir tak melakukan apapun untuk menjalankan mandatnya tersebut. Dalam beberapa tahun ke belakang, misalnya, ia hanya diam melihat kenyataan pengusiran paksa para petani lokal dari jutaan hektar lahan yang kemudian dipergunakan untuk pertanian korporasi (khususnya sawit). Saat ini HKTI terutama berfungsi sebagai kendaraan untuk mencapai ambisi-ambisi politik; dalam beberapa tahun belakangan, kegiatan-kegiatannya terutama difokuskan untuk mendukung partai-partai politik atau para kandidat untuk meraih posisi-posisi politik tingkat tinggi. HKTI dalam beberapa tahun telah disibukkan oleh perebutan tampuk kepemimpinan¹⁹; dua kubu HKTI terus saling klaim tentang legitimasi. Dan seperti dapat dilihat dari dua website mereka yang saling bersaing, keduanya tak memiliki visi apapun tentang pembaruan agraria maupun program-program atau kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk para pemuda di perdesaan.²⁰

indonesian-peasants-front-and-plantation-workers-union-1945-1966/. Diakses pada 1 Oktober 2015.

¹⁹ Hasan, Rofiqi. Tempo.co, 2010. <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/13/078263172/Munas-HKTI-Kisruh-Muncul-Desakan-Forum-Tandingan>. Diakses pada 17 Januari 2015, dan beberapa berita terkait lainnya berada di laman yang sama.

²⁰ www.hkti.or.id dan www.hkti.org

Sayangnya, hampir dua dekade setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto, secara umum lembaga-lembaga perkotaan atau asosiasi pertanian pada dasarnya merupakan lembaga-lembaga yang memiliki prinsip pengelolaan atas-bawah (*top down*) yang diwariskan oleh era Soeharto. Lembaga-lembaga seperti paguyuban pengguna air, koperasi petani, kelompok tani lebih banyak digunakan sebagai saluran program-program pemerintah. Kelompok Tani (Poktan) petani hingga kini kebanyakan sibuk menyalurkan subsidi bibit, pupuk, dan mesin pertanian; secara umum (meskipun ada pengecualian di beberapa daerah) lembaga-lembaga tersebut terkooptasi dan subsidiya jatuh ke tangan pemburu rente dan hanya segelintir saja petani, atas nama keseluruhan kelompok petani, guna memperoleh subsidi dan peluang program pemerintah (Chazali, 2017).

Meski demikian, ada beberapa organisasi di tingkat daerah yang memiliki visi gerakan dan kegiatan yang mengakomodasi kebutuhan petani kecil. Misalnya saja Serikat Petani Pasundan (SPP) di Jawa Barat dan Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) di Sulawesi Selatan. Aliansi Petani Lembor (APEL) di Manggarai Barat, misalnya mencoba membangun dan mengembangkan kedaulatan petani melalui media dan pemerintah daerah. Satu pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah apakah kemunculan gerakan petani (muda) yang lebih otonom, demokratis (dan mungkin satu federasi nasional dari gerakan-gerakan tersebut), dan upaya-upaya mereka untuk melibatkan kaum muda dalam kegiatan-kegiatan dan dalam lobi-lobi kebijakan mereka, bisa menyediakan para

pemuda perdesaan, laki-laki dan perempuan, sebuah visi tentang masa depan pertanian yang lebih menarik bagi mereka, dan dukungan-dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan visi/ cita-cita tersebut?

Satu institusi desa yang potensinya menjanjikan, walau juga dibentuk dengan asas kelola atas-bawah (*top down*), adalah program besar pengentasan kemiskinan desa di Indonesia yang dikenal dengan nama PNPM, yang pada masa puncaknya mencakup seluruh desa di Indonesia PNPM menciptakan lembaga-lembaga perputaran dana perdesaan dan kelompok pelaksana pembangunan desa. Di desa-desa di mana lembaga-lembaga tersebut masih bertahan dan mengelola perputaran dana, relatif melayani mayoritas warga dan melibatkan banyak perempuan (SPP-Simpan Pinjam untuk Perempuan) juga warga yang relatif masih muda, yang memiliki kepercayaan diri untuk mengelola dana secara transparan di hadapan seluruh warga desa. Saat ini lembaga tersebut tidak ditargetkan khusus kepada kaum muda atau kepada pertanian, namun lembaga tersebut masih berpotensi dapat dimanfaatkan oleh kaum muda perdesaan untuk menindaklanjuti minat mereka menjadi petani.

Terkait masalah (calon) petani muda dalam memperoleh akses ke tanah, regulasi administratif di Indonesia bergerak ke arah otonomi yang lebih besar bagi desa untuk mengatur urusan mereka sendiri. Terjadi perluasan penyesuaian lokal terhadap struktur-struktur penguasaan tanah (*land tenure*) saat ini. Satu desa yang kami pelajari di Kebumen (Jawa Tengah) telah membantu mereka yang tidak, atau nyaris tidak, memiliki tanah untuk memperoleh akses ke

tanah desa, melalui pengaturan kepemilikan yang lebih tepat, dan untuk membatasi *absenteeism* serta konsentrasi kepemilikan yang berlebihan. Sebagian dari hibah yang kini diterima desa berdasarkan UU 6/2014 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cadangan tanah umum; alokasi sasaran hak guna tanah akan menjadi jalan untuk memberi warga, perempuan kepala keluarga, dan kaum muda, kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh sepetak lahan pertanian. Serupa halnya, pemerintah desa dan kelompok-kelompok petani harus dapat mengupayakan dukungan yang lebih baik bagi produksi pertanian kecil dan menolak teknologi taktepat guna (seperti *Combine Harvester*) yang diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian, yang hanya bermanfaat bagi minoritas keluarga kaya dan merusak peluang kerja di masa panen (Wati & Chazali, 2015).

Pemuda dan Pertanian: Refleksi Penutup

Ada banyak alasan bagi kaum muda mengapa meninggalkan desa terlihat menarik sementara masa depan bertani nampak sebaliknya. Media massa sering menggambarkan dunia perdesaan dan petani sebagai terbelakang dan miskin. Kenyataannya, banyak aspek kehidupan desa yang berubah pesat. Di banyak desa, konektivitas sama kencangnya dengan di kota; sepeda motor murah dan sudah menjadi barang lumrah; selain itu, anak-anak muda pun sibuk dengan akun *Facebook* masing-masing. Beberapa tahun silam memang telepon genggam jenis apapun “bernilai posisional” tinggi (nilainya bagi pemilik ada pada

kenyataannya bahwa orang lain belum memilikinya). Akan tetapi sekarang ini yang ada adalah pilihan telepon pintar versus telepon biasa; dan kualitas tinggi versus telepon genggam murah buatan Cina. Kaum muda bergelut secara aktif dengan gagasan-gagasan dan gaya hidup kaum muda global, yang mungkin membuat mereka memandang kehidupan perdesaan dan bertani dengan cara yang berbeda dengan cara pandang orang tua terdahulu.

Jika kebutuhan Indonesia akan beras dan bahan pangan lainnya di masa depan hendak dipenuhi sebagian besar oleh petani kecil alih-alih oleh perkebunan pangan industrial berbasis korporasi yang lebih dilirik oleh kaum teknokrat, maka kehidupan perdesaan dan pertanian harus dibuat lebih menarik bagi kaum muda. Kita perlu memiliki pandangan yang jelas mengenai kendala-kendala utama—baik yang bersifat praktis ataupun kultural—yang menghambat kaum muda menggeluti pertanian, baik ketika mereka masih muda atau sebagai pilihan di kemudian hari. Jika kita melihat migrasi kaum muda dan pilihan nyata mereka untuk tidak bertani, kita memerlukan perspektif jangka panjang, yang melihat sepanjang hidup si anak muda.

Pertama, isu kaum muda dan akses ke tanah harus ditanggapi secara serius. Isu terkait generasi ini tidak begitu diperhatikan dalam wacana kebijakan pertanahan. Ada kebutuhan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan untuk mengambil tanah dari pasar properti swasta dan mengalokasikannya dalam bentuk hak pakai kepada kaum muda serta untuk mencari jalan guna membatasi investasi spekulatif tanah. Spekulasi tanah buruk untuk ekonomi (ini

adalah suatu bentuk investasi parasit dan tidak produktif). Spekulasi investasi tanah juga buruk bagi ikatan sosial di perdesaan, dan sebagaimana telah kita lihat, hal ini buruk pula bagi masa depan kaum muda. Selain itu, sementara laki-laki dan perempuan secara formal memiliki hak yang sama untuk memiliki tanah, tetap saja ada banyak perbedaan praktis berbasis gender dan kendala bagi perempuan muda untuk mengakses tanah dan peluang-peluang pertanian.

Kaum muda Indonesia adalah sumber potensi terpenting bagi inovasi, energi, dan kreativitas dalam mengembangkan praktik-praktik bertani yang baru, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan sangat produktif. Banyak hal yang dapat dilakukan terkait pendidikan umum, media massa, dan terutama media sosial untuk memperbaiki citra pertanian dan kehidupan perdesaan yang beredar saat ini. Misalnya contoh konkret petani muda laki-laki maupun perempuan yang mempraktikkan cara-cara cerdas dan kreatif untuk memproduksi dan berkehidupan layak dari pertanian, bisa memiliki potensi dampak yang kuat. Bagi kebanyakan kaum muda yang pernah kami ajak bicara masalahnya bukanlah semata-mata kehidupan perdesaan atau pertanian yang bercitra demikian, namun juga kurangnya lapangan kerja di desa dan kecilnya pendapatan dari bertani dengan kondisi saat ini. Itulah yang membuat mereka berpaling.

Daftar Rujukan

- Alexander, Paul, Peter Boomgaard, & Ben White (eds.). (1999). *In the Shadow of Agriculture: Nonfarm Activities in the Javanese Economy, Past, and Present*. Amsterdam, Royal Tropical: Institute Press.
- Ambarwati, Lia, Ricky Ardian Harahap, Isono Sadoko, and Ben White (2016). *Land Tenure and Agrarian Structure in Regions of Small-Scale Food Production*. In McCharty, John F. & Kathryn Robinson (eds.), *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty* (pp. 265-294). Singapore: NUS Press.
- Bernstein, Henry. (2010). *Class Analysis of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood Press.
- BPS. (2013). *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Luas Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman, Indonesia (000 Ha), 1995 – 2015*. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1665>.
- Chazali, Charina (2017). Mengembangkan Institusi Ekonomi Perdesaan: Belajar dari Pengalaman. Dalam *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia* (301-328). Yogyakarta: IRE.
- Harahap, Ricky Ardian & Aprilia Ambarwati (2015). Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Desa

- Penghasil Padi. *Jurnal Analisis Sosial*, 19(1), 11-26.
- LIPI. 2016. LIPI: Krisis Regenerasi Petani, Masalah Serius di Perdesaan. <http://lipi.go.id/lipimedia/single/lipi:-krisis-regenerasi-petani-masalah-serius-di-perdesaan/10832>. Diakses pada 5 Oktober 2017.
- Muthmainah, Dinda Audriene . CNN Indonesia 2017. *Membaca Masa Depan Asuransi Pertanian di Tangan Jasindo*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171120093212-84-256780/membaca-masa-depan-asuransi-pertanian-di-tangan-jasindo/>. Diakses pada 21 November 2017.
- Nugraha, Yogaprasta & Rina Herawati. (2015). Menguak Realitas Pemuda di Sektor Pertanian Perdesaan. *Jurnal Analisis Sosial*, 19(1). 27-40.
- Purnomohadi, N. (2000). Jakarta: Urban Agriculture as an Alternative Strategy to Face the Economic Crisis. In Bakker, Niko et al. (eds.) *Growing Cities, Growing Food: Urban Agriculture on the Policy Agenda. A Reader on Urban Agriculture. German Foundation for International Development (DSE)* (453-466). Feldafing: Germany.
- Purwanto, Semiarto Aji. (2010). *Bertani di Kota, Berumah di Desa: Studi Kasus Pertanian Kota di Jakarta Timur* (disertasi doktoral). Depok: Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Ruwiastuti, Maria, dkk. (1997). *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Siregar, Masjidin. (2001) Petani Pinggiran Kota: Suatu Alternatif atau Masalah Baru. *Bulletin Agro Ekonomi*, 1(4), 8-11.
- Siregar, Masjidin. (2006). Peri-Urban Vegetable Farming in Jakarta. In *Proceeding for International Workshop on Urban/ Peri-Urban Agriculture in the Asian and Pacific Region*. Tagaytay City, Philippines, May 22-26, 2006.
- Kementerian Pertanian. (2014). *Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Suryana, Asep. (2006). *Menjadi Pinggiran Jakarta: Dinamika Sosial Petani Buah di Wilayah Pasar Minggu 1921-1966*. Dalam Laporan Penelitian *Indonesia Across Orders: The Reorganization of Indonesian Society 1930-1960*. Jakarta: LIPI & NIOD.
- Wati, Herlina & Charina Chazali. (2015). Sistem Pertanian Padi Indonesia dalam Perspektif Efisiensi Sosial. *Jurnal Analisis Sosial*, 19 (1), 41-56.
- White, Ben. (2012). Indonesian Rural Youth Transitions: Employment, Mobility and the Future of Agriculture. In Booth, Anne, Chris Manning, & Thee Kian Wie (eds.), *Land, Livelihood, the Economy, and Environment in Indonesia: Essays in Honour of Joan Hardjono*. Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

White, Ben & Gunawan Wiradi. (1989). Agrarian and Non-Agrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages. In Hart, Gillian, A. Turton & Ben White (eds.), *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia* (266-302). Berkeley: University of California Press.

White, Ben. (2015). Generational Dynamics in Agriculture: Reflections on Rural

Youth and Farming Futures. *Cahiers Agricultures*, 24(6), 330-334.

White, Ben. (2015). Remembering the Indonesian Peasants' Front and Plantation Workers' Union (1945-1966).

<http://www.tribunal1965.org/remembering-the-indonesian-peasants-front-and-plantation-workers-union-1945-1966/>. Diakses pada 21 November 2015.

DISKURSUS PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN

Gutomo Bayu Aji

*Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*

gutomoaji@yahoo.com

Abstract

This article describes the shift in the discourse of youth from the Old Order (Orde Lama) to the New Order (Orba) in its relation to the change in the national politic lanscape. The formation of the youth discourse under the developmental regime started with the repression of the political parties ideologies and civil society organizations and with the arrangement of the national education. Education was shifted from the liberation process to become an instrument to controlling the youth so they grown up as labours for the development. In such discourse practice, the youth lose their opportunities to find their identities in tune with the their core culture and to be involved in the development of nation-state.

Keywords: *Youth discourse, National politic, Development, National education system*

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan perubahan diskursus pemuda dari Orde Lama ke Orde Baru karena perubahan politik nasional. Pembentukan diskursus pemuda di bawah rezim pembangunan diawali dengan pemberangusan ideologi, partai politik dan organisasi masyarakat, serta penataan sistem pendidikan nasional. Pendidikan berubah dari arena pemberdikarian menjadi instrumen untuk mengendalikan pemuda agar tumbuh sebagai tenaga kerja pembangunan. Di dalam praktik diskursus ini, pemuda menjadi kehilangan kesempatan untuk menemukan jati dirinya yang sesuai dengan jiwa kebudayaannya dan berkiprah dalam membangun negara-bangsa.

Kata kunci: *Diskursus pemuda, Politik nasional, Pembangunan, Sistem pendidikan nasional*

Pengantar

Sesudah mengambil keuntungan dari peristiwa '65 yang ditudingkan kepada PKI, Soeharto sadar betul tentang arti kekuatan politik pemuda. Ia juga merupakan produk pergerakan kaum muda di era Orde Lama dari jalur tentara (angkatan perang Indonesia) dan turut merasakan pertentangan-pertentangan ideologis di dalam sistem multipartai yang dimotori oleh kaum muda penerus pergerakan nasional. Soeharto juga memahami sejarah pergerakan kaum muda yang berbeda latar belakang dan kepentingan (ideologis) termasuk pengaruh ideologi komunis yang dihadirkan oleh Sneevliet kepada Semaun misalnya¹, karena ia sempat mengenyam pendidikan masa Orde Lama yang mengajarkan pendidikan sejarah jauh lebih baik daripada masa sekarang.

Soeharto mungkin juga menyadari betul, betapa kekuatan politik kaum muda itu sangat besar ketika digunakan sebagai alat untuk menumpas komunisme di tanah air pada sekitar tahun 1966-1967 dan sekaligus menumbangkan rezim yang dipolitisasi sebagai diktator yang memberi ruang bagi tumbuhnya ideologi komunis di tanah air. Pemuda dalam organisasi-organisasi seperti KAMMI, KAPPI ataupun yang tergabung dan yang sekaligus motor dari semaraknya kehidupan partai-partai politik (yang mulai dipengaruhi anti komunisme saat itu) termasuk Ormas dibawah naungannya, benar-benar merupakan kekuatan politik yang berbahaya. Bukan

hanya darah dan jutaan nyawa manusia yang memperlihatkan hal itu yang sebagian merupakan efek dari kekuatan politik pemuda yang disalahgunakan, tetapi juga runtuhnya sebuah rezim yang disegani dunia yang selama dua puluh tahun berkuasa—yang sesungguhnya jauh lebih demokratis daripada yang sesudahnya termasuk pada masa sistem multipartai sekarang ini.

Indonesia di bawah kendalanya yang dicitrakan sebagai pengemban Supersemar, yang berarti mengambil keuntungan yang bersifat nasional dari kharisma serta ketokohan pemimpin besar revolusi, merasa sangat perlu untuk menata stabilitas politik nasional yang bersumber dari ideologi-ideologi partai politik yang sangat diminati oleh kalangan muda. Akhirnya, pemuda harus dijauhkan dari partai politik dan diwadahi secara tunggal dalam organisasi pemuda yang bersifat nasional. Partai politik dibatasi bukan lagi sebagai ruang ekspresi politik kaum muda, melainkan sebagai penyaluran politik secara sederhana bagi tokoh-tokoh nasional (generasi tua) yang tergabung dalam kelompok nasionalis, agama, dan tentara bersama (pegawai) pemerintah. Mengingat betapa berbahayanya kekuatan politik pemuda, mereka harus dijinakkan di dalam wadah-wadah tunggal untuk kepentingan—apa yang kemudian diadopsi dari Bank Dunia sebagai—pembangunan nasional.

Artikel pendek ini berupaya membaca pengendalian kekuatan politik kaum muda dan pembentukan diskursus pemuda di dalam pembangunan yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam tataran

¹ Dalam Kurniadi, 1987

praktik hingga saat ini, diskursus itu beroperasi pada dua arena, yaitu keluarga dan sekolah. Untuk melihat praktik itu, tulisan ini terbatas pada hasil pengamatan selama dua tahun terakhir di tiga desa di Jawa Tengah. Survei kecil kami² lakukan untuk melihat konstruksi sosial pemuda di dalam keluarga dan sekolah. Dua arena itu ditaklukan oleh rezim pemerintah Orde Baru untuk mengendalikan generasi muda sejak usia dini (bahkan sejak dalam kandungan) dari keturunan tiap-tiap keluarga yang diwajibkan menempuh pendidikan yang sudah dikendalikan pula untuk menghasilkan generasi penerus pembangunan.

Perubahan (Mendadak) Diskursus tentang Pemuda

Tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa jatuhnya rezim Soekarno melalui pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto merupakan pertanda matinya kehidupan politik kaum muda. Kalangan muda bahkan merayakan euforia antikomunis dengan melibatkan diri dalam pemberantasan komunisme pada waktu itu dan ikut menurunkan Soekarno. Mereka seperti tidak sadar (atau mungkin sadar) bahwa kekuatan politik yang amat besar yang ada pada diri mereka sedang dimanfaatkan oleh kepentingan tentara untuk menumpas komunisme dari bumi Indonesia. Setidaknya, dua kali uji coba pemberontakan komunis yang dila-

kukan pada tahun 1948 dan 1965, telah menghadapi kekuatan politik terbesar di Indonesia pada waktu itu *vis a vis* tentara yang menjalankan tugas menjaga persatuan.

Kehidupan politik kaum muda pada masa Orde Lama memang diwarnai dengan pertentangan-pertentangan ideologis, tetapi kontradiksi-kontradiksi yang terjadi justru menegaskan tumbuhnya suatu komunitas nasional yang sedang mencari bentuk negara-bangsa yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena setidaknya dua hal berikut. Pertama, pertentangan-pertentangan ideologis yang terjadi di kalangan muda pada masa Orde Lama itu setidaknya masih merupakan kelanjutan dari semangat pergerakan Indonesia pada zaman kolonial. Hal ini mungkin terjadi karena tokoh-tokoh senior dalam kesemarak politik waktu itu masih dimotori oleh tokoh-tokoh muda pada masa pergerakan kemerdekaan. Mereka yang ikut mendirikan bangsa dan negara ini ikut serta pula dalam mengisi kemerdekaan dengan kesemarak pencarian (negara-bangsa) Indonesia itu.

Kedua, sistem multipartai yang entah atas desakan siapa lalu Hatta tiba-tiba mengeluarkan dekrit dalam suatu sidang kabinet pada September 1945 yang tidak dihadiri oleh Soekarno yang mencabut anjuran Soekarno untuk melakukan “gerakan rakyat nasional” dan memberlakukan sistem multipartai. Walaupun dekrit wakil presiden ini menimbulkan pertentangan di antara beberapa tokoh bangsa, pada kenyataannya sistem multipartai mulai diberlakukan pada saat itu dan diwarisi

² Saya bersama tim peneliti dari Puslit. Kependudukan LIPI melakukan penelitian “modernisasi dan krisis regenerasi petani di perdesaan” mulai tahun 2015 sampai sekarang.

secara parsial pada masa sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa dengan dicabutnya anjuran Soekarno untuk melakukan “gerakan rakyat nasional” itu maka partisipasi politik rakyat dalam mengisi kemerdekaan menjadi terpecah, tidak dalam satu komando pemimpin besar revolusi³. Namun, sebagian yang lain menganggap bahwa sistem multipartai itu menghindarkan Indonesia dari kecenderungan diktator dan akan menjadi iklim politik yang baik bagi berlangsungnya kontradiksi-kontradiksi sesama anak bangsa⁴.

Pemilu pertama yang dilakukan pada tahun 1955 merupakan puncak kehidupan berdemokrasi rakyat Indonesia melalui sistem multipartai ini. Walaupun garis politik Soekarno tampak tidak nyaman dengan sistem politik ini, tetapi pada kenyataannya sistem inilah yang berjalan di Indonesia pada masa Orde Lama. Ketidnyamanan itu antara lain terlihat pada dua hal berikut. Pertama, diberlakukannya uji coba sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1949 walaupun hanya bertahan selama satu tahun. Kedua, uji coba Soekarno untuk menyatukan ideologi-ideologi besar nasional, yaitu nasionalis, agama, dan komunis di bawah ideologi gabungan Nasakom. Walaupun pada kenyataannya belum tampak berhasil menjadi landasan ideologi negara-bangsa kita dan malah dituding oleh sebagian kalangan politisi (dan tentara) telah

memberikan arena politik bagi PKI untuk menguasai Indonesia melalui jalan kudeta.

Terlepas dari perdebatan politik yang menyertai kesemarakan kehidupan berpolitik pada masa Orde Lama, masa itu telah memberikan ruang kebebasan bagi kaum muda untuk berekspresi. Rezim demokratis Soekarno ataupun rezim demokrasi yang menelung Soekarno yang mengusung sistem multipartai yang keduanya (atau lebih) saling berkontestasi sepanjang masa itu, pada kenyataannya justru menjadi arena terbaik bagi kehidupan politik kaum muda sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Hal ini bisa dimengerti karena Soekarno sendiri tumbuh dari golongan kaum muda sejak zaman pergerakan kemerdekaan dan begitu pun Hatta (dan sebagian besar tokoh-tokoh yang lain) yang keduanya tetap konsisten dengan garis politiknya sepanjang karier politik mereka.

Melalui pembacaan terhadap ruang politik berdemokrasi pada masa Orde Lama ini, kita setidaknya bisa mengerti bagaimana rezim kekuasaan memandang pemuda dan bagaimana pemuda terlibat dalam menciptakan kontradiksi dalam suatu komunitas nasional, suatu komunitas politik (dan kebudayaan) tempat kaum muda (bersama generasi yang sudah senior) mengekspresikan pikiran-pikirannya dalam suasana dialog ataupun perdebatan yang semarak dan hangat yang kesemuanya ingin mencapai suatu tujuan nasional. Pemuda bukan hanya dilihat dari sudut pandang kekuasaan sebagai generasi penerus bangsa dalam arti kehidupan nasional yang sesungguhnya, tetapi juga dipandang sebagai agen

³ Perpecahan tampak ketika kalangan muda menghadapi agresi militer Inggris yang ditanggapi oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk menguasai Indonesia lagi.

⁴ Soal diktator ini disampaikan Hatta dalam sidang kabinet itu (dalam Dewantara, 1959)

perubahan. Di tangan pemuda, penguasa itu dengan sadar meletakkan di atas pundaknya kehidupan berbangsa hari ini dan hari esok. Soekarno dalam suatu pidatonya yang menggetarkan pernah berucap:

Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.

Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Seribu orang tua hanya dapat bermimpi. Satu orang pemuda dapat mengubah dunia.

Retorika itu setidaknya mencerminkan ekspresi Soekarno tentang agensi pemuda, identitas yang sangat kuat, dan subyek politik yang dipundaknya disandarkan perubahan nasib bangsa.

Sejalan dengan retorika Soekarno yang mengobarkan semangat rakyat Indonesia untuk mengutamakan jiwa sebelum diajarkannya keahlian-keahlian yang bersumber dari akal dalam upaya untuk membangun karakter bangsa, di arena pendidikan telah berkiprah Ki Hadjar Dewantara sejak Taman Siswa berdiri tahun 1922. Walaupun sistem Taman Siswa dikritik habis-habisan oleh Sutan Takdir Alisjahbana⁵, tetapi justru filsafat Takdirlah yang tidak bisa ditunjukkan olehnya dalam praktik di tingkat komunitas nasional saat itu, baik di daerah maupun nasional. Terbangunnya komunitas nasional, sebagaimana juga Takdir yang berada di dalamnya, sejak era pergerakan hingga zaman kemerdekaan, bukan didasarkan atas

⁵ Dalam Alisjahbana dkk. (1954). *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K Jakarta dan Balai Pustaka.

filsafat Takdir itu, tetapi justru sebaliknya berangkat dari jiwa nasionalisme yang dilandaskan pada semangat anti kolonialisme. Sebaliknya, sistem pendidikan Taman Siswa mampu menunjukkan praktik di tingkat komunitas walaupun mengalami pasang surut di era demokrasi multipartai itu.

Dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi dan Leiderschap* (1959), Ki Hadjar tampak mempersalahkan Hatta karena mengeluarkan dekrit tentang sistem multipartai sehingga demokrasi tidak bisa dijalankan berdasarkan kebijaksanaan. Dengan berlakunya sistem multipartai ini kemungkinan besar Ki Hadjar juga kehilangan basis politiknya karena prinsip Taman Siswa didirikan antara lain berdasarkan asas kekeluargaan yang di dalam sistem demokrasi menemukan padanannya dengan sistem demokrasi terpimpin⁶. Jiwa Taman Siswa agaknya akan lebih bisa berkembang di jalan Soekarno yaitu “gerakan rakyat nasional” ketimbang di jalan demokrasi multipartai. Dan benar saja, setelah diberlakukannya sistem multipartai itu, Ki Hadjar dan Taman Siswa tampak semakin surut dalam kancah perhelatan komunitas nasional.

Semakin surutnya Taman Siswa sebenarnya juga menandakan semakin surutnya strategi kebudayaan dalam membangun karakter bangsa. Jiwa nasional semakin tergerus oleh berkembangnya nalar

⁶ Hilangnya basis politik Taman Siswa ini juga disampaikan oleh Makmuri Sukarno (2008) dalam artikelnya berjudul “Perguruan Taman Siswa: Kasus Pendidikan Komunitas Menghadapi Negara”

di dalam sistem demokrasi multipartai karena hakikat sistem demokrasi itu bukan lagi diletakkan pada kebenaran dan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, melainkan pada suara terbanyak (lima puluh persen plus satu), yang semakin memiliki kecenderungan pragmatis. Iklim demokrasi ini di satu sisi tidak cocok dengan prinsip Taman Siswa, dan tiadanya kendaraan politik bagi Ki Hadjar termasuk jalan “gerakan rakyat nasional” itu, ajaran Taman Siswa menjadi kalah bersaing dengan ideologi dan kepentingan lain yang dibawa serta oleh partai-partai politik maupun ormas-ormasnya. Hampir setiap partai politik dan ormasnya juga melihat pendidikan sebagai “ladang pertarungan” untuk membangun kebudayaan nasional.

Walaupun tampak ada pergeseran politik terutama di dalam sistem demokrasi, tetapi situasi ini masih menjadi iklim yang baik bagi kehidupan pemuda. Hanya saja, diskursus mengenai pemuda mengalami pergeseran yang cukup mendasar, yaitu pemuda sebagai agen tunggal perubahan menjadi pemuda sebagai agen majemuk perubahan. Dalam arti kata lain, pemuda tidak lagi dilihat sebagai entitas tunggal sebagaimana yang diinginkan Soekarno dalam “gerakan rakyat nasional” yang antara lain terlihat dalam pidato retoriknya, “Hai pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.” Melainkan pemuda yang memiliki banyak wajah dan ideologi-ideologi dalam berbagai representasi yang menyemarakkan ruang politik yang disebut sebagai komunitas nasional itu. Pergeseran diskursus ini menunjukkan

adanya suatu pergeseran pandangan tentang pemuda dari yang sebelumnya sederhana menjadi yang kompleks.

Begitu pun di arena pendidikan tempat sistem pendidikan nasional diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan, bukan hanya pesantren dan perguruan seperti Taman Siswa yang menghendaki digunakannya sebagai sistem pendidikan nasional, melainkan juga Muhammadiyah, Ormas tersebut menolak Taman Siswa sebagai sistem pendidikan nasional karena ajarannya dianggap berbau Hindu dan disusupi komunisme.⁷ Soekarno dalam hal ini tampak larut dalam kontradiksi yang tak berkesudahan, atau justru menikmati, dan tampak menegaskan lagi pentingnya membangun karakter bangsa di penghujung kekuasaannya. Penegasannya tentang membangun karakter bangsa harus dilandasi jiwa (bukan keahlian semata-mata), menunjukkan bahwa kreasi negara-bangsa itu belum tuntas. Efek dari sistem demokrasi multipartai telah menciptakan pendidikan sebagai “ladang pertarungan” yang semakin luas yang membuat gagasan tentang karakter bangsa itu mengalami pencarian yang seolah tanpa henti.

Bagi kalangan pemuda yang semakin terdidik ala Barat, situasi demokrasi ini bisa saja melahirkan kelompok yang dituding “intelektualistis” atau kelompok berpikir yang tak berkesudahan karena tidak berpijak pada realitas empiris sehingga menikmati

⁷ Taman Siswa menggunakan prinsip “sama rata sama rasa” yang disampaikan oleh Mas Marco, salah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan berhaluan kiri

proses itu tanpa ujung. Nuansa ini juga tidak terlepas dari efek sistem demokrasi multipartai yang hingga pada penghujung kekuasaan Soekarno belum mencapai kulminasi mengenai karakter bangsa yang akan melandasi berdirinya negara-bangsa ini. Jangankan tentang negara-bangsa, tentang kebudayaan nasional yang seharusnya menjadi landasan sistem pendidikan nasional pun belum tuntas didialogkan karena pendidikan telah berkembang menjadi “ladang pertarungan” yang strategis.

Proses (ber)negara-bangsa yang belum kunjung usai dirumuskan itu tiba-tiba dikagetkan dengan peristiwa '65 yang kemudian membuat banyak orang tiarap. Sesudah peristiwa itu tiba-tiba semua berhenti, semua yang terkait dengan gairah (ber)komunitas nasional itu. Celakanya lagi tentara bukan hanya mengendalikan keamanan pascaoperasi '65 tetapi juga mengambil alih kekuasaan yang antara lain dilakukan dengan cara memanfaatkan kekuatan politik pemuda. Di bawah Soeharto, kehidupan politik seperti dibalik 180 derajat. Indonesia mendadak berubah dari negara demokrasi yang disegani dunia menjadi negara otoriter seotoriter-otoriternya termasuk dalam pembentukan diskursus pemuda. Tidak ada lagi kebebasan dan ruang demokrasi ataupun komunitas nasional yang semarak seperti sebelumnya.

Diskursus Pengendalian Pemuda

Peristiwa '65 benar-benar dimanfaatkan oleh Soeharto untuk membalik sejarah. Setelah berhasil mengendalikan keamanan tak lama

kemudian ia membekukan PKI dan ormas-ormasnya pada September itu juga. Berbagai tekanan kepada Soekarno juga mulai muncul untuk membubarkan PKI, tetapi ia berpendapat lain, sebagaimana dalam pidatonya berikut:

Gestoknja harus kita hantam, tapi komunisnja tidak bisa, karena ajaran komunis itu adalah hasil keadaan objektif dalam masyarakat Indonesia seperti halnja nasionalis dan agama. (Pidato Soekarno, 21 Desember 1965)

Situasi pasca '65 di Indonesia juga tampak menjadi arena pertarungan ideologi Blok Barat v.s. Timur. Soeharto yang memiliki kendali atas keamanan berhasil membangun sentimen anti komunisme yang semakin luas, antara lain di kalangan kelompok pemuda dan partai-partai politik. Fraksi-fraksi di parlemen berhasil mendesak mayoritas anggota untuk membubarkan PKI melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang berisi tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran Komunisme-Leninisme di Indonesia⁸.

Buat Soeharto yang semakin mendapatkan angin segar dari Blok Barat dan kalangan masyarakat luas terutama kelompok pemuda, pembubaran PKI belum cukup untuk mengambil alih kekuasaan. Soekarno harus terkesan menyerahkan kekuasaannya kepadanya dan ia kemudian bisa menghancurkan kekuatan ideologi massanya secara sistematis. Buat Soeharto

⁸ Pembubaran PKI juga diikuti dengan penangkapan menteri-menteri yang dianggap terlibat PKI dan ormas-ormasnya serta perburuan orang-orang yang dituduh sebagai anggota ataupun simpatisan PKI serta ormas-ormasnya di seluruh Indonesia.

dan kalangan tentara, mereka harus benar-benar mengendalikan keamanan. Sistem multipartai dipandang berbahaya untuk tumbuhnya pertentangan-pertentangan ideologis yang bisa mengguncang persatuan. Menurut kalangan tentara, sistem multipartai berdasarkan ideologi-ideologi itu tidak sesuai dengan semangat Orde Baru, sebagaimana dinyatakan dalam uraian Syafa'at (2009) berikut:

Kelompok militer menginginkan perubahan besar dari sistem kepartaian. Partai-partai lama yang bersifat ideologis diganti dengan organisasi-organisasi dengan program sesuai kebutuhan pembangunan. Kekuatan politik diharapkan dapat mendukung program pemerintah. (hal. 197)

Pemerintah di bawah rezim Soeharto kemudian merombak secara mendasar sistem multipartai menjadi sistem “dwipartai” atau fusi kelompok demokrasi, kelompok persatuan pembangunan, kelompok karya pembangunan, dan kelompok ABRI.

Penghancuran sistem demokrasi multipartai yang dibentuk pertama kali oleh Hatta ini bukan hanya menghancurkan infrastruktur demokrasi terbesar di Indonesia, yaitu partai-partai politik yang multi-ideologi, tetapi juga menghancurkan kontradiksi-kontradiksi yang telah dihasilkan dalam semangat komunitas nasional sebelumnya. Di mata rezim ini, kontradiksi harus dihindari dan digantikan dengan konsensus. Maksud konsensus di sini adalah seperti kesepakatan nasional yang dicapai atas musyawarah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terbatas yang mewakili sistem “dwipartai” itu. Bagai-

mana pun di dalam sistem “dwipartai” itu terdapat kelompok dominan, yaitu karya pembangunan (Golkar) dan ABRI (yang keanggotannya di parlemen berdasarkan penunjukan). Jadi, boleh dikatakan konsensus, tetapi yang dikendalikan melalui sistem “dwipartai”.

Matinya demokrasi diikuti promosi Orde Baru mengenai pembangunan. Di dalam paradigma pembangunan, pemuda tidak lagi dilihat sebagai generasi penerus cita-cita kemerdekaan dan agen perubahan bangsa dari kolonialisme, melainkan dilihat sebagai kekuatan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar termasuk jumlah pemuda mulai dilihat sebagai modal pembangunan. Pemuda merupakan tenaga kerja produktif yang harus dimanfaatkan sebagai investasi masa depan. Pandangan-pandangan terhadap pemuda semacam ini muncul di dalam paradigma pembangunan yang mengadopsi teori modal manusia (*human capital*) Theodore Schultz tahun 1961 dan Garry Becker tahun 1964. Teori ini meyakini bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi diperlihatkan oleh peningkatan pendapatan pekerja yang merupakan kemajuan dari pendidikan. Teori ini berimplikasi pada bidang pendidikan yang dilihat sebagai arena pembangunan sumber daya manusia.

Perubahan paradigma dari demokrasi ke pembangunan pada awal masa Orde Baru itu diikuti dengan perombakan besar-besaran sektor pendidikan. Pendidikan bukan lagi dilihat sebagai cara untuk mencapai pembebasan atau kemerdekaan setiap manusia dan jalan untuk mencapai

pembentukan negara-bangsa, tetapi sebagai instrumen untuk menjadikan setiap pemuda sebagai investasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pendidikan bukan lagi menjadi “ladang pertarungan” dalam konteks suatu komunitas nasional, tetapi sebagai tali kendali untuk mengekang kaum muda agar tidak tumbuh kesadaran politiknya sekaligus untuk menanamkan suatu sistem pemikiran dari suatu rezim agar mereka tunduk dan patuh.

Melalui cara pandang itu, sektor pendidikan harus dirombak dari sistem pendidikan yang demokratis menjadi sistem pendidikan yang intervensif dan doktrinal. Sistem pendidikan asli Indonesia seperti Taman Siswa, Kayu Tanam, pesantren, dan lain-lain yang walaupun dapat meneruskan usahanya, tetapi tidak diadopsi ke dalam sistem pendidikan nasional, malahan terkesan dipinggirkan. Pemerintah mengambil alih penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dengan menerapkan konsep pembangunan nasional di dalamnya melalui berbagai prioritas, antara lain pemberantasan buta huruf, pendidikan keahlian, peningkatan partisipasi sekolah, dan lain-lain yang sesuai dengan kepentingan pembangunan.

Sejak awal masa pemerintahan Orde Baru, dua sektor strategis pembangunan ini mulai dikendalikan. Pemerintah membuat perencanaan jangka panjang untuk kedua sektor itu di dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), semacam pedoman pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sebagai mandataris rakyat di parlemen yang sudah dikendalikan. GBHN pertama dibuat

tahun 1973 yang antara lain memuat soal pendidikan serta pembinaan generasi muda, sebagaimana disebutkan,

Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila... Pendidikan diarahkan untuk pembinaan generasi muda sebagai tunas-tunas bangsa, ditujukan agar mereka dapat menjadi pengganti generasi yang lebih baik... Wadah-wadah Pembinaan pemuda dilakukan melalui lingkungan keluarga, sekolah, organisasi-organisasi kepemudaan, pramuka, dan lain-lain. Pembinaan keluarga yang sejahtera adalah sarana bagi pembinaan generasi muda.. (GBHN 1973)

Pendidikan dikembangkan melalui tiga jalur atau yang sekarang dikenal dengan sebutan trisentra—bukan tricon (*continuïteit, convergentie, concentric-citeit*)⁹ sebagai mana yang diajarkan oleh Ki Hadjar dalam rangka memajukan kebudayaan nasional—yaitu jalur sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga jalur ini sesungguhnya juga sudah dirombak, bukan untuk mengembangkan generasi muda yang berjiwa nasional melainkan untuk menanamkan karakter nasional yang baru yang direduksi ke dalam pembangunan.

Untuk mengendalikan kaum muda, rezim Orde Baru ternyata tidak cukup dengan menanamkan ideologi pembangunan saja, tetapi juga mengebiri organisasi-organisasi pemuda dan menggabungkannya ke dalam wadah tunggal. Soeharto hampir bisa dikatakan meniru cara Soekarno dalam hal Nasakom, tetapi dengan cara yang sebaliknya, bukan

⁹ Ki Hadjar Dewantara (1959)

untuk meletakkan dasar ideologi kebangsaan, melainkan untuk mereduksi pluralitas etnis dan agama di kalangan kaum muda. Strategi ini ia mainkan melalui kelompok Cipayung yang bertujuan untuk memobilisasi organisasi-organisasi pemuda dari berbagai etnis dan agama ke dalam wadah tunggal yang dilandasi semboyan Bhineka Tunggal Ika (Kurniadi, 1987). Kelompok inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal dibentuknya KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang merupakan wadah tunggal pemuda Indonesia di masa Orde Baru.

Seluruh ormas ditata ulang secara sentralistis. Selain KNPI yang digunakan untuk mengendalikan gerakan pemuda di tingkat nasional, pemerintah juga mewadahi kegiatan pemuda di tingkat desa melalui Karang Taruna yang dibentuk di setiap desa di seluruh Indonesia. Karang Taruna digerakkan di bawah pembinaan pemerintah desa yang juga dikontrol secara sentralistis. Selain dua organisasi pemuda itu, pemerintah juga memberi ruang kepada remaja-pemuda ke dalam wadah Pramuka dan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) di sekolah-sekolah. Melalui penataan ulang ini, kalangan muda praktis tidak memiliki ruang berdemokrasi karena seluruh organisasi bentukan pemerintah itu dimaksudkan untuk mengendalikan dan menyalurkan minat dan bakat yang sesuai dengan tema pembangunan. Tema yang disodorkan kepada kelompok Cipayung misalnya, generasi muda yang sehat, tangguh, dan bertanggung jawab melalui pembentukan PNPKB (Panitia Nasional Pemuda untuk

Keluarga Berencana) pada tahun 1972 (Kurniadi, 1987).

Ideologi Ormas juga dikendalikan dengan menata seluruh aliran-aliran ideologi yang tumbuh selama masa demokrasi ke dalam ideologi tunggal yang disebut ideologi Pancasila. Pengendalian ini dimaksudkan agar setiap Ormas tidak menggunakan aliran ideologinya sendiri-sendiri sehingga dikhawatirkan muncul kontradiksi. Pancasila ditafsir ulang untuk kepentingan pembangunan antara lain tampak dalam tafsir “masing-masing sila saling terkait”, “mengutamakan musyawarah tetapi kalau tidak mencapai mufakat menggunakan suara terbanyak”, “musyawarah secara kekeluargaan tetapi dikendalikan oleh kekuasaan”, dan munculnya istilah baru yaitu “demokrasi Pancasila” dan “bapak pembangunan” (bapak dari ideologi kekeluargaan). Tafsir-tafsir ini telah menggeser pemaknaan terhadap Pancasila sebatas pada jargon ataupun teks yang tidak kontekstual sehingga Pancasila menjadi miskin kreativitas dalam hal pemaknaan dan lebih dimaknai secara normatif, kalau bukan menjadi doktrin ideologi tunggal.

Pengendalian itu telah membuat pandangan politik pemuda menjadi normatif dan proses regenerasi politik pemuda juga mengalami kemandegan. Pendidikan politik masyarakat termasuk untuk kalangan muda dikanalisis ke dalam satu jalur yaitu P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) (Tanjung, 2002)¹⁰. P-4 diajarkan

¹⁰ Bukan hanya P-4 tetapi juga penataran kewaspadaan nasional, latihan kepemimpinan pemuda, pendidikan disiplin nasional, pelatihan

kepada anak-anak-remaja-pemuda mulai dari sekolah dasar hingga menengah sehingga mereka memiliki ideologi politik tunggal. Pengendalian ini juga didukung oleh kalangan tangki pemikir (*think tanks*) Orba antara lain Ali Moertopo yang berkepentingan merumuskan strategi kebudayaan melalui jalan pendidikan, sebagaimana yang ia tulis berikut:

Sesudahnya kita definisikan prioritas pertama dan prioritas kedua sampailah kita kepada urgensi ketiga di dalam strategi kebudayaan nasional kita. Ini adalah pendidikan...” “... Pendidikan adalah sarana untuk melaksanakan proses akulturasi dan enkulturasi...” “Oleh karena pendidikan adalah sarana akulturasi, maka dengan pendidikan itu harus dikembangkan ekonomi, teknologi dan pengetahuan... Pendidikan harus mampu mengembangkan teknologi sebagai sikap dan nilai hidup, sebagai pengetahuan maupun sebagai keterampilan...” (Moertopo, 1978)

Tafsir atas kebudayaan (dan pendidikan) yang dibuat oleh Ali Moertopo berbeda dengan gagasan-gagasan yang muncul dalam “Polemik Kebudayaan” yang berlangsung antara tahun 1934-1939 antara Takdir dan Soetomo (serta Ki Hadjar)¹¹. Tafsir Moertopo tentang strategi kebudayaan adalah menyerap pengetahuan dan teknologi Barat (akulturasi) serta menanamkannya ke dalam nilai-nilai kebudayaan masyarakat

kemahiran professional, dan lain-lain (dalam Tanjung, 2002)

¹¹ Dalam “Polemik Kebudayaan”, Takdir menghendaki sistem pendidikan nasional berjiwa Barat, sementara Soetomo (dan Ki Hadjar) mengutamakan jiwa nasional (Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K, 1954)

(enkulturasi) sehingga berkembang suatu kebudayaan nasional (berdasarkan tujuh unsur kebudayaan yang dirumuskan oleh Koentjaraningrat). Tafsir ini dimaksudkan untuk meletakkan jalan bagi politik pendidikan nasional yang ia maksudkan sebagai sarana pembangunan ekonomi.

Rekan selembaganya di CSIS yaitu Daoed Joesoef yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sepulang meraih dua gelar doktor dari Sorbonne kemudian membuat dua kebijakan terkait pendidikan dan pemuda pada 1978 yaitu pertama, kebijakan NKK/ BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang merupakan upaya depolitisasi pemuda di perguruan tinggi.¹² Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh menteri berikutnya yaitu Noegroho Noto Soesanto yang mengeluarkan kebijakan pembubaran Dewan Mahasiswa yang menjadi ajang kegiatan politik praktis mahasiswa dan menggantinya dengan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) yang dikendalikan oleh lembaga pendidikan tinggi. Kedua, kebijakan nasional yang menyeluruh dan terpadu tentang pola dasar pembinaan dan pembangunan generasi muda yang ditetapkan GBHN.¹³ Adapun strategi

¹² Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), yang disusul dengan Surat Keputusan Menteri P & K Nomor 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

¹³ Surat Keputusan Menteri P & K Nomor 0323/U/1978 tanggal 28 Oktober 1978 (bertepatan

pembinaan dan pembangunan generasi muda sebagaimana GBHN 1978 adalah sebagai berikut:

Pertama, pembinaan untuk meneruskan kader pembangunan nasional; Kedua, pengembangan wadah yang telah dibentuk yaitu KNPI, pramuka, karang taruna, OSIS dan olah raga; dan Ketiga, perlu diwujudkan suatu kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu. (GBHN, 1978)

Dalam GBHN 1988, kebijakan nasional tentang pemuda semakin dipertegas sebagai modal pembangunan, antara lain terlihat pada kalimat-kalimat berikut:

“Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang...” “Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan secara nasional, menyeluruh dan terpadu serta dimulai sedini mungkin dan mencakup tahap-tahap pertumbuhan sebagai anak, remaja dan pemuda.” “... Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan antara lain melalui upaya-upaya... menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara... serta mendorong partisipasi dalam kehidupan

dengan sumpah pemuda) tentang pola dasar pembinaan dan pembangunan generasi muda sesuai GBHN, yang memiliki arah dan tujuan untuk pengembangan keselarasan dan keutuhan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai insan yang berketuhanan, beriman dan bertaqwa kepada-Nya, serta mengamalkan ajaran-ajaran-Nya, berbudi pekerti luhur dan bermoral Pancasila, juga antara generasi muda dan masyarakatnya, sebagai insan sosial-budaya, sosial politik dan sosial-ekonomi.

berbangsa dan bernegara”. “... Pembinaan dan pengembangan pemuda diarahkan untuk membentuk pemuda Indonesia menjadi kader bangsa ...” “... Pembinaan pemuda perlu dilakukan dengan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap tantangan pembangunan masa depan sehingga akan meningkatkan kegiatan kepemudaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu perlu dimantapkan fungsi dan peranan wadah-wadah kepemudaan KNPI, pramuka, karang taruna, OSIS, organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan organisasi fungsional pemuda lainnya.” (GBHN, 1988)

Selain mulai disinggung tentang penciptaan lapangan kerja oleh pemuda, GBHN juga menekankan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Konsep ini bermakna pembangunan lahir (material) dan batin (spiritual) yang menjiwai semangat pembangunan selama Orba terutama di Bappenas. Kebijakan terkait hal itu terutama di kalangan pemuda berlangsung sepanjang PJPT II (1993-2018), tetapi kandas pada Pelita VI karena jatuhnya rezim Soeharto saat gerakan Reformasi yang dimotori kaum muda. Sesudah itu, walaupun GBHN dihapus, tetapi kebijakan pendidikan dan pemuda belum mengalami perubahan mendasar. Kebebasan mungkin sedikit tercapai, tetapi tentara dan kelompok Islam radikal menjadi kekuatan kontrol terhadap ideologi komunis, selain rasisme dalam politisasi sentimen agama dan etnis.

Paradigma pembangunan pascareformasi juga tidak mengalami perubahan mendasar selain beberapa perbaikan pada konsep sustainability dan pemerataan, yang

walaupun pada kenyataannya kerusakan lingkungan dan ketimpangan pendapatan (rasio gini) semakin besar. Pendidikan masih dipandang sebagai instrumen untuk mengendalikan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti sebagai tenaga kerja yang siap pakai. Kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai itu justru semakin mendapatkan arti penting pada rezim pemerintahan pascareformasi mulai dari SBY hingga Jokowi sekarang yang memulai babak baru “orde infrastruktur”¹⁴, di mana MP3EI dan investasi multinasional untuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah semakin cepat.

Beroperasinya Diskursus Pemuda di Perdesaan

Sepanjang rezim pemerintahan Orba, diskursus pemuda dalam pembangunan itu beroperasi sangat efektif di perdesaan. Pembubaran PKI, depolitisasi massa, penataan ormas ke dalam wadah tunggal, serta kontrol tentara di kalangan masyarakat telah menjadikan pembangunan sebagai satu-satunya pilihan untuk melakukan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat perdesaan. Desa-desa telah berubah menjadi ladang yang subur bagi beroperasinya diskursus pemuda dan menjadi target utama kebijakan itu karena jumlah penduduk perdesaan yang besar tetapi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Efektifnya diskursus itu setidaknya terlihat dari statistik pendidikan tahun 1968-

¹⁴ Istilah “orde infrastruktur” atau *infrastructurism* pernah digunakan oleh Max Lane pada saat diskusi dengan mahasiswa “Forum Indonesia” di Universitas Melbourne, April 2017.

1989 yang memperlihatkan: “wajib belajar dua belas tahun telah berhasil meningkatkan jumlah murid tingkat SD dari 12,3 juta menjadi 30 juta; lulusan SLTP meningkat dari 307 ribu menjadi 2 juta; lulusan SLTA meningkat dari 100 ribu menjadi 1,2 juta; dan jumlah mahasiswa meningkat dari 156 ribu menjadi 1,8 juta” (Santoso, 1992). Data itu tidak memisahkan penduduk desa dan kota tetapi berdasarkan jumlah penduduk dan pemuda di antara tahun itu diketahui sebagian besar merupakan penduduk desa.¹⁵

Pendidikan dasar sembilan tahun dan menengah itu memang telah meningkatkan kemampuan baca tulis dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan pembangunan, tetapi juga telah membuat pemuda desa menjadi kendor di dalam pertanian. Kebijakan pendidikan ini telah memproduksi pengetahuan baru yang mengikis habitus petani yang diwariskan kepada generasi muda perdesaan selama berabad-abad, menjadikannya terasing dengan dunia pertanian, dan bahkan beraspirasi jauh melampaui batasan kultural masyarakat desanya yang sebagian besar adalah petani.

¹⁵ Statistik penduduk dan pemuda Indonesia yang diolah oleh Aris Ananta memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk dan pemuda Indonesia antara tahun-tahun itu berada di perdesaan, khususnya Jawa, dengan jumlah yang semakin besar tetapi kemudian menurun karena kecenderungan *aging population* (setelah tahun 2020-an), tetapi dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Dalam uraiannya juga disebutkan jumlah penduduk Indonesia tahun 1971 adalah 118.367.830 jiwa, 1980 adalah 146.776.473 jiwa, dan 1990 adalah 180.383.700 jiwa. Sedangkan jumlah pemuda (15-24 tahun) Indonesia tahun 1971 adalah 19.356.764 jiwa, 1980 adalah 28.284.780 jiwa, dan 1990 adalah 36.829.471 jiwa (Ananta, 1992).

Rezim Orba berhasil mentransformasikan masyarakat perdesaan bukan hanya dari segi pendidikannya, tetapi dengan pendidikan itu kaum muda dimobilisasikan ke perkotaan, ke sektor-sektor baru yaitu industri, jasa, dan perdagangan (termasuk sektor informal yang mulai berkembang sejak era '80an) yang dianggap memiliki kontribusi produktif dalam pertumbuhan ekonomi¹⁶.

Beroperasinya diskursus pemuda di perdesaan setidaknya efektif di dua arena yaitu keluarga dan sekolah. Pertama, di keluarga, pemuda dikonstruksi secara sosial sebagai tonggak ekonomi keluarga di masa depan. Adapun tonggak ekonomi keluarga itu bisa dicapai melalui cengkeraman kendali pendidikan yang akan membawa pemuda ke dunia kerja yang diciptakan melalui pembangunan. Bukan di dunia pertanian melainkan di dunia industri, jasa, dan perdagangan. Jadi sebenarnya pendidikan tidak mempunyai relevansi dengan program revolusi hijau di perdesaan karena toh akhirnya si pemuda akan dibawa keluar dari dunia pertanian. Beban revolusi hijau diletakkan kepada orang tua khususnya laki-laki (bapak) sebagai petani tunggal di dalam sistem pertanian keluarga. Adapun perempuan (ibu) lebih banyak mengambil peran *multiple-activity* di luar pertanian setelah pertanian dikendalikan oleh negara dan swasta yang membuat usaha tani menjadi

tertekan, bergantung, dan sering tidak menguntungkan.

Di dalam arena keluarga, ibu sebenarnya juga menjadi “objek antara” tercapainya kualitas hidup anak (melalui pendidikan) untuk pembangunan. Pada era SDGs sekarang, ibu bahkan menjadi “objek antara” sejak ia mengandung karena target kesehatan anak ditetapkan 1000 hari sejak dalam kandungan. Dengan demikian, di dalam diskursus ini, seorang ibu yang mulia dijadikan instrumen untuk menghasilkan pemuda yang berkualitas dalam pembangunan. Hal ini berbeda dengan diskursus pemuda yang diajarkan oleh Ki Hadjar dalam sistem pendidikan Taman Siswa misalnya, yang menempatkan ibu sebagai subjek yang mulia karena yang menjaga keturunan manusia termasuk para pemuda yang akan menjadi manusia berdikari¹⁷.

Beroperasinya diskursus pemuda di perdesaan masih terlihat kuat sampai dengan saat ini. Survei kecil di tiga desa di Jawa Tengah memperlihatkan masih beroperasinya diskursus pemuda itu dengan sangat efektif. Sebagian besar orang tua dari keluarga Desa Bengawan, Umbul, dan Gendong memilihkan SD untuk anak-anak di desanya. Selain pertimbangan usia anak (7-12 tahun), juga keamanan pengasuhan kalau memilih SD pada jarak yang paling dekat dengan rumahnya. Namun, ketika memasuki pendidikan SMP ke atas, banyak di antara orang tua di desa yang memilihkan

¹⁶ Statistik migrasi tidak pernah didata oleh BPS, namun dari survey kecil di desa-desa di Jawa Tengah diketahui bahwa 1 dari 3 anak dari keluarga petani melakukan migrasi dan hanya sedikit dari anak yang tinggal di rumah ataupun yang migrasi terkait dengan pertanian (Aji, dkk., 2016).

¹⁷ Mengenai perempuan dalam pandangan Ki Hadjar telah dituliskan dalam bukunya berjudul, “Soal Wanita”.

sekolah untuk anaknya di kota. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh ketersediaan SMP, tetapi banyak juga orang tua yang memilihkan sekolah anaknya di luar kecamatan seperti di pusat kota terdekat atau di kota kabupaten. Selain ketersediaan, pilihan ke kota ini berkaitan dengan mutu sekolah untuk anak. Mengejar mutu sekolah sampai ke kota-kota hingga jenjang pendidikan paling tinggi yang bisa ditempuh sudah seperti candu di kalangan masyarakat desa saat ini¹⁸. Hampir tidak ada anak dari keluarga miskin yang tidak sekolah, sekalipun hanya “keterpaksaan” menempuh pendidikan dasar, karena malu apabila tidak “mencandu bersama yang lain”.

Dewasa ini ketika sekolah menjadi ladang bisnis yang menggiurkan, sementara belum semua sekolah negeri mampu membawa siswa ke tingkat kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan, sekolah swasta unggulan mulai tumbuh di daerah-daerah termasuk di pusat-pusat kota kecil di sekitar desa yang di survei. Sekolah swasta yang belakangan menggunakan konsep unggulan yang memberikan keahlian tambahan kepada siswa baik dalam keahlian berbahasa asing, keterampilan teknis industrial yang siap pakai, maupun kapasitas intelektualitas yang menjanjikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pada Tabel 2 diperlihatkan bahwa sekolah unggulan itu telah menarik hati para orang tua desa agar anaknya mendapatkan tempat yang layak dalam era pembangunan

ini. Di kalangan orang tua desa, bahkan sudah ada yang mulai menyekolahkan anaknya ke sekolah unggulan sejak SD dan semakin banyak ketika anaknya masuk SMP dan SMA.

¹⁸ Istilah candu ini digunakan oleh Roem Topatimasang dalam judul bukunya “Sekolah Itu Candu” (2010)

Tabel 1 Persentase Pemilihan Lokasi Sekolah Orang Tua kepada Anaknya.

Jenjang Pendidikan	Lokasi Sekolah	Desa					
		Bengawan		Umbul		Gendong	
Diploma/ Sarjana/ Setara	Desa	0	0 %	0	0%	0	0%
	Kota	22	100%	12	100%	13	100%
SMA/SMK/Setara	Desa	6	13%	4	9%	2	5%
	Kota	42	84%	40	51%	39	63%
SMP/Setara	Desa	8	16%	38	79%	23	47%
	Kota	42	84%	10	21%	26	53%
SD/Setara	Desa	50	100%	50	100%	47	94%
	Kota	0	0%	0	0%	3	6%

Sumber : Survei “Modernisasi dan Krisis

Tabel 2 Mutu Sekolah Pemuda Menurut Orang Tua Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Mutu Sekolah	Desa		
		Bengawan	Umbul	Gendong
Diploma/Sarjana/Setara	Sekolah Unggulan Negeri	4	6	5
	Sekolah Unggulan Swasta	3	0	6
	Sekolah Negeri Biasa	9	2	0
	Sekolah Swasta Biasa	7	4	2
SMA/SMK/Setara	Sekolah Unggulan Negeri	10	14	9
	Sekolah Unggulan Swasta	1	0	5
	Sekolah Negeri Biasa	17	25	15
	Sekolah Swasta Biasa	19	5	12
SMP/Setara	Sekolah Unggulan Negeri	7	6	15
	Sekolah Unggulan Swasta	4	0	0
	Sekolah Negeri Biasa	24	41	32
	Sekolah Swasta Biasa	15	0	1
SD/Setara	Sekolah Unggulan Negeri	2	6	9
	Sekolah Unggulan Swasta	1	0	0
	Sekolah Negeri Biasa	36	42	41
	Sekolah Swasta Biasa	9	0	0

Sumber : Survei “Modernisasi dan Krisis Regenerasi Petani”, P2K-LIPI, 2015

Dunia pendidikan sekarang memang tampak menjadi “ladang pertarungan” kelompok nasionalis, liberal, dan Islam radikal. Pertarungan itu tampak nyata dalam pembuatan kurikulum pendidikan sekolah yang walaupun tetap digunakan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi warna enkulturasinya tampak kental di tiga aliran ideologi itu¹⁹. Di dunia pendidikan, kurikulum menjadi penentu pembentuk intelektualitas anak. Kurikulum menjadi kunci untuk membentuk anak didik menjadi investasi sumber daya manusia yang berkualitas atau yang siap pakai. Kurikulum bekerja tanpa disadari seolah hal baru yang harus dipelajari yang menjanjikan harapan pekerjaan masa depan. Selama rezim Orba, kurikulum telah membentuk persepsi tentang pengetahuan dari satu generasi anak ke generasi anak berikutnya hingga melahirkan generasi muda. Karena itu, anak yang lahir dan masuk sekolah kemudian telah dipersepsikan tentang pentingnya pengetahuan itu dan mengejanya.

Berbeda dengan kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah asli Indonesia seperti Taman Siswa, Kayu Tanam, dan pesantren, kurikulum pendidikan sekolah negeri seolah tanpa jiwa kebangsaan yang jelas. Ia hanya berisi pengetahuan yang tidak tumbuh dari dalam jiwa (kebudayaan) masyarakatnya. Ia seperti jatuh dari langit kepada anak tanpa ia tahu hubungannya dengan tem-

pat ia dilahirkan dan dibesarkannya. Sebagian besar anak yang mengenyam pendidikan umumnya justru terasing dari lingkungannya dan menjadi miskin kreativitas karena ada jarak antara pengetahuan yang ia terima di sekolah dengan kebudayaan tempat ia tumbuh. Pikiran-pikirannya tidak tumbuh secara *genuine* melainkan seperti dicangkokkan pengetahuan asing di dalam kepalanya yang terus dipupuk sehingga ia menjadi tenaga kerja yang siap pakai.

Hampir tidak ada anak yang berkeinginan menjadi petani, bahkan seorang anak yang ditanya oleh orangtuanya alasan kenapa tidak mau jadi petani dijawabnya spontan, “karena di sawah panas”. Lalu ia meneruskan, “ingin menjadi polisi”²⁰. Cita-cita anak tidak tercerus begitu saja, tetapi hasil dari penanaman ideologi pendidikan. Ia tidak ingin menjadi petani juga bukan tercerus begitu saja, melainkan karena sekolah tidak mengajarkan ilmu pengetahuan tentang petani, dan orang tuanya yang notabene adalah seorang petani tidak ingin anaknya menjadi petani. Mengapa? Karena ia adalah seorang petani penggarap, yang tidak memiliki lahan sawah sendiri, dan menyadari bukan pekerjaan yang layak untuk anaknya kelak. Orang tua bahkan selalu berangan-angan, “kalau bisa anak lebih baik dari (pekerjaan) orangtuanya sekarang”²¹.

¹⁹ Beberapa pelaku pendidikan mengatakan bahwa Kurikulum 2013 sangat kental dengan nuansa ajaran Islam dari kelompok Islam radikal.

²⁰ Dialog orang tua dengan anak di desa Umbul dalam film dokumenter “Srono Urip” (2015)

²¹ Dialog orang tua dan pemuda di tiga desa dalam film dokumenter “Srono Urip” (2015)

Tabel 3 Mata Pelajaran yang Disukai oleh Murid di Perdesaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pelajaran Yang Paling Disukai	Desa			Total
		Bengawan	Umbul	Gendong	
Diploma dan Sarjana	Bahasa	3	0	1	4
	Pendidikan	4	3	2	9
	Komputer	3	1	2	6
	Teknik	6	0	0	6
	Ekonomi	2	2	6	10
	Ilmu Pengetahuan Alam	2	3	0	5
	Agama	0	1	0	1
	Seni	0	0	0	0
SMA/SMK/Setara	Bahasa	3	9	2	14
	IPA	3	4	2	9
	IPS	4	4	5	13
	Matematika	3	12	2	17
	Komputer	0	0	2	2
	Teknik	9	0	6	15
	Agama	0	1	0	1
	Seni	0	0	1	1
	Olahraga	2	2	1	5
SMP/Setara	Bahasa	1	0	0	1
	IPA	0	0	2	2
	IPS	1	0	2	3
	Matematika	2	1	1	4
	Agama	0	0	0	0
	Seni	0	1	1	2
	PKN	0	1	1	2
SD/Setara	IPA	0	0	3	3
	IPS	0	0	0	0
	Bahasa	0	0	1	1
	Seni	0	0	0	0

Sumber: Survei "Modernisasi dan Krisis Regenerasi Petani", P2K-LIPI, 2015

Tabel 4 Profesi Menarik untuk Masa Depan Menurut Guru Berdasarkan Persepsi Murid

Profesi Menurut Guru Menarik Berdasarkan Persepsi Pemuda	Persentase
Teknisi	7%
Wirausaha	38%
Karyawan Swasta	12%
PNS (Guru, Polisi, TNI)	39%
Dokter	5%

Sumber: Survei "Modernisasi dan Krisis Regenerasi Petani", P2K-LIPI, 2015

Penutup

Diskursus pemuda yang dikendalikan melalui cengkeraman pendidikan sekarang ini telah berimplikasi serius kepada kehidupan pemuda setidaknya pada dua hal berikut: Pertama, pemuda menjadi kehilangan kesempatan untuk berkiprah dalam percaturan politik negara-bangsa sebagaimana yang diperlihatkan para pemuda di masa Orla dalam suatu komunitas nasional yang semarak. Walaupun sistem multipartai sekarang memberi kesempatan kepada pemuda untuk ambil bagian dalam politik baik di daerah maupun nasional tetapi partai politik sekarang lebih banyak dipertanyakan kepentingannya karena KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Kontradiksi ideologi juga jarang kalau bukan hampir tidak pernah terjadi karena hampir semua partai politik menggunakan tradisi ideologi warisan Orba yaitu ideologi tunggal Pancasila, yang cenderung tekstual dan miskin kreativitas pemakaian secara kontekstual. Bukan hanya ruang ekspresi, tetapi juga partisipasi politik pemuda sekarang jauh merosot dibandingkan masa sebelumnya.

Kedua, pemuda menjadi kehilangan kesempatan untuk menemukan jati dirinya karena sistem pendidikan nasional telah menjadikan mereka sebagai “kuda beban” pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi barisan tenaga kerja yang kehilangan jiwa yang berlandaskan pada kebudayaannya (ataupun kebudayaan nasionalnya). Pemuda bahkan terasing dari lingkungan tempat ia dilahirkan dan

dibesarkan terutama lingkungan perdesaan dan pertanian karena sistem pendidikan nasional menjauhkan mereka dari dunia pertanian yang juga menjauhkannya dengan program intensifikasi pertanian, tempat orangtua (bapak) menjadi petani tunggal di dalam sistem pertanian keluarga. Ekonomi-politik pertanian yang menekan kalangan petani kecil secara komersial dan merugikan kaum tani juga menjadi sebab rendahnya minat pemuda desa untuk berkecimpung di dunia pertanian, selain karena politik pendidikan itu.

Daftar Rujukan

- Ananta, Aris (1992). Peta Demografis Pemuda Indonesia: Kini dan Masa Depan. Dalam *Pembangunan Pemuda, Beberapa Dimensi Pemikiran*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan – LIPI.
- Dewantara, Ki Hadjar (1956). *Pidato dalam Upacara Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa oleh UGM kepada Ki Hadjar Dewantara, Jawatan Penerangan DIY*.
- Dewantara, Ki Hadjar (1959). *Demokrasi dan Leiderschap*. Jogjakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa.
- Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1973.
- Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1978.

- Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988.
- Kurniadi, Eddy (1987). *Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia (Analisis Studi Berdasarkan Pendekatan Sejarah dan Sosio-kultural)*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Moertopo, Ali (1978). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- N.N. (1954). *Polemik Kebudayaan Pokok Pikiran St. Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Purbatjaraka, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, Ki Hadjar Dewantara*. Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementarian P.P. dan K.
- Safa'at, Muchamad Ali (2009). *Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004*. Disertasi Fakultas Hukum, Paska Sarjana Universitas Indonesia.
- Santoso, Amir (1992). Pembahasan atas Makalah Akbar Tanjung berjudul Kebijakan Kepemudaan di Indonesia Kini dan Masa Depan. Dalam *Pembangunan Pemuda, Beberapa Dimensi Pemikiran*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan – LIPI.
- Soeharto, Pitut dan Zaenoel Ihsan (1982). *Belenggu Ganas*. Jakarta: Aksara Jayasakti.
- Sukarno, Makmuri (2008). Perguruan Taman Siswa: Kasus Pendidikan Komunitas Menghadapi Negara. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Jilid XXXIV (2).
- Tanjung, Akbar (1992). Kebijakan Kepemudaan di Indonesia, Kini dan masa Depan. Dalam Tirtosudarmo, Riwanto dan Makmuri Sukarno. *Pembangunan Pemuda, Beberapa Dimensi Pemikiran*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan - LIPI.
- Tirtosudarmo, Riwanto dan Makmuri Sukarno (1992). *Pembangunan Pemuda, Beberapa Dimensi Pemikiran*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, LIPI.

KETERGUSURAN ANTARGENERASI DI ZONA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA¹

Tania Murray Li

*Profesor di Department of Anthropology - Centre for Southeast Asian Studies,
The University of Toronto, Canada
tania.li@utoronto.ca*

Abstract

This article explores intergenerational trajectories in Indonesia's oil palm regions. First, I use a broad brush and selected examples from different regions to highlight the long-term, intergenerational dynamics of displacement from the land, and from opportunities to find decent work. Then I draw on primary data from field research in West Kalimantan to take a close-up view on intergenerational dynamics in households and communities tucked around the borders of plantations. Finally I review attempts to regulate plantations, improve their "sustainability", and make them more accountable to local populations.

Keywords: *Intergenerational displacement, Palm oil plantation, Indonesia*

Abstrak

Artikel ini menggali lintasan antargenerasi dalam wilayah perkebunan sawit. Pertama-tama saya memberi pandangan umum menggunakan ilustrasi terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menyorot dinamika jangka panjang antargenerasi terkait ketergusuran dari lahan dan dari peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak. Kemudian, saya menggunakan data primer dari penelitian lapangan di Kalimantan Barat untuk melihat secara dekat dinamika antargenerasi pada keluarga dan masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah perbatasan perkebunan. Setelah itu, saya mengulas upaya-upaya untuk meregulasi perkebunan, meningkatkan "keberlanjutan" perkebunan, dan membuat perkebunan lebih akuntabel bagi penduduk setempat.

Kata Kunci: *Ketergusuran antargenerasi, Perkebunan sawit, Indonesia*

*"Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."—Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (Bruntland Commission), *Our Common Future* (1987)*

¹ Artikel ini akan terbit dalam versi bahasa Inggris di Park dan White (eds.) (2017).

Pengantar

Selama berkendara berjam-jam menyusuri tapak jalur ban sepanjang jalan membosankan yang membelah hamparan luas perkebunan sawit di Pulau Kalimantan, kami dihadapkan pada pertanyaan menohok mengenai inti kebutuhan manusia akan keberlanjutan (*sustainability*) sebagaimana didefinisikan oleh *Bruntland Commission*: kebutuhan siapa yang saat ini dipenuhi oleh bentuk pembangunan semacam ini? Dan bagaimana generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri di tengah kancah yang ditampuki oleh perkebunan-perkebunan berskala besar?

Dua pertanyaan tersebut berkisar di seputar tema keberlanjutan yang dapat ditanggapi pada banyak tataran. Namun, pada tulisan ini saya hanya menaruh perhatian pada titik produksi kelapa sawit yang saya sebut sebagai “zona perkebunan”. Zona-zona ini terdiri dari banyak perkebunan, yang masing-masing membentang pada wilayah seluas 25 hingga 30,000 ha. Perkebunan-perkebunan tersebut dimiliki oleh perusahaan perkebunan nasional dan transnasional. Sebagian di antaranya meliputi juga “perkebunan rakyat” yang tanahnya dimiliki oleh petani kecil, tetapi ditanami oleh dan terikat kepada perusahaan “induk”. Sebagian lagi dimiliki oleh pihak-pihak perseorangan (biasanya pejabat pemerintah atau perkebunan, politisi atau kroni mereka) yang mendapatkan tanah melalui pencaplokan atau pembelian.

Dalam pengertian saya zona perkebunan mencakup ruang-ruang residual atau “kantong-kantong” yang menyempil di

antara perkebunan-perkebunan tempat pihak-pihak pemegang tanah saat ini atau sebelumnya (umumnya anggota masyarakat adat atau “pribumi”), bersama dengan para pekerja perkebunan saat ini atau sebelumnya (biasanya para migran), bekerja untuk mencari penghidupan. Terlepas dari apakah mereka memiliki lahan pertanian sendiri atau bekerja untuk perkebunan, kehidupan mereka sangat dibentuk oleh tempat keberadaan mereka di suatu jenis ruang—yakni zona perkebunan—dengan dinamika material, politik, dan sosial tersendiri.

Pada 2014, data statistik resmi Indonesia mencatat luas lahan kelapa sawit sebesar 10,7 juta hektar. Lahan tersebut 52% dimiliki oleh perusahaan swasta, 7% oleh BUMN, dan 41% oleh perkebunan rakyat (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015, 9).² Ada pula lahan seluas 6-7 juta hektar yang berdasarkan laporan dikuasai oleh sejumlah perusahaan, tapi belum dikembangkan (USDA, 2013: 1). Semua perkebunan yang mengelola lahan di atas 25 hektar semestinya memiliki izin perkebunan. Meski demikian, terdapat perkebunan-perkebunan tak berizin yang luasnya mencapai ratusan hektar, dan luas total area perkebunan rakyat mandiri (<25 ha) tidak diketahui (Molenaar, 2013: 8).³

² (Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015: 9). Untuk tinjauan bernas tentang sektor kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, lihat (Cramb and Curry, 2012; Cramb dan McCarthy, 2016). Pada 2015, perusahaan publik yang terdaftar di pasar saham menguasai sekitar 50% dari wilayah perkebunan komersial Indonesia, sementara sisanya ada di tangan modal swasta, terutama pemodal Indonesia (Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, 2016: 10)

³ Sebuah studi di provinsi Riau mengungkapkan bahwa 1,8 juta ha perkebunan milik 190 perusahaan

Pihak-pihak yang mengusung industri ini menargetkan total luas 20-30 juta hektar.

Saat ini Indonesia menyumbang 50% pasokan ekspor minyak sawit dunia, yang sebagian besar dikirim ke India untuk digunakan sebagai minyak goreng (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015: 58). Minyak tersebut digunakan juga dalam beragam jenis produk makanan, deterjen, dan kosmetik, serta dapat digunakan sebagai bahan bakar hayati. Peluang pasar yang besar tersebut membuai perusahaan-perusahaan perkebunan transnasional untuk memanfaatkan kemerosotan harga pada 2015 dengan cara membeli perusahaan-perusahaan yang tengah limbung dan kemudian memperluas perkebunan mereka (Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, 2016).

Pohon sawit diregenerasi setiap dua puluh tahun dan perkebunan dapat terus berproduksi tanpa batas selama cukup bahan kimia pertanian digunakan. Karena itu, tak ayal jika banyak pihak meraup pemasukan melimpah dari perkebunan sawit dalam bentuk laba, pajak, biaya perizinan, suap, dan pungli. Namun, seberapa jauhkah zona-zona perkebunan ini dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun mendatang?

Pihak-pihak yang mendukung perkebunan sawit menyorot jumlah lapangan kerja yang diciptakan, tetapi pada kenyataannya, jumlahnya ternyata sedikit dan lapangan kerja yang tersedia pun berkualitas rendah. Perkebunan sawit rata-rata memerlukan seorang pekerja untuk setiap lima hektar (jauh lebih sedikit

tidak berizin, dan tidak melaporkan secara konsisten dalam statistik resmi (Anon, 2016).

daripada perkebunan karet, yang rasionya adalah 1:1).⁴ Sebagian warga perkebunan mungkin memiliki peluang lebih baik, tetapi banyak pula warga yang terpapar dampak negatifnya, seperti kooptasi terhadap lembaga-lembaga adat, perusakan hutan, pencemaran air, dan hilangnya akses ke masa depan pertanian yang beragam dan lentur.⁵ Saya berargumen bahwa dampak-dampak negatif tersebut bukanlah kesalahan perusahaan-perusahaan busuk yang dapat dibenahi dengan standar-standar yang lebih ketat. Alih-alih demikian, dampak-dampak itu terbangun tetap dalam arus pengembangan zona perkebunan ketika kantong-kantong lahan yang tersisa semakin ditanami pohon sawit.

Dipandang dari perspektif tanah dan tenaga kerja, perkebunan memiliki dinamika penggusuran yang mendasar. Pada konteks seperti Malaysia, yang hanya 13% penduduknya bekerja di sektor pertanian dan kaum mudanya memiliki beragam kesempatan kerja, ekspansi perkebunan tidak mesti menjadi sebuah bencana (Cramb 2007). Akan tetapi, di Indonesia, yang 38% penduduknya bekerja di bidang pertanian sementara lapangan pekerjaan lain langka dan berupah rendah, pertanian masih menawarkan daya tarik penghidupan bagi

⁴ (Bank Dunia dan Perusahaan Keuangan Internasional, 2011: 16, 58) mengutip estimasi industri 1:5. Pemerintah Indonesia menggunakan rasio 2:2 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015). Data perusahaan dari dua perkebunan di Kalimantan Barat menunjukkan rasio 1:6 dan 1:10 (Li, 2015: 22, 24). Perkebunan sawit Malaysia melaporkan angka rasio 1:10 (Abdullah, Ismail, dan Rahman, 2011).

⁵ (Colchester dan Chao, 2013; Colchester dkk., 2006; Li, 2015; Marti, 2008; Siagian dkk., 2011; Wakker, 2005; Institute for Ecosoc Rights, 2014).

mereka yang memiliki akses ke tanah (Cramb dan McCarthy 2016). Bagi penduduk yang tinggal dan terhimpit di zona perkebunan—yang jumlahnya telah mencapai delapan juta dalam perhitungan saya—⁶ masa depan tampak suram.

Untuk menggali lintasan antar-generasi dalam wilayah perkebunan sawit, pertama-tama saya memberi pandangan umum menggunakan ilustrasi terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menyorot dinamika jangka panjang antargenerasi terkait ketergusuran dari lahan dan dari peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak. Setelah itu, saya menggunakan data primer dari penelitian saya di Kalimantan Barat untuk melihat secara dekat dinamika antargenerasi pada keluarga dan masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah perbatasan perkebunan. Kemudian, saya mengulas upaya-upaya untuk meregulasi perkebunan, meningkatkan “keberlanjutan” perkebunan, dan membuat perkebunan lebih akuntabel bagi penduduk setempat.

⁶ Dengan asumsi seorang pekerja per lima hektar dan sebagian pekerja laki-laki hidup sendiri tanpa keluarga, saya memperkirakan rata-rata tiga orang (satu pekerja plus dua anggota keluarga) per lima hektar. Jadi, sebelas juta ha – 6,6 jiwa, plus orang lain yang hidup di kantong-kantong dan menyediakan layanan, sekitar delapan juta. Perhitungan lain didasarkan pada populasi kecamatan-kecamatan yang jenuh. Di Kecamatan Meliau, Kalimantan Barat, pada 2015, terdapat 48 ribu warga, dan 65 ribu ha perkebunan (di total lahan seluas 150 ribu ha). Dengan demikian, ada 0,74 orang per ha perkebunan, dan total sekitar delapan juta.

Perkebunan dan Ketergusuran Antargenerasi

Bagian ini mengupas evolusi zona-zona perkebunan seiring peralihan dari wilayah ekonomi garis depan (*frontier economies*) dengan lahan berlimpah menjadi wilayah jenuh yang didominasi perkebunan kelapa sawit dan penduduknya nyaris tidak memiliki tanah hidup menyempil di sudut dan celah perkebunan. Mereka berjuang demi mendapat kerja yang layak. Pengalaman generasi yang terlahir dalam kondisi kelangkaan lahan berbeda dengan pengalaman generasi yang hidup di garis depan perkebunan saat peluang baru masih terbuka lebar.

Pencaplokan Tanah Terjadi secara Perlahan

Istilah “*land grab*,” yang banyak dibahas di lingkaran-lingkar akademik dan kebijakan sejak 2008, mungkin menyesatkan. Istilah “*grab*” (penyerobotan, perebutan) menyiratkan tindak pencaplokan secara tiba-tiba ketika penduduk perdesaan kehilangan akses ke lahan pertanian, rumah, dan desa mereka. Pencaplokan semacam ini memang terjadi di Indonesia dan sering membawa dampak kekerasan langsung—pohon-pohon karet dan buah diruntuhkan *bulldozer*, rumah-rumah dibakar, dan warga pemrotes dikejar atau dianiaya preman. Meski demikian, pencaplokan tanah semacam ini memakan biaya material. Perlu uang untuk menyewa *bulldozer* dan mengamplopi satuan polisi atau militer yang dikerahkan. Aksi ini juga mengandung biaya politik karena ada kemungkinan paparan perusahaan terhadap liputan pers, pejabat pemerintah terhadap protes massa, atau

kritik dari atasan karena gagal mengatur distrik mereka secara damai (Li, 2015)

Di Indonesia pasca-Soeharto, pencampuran lahan secara langsung yang diikuti pengusuran semakin menurun. Pejabat takut dituduh melanggar HAM sehingga akan mencoreng nama mereka serta seluruh pemerintahan. Strategi yang semakin lazim dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan guna memperoleh persetujuan warga atas kehadiran perusahaan di tanah mereka. Sebenarnya, di era Soeharto pun kesepakatan warga lebih disukai karena dalih di balik ekspansi perkebunan adalah untuk menciptakan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga. Meski demikian, tidak jelas mengapa warga akan sepakat untuk menyerahkan tanah adat luas mereka ke tangan perusahaan.

Ada dua alasan yang paling banyak dilaporkan berhubungan dengan tindakan tersebut.

Pertama, perusahaan dan pejabat pemerintah melakukan intimidasi dan manipulasi yang membuat pemegang tanah adat merasakan ketidakpastian status hukum tanah mereka. Hukum di Indonesia kurang mengakui hak-hak atas tanah adat. Selain itu, tidak adanya dokumen atau surat penyerahan hak resmi membuat pemegang tanah semakin yakin mereka tidak dapat mempertahankan tanah dari perusahaan yang datang sambil mengacung-acungkan izin lokasi.

Warga mungkin memutuskan lebih baik menjual, meski ketentuan-ketentuan jual-belinya tidak menguntungkan, daripada membiarkan tanah direnggut dari

tangan mereka tanpa secuil kompensasi.⁷ Pihak-pihak perusahaan rajin mengooptasi para pemimpin desa dan pemangku adat untuk membantu memaksa sanak saudara dan tetangga agar melepas tanah mereka, dan dalam prosesnya mengikis kredibilitas mereka sendiri sebagai advokator. Dalam kasus ini, di beberapa daerah bahkan dibentuk “tim-tim pembebasan tanah” yang beranggotakan pejabat pemerintah sehingga pemegang tanah tidak dapat mengharapkan bantuan mereka (Sirait, 2009).

Kedua, pemegang tanah mungkin tertarik oleh janji-janji yang diumbar perusahaan kelapa sawit, terutama janji pembangunan jalan. Tanpa jalan warga tidak dapat mengakses sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan sarana serta prasarana lain yang mereka butuhkan sebagai warga negara dan masyarakat modern. Meskipun mau, mereka juga tidak dapat menanam sawit sendiri karena buah kelapa sawit harus diangkut ke pabrik minyak kelapa sawit dalam waktu 48 jam. Ini membutuhkan jalan yang bisa dilalui truk; tandan-tandan sawit terlalu besar untuk diangkut dengan sepeda motor. Selain itu, perusahaan mungkin juga berjanji untuk mengembangkan perkebunan rakyat sebagai imbalan atas lahan yang dilepaskan, walau pemenuhannya sering mengecewakan. Di sebagian Sumatera, tempat petani umumnya memiliki organisasi kuat, kesepakatan yang dibuat mungkin menguntungkan bagi

⁷ Kompensasi yang dibayarkan perusahaan untuk memperoleh lahan konon telah naik hingga 500 dolar AS per ha di Kalimantan dan 2000 dolar AS di Sumatera (Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, 2016: 22), namun masih terjadi praktik pembayaran minimal dan pencampuran secara tiba-tiba (Institute for Ecosoc Rights, 2014).

perkebunan rakyat (Feintrenie, Chong, dan Levang, 2010: 387, 390). Akan tetapi, di Kalimantan, kesepakatan umumnya meminta pemegang tanah adat untuk melepaskan sepuluh hektar lahan kepada perusahaan, dan sebagai imbalannya, perusahaan sepakat untuk menanam dua hektar lahan dengan kelapa sawit untuk pemegang lahan, tetapi dengan tetap mengutip biaya pengembangan lahan kepada pemegang tanah. Para pemegang tanah menyesali hilangnya tanah akibat kesepakatan-kesepakatan tersebut. Namun, mereka berharap untuk dapat mengonversi sebagian tanah mereka yang tersisa menjadi perkebunan “mandiri” dan masih meraih kondisi yang lebih baik.⁸

Alasan ketiga yang membuat warga desa akhirnya sepakat melepas lahan ada pada jantung dinamika antargenerasi. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit sadar akan risiko kemarahan pemegang lahan dan keriuhan media dan karenanya mereka tidak mengambil *seluruh* lahan warga. Alih-alih demikian, wilayah pemukiman yang ada dijadikan “kantong-kantong”, dibiarkan tidak terganggu, dan dikelilingi lahan-lahan pertanian. Tanah yang ada mungkin masih cukup bagi generasi saat ini untuk terus bertani atau berkebun seperti sedia kala

atau, warga mungkin setidaknya masih bisa menyadap pohon karet dan memanen buah, walaupun jarang mencukupi untuk mempertahankan produksi padi gogo lewat pertanian berpindah. Jika masih ada lahan hutan primer di sekitar, warga masih bisa berharap generasi selanjutnya akan membuka lahan sesuai kebutuhan.

Terbiasa hidup di daerah perbatasan hutan membuat warga mungkin tidak merasakan kelangkaan lahan (Li, 2013). Baru di kemudian hari, saat kantong-kantong tersebut ternyata terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang, dan lahan hutan sekitar telah dipenuhi perkebunan, para pemegang lahan adat mungkin akan merasakan “pencaplokan” lahan sebagai kehilangan permanen peluang pertanian. Sebagaimana diungkapkan seorang tetua di lokasi penelitian saya di Kalimantan, “saat perusahaan pertama kali datang, kami mengira lahan kami seluas samudera”. Namun, semakin banyak perusahaan masuk kini anak cucunya tidak memiliki tanah. Mereka terdesak di lautan perkebunan sawit tanpa memiliki atau berkesempatan memiliki bagian karena harga tanah di kantong-kantong atau lahan-lahan non perkebunan yang tersisa terlampaui jauh dari jangkauan kemampuan mereka.

Di tengah ketergusuran yang direkayasa perusahaan-perusahaan perkebunan, terdapat pula dinamika ketergusuran “antarorang-orang” ketika para pemegang lahan adat, pendatang, dan kelompok elite lokal saling bersaing untuk mendapatkan lahan yang menjadi bernilai tinggi. Di mana pun zona perkebunan berkembang dan jalan

⁸ Prestasi buruk investor swasta dalam memperhatikan perkebunan rakyat diakui dalam (World Bank dan International Finance Corporation, 2011; Molenaar 2013). Program perkebunan rakyat yang dikelola pemerintah dan perusahaan perkebunan dijelaskan dalam (Cramb dan McCarthy 2016, 53-62; McCarthy, Gillespie, dan Zen 2012; Molenaar 2013, 44-53). Mengenai antusiasme pemilik perkebunan rakyat untuk menanam kelapa sawit, lihat (Rist, Feintrenie, dan Levang 2010; Feintrenie, Chong, dan Levang 2010).

baru dibangun, para makelar dan elite lokal dengan cepat akan mencaplok atau membeli lahan antara yang masih terselip di perkebunan-perkebunan yang ada. Kelompok elite ini mencakup pemilik perkebunan kelapa sawit rakyat yang kaya, pejabat, politisi, guru, pedagang, dan manajer perkebunan. Mereka menyewa pekerja untuk menanam kelapa sawit di perkebunan “mandiri” atau menahan tanah untuk kemudian dijual lagi. Orang-orang yang tadinya memegang lahan diintimidasi atau dibujuk untuk menjual lahan.⁹

Saat meneliti proses-proses ini di Sumatera, John McCarthy menemukan bahwa separuh pemilik atau pemegang lahan asli di sebuah desa tidak punya tanah lagi sejak masuknya kelapa sawit. Mereka “bergantung pada ekonomi kelapa sawit namun terpinggirkan di dalamnya” (McCarthy, 2010: 827). Perlu modal, meski tidak selalu besar, untuk meraup untung dari perkebunan kelapa sawit mandiri. Di sebuah sekolah yang dikunjungi, McCarthy menemukan sembilan dari tiga belas guru menggunakan gaji tetap mereka sebagai basis (jaminan) pinjaman guna membeli lahan dan membuka perkebunan sawit rakyat; seorang bandar (*broker*) memulai perkebunan berskala kecil, dan sepetak demi sepetak, akhirnya mengelola lahan seluas 300 ha (McCarthy, 2010: 841).

Dinamika ketergusuran “antarwarga” dapat melibatkan pihak luar, tetapi hal ini juga terjadi dalam skala kecil ketika sebagian warga meningkat kesejahtera-

annya, sementara tetangga dan sanak saudara mereka kehilangan tanah. Pendapatan dari kelapa sawit menambah penghasilan gaji PNS yang rendah dan dapat menopang biaya hidup tinggi kaum muda yang belajar atau bekerja di kota. Perkebunan kelapa sawit rakyat jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan berkebun karet atau bertani padi gogo secara berpindah. Buruh bisa disewa untuk pekerjaan yang berat atau memerlukan keahlian, dan pemilik dapat mengelola perkebunan dari jauh lewat pihak yang diberi kuasa (Feintrenie, Chong, dan Levang, 2010; McCarthy, 2010: 845). Terlepas dari apakah anak-anak mereka kelak bercita-cita mengelola usaha tani atau perkebunan sendiri, para orang tua yang mampu membiayai anak-anak mereka dengan penghasilan dari perkebunan berharap anak-anak mereka bisa sejahtera dari kelapa sawit. Sebaliknya, masa depan anak-anak yang tidak mewarisi tanah sangatlah terbatas.

Secara teoretis, ekonomi kelapa sawit yang tumbuh pesat seharusnya dapat memberi orang-orang yang tidak memiliki tanah sumber-sumber penghasilan sebagai buruh perkebunan atau lewat penyediaan layanan-layanan bagi masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi, pada praktiknya, peluang kerja ternyata sedikit dan tidak tersebar merata.

Buruh Perkebunan: Ketergusuran Berlapis Tiga

Saat orang tergusur dari tanah mereka dan tidak terserap sebagai pekerja mereka

⁹ Untuk contoh di Sumatera dan Kalimantan, lihat (McCarthy, Vel, dan Afiff 2012; Potter dan Badcock 2004; Rist, Feintrenie, dan Levang 2010; Potter 2012).

mengalami ketergusuran ganda: tanahnya dibutuhkan, tetapi mereka tidak (Li, 2011). Sebagaimana telah diulas sebelumnya, serapan bersih tenaga kerja perkebunan sawit rendah karena perkebunan menerapkan skala rata-rata seorang pekerja untuk setiap lima hektar. Selain ketergusuran ganda ini, mereka dihadapkan juga pada bentuk ketergusuran ketiga, yakni pemilihan pekerja berdasarkan kriteria etnis, umur, dan gender yang sangat ketat. Seperti halnya penggusuran tanah, ketergusuran dari peluang mengakses kerja berbayar memiliki dinamika sendiri yang berubah seiring waktu.

Para petani yang tinggal di tepian garis depan ekonomi perkebunan yang semakin mengekspansi di Sumatera pada 1870-an tidak perlu bekerja di perkebunan karena mereka masih memiliki akses mandiri ke lahan pertanian. Meskipun perkebunan mengambil tanah mereka, mereka masih dapat pindah dan membuka lahan di tepian hutan. Inilah alasan awalnya mengapa pekerja migran didatangkan ke Sumatera: orang-orang yang tinggal di sana sedikit dan mereka tidak ingin terlibat dalam pekerjaan tersebut (Stoler, 1995; Breman, 1989; Pelzer, 1978).

Kondisi serupa terjadi di garis-garis depan ekspansi perkebunan yang ada saat ini. Pekerja harus didatangkan dan mereka harus dibayar dengan upah yang cukup baik agar mereka tetap bertahan di sana. Perkebunan juga mungkin harus mengatasi perputaran pekerja yang banyak terjadi. Karena tanah di garis depan perkebunan relatif murah, pekerja migran cenderung menetap cukup lama hingga mereka

mengumpulkan cukup uang untuk membeli tanah dan menanam kelapa sawit sendiri (Potter, 2012). Karena itu, bagi pekerja perkebunan di wilayah-wilayah garis depan membuka peluang kerja berupah memadai dan peluang masa depan untuk menjadi pengelola perkebunan sawit rakyat yang berhasil.

Kondisi lapangan kerja berubah drastis saat daerah garis depan tertutup. Mereka yang dulu pemilik tanah terperangkap di kantung-kantung tanpa tersedia cukup lahan untuk bertani. Mereka terpojok bersama dengan eks pekerja perkebunan yang ingin membeli tanah, tetapi tidak sanggup mengejar harganya. Keadaan ini banyak ditemukan di zona perkebunan Sumatera pada 1950-an, ketika penduduk lokal berbaur dan eks pekerja perkebunan sama-sama tinggal di daerah garis depan perkebunan. Sebagaimana ditunjukkan Ann Stoler (1995), kemunculan otonomi perkebunan rakyat di kantung-kantung yang diamatinya pada 1970-an menimbulkan kesalahpahaman. Penguasaan lahan secara tidak memadai mengandung arti bahwa petani masih harus mencari kerja di perkebunan untuk bertahan hidup. Perkebunan memanfaatkan cadangan tenaga kerja yang ada untuk mengurangi angkatan kerja tetap mereka dan mulai mengandalkan pekerja lepas yang disewa dengan upah harian rendah tanpa diberi jaminan apa pun.

Di Indonesia saat ini, kasualisasi pekerjaan perkebunan kelapa sawit banyak dilaporkan.¹⁰ Hal ini merupakan tren yang

¹⁰ (Siagian dkk. 2011; Sinaga 2013; Sirait 2009; Institute for Ecosoc Rights, 2014). Lemahnya perlindungan dan memburuknya ketentuan-

sangat mudah diprediksi. Seiring jenuhnya zona perkebunan, orang-orang yang tidak memiliki lahan sangat membutuhkan pekerjaan dan perkebunan tidak lagi harus menawarkan pekerjaan dan kondisi kehidupan yang layak guna menarik dan mempertahankan pekerja. Karena itu, setiap generasi baru yang lahir di zona perkebunan sangat mungkin mengalami kondisi kerja yang lebih buruk daripada yang dialami generasi sebelumnya. Perubahan seperti ini menjadi bagian arah pengembangan zona perkebunan sebagai akibat struktural dari upaya “normal” ke arah efisiensi dan laba perusahaan. Hal ini hanya dapat ditanggulangi oleh undang-undang perlindungan tenaga kerja dan penagakannya secara kuat atau lewat tekanan pekerja secara terorganisasi yang semuanya sama sekali tidak ada di Indonesia saat ini karena alasan-alasan yang akan saya kemukakan kemudian.

Orang-orang yang mencari kerja di perkebunan menghadapi ketergusuran jenis ketiga ketika manajer mencoret nama mereka berdasarkan kriteria umur, jenis kelamin, dan status migran. Karena pekerjaan lapangan di perkebunan sawit hampir tidak termekanisasi, manajer memprioritaskan kemampuan fisik pekerja. Hanya laki-laki muda yang sehat yang mampu melakukan pekerjaan berat memanen sawit. Setelah itu, karena memanen adalah keahlian yang perlu waktu lama untuk dikuasai dan penanganan panen yang terlambat atau salah dapat menimbulkan kerugian, para manajer mengkhususkan pekerjaan ini untuk tenaga

ketentuan ketenagakerjaan merupakan kecenderungan yang mendunia (Hurst 2005).

kerja inti, menetap, dan migran yang jumlahnya sedikit. Mereka berargumen bahwa dibandingkan pekerja lepas atau “lokal”, tingkat kehadiran pekerja migran setiap hari lebih dapat diandalkan, dan hal ini sering memunculkan stereotip “pribumi malas” yang digunakan untuk menjustifikasi pilihan perekrutan pekerja (Alatas, 1977; Dove, 1999).

Kriteria pemilihan (dan pencoretan) saling bersinggungan, melahirkan pola bahwa laki-laki “lokal” berusia berapa pun, laki-laki migran berusia lebih tua, dan semua perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan panen. Sebaliknya, perkebunan lebih memilih perempuan “lokal” yang berasal dari daerah-daerah kantung dan tidak memiliki tanah untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan karena mereka dapat dipekerjakan secara kasual dengan upah amat rendah. Mereka juga mudah didisiplinkan karena begitu besarnya kebutuhan mereka akan pekerjaan atau perkebunan mungkin menyisakan pekerjaan ini untuk istri para pemanen sebagai strategi untuk mempertahankan keberadaan laki-laki pemanen mahir yang dianggap sebagai komoditas langka.

Sebagai akibat proses-proses ini, akses pekerjaan di zona kelapa sawit dengan upah yang layak sangatlah terbatas dan selektif. Banyak orang yang tinggal di zona perkebunan tidak dapat mengaksesnya atau kehilangan akses seiring penuaan usia dan menumpuknya calon pekerja pada setiap generasi. Keluarga bercerai-berai karena di antara anggota keluarga yang berpotensi kerja ada yang ditolak dan ada yang diserap oleh ekonomi berbasis kelapa sawit ini.

Laki-laki muda maupun tua yang berasal dari kantung-kantung tersebut mungkin harus pindah keluar mencari kerja di tempat lain, sedangkan istri dan anak-anak perempuan mereka terus menetap untuk bekerja kasual di perkebunan. Sebaliknya, laki-laki pekerja pendatang juga meninggalkan istri dan anak mereka di tempat asal—banyak yang berasal dari pulau lain—sementara mereka bekerja sendiri di zona perkebunan dan mengumpulkan uang untuk dikirim ke rumah.

Keluarga yang terfragmentasi berdampak pada semua anggotanya, terutama para orang tua yang harus berjuang memenuhi kebutuhan material dan emosional generasi selanjutnya. Kondisi hidup dan kerja yang tercipta di zona perkebunan jauh berbeda dengan gambaran kehidupan yang ditampilkan pada brosur-brosur mengilap industri kelapa sawit, yang memperlihatkan para pekerja dengan rumah-rumah yang tertata rapi serta putra-putri mereka yang berbondong-bondong pergi ke sekolah perkebunan. Kondisi kerja demikian, andai pun ada, hanya terbatas bagi kelompok kecil pekerja inti perkebunan. Bahkan kelompok ini pun semakin terancam seiring alih daya yang semakin gencar dilakukan perusahaan dan penurunan uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain bagi pekerja inti (Li in press). Sebagian besar pekerjaan perkebunan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang kondisi kerja dan kehidupannya penuh tantangan dan semakin memburuk seiring berjalannya waktu.

Apakah Kondisi Tak Berlahan (*Landlessness*) Direncanakan?

Tidak jelas apakah perusahaan-perusahaan perkebunan sudah mengantisipasi sejak awal manfaat mempekerjakan tenaga kerja murah dari kelompok-kelompok warga tak berlahan yang mereka ciptakan selama ini. Perencanaan semacam ini memerlukan wawasan panjang dan kerjasama antar-perusahaan yang keduanya tidak lazim dalam budaya korporat. Pihak yang seharusnya memiliki rencana jangka panjang adalah pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota, tempat bagi tata ruang “terdesentralisasi” seharusnya dilakukan. Sayangnya, pandangan jangka panjang semacam ini dihadang oleh insentif uang kilat yang terus mengalir ke pundi-pundi pejabat dan politisi yang melancarkan proses pengeluaran izin perkebunan dan turut melindungi kepentingan perusahaan seraya mengakumulasi kepemilikan lahan untuk mereka sendiri.¹¹ Karena itu, perkebunan terus berekspansi tanpa memikirkan kebutuhan lahan bagi generasi mendatang.

Tren ekspansi perkebunan yang tidak terbendung saat ini di sebagian Kalimantan sepertinya diskenariokan untuk mengulang apa yang pernah terjadi di sabuk perkebunan Sumatera. Hal ini bermula dari kemunculan perkebunan-perkebunan perintis pada sekitar 1870 yang terus bertambah hingga pada 1942 petak-petak perkebunan yang nyaris menyambung tanpa putus tersebut mencapai luas satu juta hektar. Saat itu penguasa kolonial tidak membatasi ekspansi perkebunan dengan tujuan untuk mencadangkan tanah bagi penduduk

¹¹ Lihat (McCarthy, Gillespie, dan Zen, 2012; Varkkey, 2012; McCarthy, 2010)

pribumi saat itu atau untuk generasi mendatang.¹²

Serupa dengan itu, terdapat pula jurang kesenjangan yang amat lebar pada rencana tata ruang saat ini. Pada 2014, *Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan* mengalkulasi bahwa di provinsi Kalimantan Barat, dari luas tanah total sebesar 14,4 juta hektar, 4,8 juta hektar di antaranya dialokasikan untuk perusahaan kelapa sawit, 1,5 juta hektar untuk 651 perusahaan pertambangan, 3,7 juta hektar untuk 151 perusahaan kayu, dan 3,7 juta hektar untuk hutan lindung.

Alokasi ini hanya menyisakan 0,7 juta hektar saja untuk pertanian, perumahan, dan kebutuhan prasarana bagi 4,3 juta jiwa penduduk. Abai terhadap penyempitan lahan ini, pemerintah provinsi malah mengusulkan untuk mengalihkan 1,5 juta hektar lagi lahan untuk perkebunan kelapa sawit.¹³ Setelah itu, pada 2015, Departemen Transmigrasi yang mengalami perombakan (kini bernama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) menyasar Kalimantan Barat sebagai provinsi tujuan penempatan empat juta keluarga dari pulau-pulau padat Jawa dan Bali.

¹² Penguasa kolonial berdebat panjang mengenai seberapa luas lahan yang diperlukan populasi lokal untuk produksi pangan, dan untuk berapa generasi penyediaan tersebut harus diberikan kepada mereka, sementara ekspansi perkebunan terus berlanjut tanpa kendali (Pelzer, 1978).

¹³ Hadinaryanto, Satria Eka. Mongabay. 2014. Special Report: Palm oil, politics, and land use in Indonesian Borneo (Part I). <http://news.mongabay.com/2014/0424-Hadinaryanto-palmoil-kalimantan.html#ixzz3c5PFVyg5>. Diakses pada 24 April 2014.

Menurut rencana, transmigran (termasuk pensiunan tentara) akan ditempatkan di wilayah perbatasan dengan Malaysia, dekat dengan lokasi perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tenaga kerja.¹⁴ Berhubungan dengan fenomena ini, politisi provinsi setempat membunyikan sirene tanda bahaya dengan argumen bahwa kedatangan transmigran dalam jumlah besar akan semakin mengurangi akses atas lahan bagi penduduk asli Melayu dan Dayak.¹⁵

Dinamika ketergusuran akibat transmigrasi berlapis tiga. Program tersebut menggusur pemilik tanah secara langsung melalui pemerolehan lahan secara resmi maupun secara tak langsung seiring para transmigran yang kerap membeli tanah dari penduduk sekitar yang kelak akan mereka tanami kelapa sawit secara mandiri (Potter, 2012). Seiring waktu, program ini juga menggusur para transmigran itu sendiri. Seperti pada masa lalu, berdasarkan rencana transmigrasi yang baru, setiap keluarga hanya akan dialokasikan lahan seluas dua hektar. Kalaupun lahan tersebut subur dan keluarga tersebut mampu mengelolanya, program ini tidak menganggarkan kebu-

¹⁴ Tambun, Lenny Tristia. Jakarta Globe, 2015. Government to Relocate 3.5m Families Under Revived Transmigration Scheme. <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/government-relocate-3-5m-families-revived-transmigration-scheme/>. Diakses pada 22 September 2015. ; kemendes.go.id/berita/1393/transmigrasi-perbatasan-menteri-marwan-ingin-wujudkan-perkebunan-rakyat.

¹⁵ Yannur, Arie. Kompasiana, 2015. Menolak Transmigrasi di Kaltara & Kalbar. http://www.kompasiana.com/arie.yannur/menolak-transmigrasi-di-kaltara-kalbar_55294d78f17e61045c8b45a3. Diakses 16 Maret 2015.

tuhan tanah bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-cucu para transmigran ini akan menggembungkan populasi angkatan kerja regional dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja laki-laki muda Jawa yang memang diincar para manajer perkebunan. (Li, 2016). Keadaan ini mungkin timbul tanpa disengaja sebagai dampak bawaan lemahnya perencanaan program transmigrasi, tetapi ternyata ada kemiripan dengan visi kaum pemilik perkebunan Belanda. Di Sumatera pada 1932, para anggota Asosiasi Pemilik Perkebunan Deli mengantisipasi manfaat mendatangkan transmigran dari Jawa yang kelak akan menjadi angkatan kerja yang tak bertanah. Cakrawala waktu dieksplicitkan dalam kutipan berikut:

Andaikata jumlah pemukim meningkat sebagai akibat banyak anak keturunan mereka, pelan-pelan tanah yang diberikan kepada mereka akan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka—dengan kata lain, jika kelebihan penduduk dan kemiskinan sama-sama berkembang luas—penduduk yang kelebihan itu akan terpaksa mencari peluang kerja di perkebunan, dan akan tercapai keadaan yang diinginkan—yakni terciptanya persediaan angkatan kerja lokal.” (1932:15 dikutip dalam Stoler, 1995: 214n23).

Akhirnya, kaum pemilik perkebunan di Deli gagal mencapai kesepakatan mengenai strategi terbaik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka dan mereka kemudian dihantam oleh serangkaian peristiwa yang terjadi (depresi pada 1930-an, perang, dan kemerdekaan). Kini, ekspansi perkebunan dan kedatangan transmigran berpadu, meniscayakan generasi selanjutnya tidak bertanah sebagai dampak bawaan yang nampaknya tak direncanakan dari program

yang bertujuan eksplisit untuk meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan pembangunan di Kalimantan.

Untuk menyimpulkan argumen saya sampai titik ini, penilaian terhadap kapasitas produksi zona-zona perkebunan jenuh untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan mendatang perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan tanah dan penilaian tersebut harus diperluas guna mencakup proses-proses panjang lintas generasi. Seluruh bentuk-bentuk ketergusuran yang telah saya paparkan dapat diperkirakan sebelumnya karena bentuk-bentuk tersebut menjadi bagian dari pola pengembangan zona perkebunan. Meski demikian, dari sudut pandang pemilik tanah saat ini dan pejabat pemerintah yang memikirkan hadirnya perkebunan baru, efek jangka panjang kejenuhan mungkin tidak terlalu terasa, atau hal tersebut diabaikan demi kepentingan-kepentingan yang lebih segera.

Kondisi tak berlahan (*landlessness*) generasi mendatang merupakan hal yang seharusnya dikhawatirkan para perencana tata ruang, tetapi sayangnya mereka ternyata tidak mengkhawatirkannya. Pemegang tanah adat tidak mengantisipasi arahan ke depan atau mereka mungkin memang tidak dapat mencegahnya. Perkebunan terus berekspansi, bahkan di provinsi seperti Kalimantan Barat, tempat sejak lama terjadi resistensi lokal menentang minyak sawit berbasis perkebunan, yang didukung kuat oleh sejumlah LSM yang berkampanye atas nama penduduk desa.¹⁶

¹⁶ Lihat paparan mengenai protes dalam Potter 2009; Levang, Riva, dan Orth 2016; Acciaioli dan Dewi 2016.

Ketika perkebunan sudah berdiri, mengambil alih lahan dari penguasaan perusahaan akan memerlukan perjuangan berat, menentang pemerintah yang melepaskan lahan untuk perusahaan, dan menentang orang lain, yakni para elite lokal serta transmigran. Ketergusuran secara perlahan lebih berat untuk ditantang dari pada “pencaplokan” yang dilakukan mendadak dan kisruh. Kondisi ini merangkak pelan dan diam-diam. Ketergusuran dari pekerjaan pun serupa: awalnya, pemilik/ pemegang lahan tidak menginginkan pekerjaan di perkebunan, dan ketika mereka akhirnya membutuhkan pekerjaan tersebut, mereka ditolak, atau hanya dapat bekerja dengan ketentuan-ketentuan kerja yang sangat memberatkan. Ketergusuran terjadi secara tidak merata. Beberapa kelompok masyarakat dan beberapa keluarga di dalamnya mungkin masih memiliki lahan atau akses ke pekerjaan di perkebunan, sementara yang lainnya tidak. Namun, lintasannya secara umum pasti karena akses ke lahan pertanian yang semakin sempit dan kondisi kerja yang semakin buruk bagi generasi mendatang.

Pada bagian berikutnya saya akan mengkaji ulang lintasan luas ini dari perspektif dekat sebuah zona sawit di Kalimantan Barat. Saya berfokus pada pengalaman penduduk desa beretnis Melayu dan Dayak yang tinggal di ruang-ruang residual di celah-celah perkebunan, dan melacak implikasi akses ke lahan dan pekerjaan yang tidak merata di kalangan generasi muda.

Lintasan Peluang dan Kerugian yang Tidak Merata

Kecamatan Meliau di Sanggau, yang merupakan fokus penelitian berkelompok yang saya lakukan pada 2010-2015,¹⁷ adalah lokasi eksperimen awal perkebunan sawit saat perusahaan perkebunan negara pindah dari Sumatera ke Kalimantan pada 1980.

Sejak itu, garis depan tanah pun tertutup di Meliau. Pada 2012, dari total lahan seluas 150.000 hektar, 65.000 hektar dikuasai oleh sejumlah perusahaan perkebunan dan sebagian lahan dicanangkan sebagai hutan lindung. Akibatnya, tanah yang tersedia bagi warga Melayu dan Dayak setempat menyempit. Pada 1980, penduduk dan politisi Dayak telah memprediksi secara akurat ancaman penyempitan lahan, dan mereka bersikap sangat kritis terhadap rencana untuk mendatangkan ribuan transmigran dari Jawa. Rencana tersebut dicituk, tetapi beberapa skema transmigrasi terus berlanjut.¹⁸ Antropolog Michael Dove, yang mengamati situasi di Meliau pada 1985, menggaungkan peringatan ini: “Keberuntungan yang mungkin harus dengan segala daya upaya dihindarkan pengelola proyek

¹⁷ Penelitian dilakukan oleh saya sendiri, rekan antropolog Dr. Pujo Semedi dari Universitas Gadjah Mada, dan tim yang terdiri dari 100 mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan University of Toronto.

¹⁸ Mengenai akuisisi lahan oleh PTPN di Sanggau yang bermasalah, lihat (Dove 1985; Potter 2009; Forest Peoples Programme 2005; Colchester dkk. 2006, 103). Kajian-kajian tersebut juga menggali pengalaman keberbedaan yang dialami berbagai dusun berdasarkan lokasi, pengalokasian sumber daya, gaya kepemimpinan, dan tingkat penerimaan atau resistensi.

adalah munculnya sekelompok penduduk yang tidak memiliki tanah dan pekerjaan di sekitar proyek” (Dove, 1985: 18). Tiga dekade setelah itu, keadaan ini memang

Lokasi terpilih di sekitar anak sungai Kapuas memungkinkan tim peneliti untuk mengkaji pola lintasan dari keberlimpahan hingga kelangkaan lahan seiring ekspansi perkebunan dan pencaplokan serta akumulasi lahan oleh kelompok elit lokal. Pada 2010, dusun-dusun Dayak di hulu anak sungai ini masih memiliki akses ke lahan yang berlimpah. Saat itu mereka masih dalam proses memutuskan seberapa jauh mereka ingin terlibat dalam perkelapasawitan. Dusun-dusun Melayu hilir, yakni titik temu antara anak sungai dan sungai Kapuas, telah menjadi kantong-kantong yang padat, dikelilingi oleh perkebunan inti yang dimiliki oleh perkebunan swasta (HD-DS)

Di sekitar pertengahan alur anak sungai ini terdapat 7.000 perkebunan kelapa sawit rakyat yang terikat kontrak dengan HD-DS, pihak yang mengembangkan lahan pada era 1990-an lewat kerja sama dengan program transmigrasi. Sekitar setengah dari pemilik perkebunan rakyat ini berasal dari Jawa dan Nusa Tenggara Timur (NTT); setengahnya lagi adalah warga Melayu dan Dayak setempat yang telah melepas sebagian tanah leluhur mereka kepada HD-DS dengan imbalan petak-petak garapan kelapa sawit. Perbedaan pengalaman keluarga-keluarga yang tinggal di tiga lokasi tersebut menggambarkan peluang dan kerugian bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dusun Dayak Hulu: Debat Karet versus Kelapa Sawit

Di Dusun Dayak Nek Sawak pada 2011, 27 dari 76 keluarga memiliki petak-petak kelapa sawit seluas dua hektar. Mereka memperolehnya pada sekitar 1995 saat bergabung sebagai peserta “lokal” skema perkebunan rakyat transmigrasi HD-DS. Mereka berada di ujung wilayah perkebunan rakyat yang paling jauh dari pabrik dan karena itu produksi mereka terhambat oleh jalan yang sering tidak dapat dilalui sehingga mereka sulit mengantar kelapa sawit ke pabrik pengolahan dalam waktu 48 jam. Sebagian warga memiliki pohon karet dan menyadap karet untuk orang lain atas dasar bagi hasil sebagai sumber penghasilan bagi laki-laki maupun perempuan. Penyadap mendapatkan 70% dari harga karet, rasio yang menguntungkan pekerja dalam konteks ketika pohon karet (dan tanah) masih melimpah dan pekerja masih relatif jarang.

Meskipun sebagian besar keluarga memiliki akses ke pertanian/ ladang berpindah, hanya setengah saja dari mereka yang menanam padi gogo. Terjadi lonjakan sesaat penanaman padi pada 2009 sebagai reaksi atas kenaikan drastis harga beras pada 2008. Akan tetapi, geliat ini melesu kembali akibat panen yang kurang berhasil dan semakin meningkatnya harga karet. Selama periode utama penelitian kami antara 2010-2012, harga karet mencapai puncak yang paling tinggi sejak sepuluh tahun terakhir sehingga memungkinkan keluarga-keluarga yang hidup dari karet merenovasi rumah, membeli motor, dan menabung di kelompok-kelompok simpan-pinjam warga Dayak. Generasi muda menikmati kesejahteraan pada masa

tersebut. Pemuda-pemudi usia belasan tahun memegang kontrak sadap karet mandiri dengan pemilik pohon dan mereka mengatur pendapatan mereka sendiri. Tingginya harga karet membuat mereka mampu membeli pakaian, kosmetik, telepon seluler, rokok, dan bensin untuk motor mereka.

Pada rentang 2010-2012, perempuan dan laki-laki sama-sama berminat menambahkan kelapa sawit ke dalam kegiatan perkebunan campuran mereka tanpa menyingkirkan pohon-pohon karet. Mereka ingin menanam kelapa sawit secara mandiri, tetapi mereka dihadapkan pada masalah kurangnya akses ke jalan yang layak. Mereka melihat bahwa ketentuan-ketentuan pelepasan lahan untuk bergabung dengan skema perkebunan rakyat kelapa sawit HD-DS pada 1990 menyulitkan mereka. Peminat harus menyerahkan 7,5 hektar lahan kepada HD-DS agar memperoleh petak seluas dua hektar untuk ditanami kelapa sawit, dan sepetak tanah untuk rumah. Mereka khawatir bahwa jika ada perusahaan lain masuk dan menawarkan ketentuan serupa, anak-cucu mereka kelak tidak akan memiliki cukup lahan.

Dihadapkan pada kebuntuan ini, sebagian menanam kembali lahan kebun mereka dengan apa yang disebut “karet hutan”. Mereka sadar bahwa pohon karet hutan perlu waktu 10-20 tahun hingga dapat berproduksi. Itupun rendah produksinya. Meski demikian, mereka berpendapat bahwa perkebunan tersebut akan menjadi sumber penghasilan tetap dan cadangan lahan bagi generasi mendatang. Keadaan berubah pada 2015. Harga karet anjlok hingga 30% dari harga puncak pada 2011

dan sejumlah keluarga harus berjuang untuk membeli makan dan membayar utang atas barang-barang yang mereka peroleh secara kredit. Kepala dusun berupaya menarik perusahaan kelapa sawit lain untuk masuk dan mengembangkan tanah dan prasarana, peluang yang pernah ditolak banyak warga Nek Sawak, tetapi kemudian mungkin akan lebih diterima oleh mereka.

Selama masa-masa keemasan harga karet, laki-laki dan perempuan muda di Nek Sawak puas dengan pendapatan mereka sebagai penyadap karet yang menurut mereka lebih tinggi dari pendapatan bekerja lepas untuk HD-DS di daerah hilir. Kaum muda tidak melihat kerja di kota sebagai peluang yang cerah karena upahnya kecil sementara biaya hidup tinggi. Kaum muda mengaitkan masa depan suram mereka dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka, yang jarang melebihi tingkat pendidikan orang tua mereka: 93% dari jumlah orang yang data pendidikannya berhasil diperoleh tim peneliti (n-183) berpendidikan SD atau lebih rendah. Temuan ini jauh berbeda dengan pengalaman kaum muda perdesaan di tempat lain yang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan orang tua mereka dan bercita-cita meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan lebih baik dan suasana gemerlap kota (White, 2012). Lebih dari itu, di saat harga karet dan pendapatan dari menyadap merosot drastis, kebanyakan kaum muda di Nek Sawak tetap tinggal dekat rumah. Survei ulang pada 2015 mencatat bahwa hanya satu orang perempuan muda yang meninggalkan desa untuk menjadi PRT. Beberapa laki-laki

muda pergi untuk bekerja sebagai penyadap karet di lokasi-lokasi pedesaan lain dan beberapa pasangan serta lelaki muda lainnya pergi untuk menjadi pekerja lepas di daerah perkebunan kelapa sawit lain sebagai jalan sementara sambil menunggu pulihnya harga karet.

Pembedaan berdasarkan kelas di antara keluarga-keluarga di Nek Sawak tidak terlalu tampak pada waktu penelitian. Tercatat 76 keluarga dan keseluruhannya memiliki akses lahan dan strategi penghidupan serupa. Pembedaan gender juga tidak signifikan. Orang tua memberikan bagian tanah yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan mereka dan laki-laki serta perempuan sama-sama berkomitmen kepada pekerjaan perkebunan campuran dan menyadap karet sebagai sumber penghidupan mereka. Perbedaan antargenerasi juga tidak terlalu kentara. Kehidupan kaum muda tidak terlalu berbeda dari kehidupan orang tua mereka. Jika warga dusun menandatangani perjanjian dengan perusahaan kelapa sawit baru, ada kemungkinan perbedaan antarkeluarga akan semakin tampak.

Keberagaman secara geografis atau perbedaan kemampuan untuk melakukan manuver politik akan berarti sebagian keluarga akan diuntungkan oleh jalan-jalan baru dan peluang-peluang menggiurkan, sementara sebagian lainnya kembali akan mendapatkan diri mereka di “ujung” atau pinggiran wilayah perkebunan sawit dengan akses terbatas ke jalan. Keluarga yang memiliki cadangan luas warisan lahan karet dan perkebunan berpindah akan dapat menyerahkan porsi lahan yang diminta

perusahaan dan masih dapat menanam kelapa sawit secara mandiri sambil memiliki cadangan tanah untuk generasi mendatang. Mereka yang pindah ke desa lain sebagai penyadap karet atau yang leluhurnya membuka sedikit lahan mungkin akhirnya akan mendapatkan petak sawit seluas hanya dua hektar atau tidak sama sekali. Dengan area penyadapan karet yang semakin menyempit, mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Tantangan-tantangan yang belum sampai di Nek Sawak ini sudah sangat dirasakan di kantong langka tanah di Kuala Buayan.

Kuala Buayan: Hidup di Kantong Perkebunan

Sebelum masuknya HD-DS pada 1990, penghidupan keluarga-keluarga Melayu di Kuala Buayan sangat mirip dengan penghidupan warga Dayak di Nek Sawak. Mereka memiliki dan/ atau menyadap pohon karet serta menanam padi gogo secara berpindah. Ekonomi mereka lebih beragam karena lokasi dusun di tepi sungai Kapuas memberi sebagian lelaki kerja sebagai nelayan, pemuat barang di dermaga sementara, atau sebagai pengemudi angkutan perahu. Lokasi dusun Kuala Buayan yang strategis di tepi sungai membuat pemerolehan tanah menjadi prioritas bagi HD-DS. Perusahaan tersebut memanfaatkan calo, preman, dan pejabat pemerintah setempat untuk membujuk dan memaksa warga Kuala Bayan untuk melepas tanah mereka dengan imbalan petak-petak pada lokasi perkebunan rakyat yang mendompleng program transmigrasi. Sebagian kecil keluarga yang memiliki

lahan luas dan/ atau hubungan dekat dengan perusahaan memperoleh petak kebun sawit di lokasi strategis dan hidup sejahtera. Namun, kebanyakan keluarga di Kuala Buayan hanya mendapatkan satu petak kebun kelapa sawit atau tidak sama sekali. Ada pula yang ditipu oleh sanak keluarga atau oleh pejabat desa yang memanipulasi proses alokasi lahan dan menjual kapling kelapa sawit ke kelompok elite lokal (Semedi dan Bakker, 2014).

Setelah kehilangan penghasilan dari menyadap walaupun seiring itu, masih ada peluang untuk mengumpulkan sayuran dan hewan buruan kecil dari kebun-kebun karet, keluarga tak bertanah baru kini harus membeli makan sendiri dalam keadaan sulit mencukupi kebutuhan. Bagi keluarga-keluarga seperti ini, kehadiran HD-DS beserta skema transmigrasi yang dibawanya merupakan bencana yang merampas tanah, penghidupan, harga diri, dan kemandirian mereka.

Survei yang dilakukan tim pada 2011 dan 2015 menunjukkan bahwa kurang lebih setengah keluarga di Kuala Buayan tidak memiliki tanah lagi; sepertiga keluarga memiliki kelapa sawit; seperenam masih memiliki pohon karet. Beberapa keluarga tak bertanah akhirnya mendapatkan petak kelapa sawit pada 1995, tetapi kemudian terpaksa menjualnya kembali karena sakit atau krisis keuangan lainnya.

Kebanyakan orang yang tidak memiliki tanah adalah pasangan muda yang orang tuanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai tanah untuk diwariskan. Tanah dengan akses ke jalan terlampau mahal untuk mereka beli sehingga mereka tidak

punya harapan untuk menjadi petani sawit mandiri. Sebaliknya, pasangan muda yang mewarisi tanah, biasanya dalam bentuk perkebunan karet tua, sibuk menanaminya dengan kelapa sawit.¹⁹

Untuk mengumpulkan uang yang mereka butuhkan guna membeli bibit, seorang lelaki muda bekerja sebagai mandor untuk HD-DS sambil beternak sapi. Seorang lagi bekerja sebagai pengemudi ojek sementara istrinya membuka warung kecil, dan mereka rajin menabung di kelompok simpan pinjam. Pasangan-pasangan muda ini dapat melihat arah jelas menuju kesejahteraan di masa mendatang. Sebaliknya, pasangan yang tidak memiliki tanah harus bertahan hidup pas-pasan. Saya mengunjungi seorang perempuan muda dengan balita yang menangis. Ia saat itu sedang menunggu suaminya pulang kerja serabutan kasar menggali pasir untuk tetangga. Perempuan ini perlu uang sekitar Rp. 1.000 untuk membeli susu. Pendeknya, diferensiasi kelas tengah berlangsung di Kuala Buayan karena peluang hidup kaum muda pun berbeda sesuai dengan harta yang dimiliki orang tua mereka.

Beberapa anggota keluarga di Kuala Buayan yang memiliki sedikit atau tidak memiliki tanah dapat mencari kerja di perkebunan HD-DS. Berdasarkan survei kepada 117 keluarga pada 2015, 12 laki-laki dan 11 perempuan dipekerjakan penuh oleh HD-DS. Sementara itu 9 laki-laki dan 14 perempuan bekerja sebagai pekerja harian.

¹⁹ Seperti warga Dayak hulu, masyarakat Melayu di dusun ini mewariskan luas tanah yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan guna membantu mereka membangun penghidupan setelah menikah.

Secara keseluruhan, ada 46 orang atau sekitar 20% orang dewasa berusia kerja yang bekerja untuk HD-DS, sementara yang lainnya bergulat mencari pekerjaan apa pun yang ada. “Kalau perusahaan memberi kami kerja, kami bisa makan,” menurut seorang laki-laki muda. Memang beberapa laki-laki masih dapat bekerja sebagai pemuat barang di sungai Kapuas, tetapi banyak pula yang merasa perlu untuk pindah dan mencari kerja di kecamatan lain sebagai penyadap karet, atau bekerja di tambang atau perkebunan. Pola ini sangat berbasis gender. Sementara laki-laki Melayu keluar desa, istri mereka tinggal untuk mengurus keluarga, menjaga hubungan keluarga dan masyarakat, dan memastikan anak-anak mereka tetap sekolah.

Capaian pendidikan di Kuala Buayan lebih tinggi daripada di Nek Sawak: dari 228 jiwa, 64% mengenyam atau lulus SD, 19% lulus SMP, 14% lulus SMA, dan 3% (7 orang) lulus atau tengah menempuh pendidikan tinggi. Tiga orang sarjana berasal dari keluarga terkaya di Kuala Bayan. Pendidikan mereka didanai dengan keuntungan dari kelapa sawit. Orang tua dengan penghasilan pas-pasan harus menimbang-nimbang pentingnya investasi untuk pendidikan. Mereka sadar bahwa peluang kerja bagi lulusan sekolah menengah tidak jauh lebih baik dari pada peluang bagi lulusan SD. Seorang perempuan muda berpendidikan sekolah menengah yang tadinya merupakan pekerja perkebunan diangkat sebagai pekerja kantoran, tetapi kondisinya taklazim mengingat ayahnya adalah seorang pejabat desa.

Bagi sebagian besar kaum muda, harapan bekerja kantoran sangatlah tipis, bahkan para lulusan sekolah menengah dari kota Meliau terpaksa melaju setiap hari sebagai pekerja lapangan harian di HD-DS. Ini merupakan indikasi sangat terbatasnya peluang kerja bagi kaum muda, terutama perempuan, di sana.²⁰ Perempuan Melayu dan Dayak yang berusia lebih tua merindukan kejayaan era perkayuan pada 1990-an, yaitu ketika pelarangan ekspor kayu gelondongan membuka lebar peluang kerja di pabrik-pabrik kayu lapis di Pontianak, tempat mereka pernah bekerja beberapa tahun sebelum akhirnya menikah. Kelapa sawit umumnya diekspor sebagai minyak sawit mentah sehingga hanya sedikit saja peluang kerja yang ada bagi kaum muda sebagai ganti atas hilangnya akses mereka terhadap lahan perkebunan.

Setelah mempertimbangkan kemungkinan peluang masa depan, seorang perempuan membawa anak-anak perempuannya bekerja di perkebunan selama libur sekolah. Tujuannya adalah untuk mengajari mereka betapa susahnyanya mencari uang sehingga mereka tidak melulu meminta uang padanya. Ia juga ingin membiasakan mereka kepada pekerjaan fisik berat yang sangat mungkin kelak akan mereka lakukan setelah lulus SD. Seorang pekerja perempuan lain, yang bertekad meneruskan pendidikan anak-anak perempuannya ke sekolah menengah, melarang mereka bekerja saat libur karena khawatir mereka

²⁰ Di Kecamatan Sanggau, hanya 2 2% dari tenaga kerja yang ada dipekerjakan pada sektor manufaktur, dan dari sedikit lapangan pekerjaan manufaktur yang ada, 82% diisi oleh laki-laki (Li, 2015: 27&53).

ingin berhenti sekolah jika sudah kenal uang dari hasil keringat sendiri.

Perempuan muda yang bekerja di perkebunan mempertahankan harga diri mereka dengan menolak mengenakan pakaian longgar seperti yang digunakan perempuan-perempuan yang lebih tua untuk menutup tubuh mereka. Para perempuan muda ini bekerja dengan pakaian bermodel jins dan kaos. Mereka mengisi istirahat mereka dengan mendengarkan lagu-lagu pop Korea dari telepon genggam mereka, mungkin sambil berkhayal bahwa mereka berada di perkebunan hanya untuk sementara hingga ada pilihan yang lebih baik.

Bakti Jaya: Kesejahteraan dan Stagnasi Transmigran

Di tengah jalur anak sungai antara Kuala Buayan dan Nek Sawak terdapat permukiman transmigran Bakti Jaya. Pada 1992, direncanakan akan dibuka 500 perkebunan rakyat transmigran pada lahan seluas 1.000 ha. Setengah dari para transmigran ini berasal dari Jawa dan NTT dan sisanya warga Melayu dan Dayak yang telah melepas tanah mereka demi bergabung dalam skema ini. Namun, separuh dari transmigran yang didatangkan ini kabur tidak lama setelah skema berjalan. Mereka ragu akan prospek kesejahteraan mereka, atau semata-mata pergi demi mencari pendapatan jangka pendek. Selain itu, sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah transmigrasi lain, sebagian peserta “lokal” juga menjual lahan mereka (McCarthy, 2010; Potter, 2012).

Pada 2011, tersisa 377 keluarga, yang 37 di antaranya berhasil menambah kepemilikan satu atau dua petak sawit, sementara sisanya masih mengelola hanya satu petak saja. Bagi sebagian warga “lokal”, petak ini membawa manfaat tambahan di luar kegiatan pertanian lain yang mereka lakukan. Namun, jika tak punya lahan lain, mereka ada pada posisi rapuh yang sama dengan yang dihadapi transmigran dari Jawa dan NTT: tertekan untuk memenuhi kebutuhan dari garapan yang hanya sepetak, tidak mampu mewariskan lahan bagi anak-anak mereka, dan rentan terhadap keterpaksaan menjual tanah saat ada keperluan pengeluaran darurat. Mereka mengalami stagnasi ekonomi. Keluarga yang tidak memiliki tanah bertahan dengan melakukan kerja upahan untuk tetangga yang sudah sejahtera dan memiliki tanah luas. Kerja upahan menjanjikan penghasilan yang lebih baik dari pada kerja perkebunan, tetapi pekerjaan ini tidak tersedia untuk semua orang. Laki-laki muda yang melakukan kerja terlatih sebagai pemanen memperoleh penghasilan yang layak, tetapi perempuan jarang dipekerjakan karena pemilik petak memilih untuk melakukan pemeliharaan sendiri. Terjadi pula bias etnis. Transmigran (dan sebagian warga Melayu dan Dayak) memilih mempekerjakan orang Jawa yang menurut mereka lebih rajin dari penduduk “lokal”.

Dari penelitian di beberapa provinsi terungkap bahwa perkebunan rakyat yang menanam hanya kelapa sawit harus memiliki setidaknya enam hektar lahan agar keluarganya bisa sejahtera; dua hektar untuk memenuhi kebutuhan bulanan; dua hektar

untuk menutup input perkebunan termasuk tenaga pemanen mahir; dan dua hektar untuk menutup investasi bagi generasi mendatang—yaitu membiayai sekolah atau membekali anak-anak dengan warisan lahan kebun untuk mereka sendiri. (Colchester dan Chao, 2013: 72).²¹ Dengan demikian, kerentanan petani rakyat Bakti Jaya akan kehilangan tanah yang diakibatkan oleh skema lemah yang mengalokasikan hanya dua hektar per keluarga, sangatlah dapat diperkirakan. Warga transmigran dan lokal yang memperoleh kesejahteraan adalah mereka yang telah memiliki petak-petak tambahan pada awal 1990-an ketika harga tanah masih rendah. Sebagian pendatang dari Jawa memang membekali diri dengan modal untuk itu atau menambah modal dengan menjual aset. Sebagian kecil bekerja di perkebunan ini untuk tujuan menabung.

Pada 2011, peluang untuk meningkatkan mobilitas di Bakti Jaya sendiri terbatas karena harga tanah sangat tinggi. Pemilik perkebunan rakyat yang lebih kaya menyalurkan investasi mereka ke garis-garis depan perkebunan sawit di bagian lain provinsi, tempat harga tanah masih murah sehingga mereka dapat memperluas perkebunan. Mereka juga membelanjakan uang untuk kebutuhan-kebutuhan gengsi seperti menyekolahkan anak ke perguruan tinggi dan membangun rumah mewah di kota Pontianak. Mereka memandang diri mereka sendiri sebagai pewirausaha dan manajer perkebunan yang mengandalkan

buruh perkebunan untuk melakukan pekerjaan berat. Remaja pada keluarga-keluarga tersebut biasanya tinggal jauh dari rumah untuk sekolah dan kuliah, dan saat mereka pulang berlibur, mereka tidak melakukan pekerjaan lapangan apa pun. Mobilitas sosial dan spasial kaum muda pada keluarga-keluarga yang sejahtera karena kelapa sawit—“maju dan hengkang”—sangatlah kontras dengan mobilitas warga sekitar mereka yang harapan masa depannya adalah menjadi pekerja serabutan tanpa harapan memiliki perkebunan sendiri.

Kelapa Sawit Berkelanjutan?

Berbagai upaya dilakukan untuk meregulasi perusahaan perkebunan melalui standar-standar sukarela seperti yang dipromosikan oleh *Roundtable on Sustainable Oil Palm* (RSPO), yaitu mencakup sekitar 20% wilayah tanam Indonesia (Pye, 2016: 417), atau standar-standar yang lebih ringan, tetapi wajib yang dikenakan oleh Lembaga Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Oil Palm* atau ISPO). Namun, korupsi yang mengakar dan aturan hukum yang lemah membuat verifikasi sulit dilakukan, bahkan bagi perkebunan bersertifikasi pun. Perusahaan selalu punya banyak cara untuk menghindari laporan inspeksi yang buruk. Analisis Dampak Lingkungan dilakukan secara basa basi. Aturan-aturan pemerolehan lahan tidak jelas, tumpang tindih, atau saling bertentangan; dan kongkalikong kuat antara perusahaan, birokrat, dan politisi

²¹ Semedi (2014) mencatat bahwa sebagian besar kekayaan dari kelapa sawit tidak diinvestasikan, tetapi dihabiskan untuk konsumsi dan hiburan (terutama alkohol, judi, dan kunjungan ke tempat-tempat pelacuran).

memberi perusahaan serta pengawas mereka banyak ruang untuk bermanuver.²²

Lebih serius dari itu, bahkan ketika standar-standar “keberlanjutan” dapat diimplementasikan secara penuh pun, hal tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah ketergusuran antargenerasi yang telah saya uraikan sebelumnya. Sebagai contoh, suatu proses pemerolehan lahan perkebunan baru yang dilaksanakan secara adil dan transparan melalui “pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu serta tanpa paksaan”, masih dapat membuat pemilik lahan adat rentan terhadap kemiskinan yang menyongsong generasi mendatang. Baik secara tiba-tiba atau perlahan, status pemilik awal tanah bergeser. Awalnya sebagai petani yang mengatur nasib sendiri kemudian menjadi pekerja yang mengandalkan upah untuk bertahan hidup. Tidak ada standar “keberlanjutan” maupun bentuk “tanggung jawab sosial perusahaan” (CSR), yang mendekati upaya untuk memulihkan lahan, perikehidupan, dan kemandirian warga sekitar atau mampu meningkatkan upah dan tunjangan bagi pekerja.

Penerapan standar pekerja yang lebih tinggi menjadi salah satu tujuan RSPO, tetapi ISPO hanya meminta perkebunan untuk patuh pada hukum. Sedihnya, adanya Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2003 justru memperlebar pelemahan perlindungan kepada pekerja harian (ILO, 2013; World Bank, 2010). Lewat tindak melakukan (*commission*) maupun pem-

biaran (*omission*), Undang-undang tersebut malah mendorong perkebunan swasta dan negara untuk menghindari aturan upah minimum dan menerapkan langkah-langkah “efisiensi” dengan mengorbankan pekerja (Tjandraningsih, 2012). Dengan demikian, lemahnya penanganan pekerja harian, terutama perempuan yang tidak memiliki tanah dan sangat mendambakan pekerjaan apa pun, menjadi legal di Indonesia. Perlindungan undang-undang terhadap hak berserikat ternyata tidak menjangkau pekerja lepas harian, bahkan pekerja yang secara resmi dipekerjakan menghadapi represi keras setiap mereka berupaya untuk berserikat (Siagian dkk., 2011; Situmorang, 2010; Heupner, 2016).

Mengorganisasikan pekerja adalah perkara yang menantang karena sulitnya akses ditambah adanya strategi perusahaan yang mengisolasi dan memecah belah pekerja. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa tantangan-tantangan ini pernah diatasi di masa lalu. Para pekerja di sabuk perkebunan Sumatra pada 1950-an adalah kelompok pekerja yang paling terorganisasi di antara kelompok-kelompok pekerja lainnya, dan Sarbupri, serikat pekerja perkebunan yang terkait dengan PKI, dikabarkan beranggotakan satu juta orang. Serikat pekerja tersebut berhasil membatalkan upaya kasualisasi yang dilakukan, dan mereka juga berhasil mengamankan hak-hak pekerja kasual/harian (Stoler, 1995: 121, 137-8). Capaian-capaian ini berbalik setelah serikat pekerja tersebut dihancurkan dan ribuan pekerja serikat tewas dalam pembantaian pada 1965 yang dikomandoi militer (Stoler, 1995: 163-4). Regulasi perkebunan yang efektif oleh

²² Lihat (Colchester dan Chao, 2013; McCarthy, Gillespie, dan Zen, 2012; McCarthy, 2012; McCarthy dan Zen, 2010; Varkkey, 2012; Pye, 2016).

pekerja merupakan sandingan penting bagi penguatan hak-hak pekerja, tetapi saat ini kedua hal tersebut masih sangat lemah.

Upaya-upaya untuk mengorganisasikan perkebunan rakyat sudah membawa beberapa kemajuan, tetapi tantangan yang ada memang berat. Sebagai contoh, Serikat Petani Kelapa Sawit sudah melakukan berbagai lobi untuk memperoleh lebih banyak dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi lahan, kredit, input perkebunan, dan prasarana.²³ Namun, karena perkebunan sudah menerima subsidi besar dalam bentuk lahan murah dan buruh murah yang dipasok departemen transmigrasi, pemilik perkebunan rakyat berargumen bahwa yang mereka inginkan adalah arena bermain yang rata. Adapun subsidi akan membantu para pemilik perkebunan rakyat yang memiliki lahan, tetapi kekurangan modal untuk membeli bibit unggul dan mendirikan perkebunan yang memadai.

Visi SPKS adalah menciptakan petani yang sejahtera, mandiri, dan terorganisasi dalam koperasi-koperasi yang memiliki kapasitas untuk memproses hasil panen sendiri, atau memiliki kekuatan untuk menegosiasikan kontrak berkeadilan dengan perusahaan bila petani memilih bergabung dengan skema inti plasma. SPKS tidak menangani masalah diferensiasi di antara petani kecil, atau keadaan petani tanpa tanah, yang ingin menjadi pemilik perkebunan rakyat, tetapi tidak memiliki jalan untuk mewujudkannya.

²³ <http://www.spks.or.id/berita-menagih-citacita-petani-adil-dan-sejahtera.html>. Diakses 10 Januari 2017

Sejauh ini, lembaga-lembaga pemerintah dan para politisi enggan mengubah model pengembangan kelapa sawit sehingga lebih menguntungkan petani rakyat. Alasannya cukup jelas: perusahaan-perusahaan perkebunan besar menghasilkan aliran pendapatan yang menggiurkan dan dapat diandalkan tidak saja bagi perusahaan sendiri, tetapi juga bagi para politisi, birokrat, pedagang dan *konco-konco* lainnya.²⁴ Bila petani kecil sejahtera dan mandiri mampu mengontrol lahan mereka sepenuhnya dan didukung oleh lembaga-lembaga (adat atau bentukan baru) yang memiliki kekuatan, akan sulit dikelola atau dipaksa (Dove, 2011). Karena itu, perusahaan dan aktor-aktor pemerintahan meragamkan “modus perkebunan besar” dan mengabaikan atau secara aktif menghambat keterlibatan petani rakyat kecil dalam produksi kelapa sawit (McCarthy and Cramb, 2016). Lebih dari itu, skema-skema yang konon bertujuan untuk membuka peluang bagi petani kecil kini malah mereduksi peran mereka menjadi hanya sebagai pemegang saham pasif dan menyerahkan produksi ke tangan-tangan perusahaan perkebunan yang mengklaim diri lebih efisien (Cramb dan McCarthy, 2016).

Eks pemilik lahan bukan saja kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan otonomi dan penguasaan ruang. Nasibnya

²⁴ Cramb and McCarthy (2016) membandingkan pendapatan bagi perusahaan, pemerintah, dan perkebunan rakyat melalui model-model berbeda di Malaysia. Mengenai persekongkolan politik-korporasi-birokrasi di sektor kelapa sawit Indonesia serta tantangan “tata kelola yang baik”, lihat (Varkkey, 2012; McCarthy, Gillespie, dan Zen, 2012).

berakhir sebagai “hantu di tanah sendiri” (*Forest Peoples Programme dan Sawit Watch*, 2006). Banyak orang yang saya temui saat penelitian saya di Kalimantan Barat berkeluh-kesah tentang kelakuan perusahaan perkebunan, para pejabat dan politisi yang melindungi perusahaan, tetapi mereka tidak melihat jalan untuk melakukan perubahan mendasar dalam relasi politik-ekonomi di zona perkebunan. Singkatnya, perkebunan akan tetap ada—sebuah fakta yang sangat jelas niscaya ketika perkebunan-perkebunan di sana memperbaharui izin mereka tanpa memper-timbangkan warga setempat.

Sebagaimana diungkap banyak peneliti di zona-zona perkebunan lain, protes yang dilakukan eks pemilik lahan, petani plasma, dan buruh hanya terbatas pada bentuk-bentuk resistensi “seharisan” seperti blokade, demo, dan penjarahan yang paling-paling hanya membawa dampak kecil (Potter, 2009; McCarthy, 2011; Levang, Riva, dan Orth, 2016). Manajer perkebunan menanggapi protes dengan cara penundaan dan manipulasi, termasuk mengadudomba satu kelompok (misalnya pekerja perkebunan) dengan kelompok lain (Gillespie, 2016: 316). Karenanya, ada potensi tinggi untuk terjadinya konflik etnis. Di Meliau pada 2011, sekelompok warga Dayak sempat melontarkan ancaman terhadap transmigran, walaupun banyak pula yang menyatakan keinginan untuk hidup damai berdampingan dengan pendatang.

Ambisi utama warga muda maupun yang lebih tua, baik warga lokal maupun transmigran, adalah untuk menjadi petani

rakyat mandiri dan sejahtera yang dapat mengelola perkebunan dan masa depan mereka sendiri. Bagi sebagian, tujuan ini dapat diwujudkan. Akan tetapi, bagi sebagian lainnya, ada hambatan karena tangan-tangan kuat individu dan perkebunan telah mengambil lahan-lahan yang ada.

Mereka yang tidak berhasil mencapai kesejahteraan sebagai petani sawit mandiri masih memiliki hidup yang lebih baik dari pada mereka yang hidup di zona yang didominasi oleh perkebunan besar. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah laporan Bank Dunia, “dampak pengentasan kemiskinan kegiatan pertanian rakyat jauh lebih besar dari pada dampak yang dihasilkan peningkatan kegiatan perusahaan perkebunan swasta atau BUMN” (World Bank dan International Finance Corporation 2011, 15).

Gubernur Kalimantan Tengah mengakui adanya pola serupa. Angka kemiskinan naik justru di kecamatan-kecamatan dengan lebih banyak perkebunan besar (Potter, 2012: 282). Pola tersebut konsisten. Hasil survei terhadap 1069 perkebunan rakyat di Sumatera dan Kalimantan ditemukan bahwa 84% perusahaan menggaji pekerja di atas upah minimum, sementara perkebunan-perkebunan besar menggaji di bawah upah minimum (Sinaga, 2013). Upah rendah berarti perkebunan hanya sedikit menghasilkan kegiatan ekonomi sekunder—sebuah masalah yang sudah dilihat beberapa dekade lalu oleh para sarjana yang mengkaji stagnasi dan pemiskinan di zona-zona perkebunan di Karibia (Beckford, 1969). Sebaliknya, jika pemilik perkebunan rakyat

sejahtera, mereka dapat menghasilkan lapangan kerja sekunder di daerah mereka, seperti misalnya di bidang konstruksi rumah, perbaikan kendaraan, restoran, dan usaha eceran.

Di Nek Sawak pada 2011, saat produksi karet tengah marak, baik pemilik maupun penyadap sama-sama menuai untung. Di dusun Dayak setempat, yang sebagian besar keluarganya tidak memiliki kelapa sawit, 138 keluarga meraup penghasilan lumayan lewat beternak babi untuk memenuhi kebutuhan warga Dayak sejahtera yang mampu membeli makanan mewah. Hal serupa ditemukan pula di kalangan pemilik perkebunan kelapa sawit rakyat dan tetangga sekitar mereka di zona perkebunan yang saya pelajari di Sulawesi pada 2009 (Li, 2011). Intinya adalah bahwa pemilik perkebunan rakyat hanya dapat menghasilkan kesejahteraan bagi diri mereka dan orang lain jika mereka memiliki setidaknya enam hektar lahan kelapa sawit, atau perkebunan campuran, dan ekonomi keluarga yang mencakup sumber penghasilan lain.

Kesimpulan

Artikel ini mengulas masalah ketergusuran antargenerasi dengan menelusuri pola-pola umum yang muncul seiring jenuhnya zona perkebunan yang mengakibatkan tanah menjadi langka dan tenaga kerja menjadi berlimpah dan dibayar murah. Makalah ini juga menggali pengalaman laki-laki dan perempuan dari generasi yang berbeda, serta dampak tak merata pengembangan perkebunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang memperoleh kesejahteraan dengan masuknya perkebunan, dan peluang-peluang terang juga tercipta bagi pemilik perkebunan rakyat untuk bergerak maju, terutama pada masa ketika lahan masih banyak dan tenaga kerja sedikit. Akan tetapi, seiring waktu arah lintasan sebagian besar keluarga malah melorot karena mereka dihadapkan pada keterbatasan akses dan imbalan kerja yang memprihatinkan.

Dalih yang diusung pihak-pihak industri dan pemerintah untuk mendukung ekspansi perkebunan sawit secara lebih jauh adalah bahwa perkebunan akan mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Temuan kajian ini justru meragukan klaim tersebut. Ekspansi perkebunan berarti pengambilan lahan dari pemilik yang ada dan pelepasan lahan tersebut kepada perkebunan dengan harga yang teramat rendah. Ini berarti terdapat persaingan ketat untuk menguasai lahan yang tersisa. Kemungkinan besarnya adalah bahwa orang-orang yang lebih miskin dan lemah akan terdesak ke luar. Ini juga berarti bahwa kondisi orang-orang tidak bertanah yang terpaksa mengambil kerja perkebunan akan semakin memburuk.

Kemiskinan memang telah dientaskan bagi sebagian orang yang hidup di zona perkebunan, tetapi jutaan orang yang tadinya tidak miskin kini telah menjadi miskin dan generasi yang satu mewariskan kemiskinan kepada generasi selanjutnya sehingga mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan. Masalah ini bukanlah masalah unik dan khas atau terbatas pada kasus perusahaan-perusahaan busuk saja. Masalah

ini menjadi bagian integral dinamika zona perkebunan yang mengunci lahan maupun warga ke dalam bentuk-bentuk kaku selama masa yang tidak tentu, mengingat bahwa pohon kelapa sawit yang tua harus ditanami ulang setiap dua puluh tahun.

Berdasarkan proses-proses struktural yang diidentifikasi di sini, upah murah, keluarga yang termiskinkan dan ter-ceraiberai sepertinya akan menjadi wujud masa mendatang jika perkebunan kelapa sawit terus berekspansi di Indonesia. Masa depan 20-30 juta hektar lahan kelapa sawit, yang sebagian besar ditanami melalui modus-modus perkebunan memang suram. Perspektif antargenerasi dapat menjelaskan mengapa banyak orang yang tinggal di zona-zona perkebunan berada dalam keputusasaan, dan memburuknya kondisi sosial terbentang di hadapan mata kecuali jika ada perubahan arah secara radikal.

Perspektif antargenerasi ini juga memaparkan mengapa istilah “pembangunan berkelanjutan” yang dimaksud pada laporan Bruntland—yakni pembangunan yang menjamin kebutuhan saat ini sambil menjamin generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri—secara mendasar tidak sejalan dengan ekspansi perkebunan. Kondisi pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan memberi dukungan kepada petani rakyat. Tanpa dukungan ini, kekayaan dan peluang berlimpah yang tercipta melalui kelapa sawit hanya akan terus mengalir kepada perusahaan, petani kaya, politisi, birokrat, dan pihak-lain yang memiliki kuasa.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Ramli, Azman Ismail, & Ayotalla Khomeini A. Rahman. (2011). Labour Requirements in the Malaysian Oil Palm Industry in 2010. *Oil Palm Industry Economic Journal*, 11 (2), 1-12.
- Acciaioli, Greg, & Oetami Dewi. (2016). Opposition to Oil Palm Plantations: Divergent Strategies, Convergent Outcomes. In Cramb, Rob & John F. McCarthy (Eds.), *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (pp. 327-353). Singapore: NUS Press.
- Alatas, Syed Hussein. (1977). *The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism*. London: Routledge.
- Anon. (2016). KPK Targets Illegal Oil Palm Companies. *Tempo*, 4 Desember 2016.
- Beckford, George L. (1969). The Economics of Agricultural Resource Use and Development in Plantation Economies. *Social and Economic Studies*, 18 (4), 321-347.
- Breman, Jan. (1989). *Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia*. Delhi: Oxford University Press.
- Colchester, Marcus & Sophie Chao. (2013). *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads*. Moreton-

- in-Marsh: Forest Peoples Programme, Sawit Watch & Transformasi untuk Keadilan Indonesia.
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A Surambo, & Herbert Pane. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Moreton-in-Marsh: Forest People Programme & Perkumpulan Sawit Watch.
- Cramb, Rob A. (2007). *Land and Longhouse: Agrarian Transformation in the Uplands of Sarawak*. Copenhagen: NIAS Press.
- Cramb, Rob & George N. Curry. (2012). Oil Palm and Rural Livelihoods in the Asia-Pacific Region: An Overview. *Asia Pacific Viewpoint*, 53 (3), 223-239.
- Cramb, Rob & John McCarthy. (2016). Characterising Oil Palm Production in Indonesia and Malaysia. In Cramb, Rob & John McCarthy (Eds.), *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (27-77). Singapore: NUS Press.
- Cramb, Rob & John McCarthy. (2016). Introduction. In Cramb, Rob & John McCarthy (Eds.), *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (pp. 1-26). Singapore: NUS Press.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2015). *Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016: Kelapa Sawit* 2015. http://ditjenbun.pertanian.go.id/tiny_mcpuk/gambar/file/statistik/2016/S AWIT%202014-2016.pdf. Diakses pada Desember 2015.
- Dove, Michael. (1985). Plantation Development in West Kalimantan II: The Perceptions of the Indigenous Population. *Borneo Research Bulletin*, 18 (1), 3-27.
- Dove, Michael. (1999). Representations of the "Other" by Others: the Ethnographic Challenge Posed by Planters' Views of Peasants in Indonesia. In Li, Tania Murray (Ed.), *Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power and Production* (pp. 201-227). London: Routledge/ Harwood.
- Dove, Michael. (2011). *The Banana Tree at the Gate*. New Haven: Yale University Press.
- Feintrenie, Laurène, Wan Kian Chong & Patrice Levang. (2010). Why do Farmers Prefer Oil Palm? Lessons Learnt from Bungo District, Indonesia. *Small-scale Forestry*, 9, 379-396.
- Forest Peoples Programme. (2005). *Dayak Leaders' Memories and Dreams: Report on a Survey of Oil Palm Plantations and Indigenous Peoples in West Kalimantan*. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme.
- Forest Peoples Programme & Sawit Watch. (2006). *Ghosts on our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders*

- and the Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Moreton-in-Marsh, UK: Forest Peoples Programme dan Sawit Watch.
- Gillespie, Piers. (2016). People, Participation, Power: The Up-stream Complexity of Indonesian Oil Palm Plantations. In Cramb, Rob & John McCarthy (Eds.), *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (301-326), Singapore: NUS Press.
- Hawkins, Doug, Yingheng Chen, & Thomas Wigglesworth. (2016). *Indonesian Palm Oil Production Sector: A Wave of Consolidation to Come*. London: Hardman Agribusiness.
- Heupner, Susan de Groot. (2016). *The Palm Oil Plantation of North Sumatra: A System of Repression and Structural Violence: A Case Study on the Independent Trade Union and Its Efforts to Organize and Mobilize Plantation Workers*. Honours thesis. Murdoch University.
- Hurst, Peter. (2005). *Agricultural Workers and their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development*. Rome: FAO-ILO-IUF.
- ILO. (2013). *Labour and Social Trends in Indonesia 2013: Reinforcing the Role of Decent Work in Equitable Growth*. Jakarta: ILO.
- Institute for Ecosoc Rights. (2014). *Industri Perkebunan Sawit dan Hak Asasi Manusia: Potret Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah*. Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights/ Norwegian Center Human Rights.
- Levang, Patrice, Wahyu F. Riva & Meri G. Orth. (2016). Oil Palm Plantations and Conflict in Indonesia: Evidence from West Kalimantan. In Cramb, Rob & John McCarthy (Eds.), *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (pp. 283-300). Singapore: NUS Press.
- Li, Tania Murray. (2011). Centering Labour in the Land Grab Debate. *Journal of Peasant Studies*, 38 (2), 281-298.
- Li, Tania Murray. (2013). Involution's Dynamic Others. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 20 (2), 276-292.
- Li, Tania Murray. (2015). *Social impacts of oil palm in Indonesia: A gendered perspective from West Kalimantan*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Li, Tania Murray. (2015). Transnational Farmland Investment: A Risky Business. *Journal of Agrarian Change*, 15 (4), 560-568.
- Li, Tania Murray. (2016). Situating Transmigration in Indonesia's Oil Palm Labour Regime. In Cramb, Rob & John McCarthy (Eds.), *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in*

- Indonesia and Malaysia* (354-377). Singapore: NUS Press.
- Li, Tania Murray (in press). The Price of Un/Freedom: Indonesia's Colonial and Contemporary Plantation Labour Regimes. *Comparative Studies in Society and History*.
- Marti, Serge. (2008). *Losing Ground: The Human Rights Impacts of Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia*. Friends of the Earth, LifeMosaic, dan Sawit Watch.
- McCarthy, John. (2011). The Limits of Legality: State, Governance and Resource Control in Indonesia. In Aspinall, Edward & Gerry van Klinken (Eds.), *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- McCarthy, John. (2010). Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 37 (4), 821-850.
- McCarthy, John. (2012). Certifying in Contested Spaces: Private Regulation in Indonesian forestry and oil palm. *Third World Quarterly*, 33 (10), 1871-1888.
- McCarthy, John F, dan Rob Cramb. (2016). Conclusion. In Cramb, Rob & John McCarthy (Eds.) *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (pp. 442-464). Singapore: NUS Press.
- McCarthy, John F., Jacqueline A.C. Vel, & Suraya Afiff. (2012). Trajectories of Land Acquisition and Enclosure: Development Schemes, Virtual Land Grabs, and Green Acquisitions in Indonesia's Outer Islands. *Journal of Peasant Studies*, 39 (2), 521-550.
- McCarthy, John, Piers Gillespie, & Zahari Zen. (2012). Swimming Upstream: Local Indonesian Production Networks in "Globalized" Palm Oil Production. *World Development*, 40 (3).
- McCarthy, John & Zahari Zen. (2010). Regulating the Oil Palm Boom: Assessing the Effectiveness of Environmental Governance Approaches to AgroIndustrial Pollution in Indonesia. *Law and Policy*, 32 (1), 153-179.
- Molenaar, Jan Willem et.al. (2013). *Diagnostic Study on Indonesian Oil Palm Smallholders: Developing a better understanding of their performance and potential*. Washington: International Finance Corporation/ World Bank Group.
- Park, Clara M. & Ben White (Eds.) (Forthcoming). Gender, generation and rural transformation in Southeast Asia. *Journal of Peasant Studies*, Special Edition.
- Pelzer, Karl J. (1978). *Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra 1863-1947*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Potter, Lesley. (2009). Oil Palm and Resistance in West Kalimantan, Indonesia. In Caoutette, Dominique & Sarah Turner (Eds.), *Agrarian Angst and Rural Resistance in*

- Contemporary Southeast Asia* (105-134). London: Routledge.
- Potter, Lesley. (2012). New Transmigration 'Paradigm' in Indonesia: Examples from Kalimantan. *Asia Pacific Viewpoint*, 53 (3), 272-287.
- Potter, Lesley & Simon Badcock. (2004). Tree Crop Smallholder, Capitalism, and Adat: Studies in Riau Province, Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 45 (3), 341-356.
- Pye, Oliver. (2016). Deconstructing the Roundtable on Sustainable Palm Oil. In Cramb, Rob & John McCarthy (Eds.), *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (pp. 409-441). Singapore: NUS Press.
- Rist, Lucy, Laurene Feintrenie, & Patrice Levang. (2010). The Livelihood Impacts of Oil Palm: Small-holders in Indonesia. *Biodiversity Conservation*, 19, 1009-1024.
- Semedi, Pujo. (2014). Palm Oil Wealth and Rumour Panics in West Kalimantan. *Forum for Development Studies*, 41 (2), 233-252.
- Semedi, Pujo & Laurens Bakker. (2014). Between Land Grabbing and Farmers' Benefits: Land Transfers in West Kalimantan, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 15 (4), 376-390.
- Siagian, Saurin P, Amin Siahaan, Buyung, & Nur Khairani. (2011). *The Loss of Reason: Human Rights Violations in the Oil Palm Plantations in Indonesia*. Lentera-Brot fur die Welt.
- Sinaga, Hariati. (2013). Employment and Income of Workers on Indonesian Oil Palm Plantations: Food Crisis at the Micro Level. *Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society*, 1 (2), 64-78.
- Sirait, Martua. (2009). *Indigenous Peoples and Oil Palm Expansion in West Kalimantan, Indonesia*. The Hague: Cordaid.
- Situmorang, Manginar. (2010). Strengthening the Peasant and Plantation Workers' Movement in North Sumatra. *Asia Monitor Resource Centre*.
www.amrc.org.hk/node/1005.
- Stoler, Ann Laura. (1995). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Tjandraningsih, Indrasari. (2012). State-Sponsored Precarious Work in Indonesia. *American Behavioral Sciences*, 57 (4), 403-419.
- USDA. (2013). *Indonesia: Palm Oil Expansion Unaffected by Forest Moratorium*.
- Varkkey, Helena. (2012). Patronage Politics as a Driver of Economic Regionalisation: The Indonesian Oil Palm Sector and Trans-boundary Haze. *Asia Pacific Viewpoint*, 53 (3), 314-329.
- Wakker, Eric. (2005). *Greasy Palms: The Social and Ecological Impacts of*

Large Scale Oil Palm Plantation in Southeast Asia. Friends of the Earth.

White, Ben. (2012). Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and the Future of Farming. *IDS Bulletin*, 43, 9-19.

World Bank. (2010). *Indonesia Jobs Report: Towards Better Jobs and Security for All.* Jakarta: World Bank.

World Bank & International Finance Corporation. (2011). *The World Bank Group Framework dan IFC Strategy for Engagement with the Palm Oil Sector.* Washington.

**IMPIAN YANG KANDAS?
PENGALAMAN KAUM MUDA TERKAIT PERUBAHAN AGRARIA DI
WILAYAH SAÏSS DI MAROKO¹**

Lisa Bossenbroek

*Researcher of Urban/Rural Sociology, Qualitative Social Research,
Cultural Anthropology
Wageningen University & Research
lisabossenbroek@gmail.com*

Jan Douwe van der Ploeg

*Professor of Transition Studies at Wageningen University, Netherlands
Adjunct Professor of Rural Sociology at China Agricultural University in Beijing
jandouwe.vanderploeg@wur.nl*

Margreet Zwarteveen

*Professor of Water Governance, IHE Delft Institute
UNESCO-IHE Institute for Water Education
University of Amsterdam
m.zwarteveen@unesco-ihe.org*

Abstract

Important social and agrarian changes are taking place on the agricultural plain of the Saïss in Morocco. Rural young men and women are key players in this process. In this article, we use the experiences, aspirations, and dreams of rural young people in the Saïss to describe and discuss current agrarian dynamics to 1) illustrate how these are intimately linked to agrarian transformation; 2) demonstrate how futures and identities are deeply gendered; and 3) provide nuance to structural analyses of agrarian change with ethnographic accounts of how changes are perceived by the people experiencing them. Our analysis shows how young people skillfully and cautiously negotiate space to realize their aspirations. In doing so they carve out new and more modern farming identities and are able to combine rurality with modernity. Nevertheless, they are situated in web of power relations hampering the fulfillment of their aspirations and dreams. This forces some to put their dreams on hold and

¹ Artikel ini diterjemahkan dari artikel berbahasa Inggris yang berjudul *Broken dreams? Youth experiences of agrarian change in Morocco's Saïss region* (2015) yang terbit di jurnal *Cah Agric* 24: 342-348. Penerjemah: Rasmus Budhyono (Pengajar Departemen Sastra Inggris Universitas Padjadjaran)

find alternative futures, a result that will strongly influence and determine the future of the countryside.

Keywords: Agrarian change, Aspirations, Gender, Rural youth

Abstrak

Saat ini tengah terjadi berbagai perubahan sosial dan agraria di dataran pertanian Saïss di Maroko. Laki-laki dan perempuan muda perdesaan merupakan pemain kunci dalam proses ini. Pada artikel ini, kami menggali pengalaman, cita-cita, dan impian kaum muda perdesaan di Saïss untuk menjelaskan dan mendiskusikan dinamika agraria terkini dengan tujuan untuk 1) menggambarkan bagaimana hal-hal tersebut sangat terkait dengan transformasi agraria; 2) menunjukkan kuatnya dimensi gender pada masa depan dan identitas; dan 3) memberikan nuansa (nuance) kepada analisis struktural perubahan agraria dengan menyajikan paparan etnografis mengenai bagaimana perubahan-perubahan tersebut dipersepsi oleh kaum muda yang mengalaminya. Analisis kami menunjukkan bagaimana kaum muda secara mahir dan hati-hati menegosiasikan ruang untuk mewujudkan cita-cita mereka. Dalam melakukan hal tersebut, kaum muda menggali identitas-identitas pertanian baru dan lebih modern serta menggabungkan kedesaan dan modernitas. Meski demikian, mereka terjerat dalam jejaring relasi kuasa yang menghambat pemenuhan cita-cita dan impian mereka. Hal ini memaksa sebagian kaum muda untuk menunda impian dan mencari alternatif masa depan, dampak yang akan sangat memengaruhi dan menentukan masa depan perdesaan.

Kata kunci: *Perubahan agraria, Aspirasi, Gender, Kaum muda perdesaan.*

Pengantar

Saat mengunjungi wilayah Saïss di Maroko, kami begitu tertarik dengan dinamisme dan energi kaum muda di sana. Mereka terlihat bekerja di lahan, mengoperasikan sistem irigasi tetes, memanggang roti, atau mencuci karpet di kanal-kanal irigasi. Antusiasme tersebut bertolak belakang dengan kebanyakan tulisan mengenai kaum muda perdesaan, yang mengasosiasikan cita-cita masa depan modern mereka dengan hilangnya minat terhadap pertanian dan dengan keinginan pindah ke kota (Gidakou, 1999; Leavy dan Smith, 2010). Alih-alih demikian, kaum muda di Saïss yakin bahwa masa depan yang lebih layak daripada nasib orang tua mereka masih mungkin diraih di per-

desaan, dan bahwa modernitas masih bisa selaras dengan perdesaan.

Pada artikel ini kami menggunakan hasil diskusi dan pengamatan kami terhadap laki-laki dan perempuan muda di Saïss untuk:

- mengilustrasikan betapa transformasi agraria sangat terkait dengan pengalaman, cita-cita, dan impian mereka;
- menunjukkan betapa masa depan dan identitas-identitas pemuda desa sangat berbasis gender;
- memberi nuansa kepada analisis yang lebih struktural terhadap perubahan agraria dengan menyajikan

paparan etnografis mengenai pengalaman seputar perubahan-perubahan tersebut.

Kami berargumen bahwa hanya dengan menangkap pengalaman mereka yang menjalani perubahan-perubahan tersebut kita dapat memahami apa arti transformasi agraria bagi “mereka yang membentuk, mempertahankan, atau menggantinya” (Scott, 1985).

Perhatian khusus kami terhadap kaum muda berawal dari kesadaran bahwa masa depan perdesaan sangat bergantung pada aspirasi-aspirasi mereka. Mundur ke belakang hingga 1969, Pascon dan Bentahar menyerukan agar perhatian lebih banyak diberikan kepada kaum muda dalam merencanakan dan memahami proses-proses perubahan agraria. Meski masa depan agraria bergantung pada ke-mauan dan kemampuan kaum muda untuk berkarier di bidang pertanian (White, 2012), literatur mengenai perubahan agraria biasanya tidak menganggap kaum muda sebagai aktor penting. Hanya segelintir penulis (Pascon dan Bentahar, 1969; Gidarakou, 1999; White, 2012) yang secara eksplisit memikirkan kaum muda. Kalaupun ada, pada umumnya untuk menyoroti kurangnya ambisi kedesaan mereka sebagai ancaman terhadap masa depan pertanian dan ketahanan pangan.

Metode

Penelitian lapangan untuk kajian ini dilakukan di desa Aït Ali karena saat itu di sana tengah terjadi proses pembubaran koperasi negara yang terletak di salah satu

penjuru desa. Proses ini memicu lebih lanjut dinamika perdesaan dan agraria (penjualan tanah, bermukimnya jenis-jenis petani baru, dan proyek-proyek pertanian baru). Adapun metode penelitian lapangan yang dilakukan mencakup serangkaian kunjungan antara Mei 2012 dan Februari 2015. Kami memadukan beberapa metode kualitatif, yaitu dengan melakukan 38 wawancara mendalam (20 pemuda dan 18 pemudi), wawancara kolektif, diskusi kelompok, dan *life history* (sejarah hidup). Responden dipilih melalui identifikasi diri dan antarsesama.

Saat mewawancarai kaum muda, kami meminta mereka untuk menghubungkan kami dengan kaum muda lainnya dan menanyakan apakah mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai kaum muda. Untuk memverifikasi dan mengontekstualisasi pengalaman dan sejarah hidup, kami juga mewawancarai orang tua, kakek-nenek, dan saudara responden. Untuk itu, kami pun terlibat dalam beragam kegiatan (pernikahan, kunjungan keluarga) agar turut mengalami kejadian sehari-hari pada konteksnya, menjembatani perbedaan budaya, dan membangun relasi kepercayaan dengan terwawancara. Hasilnya kemudian kami analisis melalui proses pengodean. Adapun aspek penafsiran diverifikasi lewat pembicaraan dengan sebagian kaum muda yang diwawancarai.

Dataran Saïss dan Dinamika

Agraria Saat ini

Desa Aït Ali terletak di dataran Saïss yang memiliki luas total 220.000 hektar. Sekira 49.677 di antaranya dialiri irigasi (Ministry

of Agriculture, 2012). Pertanian merupakan kegiatan utama di wilayah ini dengan gaya pertanian yang heterogen. Selama seabad terakhir, wilayah ini telah mengalami banyak transformasi agraria.

Tiga dekade terakhir adalah masa-masa penuh gejolak sebagai akibat dari bermacam-macam kebijakan-kebijakan liberalisasi, naiknya penggunaan air tanah serta dampak perubahannya terhadap pola-pola tanaman, integrasi ke dalam pasar-pasar baru, dan penggunaan teknologi. Selain itu, privatisasi lahan koperasi negara pada 2006 dan kebijakan-kebijakan tanah lainnya, termasuk Program *Plan Maroc Vert* (Program Maroko Hijau) sejak 2008 (untuk mempromosikan modernisasi pertanian), menyulut lebih jauh dinamika yang terjadi. Dinamika ini selain menekankan sebagian petani kecil untuk menjual tanah mereka, juga membuat daerah Saïss menarik untuk investor baru dan petani gaya baru.

Yang membedakan secara jelas antara usaha tani baru dengan yang sudah ada adalah bahwa usaha tani baru dibatasi pagar, ditanami dengan tanaman monokultur bernilai tinggi (anggur dan pohon buah lainnya), serta dilengkapi dengan sumur-sumur bor dan sistem irigasi tetes.

Kaum Muda, Perubahan Agraria, dan Cita-Cita yang Bermunculan

Pemuda di sana pada umumnya menyangkan penjualan tanah akibat tekanan finansial dan bersikap kritis terhadap menyempitnya lahan penggembalaan akibat pagar-pagar yang mengelilingi lahan-lahan baru. Meski demikian, banyak yang mengapresiasi secara positif peluang-peluang eko-

nomi dan penghidupan baru (potensial) yang diciptakan para investor, termasuk beragamnya peluang kerja.

Bagi banyak pemuda, pewirausahaan baru menjadi panutan bila mampu menunjukkan cara-cara bertani baru dan berbeda dan menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi seorang petani. Mereka juga menjadi rujukan saat kaum muda menyatakan impiannya, misalnya untuk menjadi petani organik atau membuka perusahaan bibit pohon buah. Para pemuda juga bermimpi untuk menjadi modern. Namun demikian, yang menjadi panutan mereka adalah para tokoh perempuan di serial opera sabun populer di televisi Turki dan Mesir, atau guru-guru perempuan yang mengajari mereka Al-Quran dan literasi.

Seperti para perempuan modern panutan mereka, mereka pun ingin memiliki penghasilan sendiri dengan memprofesionalkan dan meluaskan kegiatan rumah tangga mereka. Untuk itu, selain mengejar pendidikan, mereka juga bermimpi mendirikan *bakery* atau usaha sapi perah. Akan tetapi, bisnis seperti ini masih jarang di daerah ini. Perempuan muda lainnya ada yang bermimpi menikah dengan lelaki kaya yang tinggal di kota dan punya rumah kedua di desa, atau yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan mapan.

Berikutnya, kami menggunakan sebagian studi kasus mendalam untuk menyusuri dari mana datangnya cita-cita dan impian mereka dan menggali bagaimana mereka dapat mewujudkannya.

Mengurai Cita-Cita: Merancang Masa Depan yang Didambakan dan Citra Diri Baru

Cita-cita dan impian beragam kaum muda dapat dipandang sebagai “proyek kehidupan” (*life-projects*) atau rancangan masa depan dambaan (Du Bois-Reymond, 1998). Berikut ini kami sajikan empat proyek kehidupan berbeda yang mewakili pengalaman dan cita-cita kaum muda yang mengalami perubahan agraria di Saïss. Kisah-kisah hidup berikut menggambarkan betapa kepemudaan mereka ditandai dan dibentuk oleh gender, sejarah keluarga, akses ke sumber daya, dan pengalaman masa lalu.

Driss: “Saya berencana mendirikan perusahaan pembibitan pohon buah”

Driss adalah pemuda berumur 29 tahun yang melihat dirinya di masa depan sebagai seorang petani mandiri yang mengelola proyek pertaniannya sendiri dan memutakhirkannya dengan jenis panen dan teknologi terbaru. Citra ini cukup berbeda dari situasinya sekarang. Ia bertani dengan saudara-saudara laki-lakinya di tanah milik dan di bawah wewenang ayahnya. Mereka menggarap tiga hektar lahan bawang dan tomat yang dialiri irigasi, dan sepuluh hektar sisanya ditanami tanaman biji-bijian tadah hujan.

Cita-cita Driss sebagian besar tumbuh lewat berbagai pengalaman magang dan pelatihan praktis yang dilakoninya sejak ia berhenti sekolah pada umur lima belas tahun. Ia magang di “beberapa pertanian yang ada di garis depan kemajuan terkait irigasi tetes.” Lewat keahlian dan pengetahuan baru yang dikuasai serta pengenalan

terhadap teknologi baru, Driss meramu bahan-bahan untuk merancang proyek kehidupannya, yang juga sebagian dibentuk oleh latar sejarah tertentu di keluarganya. Pada 1992, ayah Driss memperoleh lahan seluas tiga belas hektar ketika koperasi negara direstrukturisasi. Saat lahan diprivatisasi harga tanah naik sehingga tidak mungkin bagi Driss untuk membeli atau menyewa lahan karena banyak petani yang dahulu menyewakan tanah mereka kini lebih memilih menjualnya. Karena itu, Driss memandang bahwa tanah milik ayahnya sebagai aset yang lebih berharga. Inilah yang semakin memperkuat cita-cita Driss.

Anas: “Saya ingin mendirikan pabrik pengemasan dan pendinginan”

Kisah Anas, pemuda 26 tahun, menggambarkan bagaimana pengalaman masa lalu dan sejarah keluarga membentuk cita-cita dan proyek kehidupannya. Seperti Driss, Anas mengikuti bermacam program pelatihan dan magang di berbagai usaha tani besar di wilayah tersebut. Keterpaparan oleh inovasi baru mengilhaminya untuk mulai mengembangkan proyek sendiri.

Kenyataan bahwa Anas memiliki akses ke lahan, yang diperoleh dan dikelola oleh generasi pendahulunya, semakin memupuk cita-citanya. Kakek Anas, yang pernah bekerja di bawah pemerintahan protektorat Perancis dan kemudian bekerja di Perancis, membeli 45 hektar tanah dengan uang yang diperolehnya semasa bekerja. Saat ini ia mengelola usaha tani bersama dengan empat anaknya dan Anas, cucu lelaki tertuanya. Usaha tani keluarga ini memadukan peternakan dengan beberapa hektar ladang gandum dan sayuran. Dalam pengelolaan usaha tani tersebut, semua keputusan penting

diambil oleh ayah Anas (seorang pegawai negeri) dan kakeknya.

Cita-cita Anas diiringi keinginan untuk membuat dirinya berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Tidak seperti sang kakek yang pernah bekerja sebagai buruh pertanian bagi orang asing, berkotor-kotor dan berkeringat demi mengumpulkan warisannya, Anas bermimpi menjadi manajer pertanian yang berdandan rapi dan mengelola usahanya dari kesejukan ruang kantor atau mobil pribadi.

Samira: “Saya ingin menikah dan memiliki dua rumah: satu di kota dan satu di desa.”

Samira, perempuan muda berusia 30, sangat ingin membangun rumah tangga sendiri dan hidup mandiri tanpa membebani kedua orang tuanya. Saat pertama kali kami menanyakan impiannya, Samira menjawab dengan mata berbinar: “Saya ingin menikah dan memiliki dua rumah: satu di kota dan satu di desa”. Pada pertemuan-pertemuan kami selanjutnya, pernikahan mencuat sebagai topik berulang yang mencerminkan apa yang senantiasa diidam-idamkannya.

Bagi Samira, pernikahan merepresentasi: “rumah”, “kemapanan”, “kemandirian”, dan “jalan memperoleh anak-anak yang dapat mengurus saya di masa tua kelak”. Samira menyayangi ibunya dan mengagumi ketangguhannya. Dengan bangga ia pun menyebut ibunya sebagai “perempuan yang cerdas, cekatan, dan tidak pemalas”. Meski demikian, ia mengambil jarak dari identitas pertanian profesional ibunya karena ia memiliki cita-cita sendiri sebagai orang yang berbeda kelak: “Ibu mengurus sapi dan kebun, tapi saya tidak ingin seperti ibu.

Terlalu banyak kerja.” Pada kenyataannya, Samira toh kerap membantu mengurus dua hektar tanah milik ayahnya karena tinggal Samiralah satu-satunya anak yang masih tinggal di rumah.

Mona: “Saya ingin punya kehidupan yang terhormat dan mengejar pendidikan”.

Mona, 28, bekerja sebagai buruh perempuan di proyek sepupunya, Anas (lihat di atas). Ia bermimpi tinggal di kota dan berhenti bekerja di pertanian. Ia seorang janda cerai yang tinggal bersama putranya, Adam (5), kedua orang tua, dan dua saudara laki-laki (keduanya buruh) di sebuah pondok yang dibangun di atas sepetak tanah negara. Seperti Samira, Mona ingin terlepas dari nasib yang dialami orang tuanya. Ia ingin hidup terhormat, naik status sosial, dan melanjutkan pendidikan. Ayah Mona, 70, dulunya buruh pertanian milik penjajah di zaman pemerintahan protektorat Perancis. Setelah hengkangnya kaum penjajah Perancis, perjuangannya memperoleh lahan di salah satu koperasi negara kandas, dan ia terus berburuh tani bersama istrinya. Mereka memiliki enam anak dan tiga di antaranya masih tinggal bersama mereka.

Proyek kehidupan Samira dan Mona berbeda dengan proyek kehidupan Anas dan Driss. Hal ini menunjukkan betapa masa depan dan identitas di Saïss dibentuk oleh pembagian kerja berbasis gender yang berakar pada ideologi-ideologi gender di perdesaan. Bertani tetap merupakan identitas pekerjaan maskulin, dan pekerjaan perempuan umumnya terbatas pada lingkup urusan rumah tangga dan pertanian. Selain itu, faktor tidak adanya akses ke tanah serta kegagalan menuntaskan pendidikan semakin

menguatkan proyek kehidupan dan pilihan-pilihan dalam hidup mereka.

Menegosiasikan Ruang: Membangun Strategi untuk Mencapai Impian

Setelah memantau pemuda-pemudi di atas dan kaum muda lainnya selama hampir tiga tahun, kami mulai memahami bagaimana mereka menghadapi berbagai bentuk opresi berbasis ideologi gender, relasi kekerabatan patriarkal, norma-norma sosiokultural dan tradisi, yang semuanya membangun struktur kehidupan perdesaan dengan cara-cara tertentu. Selain itu, banyak kaum muda yang sangat bergantung pada relasi keluarga dan komunitas demi penghidupan dan membangun rasa identitas mereka (Pascon dan Bentahar, 1969).

Mengejar impian adalah hal yang sulit bagi mereka karena upaya tersebut memerlukan modifikasi relasi-relasi sehingga akan menggoyahkan identitas-identitas, nilai-nilai, dan tradisi yang selama ini mengajegkan identitas-identitas tersebut. Mereka dihadapkan pada resistensi, terutama karena banyak kaum muda yang menggantungkan akses terhadap tanah kepada orang tua dan tidak dapat atau tidak ingin merusak relasi mereka dengan orang tua dan kerabat. Karena itu, untuk mewujudkan proyek, mereka harus hati-hati dalam bermanuver dan menegosiasikan ulang ruang-ruang sosiokultural dan politik mereka yang ada dan menciptakan ulang identitas lewat cara-cara yang tidak akan menimbulkan konflik yang merusak.

Driss Merintis Jalan menjadi Petani Bibit Pohon Buah

Dalam rangkaian wawancara kami, Driss sering mengeluhkan betapa ia selalu harus mengikuti keinginan dan otoritas ayahnya: “Jika ayah mengatakan bahwa kami harus menanam empat hektar lahan dengan bawang, saya tidak dapat menolak atau menentangnya.” Cara Driss membicarakan ayahnya mirip dengan cara banyak petani laki-laki muda lain membicarakan ayah mereka. Rata-rata mereka menyorot dominasi sosok ayah dalam proses pengambilan keputusan tentang pertanian seraya menggambarkan pergulatan-pergulatan kuasa patriarkal yang kerap terjadi. Hal ini semakin mengejawahtah dan terjustifikasi dalam ideologi-ideologi gender yang berlaku, yang menggambarkan ayah sebagai pencari nafkah, dan dalam penataan kontrol, kepemilikan, dan pewarisan tanah. Menurut hukum, anak perempuan mewarisi sepertiga dan anak laki-laki dua-pertiga kekayaan orang tua. Meski demikian, praktik-praktik adat sering merampas hak-hak perempuan.

Impian Driss untuk mendirikan usaha bibit pohon buah mengakibatkan keterputusan dengan praktik pertanian yang lazim saat ini. Untuk memperoleh dukungan terhadap proyeknya, akhirnya Driss menggunakan banyak cara agar ayahnya mendukungnya (gambar 1). Selama kerja magang yang diikutinya, Driss pulang ke rumah setiap akhir pekan untuk membantu ayahnya. “Di saat-saat itulah saya dapat berbagi dan berdiskusi mengenai apa yang saya amati dan pelajari di lahan-lahan pertanian tempat saya magang,” ujarnya.

Sambil membantu ayahnya di pertanian, Driss menunjukkan kemampuan dan pengalamannya sebagai strategi untuk meyakinkan ayahnya tentang keahlian teknis yang dikuasainya dan untuk mengenalkan ayahnya kepada perkembangan-perkembangan baru. Ia juga menyisihkan sebagian upahnya untuk proyeknya. Pada 2009, ia akhirnya berhasil meyakinkan ayahnya untuk memasang irigasi tetes di lahan pertanian. Setahun kemudian, Driss menjelaskan pada ayahnya bagaimana rencananya untuk mewujudkan proyek pertaniannya sekaligus menyajikan gambaran biaya dan keuntungannya. Meskipun tidak sepenuhnya yakin, ayah Driss menyetujui untuk menyewakan satu hektar tanah kepadanya.

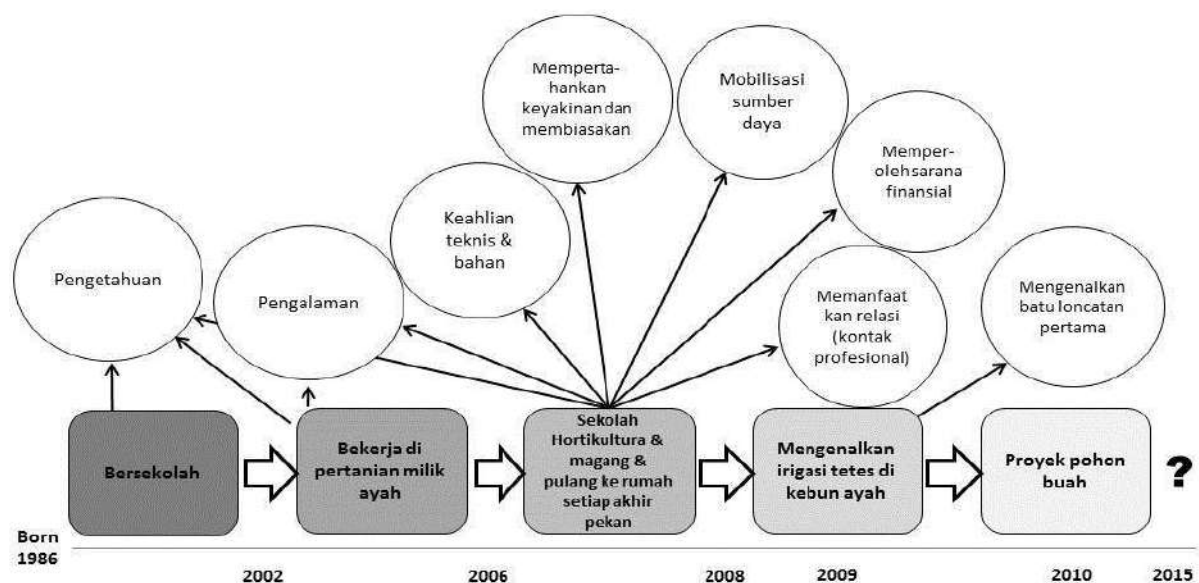
Saya menyewa satu hektar dari ayah dan membayar uang kepada ayah atas air yang digunakan untuk mengairi bibit pohon. Saya menerima 9.000 bibit gratis dari beberapa kenalan yang saya temui waktu saya magang. Dengan uang yang saya tabung, saya dapat mempekerjakan buruh.

Kenalan-kenalan profesional Driss juga memberinya pipa-pipa irigasi tetes bekas, yang dipasangnya untuk mengairi bibit.

Anas: antara *Fellah* (Petani) dan *Rajel Amal* (Pebisnis)

Kisah Anas memberikan gambaran lain mengenai betapa aktifnya kaum muda dalam menegosiasikan ruang bermanuver. Seperti Driss, Anas memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk proyeknya dengan melakoni kerja magang. Selama masa magang, Anas menjalin pertemanan dengan salah satu manajer pertanian. Mereka memutuskan berkolaborasi untuk mengembangkan proyek pembibitan pohon zaitun.

Untuk meyakinkan kakek, ayah, dan paman-pamannya, Anas kemudian merancang sebuah rencana bisnis: “Sedikit demi sedikit saya meyakinkan mereka. Pertama ayah, [yang paling tua] lalu kemudian saya berupaya meyakinkan yang lainnya. Namun, tidak semuanya teryakinkan. Untuk meyakinkan paman, kami mengunjungi teman saya yang merupakan seorang teknisi. Ia menjelaskan komponen-komponen teknis proyek saya sehingga akhirnya paman saya teryakinkan.”



Gambar 1. Menegosiasikan Ruang Melalui Mobilisasi Kompetensi dan Sumber Daya yang Diraih Driss.

Seperti Driss, Anas memperoleh bibit dari teman yang dikenalnya semasa magang. Ayah Anas membiayai proyek, sementara rekan Anas menangani pemasaran. Setelah dua tahun, Anas memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Saat ini, pohon-pohon di pertanian Anas diiri dengan alat penyiram dan irigasi tetes dan Anas menggunakan campuran hormon pada akar pohon untuk meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan pohon.

Pada 2013, Anas bersama seorang sepupu memulai proyeknya yang terbaru, yaitu membuat tiang-tiang beton yang digunakan para investor baru untuk memagari tanah mereka: “Mereka yang datang kepada saya untuk mencari bibit pohon biasanya ingin membangun

usahatani baru dan mereka tertarik pula untuk membeli tiang-tiang beton.” Katanya.

Garapan baru Anas ini jelas menunjukkan jiwa wirausahanya. Sumber-sumber daya keluarga, serta kenyataan bahwa Anas adalah putra tertua, merupakan faktor pembantu. Meski demikian, Anas juga harus mengerahkan tenaga dan waktu untuk meyakinkan para pamannya dengan memobilisasi pengalaman-pengalaman yang pernah diperoleh dan berinvestasi dalam membangun jejaring profesional.

Inovasi teknologi yang dilakukan Anas memainkan peran penting karena dapat mengeluarkan aura kecanggihan teknis pada proyek-proyeknya. Melalui proyek-proyeknya, Anas mengidentifikasi diri sekaligus sebagai *fella* (petani) dan

rajel amal (pebisnis), sebuah perpaduan antara tradisi dan modernitas. Dengan bangga Anas menunjukkan hubungan kuatnya dengan pertanian dengan mengakui hubungan keluarganya: “Saya memilih pertanian sebagai profesi saya. Kakek buyut saya adalah seorang *fellah* dan ia hidup hingga usia seratus tahun. Bertani adalah jalan hidup saya. Kami semua hidup bertani. Kami makan dari bertani.” Meski demikian, ia juga menekankan bahwa yang ia lakukan adalah hal yang baru dan berbeda: “Seiring waktu, pertanian berkembang, dan semakin banyak mesin dan teknologi yang digunakan”.

Berbeda dengan ayah, kakek, dan paman-pamannya, Anas jarang melakukan pekerjaan fisik di lahan pertanian. Meskipun kakeknya juga mengandalkan pekerja upahan yang membantunya bekerja di lahan, Anas lebih memilih mengawasi pekerja sambil sekali-sekali mengontak kliennya atau memeriksa tanaman dan sistem pengairan tetes. Selain itu, Anas juga kerap berkeliling dengan mobilnya untuk mengelola usahanya. Pada akhir pekan, ia bergaya mengenakan jaket kulit dan kadang-kadang pergi bersama teman-temannya untuk *nongkrong* dan *ngopi* di kota.

Dari caranya berdandan, bertingkah laku, dan berbicara, Anas memainkan peran sebagai jenis petani baru; seseorang yang berhasil memadukan keterikatan kepada tanah sebagai *fellah* dari masa lalu dengan mobilitas dan kemampuan manajerial seorang pewirausaha masa kini.

Samira Menciptakan Ruang untuk Menjadi Perempuan Terhormat

Jika kita melihat kehidupan pertanian sehari-hari yang dialami Samira dan Mona, tampak bahwa cita-cita mereka dibayangkan oleh rutinitas kehidupan mereka sehari-hari. Samira, seperti beberapa perempuan muda lain yang kami ajak bicara, menyebut bahwa yang dilakukannya di pertanian adalah “membantu”, “melakukan ini-itu” (*doing everything*), atau “menggantikan saudara lelakinya jika sedang tidak ada”.

Samira tidak menyebut kegiatannya di pertanian sebagai kerja tani. Bagi dirinya dan perempuan lainnya, kegiatan bercocoktanam bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan; mereka terikat dengan tanah karena kerja yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai bagian identitas mereka (lihat pula O’Hara, 1998). Ideologi gender perdesaan telah mengukuhkan pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan dan menggariskan keibuan dan pengasuhan serta tugas-tugas domestik sebagai unsur inti pembentuk identitas perempuan dewasa.

Sebelum menikah, perempuan ada di bawah otoritas dan tanggung jawab orang tua, yang mengawasi perilaku mereka dan kerap hanya memberi ruang sempit bagi pengembangan diri. Dalam lingkungan seperti ini, pernikahan menjadi jalan bagi perempuan muda untuk keluar dari kontrol orang tua (Naamane-Guessous, 1998). Pernikahan juga merupakan salah satu dari sedikit cara bagi perempuan untuk naik tangga sosial. Sisi negatifnya adalah bahwa masyarakat perdesaan kurang menghargai perempuan yang belum menikah, terutama

jika mereka telah melewati usia yang secara sosial dianggap pas untuk menikah, yakni sekitar usia tiga puluh.

Kegiatan sehari-hari Samira sulit untuk dipadukan dengan harapannya untuk menikah dan memiliki satu rumah di kota dan satu di desa. Kenyataan pahitnya adalah, Samira masih lajang pada usia tiga puluh. Samira didera tekanan sosial untuk menikah. Sebagian tetangga menyebutnya “perawan tua”. Samira bergulat menghadapi harapan-harapan sosial tersebut tanpa mengesampingkan impiannya dengan cara mencari celah pada ideologi gender yang ada guna menciptakan ruang kemandirian relatif. Misalnya, ia mengikuti pengajian Quran dan kursus literasi yang diselenggarakan di sebuah mesjid di Aït Ali.

Selain membantu mengembangkan kemampuan membaca dan menulis Samira, kegiatan tersebut juga memberi kesempatan baginya untuk bertemu dengan “perempuan-perempuan terhormat” lain: “Saya belajar berdandan dengan benar. Kami harus mengenakan pakaian bersih ke mesjid: pakaian panjang yang dikenakan dengan benar. Saya belajar menghargai diri saya sendiri.”

Pertama kali kami bertemu Samira saat ia tengah menyuci karpet di desa. Ia mengenakan kerudung longgar agak carang yang memperlihatkan kedua telinganya. Perempuan-perempuan lain mengenakan kerudung yang menyembunyikan telinga mereka dan berbahan lebih rapat sehingga tidak terlalu memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Setelah beberapa kali menghadiri pengajian, Samira mulai mengubah caranya mengenakan hijab. Ia

menjelaskan bahwa ini ia lakukan “untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Sejak saya berhijab seperti ini, saya merasa bahwa warga Aït Ali lebih menghargai saya.”

Perubahan caranya berkerudung tersebut juga bertepatan dengan peningkatan mobilitasnya. Untuk menghadiri pengajian di mesjid, ia harus berjalan sepuluh menit dari rumahnya, melewati ruang “publik” yang dianggap maskulin. Dengan mengubah caranya mengenakan kerudung, Samira dapat mengarungi ruang ini tanpa mengundang kernyit dahi atau komentar kritik. Tindakan ini telah membangun sebuah gelembung privat yang tidak bisa ditembus, semacam ranah privat simbolis. Inilah yang membuatnya bisa berjalan melalui ranah “publik” tanpa kehilangan kehormatan atau diejek sebagai perawan tua.

Ketika pengajian dan kursus literasi dihentikan sementara, Samira bekerja di tanah milik pamannya, yang berjarak dua puluh menit dari rumahnya. Karena ia bekerja dengan sepupunya di bawah pengawasan paman dan bibinya sendiri, ruang ini dapat dianggap sebagai perluasan lingkung “privat” perempuan. Samira menjelaskan keengganannya tinggal di rumah serta keinginannya bertemu dengan orang lain, Ia berujar:

Saya bertemu dengan perempuan-perempuan lain di desa yang punya lebih banyak pengalaman hidup. Sambil bekerja, kami membicarakan banyak hal; masalah yang mereka hadapi di rumah dengan suami atau keluarga suami, masalah membesarkan anak, isu-isu seksual, serta bagaimana cara memuaskan suami.

Samira membelanjakan uangnya untuk membeli parfum atau pakaian dan mulai memikirkan untuk membangun usaha: proyek sapi perah di desa, atau toko kue di kota. Sebagaimana dikisahkan Samira, ideologi gender yang ada menentukan parameter bagaimana perempuan muda mengimpikan pengembangan diri mereka. Dalam lingkup parameter itulah perempuan muda seperti Samira mencari jalan dan ruang untuk memperoleh pengalaman hidup yang dapat diterima secara sosial dan kultural (**Gambar 2**). Saat berkumpul dengan perempuan lain, mereka mengajari Samira bagaimana dapat terus menjaga kehormatan sambil menikmati (setidaknya sebagian) kesenangan kehidupan modern. Dalam prosesnya, mereka sedikit meredefinisi apa yang dimaksud dengan *ke-perempuan-an* dan mengukir masa depan serta identitas baru mereka tanpa mengganggu tatanan gender yang berlaku.

Perjalanan Mona Mencapai Otonomi dan Pengembangan Diri

Kisah Mona memberikan gambaran lain mengenai bagaimana perempuan muda perdesaan menegosiasikan identitas-identitas mereka. Setelah bercerai, Mona terpaksa pulang ke rumah orang tuanya. Masyarakat perdesaan Maroko sering bersikap kejam terhadap janda dan menganggap mereka sebagai perempuan lajang. Jika mereka punya anak dan berarti sudah tidak perawan, status mereka bahkan dianggap lebih rendah dari perempuan lajang (Naamane-Guessous, 1988). Perempuan janda kembali ada dalam perwalian dan pengawasan orang tua. Keadaannya lebih

buruk bagi Mona karena ia pulang membawa satu mulut lagi untuk diberi makan. Mona mendapatkan dirinya kembali ke titik nol dan semakin jauh dari proyek membangun kehidupan terhormat dan meneruskan pendidikan.

Meskipun tampak tanpa harapan, Mona tidak kehilangan geliat. Untuk mendapatkan penghasilan secara mandiri, ia mulai bekerja pada proyek Anas. Pilihan ini memungkinkannya untuk membangun identitas sebagai ibu tunggal yang bekerja demi menjamin masa depan yang lebih baik bagi putranya dan menyekolahkanya kelak. Karena Anas masih sanak keluarga dan Mona pun bekerja dengan tetangganya sesama perempuan, ia memandang pekerjaan ini masih ada pada ranah “privat” sambil memanfaatkannya untuk menegosiasikan identitas “publik”.

Penghasilan Mona yang membantu memenuhi kebutuhan rumah turut menguatkan otonomi dan posisi tawarnya dalam keluarga. Selain itu, Mona juga menabung sebagian penghasilannya untuk bermigrasi bersama putranya ke Eropa melalui Tunisia dan Libya lalu bekerja dan melanjutkan pendidikannya di sana. Ia membeli dua paspor, dua tiket pesawat ke Tunis dan membayar penyelundup manusia. Ia sangat gembira saat tiba di Tunisia: “Saya cinta Tunisia. Saya bisa melihat laut dan menjadi Mona yang lain. Saya ingin bekerja, memiliki SIM, dan melanjutkan pendidikan.”

Seperti Samira, Mona mengarungi harapan-harapan dan ideologi bergender, dan mengakali bagaimana mengurangi cap negatif yang diletakkan padanya sebagai janda dan ibu tunggal. Ia pun memimpikan

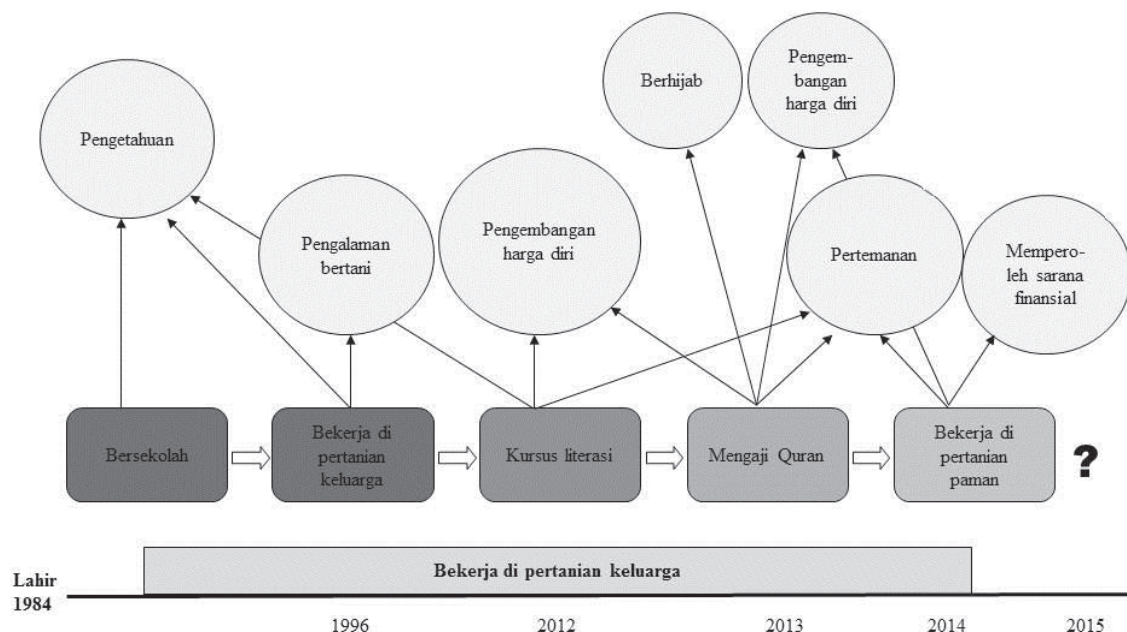
masa depan di tempat lain untuk lepas dari tatanan kejam dan membatasi yang berlaku di desanya. Prospek masa depan baru di seberang Laut Tengah sebagai sosok Mona yang baru—perempuan yang bekerja sambil kuliah—adalah impian yang membe- rinya harapan dan membuatnya bertahan hidup.

Menunda Impian dan Memutar Haluan Cita-Cita

Sejauh mana Driss, Anas, Samira, dan Mona berhasil menciptakan ruang penting bagi cita-cita dan impian mereka dalam lingkup norma sosiokultural, ideologi, dan tradisi yang ada di perdesaan? Akankah mereka membebaskan diri dari jerat geliat kuasa hierarkis yang membelenggu mereka?

Driss pernah bermimpi menyangkok

9.000 bibit pohon, yang ditanamnya di satu hektar lahan yang disewa dari ayahnya, ke sisa tanah yang ada. Akan tetapi, ia tidak berhasil meyakinkan ayahnya akan hal ini dan akhirnya terpaksa menjual bibit-bibit tersebut. Ia harus berbenturan dengan ke- inginan dan otoritas ayahnya. Tanpa perse- tujuan dan sumber daya yang dimiliki ayahnya, Driss hanya dapat berbuat sedikit atau tidak sama sekali. Keadaan ini sangat membuatnya kecewa: “Saya ingin pindah ke daerah lain. (...) saya muak dengan keadaan ini. Saya hanya ingin sesuatu untuk diri saya sendiri, sesuatu yang bisa saya andalkan. Proyek sendiri, uang sendiri.” Driss tidak menolak bertani, tetapi ia ingin pindah ke tempat lain untuk mengejar proyek kehidupannya, jauh dari penglihatan dan pengawasan ayah, keluarga, dan masyarakat desanya.



Gambar 2. Menegosiasikan Ruang dengan Mobilisasi Kompetensi dan Sumber Daya yang Diraih Samira

Proyek-proyek Anas berjalan namun keinginannya untuk “kelak bertani lepas secara mandiri dari ayahnya” menyiratkan kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. “Keberhasilan” Anas bergantung pada persetujuan dan dukungan kakek dan ayahnya. Mereka memantau berbagai kegiatan Anas dan mengontrol semua alat produksi. Misalnya, ayah Anas memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab pemasaran produk ketika Anas menghadapi kesulitan dalam menagih hutang. Ayah Anas, dalam hal ini, kurang menaruh kepercayaan pada anaknya dan enggan menyerahkan kuasa pengambilan keputusan pertanian kepadanya. Terdapat pula masalah perbedaan generasi pada cara Anas dan ayah atau kakeknya mendefinisikan petani yang baik. Bagi generasi terdahulu, kelaki-lakian perdesaan diidentikkan dengan kekuatan fisik, kerja keras, dan kekotoran. Bahwa Anas tidak mengikuti stereotip ini menjadi sumber kekecewaan bagi kakeknya: “Mereka kerjanya jalan-jalan, dan baju serta celana mereka selalu bersih. Mana mau mereka tangannya kotor.”

Samira bergiat dalam aktivitas beragam untuk meredefinisi dirinya dalam lingkungan sosiokultural yang tidak bersahabat kepada perempuan “tua” yang tidak atau belum menikah. Pada musim dingin 2015, Samira masih bermimpi untuk menikah dan hidup di kota sambil tetap memiliki rumah di desa, tetapi impian tersebut perlahan-lahan pudar. Ia malah mulai bermimpi pindah ke Perancis, sambil berharap bantuan kakaknya untuk mengatur kontrak kerja baginya.

Dalam salah satu wawancara terakhir dengannya, Samira menyimpulkan: “Hara-

pan kami hanyut sudah terbawa arus sungai, dan kami tetap tinggal bersama orang-orang baik [orang tuanya].” Pada kasus Mona, saat ia tiba di Tunisia dan berdiri di tepi laut, ia menyadari bahwa dirinya dan anaknya sama-sama tidak bisa berenang. Ia tiba-tiba menjadi begitu takut akan perahu (ilegal) yang hendak membawanya ke seberang sehingga ia membatalkan rencananya dan malah membeli dua tiket pulang kembali ke Casablanca. “Saya sudah bekerja selama lima tahun bahkan menjual kalung emas saya demi mengubah hidup, namun kini semuanya kandas.” Sekembalinya ke rumah, ia berhenti bekerja dan menurut pengakuannya ia mengalami kecemasan dan masalah jantung: “Rasanya ada mata jahat yang selalu mengikuti saya. Orang-orang membicarakan hal buruk tentang saya.” Seperti Samira, ia mula berpikir untuk kabur ke Perancis dan berharap memperoleh kontrak kerja atau menikah sebagai jalan untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebagaimana tergambar melalui kehidupan Mona, setelah ia pulang kembali ke desa, semakin sulit baginya untuk mengangrunji jejaring tebal sosial dan kultural. Ia tidak mengalami pelayanan dan perlakuan sebagai ibu tunggal, janda cerai, dan buruh upahan, namun ia juga adalah seorang yang telah menghabiskan semua uangnya tanpa hasil. Bagi Mona, kehidupan perdesaan mulai dirasakan sebagai penjara. Seperti bagi Samira, bermigrasi kini menjadi satu-satunya jalan keluar—migrasi ke tempat yang jauh sehingga ia dapat memulai kembali kehidupan baru dan menjadi sosok “Mona yang lain”.

Kesimpulan

Analisis kami menunjukkan bahwa banyak kaum muda di Saïss terinspirasi oleh dinamika perdesaan saat ini sehingga memperkuat impian mereka untuk menggapai masa depan yang lebih baik dengan mencampurkan kehidupan modern dan perdesaan, misalnya lewat pemaduan identitas petani dan pewirausaha atau identitas ibu dan otonomi finansial. Meski demikian, tidaklah mudah bagi mereka untuk mewujudkan impian tersebut. Untuk itu, mereka harus memodifikasi hierarki keluarga dan kekerabatan patriarkal dan melawan ideologi-ideologi gender yang mengukuhkan semua itu. Pada proses pembelokan aturan dan penentangan kuasa, kaum muda mungkin mengalami kekecewaan dan keputusasaan, dan sebagian menyerah pasrah. Perempuan muda, terutama, adalah orang-orang yang mengalami pengekangan yang menghalangi pemenuhan cita-cita dan impian mereka.

Analisis kami menyimpulkan bahwa kelayakan hidup di perdesaan di masa depan mungkin bergantung pada pemberdayaan kaum muda dalam memenuhi impian mereka. Oleh karena itu, kami menutup makalah ini dengan seruan untuk memberikan pengakuan dan dukungan lebih baik bagi kaum muda serta gagasan dan ambisi mereka. Tanpa antusiasme dan kreativitas kaum muda perdesaan, dan tanpa dukungan agar mereka dapat menegosiasikan hirarki kuasa yang ada, ada risiko perdesaan menjadi situs stereotip tradisi dan stagnasi belaka. Dukungan dapat berupa program-program yang memfasilitasi akses ke lahan dan kredit, kursus-kursus pelatihan, lokakarya,

atau peningkatan sarana pendidikan yang mensyaratkan kuota minimum untuk perempuan muda. Dukungan yang diberikan juga harus mampu membedakan keragaman kepentingan kaum muda laki-laki dan perempuan, dan mengakomodasi perbedaan tingkat kekayaan dan akses ke tanah.

Kaum muda perdesaan adalah orang-orang yang penuh energi, gagasan, kemauan, dan keingintahuan, dan kini tinggal pemerintah Maroko dan para pembuat kebijakan yang harus mengakui dan memajukan semangat dan antusiasme kaum muda tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dilakukan dalam konteks proyek Daima dan didukung oleh Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) melalui Hibah Grant 313-99-230 dalam kerangka proyek MVI ‘*Drip Irrigation Realities in Perspectives*’. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Zakaria Kadiri dan Hichem Amichi yang telah memungkinkan penerbitan edisi khusus ini (Dalam edisi bahasa Inggris, red.). Kami juga berterima kasih kepada para pembaca kritis atas komentar penting mereka. Akhirnya, terima kasih kami sampaikan kepada Najoua El Alime atas bantuan dan buah pikirannya tentang penulisan makalah ini, juga kepada Anas, Driss, Samira dan Mona yang telah berkenan berbagi kisah mereka kepada kami. Artikel ini kami persembahkan untuk mereka.

Daftar Rujukan

- Du Bois-Reymond, Manuela. (1998). “I Don't Want to Commit Myself Yet”: Young people's life concepts. *Journal of Youth Studies* 1(1), 63-79. doi: 10.1080/13676261.1998.10592995.

- Gidakou, Issabella. (1999). Young Women's Attitudes towards Agriculture and Women's Attitudes towards Agriculture and Women's New Roles in The Greek Countryside: A first approach. *Journal of Rural Studies* 15(2),147-58. doi: 10.1016/S0743-0167(98)00054-0.
- Leavy, Jennifer & Sally Smith. (2010). Future Farmers: Youth aspirations, expectations and life choices. *Discussion Paper Future Agricultures 013*. Future Agriculture.
- Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime. (2012). *Situation de L'agriculture Marocaine*. Rabat (Maroko): Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime.
- Naamane-Guessous, Soumaya. (1988). *Au-delà de Toute Pudeur: La sexualité féminine au Maroc*. Casablanca (Maroko): Éditions Eddif.
- O'Hara, Patricia. (1998). *Partners in Production: Women, farm and family in Ireland*. Oxford: Bergahn Books.
- Pascon, P. & Bentahar M. (1969). Ce Que Disent 296 Jeunes Ruraux. In Khatibi, A (ed.) *Etudes Sociologiques Sur Le Maroc*. Tanger (Maroko): Éditions marocaines et internationales.
- Scott, James. (1985). *Weapons of The Weak: Everyday forms of peasant resistance*. New Haven (CT): Yale University Press.
- White, Ben. (2012). Agriculture and The Generation Problem: Rural Youth, employment and the future of farming. *IDS Buletin* 4(36), 9-19. doi: 10.1111/j.1759-5436.2012.00375.x.

MELAWAN CENGKRAMAN ISOLASI DAN KEMISKINAN: KEWIRAUSAHAAN ANAK MUDA PAPUA DI KAMPUNG- KAMPUNG TERPENCIL KABUPATEN TELUK BINTUNI, PAPUA BARAT

I Ngurah Suryawan

Pengajar di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA)

Manokwari, Papua Barat

ngurahsuryawan@gmail.com

Abstract

Papua young generation living in villages face various challenges to survive in poverty and isolated area. In the Kampong of Sarbe and Korano Jaya, Teluk Bintuni, West Papua, some young people work in many ways to escape from poverty. They develop a spirit of entrepreneurship by seeking and distributing prawns and crabs to support their economic life. Some of them organize a business group to be able to access bank credit to develop their business. This effort was positively responded by a private bank by giving them a bank credit. These young papuan have spirit of entrepreneurship for their pride and independent economy.

Keywords: *Entrepreneurship, poverty, isolation, autonomy*

Abstrak

Generasi muda Papua yang berada di kampung-kampung menghadapi tantangan untuk bertahan dari kemiskinan di tengah keterisoliran daerah. Di Kampung Sarbe dan Korano Jaya, Teluk Bintuni, Papua Barat, anak-anak muda berusaha dengan berbagai cara untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Mereka mengembangkan semangat kewirausahaan dengan mencari dan mendistribusikan udang dan kepiting untuk menopang kehidupan ekonomi mereka. Beberapa anak muda mengorganisir sebuah kelompok usaha untuk mendapatkan kredit permodalan untuk penangkapan dan pengalengan udang dan kepiting. Semangat kewirausahaan ini direspon positif oleh sebuah bank swasta sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Mereka memiliki semangat untuk berwirausaha demi martabat diri dan kemandirian ekonomi.

Kata kunci: *kewirausahaan, kemiskinan, isolasi, kemandirian*

Kitong tahu kitong kaya, tapi orang di luar tahu kitong miskin

(Kita tahu bahwa kita kaya, tapi orang di luar mengetahui kita miskin)

(Petrus, anak muda Kampung Sarbe)

Pendahuluan

Artikel ini mendalami tantangan-tantangan dan serta siasat yang dipraktikkan oleh generasi muda Papua di wilayah pedalaman (Kampung Sarbe) untuk berjuang dengan kelompok usaha mereka menerobos keterisolasian kampungnya. Pada saat yang bersamaan, inovasi-inovasi yang lahir dari kampung transmigran, yang mempertemukan orang Papua dengan orang Jawa berkolaborasi membentuk kelompok nelayan kepiting dan udang. Kelompok ini berkembang baik karena hasil kerjasama warga Kampung Korano yang mendapatkan suntikan dana kredit usaha dari Bank Mandiri.

Generasi muda di kampung-kampung terpencil tanah Papua menghadapi dilema dalam mengembangkan dirinya. Permasalahan tersebut mengacu kepada kondisi di kampung mereka yang berada di lokasi terpencil dan akses yang sangat sulit menuju ke daerah kabupaten. Keterjangkauan ini menjadi masalah mendasar untuk menghubungkan mereka dengan daerah-daerah lain dan mengembangkan berbagai macam aktivitas ekonomi. Keterisoliran itulah yang membuat mereka menjadi begitu tergantung dengan hasil-hasil kebun dan hidup subsisten. Cengkraman kemiskinan yang disematkan karena keterbatasan mengakses modernitas di kota menambah pelik suasana. Kesederhanaan dan ketergantungan mereka terhadap alam menjadi satu-satunya cara mereka bertahan di tengah kehidupan yang semakin keras.

Kehadiran para migran dari Jawa dan BBM (Buton Bugis Makassar) membawa mereka mengenal barang-barang yang dijual di kios-kios, biskuit dan tentu saja mi instan

yang digemari anak-anak. Seminggu sekali sebagian warga kampung dengan menggunakan *ketinting* dan *motor Johnson* menuju pasar di kota untuk menjual hasil kebun mereka dan uang yang mereka dapatkan habis untuk membeli bensin, beras, garam, dan kebutuhan lainnya. Begitu seterusnya. Situasi demikian membuat mereka enggan untuk sering ke kota dan lebih memilih tinggal di kampung. Mereka (para anak mudanya) berinisiatif untuk membuat kelompok usaha penangkapan udang dan kepiting dan hasil-hasil kebun yang akan dikumpulkan untuk kemudian dijual ke Pasar Baru Bintuni. Kelompok ini akan mengorganisir warga-warga kampung yang ingin menitipkan hasil kebun mereka seperti patatas, kumbili, pisang, rica, dan sayur-sayuran. Fokus mereka sebenarnya adalah penjualan kepiting dan udang yang memang menjadi primadona dan sumber penghasilan nelayan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Di sisi lainnya, di sebuah kampung lokasi transmigrasi, geliat anak-anak muda untuk berusaha dan maju dengan kelompok penangkap ikan dan kepiting juga jelas terlihat. Kampung Korano Jaya adalah wilayah transmigrasi SP (Satuan Pemukiman) yang menjadi pionir dari kelompok nelayan udang dan kepiting di wilayah Bintuni. Letak geografis yang lumayan dekat dengan kota memudahkan mereka untuk berkembang lebih baik. Satu karakter menarik dari kampung ini adalah akulturasi dan saling belajar serta memotivasi yang terjadi antara warga transmigrasi yang sebagian besar dari Jawa dengan warga Bintuni yaitu dari orang Wamesa dan kelompok etnik lainnya di Papua.

Bagian pertama artikel ini memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Teluk Bintuni sebagai wilayah yang kaya karena menjadi lokasi dari perusahaan BP (*British Petroleum*), perusahaan gas dari Inggris. Bagian kedua adalah gambaran tentang Kampung Sarbe dan Korono Jaya. Bagian ini menggambarkan bagaimana tantangan geografis memicu para generasi muda untuk mencari jalan alternatif untuk berusaha di tengah keterbatasan. Bagian ketiga adalah etnografi yang saya tunjukkan untuk menggambarkan bagaimana anak-anak muda di Kampung Sarbe dan Korono Jaya berjuang dari bawah untuk menggerakkan teman-teman mereka berwirausaha untuk memanfaatkan *ketinting* dan *long boat* yang mereka miliki untuk mencari kepiting dan udang. Pada bagian terakhir saya akan mencoba merangkum kisah-kisah mereka untuk sebuah harapan tentang kebangkitan kampung yang berawal dari inisiatif anak-anak muda untuk mencari alternatif baru di tengah situasi keterbatasan di kampung-kampung tanah Papua.

Kota (C)emas Bintuni

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni adalah 52.422 orang terdiri atas 29.078 laki-laki dan 23.344 perempuan. Dengan luas wilayah 18.637 km² yang didiami oleh 52.403 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah hanya 3 orang/km².

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Teluk Bintuni selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2000 sampai 2010 sebesar 4,64

persen. Dalam konteks sosial budaya, orang Bintuni sering digambarkan dalam tujuh suku asli penduduk Kabupaten Teluk Bintuni yaitu suku Irarutu, suku Kuri, suku Simuri, suku Sough, suku Moskona, suku Wamesa, dan suku Sebyar.

Selain penduduk asli terdapat pula para pendatang baik pendatang Papua maupun non Papua yang terkonsentrasi di Kota Bintuni seperti dari Biak, Ayamaru, Serui, Arfak, Bugis, Makassar, Jawa, Sunda, Batak, Maluku dan Toraja. Penduduk asal pulau Jawa datang ke Bintuni karena program transmigrasi yang dilaksanakan antara tahun 1994–1997. Pendatang dari Bugis dan Makassar datang ke Bintuni secara sendiri-sendiri untuk berdagang dan menjadi nelayan sedangkan pendatang lain umumnya merupakan pegawai negeri yang ditempatkan oleh pemerintah di Bintuni.

Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, perekonomian Teluk Bintuni bertumpu pada bidang pertanian, khususnya kehutanan. Dari hutan produksi, diperoleh kayu bernilai ekonomis yang dominan antara lain Merbau, Matoa, Nyatoh, Pulai, Mersawa, Resak, Medang, dan Bintangur. Hutan Teluk Bintuni juga menghasilkan sagu yang merupakan bahan makanan pokok di daerah ini. Selain kayu bulat dan sagu, juga dihasilkan Gaharu, Rotan, minyak lawang, dan Masoi. Masoi adalah kulit kayu sebagai bahan wangi-wangian. Di sektor perkebunan komoditi utama yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, kakao (cokelat), cengkeh, kelapa dan kopi robusta.

Perut bumi Teluk Bintuni terbilang kaya akan bahan tambang dan galian. Hampir seluruh kawasan mengandung gas

alam (LNG), hasil tambang lainnya berupa batu bara dan mika. Potensi sumber daya alam Teluk Bintuni tidak hanya di daratan, perairan kabupaten merupakan sumber daya ikan dan udang galah. Dengan potensi yang dimiliki, ditunjang letak geografis yang strategis, Kabupaten Teluk Bintuni sangat mungkin menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepala burung.

Namun situasi yang strategis ini menyimpan kompleksitas terhubungnya wilayah-wilayah di sekitar teluk dalam pengembangan ekonomi. Sampai saat ini kampung-kampung di pedalaman hanya terjangkau dengan menggunakan *speed boat* yang biaya sewanya sangat mahal. Sebagian lagi praktis hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat sewaan. Jadi bisa dipastikan bahwa pengembangan ekonomi tidak akan terjadi di wilayah-wilayah pedalaman ini. Masyarakat yang mendiami daerah-daerah pedalaman ini sangat sulit mengakses kota dan memilih hidup bertahan di kampung dengan segala keterbatasan.

Kota Bintuni pun mengalami ironi yang luar biasa. Kota yang dijuluki kota emas ini perlahan-lahan menjadi kota cemas karena tersingkirnya secara perlahan-lahan orang asli Papua dari tujuh suku yang awalnya mendiami wilayah yang disebut Kabupaten Bintuni sekarang. Pusat keramaian Bintuni praktis hanya *sepanggal* (satu ruas) jalan utama di kota yang disesaki dengan Ruko (Rumah Toko) dari para pedagang yang hampir semuanya adalah para pendatang dari berbagai etnik di Indonesia. Di sepanjang jalan di kota Bintuni adalah salah satu lokasi kemiskinan yang terselubung.

Sebelum menjadi ruko-ruko yang berdiri megah seperti sekarang, ruas jalan tersebut adalah hak ulayat dari orang Wamesa yang merupakan suku yang mendiami Kota Bintuni. Namun seiring arus migrasi dan perubahan sosial di Bintuni, perlahan-lahan tanah ulayat dari Suku Wamesa terjual habis di sepanjang jalan kota Bintuni. Mereka kemudian tersingkir ke belakang jalan utama dan menempati rumah-rumah panggung di sepanjang pesisir teluk.

Melihat Kampung Sarbe dan Korano Jaya

Memasuki kampung Sarbe di distrik Kuri, air laut sedang pasang sehingga *speed boat* yang saya tumpangi bisa sandar dengan aman. Bersamaan dengan sandarnya saya di kampung, dua orang *paitua* (bapak) dengan perahu sederhana dan alat jaring seadanya bersiap meninggalkan kampung untuk mencari udang dan kepiting. Menjadi nelayan untuk mendapatkan udang dan kepiting adalah pekerjaan primadona di kampung ini. Alasannya sudah pasti karena cepat bisa diuangkan untuk dijual ke pasar di Bintuni oleh para penadah yang datang tidak tentu ke kampung. Atau kalau tidak bisa untuk kebutuhan sehari-hari.

Kampung Sarbe adalah ibukota dari distrik Kuri yang terdiri dari tujuh kampung. Letak dari kampung ini adalah di kawasan teluk dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan *speed boat* selama dua jam hingga tiga jam. Masyarakat biasanya menggunakan *ketinting* atau *long boat* atau *ketinting* sehari-harinya sebagai alat transportasi. Mobilitas mereka biasanya adalah ke kampung-kampung tetangga di

kawasan teluk dan mengangkut hasil bumi mereka ke pasar di Bintuni yang bisa memakan waktu delapan hingga sembilan jam.

Permasalahan akses dan mobilitas warga di kampung Sarbe menjadi hal yang serius karena menelan biaya yang tidak sedikit. Mereka sangat tergantung dengan bahan bakar minyak untuk menggerakkan mesin *long boat* atau *ketinting* mereka. Harga 1 liter bahan bakar minyak yang mereka beli adalah Rp12.000 sehingga perjalanan pulang pergi dari kampung menuju pasar di Bintuni mereka menghabiskan uang Rp1,5 juta biaya yang tidak sedikit. Sementara itu mereka masih harus berjuang untuk menghabiskan barang dagangan di pasar.

Warga kampung Sarbe sangat mengandalkan *ketinting* atau *long boat* mereka masing-masing untuk mengais rupiah. Dilengkapi dengan alat-alat tangkap sederhana, mereka akan menjelajah kawasan teluk untuk menangkap kepiting dan udang. Namun tidak semua warga di kampung memiliki *long boat* sebagai modal untuk mencari udang dan kepiting. Oleh sebab itulah mereka mengalihkan perhatian untuk berkebun dan beternak. Hasil-hasil kebun yang menjadi sandaran kehidupan warga kampung Sarbe adalah buah pala yang pada masa panen bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Selain pala, hasil kebun seperti pisang, keladi, patatas, dan berbagai jenis sayuran adalah sumber penghidupan masyarakat yang bisa dijual ke Bintuni.



Gambar 1. Jalan Papan Menuju Kampung Sarbe, Distrik Kuri, Kabupaten Bintuni. (Foto: I Ngurah Suryawan)

Masyarakat di Kampung Sarbe juga masih melakukan praktik berburu binatang di hutan-hutan di belakang kampung. Hasil buruan itulah yang dibuatkan dendeng untuk kemudian dijual. Meski terbatas dalam transportasi—karena mahalunya BBM dan

jarak—mereka tetap berusaha menjangkau kota untuk menjual hasil kebun mereka. Mereka harus menjualnya ke kota karena hingga saat ini belum ada penjual-penjual pengepul yang mau datang ke kampung

Sarbe untuk membeli hasil-hasil bumi mereka.

Sebagai ibukota distrik Kuri, kampung Sarbe memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lengkap. Kantor distrik berdiri megah di tengah perkampungan penduduk. Namun sayangnya seluruh pegawai di kantor

distrik tidak berada di tempat. Begitu juga yang terjadi di kantor kepala kampung. Kepala kampung dan kepala distrik sudah hampir dua bulan lebih tidak berada di kampung. Mereka semua tinggal di kota dan menjalankan administrasi pemerintahan dari kota.



Gambar 2. *Aktivitas Warga Kampung Sarbe, Distrik Kuri, Kabupaten Bintuni Mencari Udang dan Kepiting untuk Kemudian Dijual ke Bintuni. (Foto: I Ngurah Suryawan)*

Kampung Korano Jaya terletak di distrik Manimeri, melewati jalan utama Bintuni-Manokwari. Tidak sulit menjumpainya. Jalan masuk dari jalan utama Bintuni-Manokwari juga sudah beraspal dan rumah-rumah penduduk berjejer rapi. Kawasan ini adalah wilayah SP (Sentra Pemukiman) untuk program transmigrasi yang mempunyai sejarah panjang di Bintuni. Selain ditempatkan di distrik Bintuni (kota), sebagian para perantau ini juga ditempatkan di distrik Manimeri.

Laporan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UI (2014) tentang migrasi dan perubahan sosial di distrik Sumuri

Kabupaten Teluk Bintuni mengungkapkan bahwa gelombang transmigrasi di Bintuni diawali tahun 1994, ketika pemerintah mendatangkan dua kelompok transmigran asal Jawa tengah yang ditempatkan di SP5 dan SP4. Tahun 1995–1996 didatangkan dua gelombang transmigrasi dan terakhir tahun 1997 didatangkan satu gelombang transmigrasi, sehingga jumlah SP atau Satuan Pemukiman transmigrasi berjumlah lima SP yang ditempatkan di distrik Bintuni dan sebagian di distrik Manimeri.

Setelah kedatangan para transmigran asal pulau Jawa disusul kemudian oleh para pendatang Bugis yang berprofesi sebagai pe-

dagang yang mendatangkan berbagai barang kebutuhan pokok dari luar Bintuni dan menangkut hasil alam yang dihasilkan oleh para transmigran ke luar Bintuni. Tahun 1999 datang pula orang-orang Ambon yang mengungsi akibat kerusakan dan bergabung dengan masyarakat transmigran Jawa Tengah dan Jawa Timur di SP 5. Pada awal tahun 2000-an Bintuni menjadi berkembang karena meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah ini. Dapat dikatakan kabupaten Teluk Bintuni dikembangkan oleh para pendatang yaitu transmigran asal Jawa dan pedagang asal Bugis–Makassar (LPM UI, 2014: 11).

Sejarah panjang kedatangan para transmigran itulah yang menjadi cikal bakal kampung Korano Jaya menjadi heterogen baik itu dari keluarga Papua maupun dari para transmigran sendiri. Hingga saat ini terdapat 1063 jiwa yang bermukim di kampung dengan 270 KK (Kepala Keluarga). Para pendatang dari transmigran Jawa ditambah dari Bugis dan Makassar mendominasi dengan 75% dan orang Papua sendiri 25%. Suku Wamesa adalah orang Bintuni yang mendiami kampung ditambah orang Papua yang berasal dari Jayapura, Biak, dan Serui. Situasi ini sangat berdampak terhadap pengelompokan permukiman warga-warga berdasarkan kelompok etnik yang ada. Daerah-daerah transmigran menjadi lokasi dari pertumbuhan kampung-kampung di Teluk Bintuni.

Jalan menuju kampung sudah teraspal mulus. Pembangunan juga tampak semarak dan banyak rumah-rumah warga yang dibangun dengan permanen. Kawasan SP2 ini memang terkenal menjadi salah satu kawasan SP di Bintuni yang menggeliat.

Hamparan lahan-lahan pertanian yang luas terlihat jelas di sekitar kampung. Para warganya sibuk bergelut dalam bidang pertanian dengan mengolah tanah-tanah produktif. Sebagian lainnya menekuni penangkapan kepiting yang terbukti menjadi sandaran ekonomi rumah tangga warga kampung.

Heterogenya kelompok etnik membuat kampung ini berkembang karena pengaruh perubahan yang terjalin dari interaksi antara para transmigran dengan orang Bintuni maupun orang-orang Papua lainnya yang tinggal di kampung. Berbagai jenis usaha rumah tangga berkembang sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan geliat pembangunan di sekitar jalan kampung dan rumah-rumah penduduk yang permanen. Kios-kios, bengkel, usaha mebel, dan berbagai usaha rumah tangga juga ada di sekitar kampung. Tidak ketinggalan para penjual sirih pinang di pinggir jalan.

Pemandangan yang terlihat di permukaan kampung tersebut hanyalah sedikit yang mewakili suasana di kampung Korano Jaya. Jika pagi mulai menyingsing, sebagian warganya akan sibuk masing-masing untuk beraktivitas di kebun-kebun maupun di pantai untuk mencari ikan dan kepiting. Suroso, salah seorang warga trans di Korano Jaya menuturkan aktivitasnya sehari-hari. Ia sudah bersiap-siap setelah segala sesuatu di rumah selesai untuk menuju ke kebun, harta berharga miliknya sejak menginjakkan kaki di Bintuni. Sebagai petani sayur, kesehariannya adalah ke kebunnya di belakang rumahnya untuk memastikan sayur-sayuran yang ditanamnya yaitu sawi, kacang, kangkung dan yang lainnya tetap hidup. Ia hanya menginginkan

bekerja secara kontinyu dan ada penghasilan tetap. Suroso merasa itu hanya bisa dengan mengandalkan kebun dan usaha sendiri melalui berkebun di tanah sendiri.

Menerobos Keterisoliran

Jalan-jalan papan menuju kampung dari tempat sandar *speed boat* adalah pemandangan awal di kampung Sarbe, distrik Kuri. Kampung berada di kawasan teluk ini dikelilingi oleh hutan bakau sepanjang jalan. Perahu-perahu masyarakat bersandar saat air *meti* (surut). Seorang warga yang biasa dipanggil Mas Man, orang Jawa dari Banyumas tampak sedang menyandarkan perahunya setelah selesai mencari kepiting.

Kampung Sarbe ini adalah ibukota dari distrik Kuri, kabupaten Teluk Bintuni. Dari kota Bintuni kita bisa menemukannya dengan menggunakan *long boat* atau *speed boat* yang membutuhkan waktu antara dua hingga tiga jam perjalanan. Terdapat tujuh kampung yang menjadi bagian dari distrik Kuri yaitu: kampung Wagura, Awegro, Taner/ Refideso, Otremta, Sarbe, Naramasa dan Obo. Dua kampung yang sangat terpencil adalah kampung Taner/ Refideso yang berbatasan dengan kabupaten Kaimana dan Kampung Obo yang berada di daerah pengunungan, di daerah kepala air (sumber mata air) dan berbatasan dengan kabupaten Teluk Wondama.

Secara umum di kawasan-kawasan *remote* (terpencil) di pelosok-pelosok tanah Papua, persoalan keterisoliran menjadi isu utama yang menyebabkan mereka terkungkung dalam belenggu keterbelakangan. Akses merupakan kata kunci dari permasalahan ini yang menyebabkan mereka

bisa terhubung (terinterkoneksi) dengan wilayah-wilayah di luar mereka.

Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai wilayah yang luasnya mencapai 18.658 km² tersebar dari pesisir teluk hingga pelosok-pelosok pedalaman yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat maupun laut (*long boat* atau *speed boat*). Satu-satunya alat transportasi untuk menjangkau daerah pedalaman tersebut adalah dengan pesawat carteran yang biaya sewanya bisa mencapai puluhan juta.

Keterisoliran ini diperparah lagi dengan ketidakhadiran negara di wilayah-wilayah tersebut. Meskipun hadir dalam bangunan fisik seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), sekolah, maupun kantor-kantor distrik, bisa dipastikan orang-orang yang bertugas tertumpuk di kota. Mereka malas untuk tinggal berlama-lama di kampung terpencil dengan tidak ada jaringan telpon, internet dan fasilitas yang minim. Akses yang buruk ini diperparah dengan minimnya infrastruktur yang bisa menghubungkan jaringan-jaringan migrasi (perpindahan orang) ke daerah tersebut. Kehadiran perusahaan di lokasi-lokasi terpencil di Bintuni belum menjadi jaminan rantai keterisoliran terputus di tengah masyarakat.

Gambaran keterisoliran terlihat jelas di kampung Sarbe, distrik Kuri. Meskipun mendapat juara dalam lomba kampung di kabupaten Teluk Bintuni, denyut kehidupan di kampung ini seolah tidak terasa. Pelayanan-pelayanan publik seperti kantor distrik, Pustu, sekolah, tidak menunjukkan aktivitasnya. Kepala distrik dan kepala kampung sudah hampir dua bulan berada di kota Bintuni. Bahkan yang hampir mencengangkan adalah seluruh pelayanan

publik ternyata dilakukan di kota. Warga yang membutuhkan pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK hanya mendaftar saja di kampung untuk kemudian berkasnya dibawa ke kota untuk diproses.¹

Seorang pemuda tenaga honorer distrik Kuri menuturkan bahwa sampai saat ini, ia yang bertugas di kampung, hanya mendaftarkan keperluan administrasi warga di kantor distrik. Data-data yang diperlukan akan diambil di kampung untuk kemudian seluruhnya dibawa ke kota Bintuni. “Jadi kerja administrasi itu dilakukan di Bintuni, bukan di kantor distrik,” ujarnya. Oleh sebab itulah jika ada warga kampung yang mengurus surat-surat, ia akan mendatanya di kampung dan membawanya ke kota untuk diproses selanjutnya. Hal ini tentu saja mengejutkan karena semakin membuktikan bahwa akses dan keterpencilan sangat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik yang ada di kampung-kampung terpencil.

Kelompok laki-laki muda di kampung Sarbe hanya sebagian kecil tinggal di kampung. Namun jumlah yang kecil tidak mengurangi semangat mereka untuk mengembangkan usaha penangkapan kepiting dan udang. Sebagian di antara mereka bahkan menggantungkan kehidupan dari kepiting dan udang. Usia mereka antara 20 hingga 30-an tahun. Tidak jarang anak-anak sekolah juga ikut dengan kakak maupun saudara mereka pergi melaut untuk mencari kepiting dan udang. Hingga saat ini mereka belum terorganisir dengan rapi dalam bentuk koperasi ataupun kelompok-kelompok seperti

¹ Kunjungan lapangan di kampung Sarbe, distrik Kuri, kabupaten Teluk Bintuni, 16 November 2016.

yang terjadi di wilayah kampung transmigran.

Kelompok generasi muda di kampung Sarbe inilah yang menjadi aktor yang menggerakkan perekonomian kampung. Mereka menjadi pemimpin di keluarga mereka untuk melaut dan mengumpulkan kepiting dan udang untuk dijual ke Bintuni. Orang tua mereka dan adik-adiknya sibuk mengurus kebun-kebun yang berada di sekitar wilayah kampung. Di kebun-kebun itulah yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari. Di kebun akan ditanami pisang, keladi, sayur-sayuran dan rica yang juga kelebihan hasilnya bisa dijual ke pasar di Bintuni. Para generasi mudalah yang mengurus penjualan hasil-hasil kebun, kepiting, dan udang yang mereka hasilkan untuk kemudian dijual di pasar Bintuni.

Generasi muda ini harus menjual hasil bumi dan tangkapan mereka di laut ke pasar Bintuni. Pasar Bintuni adalah satu-satunya lokasi untuk menjualnya. Tidak ada pilihan lainnya. Generasi mudalah yang bertugas untuk mengurus keberangkatan *ketinting-ketinting* (perahu dengan mesin kecil) dari kampung Sarbe menuju ke pasar di kota Bintuni. Mereka biasanya akan memungut iuran untuk membeli bensin dan mengajak teman-teman mereka yang lainnya untuk bersama-sama menuju pasar Bintuni.

Generasi muda di kampung Sarbe sebenarnya ingin sekali untuk mengubah hidup mereka dengan memperluas akses ke pasar di kota. Mereka sangat mengharapkan terdapat pasar-pasar di lokasi-lokasi terpencil di kawasan teluk tersebut. Kalau hanya untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka tidak perlu memikirkannya. Namun, mereka juga berkeinginan

untuk mengembangkan kehidupan dengan menjual hasil-hasil bumi tersebut keluar daerah untuk mendapatkan uang.

“Untuk makan *kitong* (kita) aman. Ada dusun sagu, pisang, kasbi dan sayur-sayuran,” kata laki-laki muda yang saya temui di kampung. Ia menuturkan bahwa kesehariannya tidak akan ada permasalahan dengan makan. Semuanya sudah tersedia di kampung. Namun ia sangat menyayangkan jika bantuan Raskin (Beras Miskin) hanya *taputar-putar* (berputar-putar) saja di Bintuni tanpa ada penyaluran ke kampung-kampung pedalaman. Ia sebenarnya ingin mengkonsumsi terus beras, namun itu tidak mungkin karena beras baginya ada jika ada banyak uang.

Mahalnya biaya transportasi untuk memasarkan produk-produk hasil bumi mereka di Kota Bintuni adalah permasalahan krusial yang tak terselesaikan hingga kini meski mereka telah merebut juara tiga lomba kampung seprovinsi Papua Barat. Mereka sebenarnya mengharapkan akses transportasi dipermurah ke Bintuni dan juga ada pedagang-pedagang yang datang ke wilayah mereka untuk mengambil hasil-hasil bumi. Namun hal tersebut tak kunjung terealisasi. Seorang perempuan setengah baya di kampung Sarbe bahkan dengan ketus mengungkapkan:

Sampai saat ini program-program yang kami suarakan tersebut belum muncul-muncul. Tim-tim khusus ada dari kabupaten, pemberdayaan, dari pusat datang ambil-ambil data saja. Hanya turun tim-tim saja terus.

Di tengah keterisoliran tersebut, mereka sebenarnya sangat mampu bertahan hidup dari hasil alam yang ada di kampungnya. Namun usaha mereka untuk memiliki uang

tanai hanya dengan menjual dagangan mereka ke Bintuni. Oleh sebab itulah tidak salah jika seorang lelaki muda di balai kampung Sarbe mengungkapkan, “Kitong tahu kitong kaya, tapi orang di luar tahu kitong miskin (*Kita tahu bahwa kita kaya, tapi orang di luar mengetahui (menganggap) kita miskin*)”.

Di tengah situasi keterisoliran dan kehidupan ekonomi yang tidak menentu, langkah berani diambil oleh beberapa generasi muda (lelaki dan perempuan) warga kampung Korano Jaya. Generasi muda tersebut didominasi oleh warga kelompok transmigran yang memang mendominasi kampung Korano Jaya. Usia mereka rata-rata 30-an ke atas dan sebagian besar sudah berkeluarga. Beberapa di antara mereka belum berkeluarga dan tinggal secara mandiri atau bersama dengan orang tua membantu mencari udang dan kepiting.

Kelompok generasi muda ini dibina oleh Dedy Ediyanto, kepala kampung Korano Jaya yang melihat potensi kelompok anak muda ini untuk menggerakkan ekonomi di kampung. Generasi muda inilah yang bersemangat untuk membuka jejaring untuk mengatasi permasalahan modal usaha yang menghimpit mereka. Situasi ini sangatlah pelik karena mereka membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha penangkapan udang dan kepiting. Tidak ketinggalan adalah usaha-usaha ekonomi kreatif berupa bengkel dan kios-kios yang terdapat di sepanjang jalan menuju kampung Korano Jaya.

Kepala kampung Korano Jaya, Dedy Ediyanto mengungkapkan apa yang ia lakukan bersama dengan warganya dilandasi oleh keinginan untuk memutus keter-

gantungan terhadap program-program yang ditawarkan oleh pemerintah melalui proyek-proyek. Dedy melihat selama ini di kampungnya, dan di Bintuni secara umum, masyarakat terperangkap oleh bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Situasi ini sungguh sangat sulit karena akan menyebabkan masyarakat menjadi mengandalkan pemerintah untuk kelangsungan hidupnya.

Masyarakat di kampung-kampung hanya akan menunggu proyek-proyek pemerintah untuk mendapatkan uang. Jelas saja ini sangat tergantung dari “belas kasihan” pemerintah untuk menyalurkan proyek-proyek ke masyarakat. Cara yang mereka lakukan secara bersama-sama adalah berusaha dengan keringat sendiri untuk mendapatkan kepastian dalam melanjutkan hidup dan tentu saja tidak tergantung lagi dengan proyek pemerintah.

Potensi sumber daya alam yang ada di Bintuni tidaklah kurang. Dibekali dengan tekad dan terus-menerus mencari celah usaha, beberapa warga dengan dorongan dari kepala kampung mulai untuk membulatkan tekad menekuni dengan sungguh-sungguh usaha nelayan, pertanian dan peternakan. Beberapa warga memang masih ada yang bekerja dengan mengandalkan proyek-proyek pemerintah dan juga di perusahaan kayu. Namun perlahan tapi pasti, kelompok warga yang berusaha sendiri dalam berbagai bidang tersebut menunjukkan semangat dan hasil yang menggembirakan.

Usaha dalam bidang pertanian dan nelayan sebenarnya baru dimulai di kampung Korano Jaya pada awal tahun 2015. Meski diawali dengan tertatih-tatih, kelompok warga yang menekuni usaha ini akhirnya

bisa bernafas lega karena persoalan permodalan bisa diatasi dengan menjalin kerjasama kredit dengan salah satu bank (Bank Mandiri) di Bintuni. Mereka diberikan keleluasaan untuk mendapatkan kredit yang dibagi dalam dua bentuk kredit. Yang pertama adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan pinjaman maksimal Rp25 juta. Sementara KUM (Kredit Usaha Menengah) pinjaman maksimalnya adalah Rp50 juta.

Sebagian besar warga kampung Korano Jaya mengungkapkan bantuan kemudahan kredit ini berdampak positif karena menambah gairah untuk mengembangkan usaha. Namun tidak semua warga berani untuk meminjam kredit yang ditawarkan bank Mandiri ini. Masing-masing warga masih berpikir untuk membayar angsuran setiap bulan yang harus mereka tanggung. Setiap warga tentunya memiliki kemampuan berbeda-beda dan pendapatan untuk hasil usaha mereka tentunya berbeda-beda.

Dedy Ediyanto menjelaskan permasalahan permodalan usaha ini kepada Yance Kareth, anak muda Papua dengan pengalamannya menjadi bagian kredit di perbankan. Dedy menjelaskan potensi usaha ikan dan kepiting ini di kampung Korano Jaya. Cuma permasalahannya adalah suntikan permodalan yang membelenggu warga kampung dan generasi mudanya untuk memajukan usahanya. Mendengar permasalahan yang disampaikan oleh Dedy Ediyanto, Yance Kareth menangkap potensi kewirausahaan di Korano Jaya.

Yance Kareth adalah kepala cabang pembantu (KCP) bank Mandiri Teluk Bintuni. Ia memutuskan untuk menerima tantangan penempatan di KCP Bintuni, satu

tingkat lebih rendah dari posisinya sebelumnya. Seharusnya ia bisa pindah ke KC Manokawari atau Jayapura sekalipun. Tapi hal itu tidak diambilnya. Ia berpandangan ada potensi besar di Bintuni yang belum tertangani dengan baik. Potensi besar yang ia maksudkan adalah dalam bidang SDA (Sumber Daya Alam) perikanan yang menjadikan Bintuni sebagai pengekspor kepiting dan udang.

Pengalamannya sebagai kepala bagian kredit di Nabire menjadikan *insting* Yance Kareth untuk melihat potensi kewirausahaan masyarakat Bintuni sangatlah tajam. Belum genap setahun bertugas di Bintuni, ia sudah membuat gebrakan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yang digerakkan langsung oleh masyarakat setempat. Ia dengan program kredit usaha mandiri membantu berbagai kelompok usaha yang bergerak di kampung-kampung Papua. Salah satu yang ia tangkap adalah usaha kepiting dan udang di kampung Korano Jaya. Secara keseluruhan ia melihat potensi sumber daya alam kelautan (kepiting dan udang) yang sangat kaya di Kabupaten teluk Bintuni. Oleh sebab itulah penyiapan usaha kecil dan menengah yang digerakkan langsung oleh inisiatif masyarakat lokal menjadi sangat penting.

Hingga akhirnya Yance Kareth “menemukan” kampung Korano Jaya sebagai awal dari “tembak” kredit usaha kecil dan menengah yang ia dan tim siapkan. Ia melihat potensi besar yang tersimpan di wilayah kampung transmigran tersebut. Sebagian besar masyarakatnya beraktivitas sebagai nelayan pencari kepiting dan udang, petani sayur, dan juga usaha kios dan ekonomi produktif lainnya. Oleh sebab

itulah ia membuat skema dalam dua jenis kredit yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan maksimal pinjaman Rp25 juta dan KUM (Kredit Usaha Menengah) dengan pinjaman maksimal Rp50 juta.

Ia menjadikan kampung Korano Jaya sebagai percontohan untuk kampung-kampung lainnya yang ingin mengajukan kredit untuk usahanya. Yance Kareth mengaku beruntung bertemu dengan Dedy Ediyanto, kepala kampung Korano Jaya, yang menyambut baik program KUR dan KUM ini dengan menggerakkan warga yang ingin mengembangkan usahanya. Program ini jelas berlangsung berkelanjutan dengan tujuan mengembangkan usaha mereka ke arah yang lebih maju. Kendala modal yang sering “mematikan” usaha kecil dan menengah coba diselesaikan dengan menyuntikkan dana KUR dan KUM dengan persyaratan yang dipermudah.

Menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah di Bintuni berarti juga harus memberdayakan orang asli Bintuni. Hal itu disadari betul oleh Yance Kareth sehingga ia merangsang bagi orang-orang Papua yang ingin berbisnis untuk bergabung. Jika memang ada kesulitan dalam permodalan, ia dengan hati dapat membantu. Rancangannya ke depan adalah membina kelompok-kelompok pengusaha asli Papua agar bisa bersaing dengan wirausahawan lainnya. Sasarannya adalah dalam bidang perikanan yaitu kepiting dan udang yang bisa mendunia.

Potensi SDA dalam bidang perikanan khususnya kepiting bisa menjadi ikon Bintuni ke luar daerah. Potensi itu bisa dimanfaatkan oleh orang asli Bintuni bekerjasama dengan pemerintah daerah

untuk mengembangkan usaha tersebut. Selama ini yang terjadi adalah program pemberdayaan usaha kecil hanya sebatas program dan menghabiskan uang, tidak berkelanjutan. Pemerintah sudah banyak melontorkan uang kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuk program. Jika uangnya habis maka program juga mangkrak tidak berlanjut. Namun jika program tersebut datang atas kebutuhan masyarakat dan mereka berkeinginan untuk menjadikannya sandaran kehidupan, maka sudah bisa dipastikan akan berlangsung berkelanjutan. Orang-orang Papua yang jika mempunyai tekad pasti mampu untuk melakukan hal ini.

Yance Kareth menuturkan bahwa pasti ada kesalahan yang terjadi yang menyebabkan orang Papua enggan berbisnis. Pengalamannya setahun di Bintuni menunjukkan bahwa kepercayaan diri dan keberanian dalam memulai usaha belum tertanam dengan baik. Belum lagi persoalan ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri sendiri untuk memulai sebuah usaha. Oleh sebab itulah ia akan mencoba secara terus-menerus mensosialisasikan kepada mama-mama Papua untuk mencoba usaha produktif yang bersumber dari kekayaan alam yang ada di lingkungan kita.



Gambar 3. Kelompok Usaha Kecil dan Menengah Binaan dari Bank Mandiri Pimpinan Yance Kareth di Kampung Korano Jaya, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. (Foto: I Ngurah Suryawan)

Selain berfokus kepada generasi muda Papua, program kredit usaha mandiri dari Yance Kareth dengan timnya juga merancang program untuk mensosialisasikan program kredit usaha produktif ini kepada *mama-mama* (kelompok perempuan rumah tangga) di seputaran wilayah SP lainnya. Ini

adalah program lainnya untuk mendorong munculnya pebisnis-pebisnis orang asli Papua di Bintuni yang berhasil memanfaatkan SDA. Ia meyakini itu karena tanggapan beberapa orang Papua sangatlah baik. Mereka (*mama-mama*) sangat tertarik untuk mengajukan kredit untuk mengem-

bangkan usaha pertanian (sayur-sayuran) maupun kios, kepiting, dan udangnya. “*Tong pu* (kita punya) anak jadi cepat kata *mama-mama* melihat saya yang memberikan kredit kepada dorang,” kisah Yance Kareth.

Ia meyakini bahwa *mama-mama* Papua sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha mereka dengan baik. Terbukti, terlepas dari usaha, mereka mampu untuk membiayai anak sekolah, bahkan sampai lulus kuliah. Kini anak-anak mereka sukses dan tersebar di berbagai wilayah di Papua. Ini membuktikan bahwa mereka sukses mengatur rumah tangga. “Kami coba memberikan kredit dengan jaminan tanah kepada mama ini dan terbukti lancar. *Dong* (mereka) mampu membayar dan lancar,” ungkap Yance.

Simpulan

Generasi muda Papua di kampung-kampung pedalaman sebenarnya mempunyai inisiatif untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam di kampungnya. Potensi sumber daya alam yang kaya adalah modal ekonomi yang menunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di kampung-kampung. Generasi muda berperan sangat penting untuk mengambil inisiatif perubahan dengan memberikan inspirasi di tengah banyaknya keterbatasan. Pelajaran dari generasi muda di kampung Sarbe dan Korano Jaya di kabupaten Teluk Bintuni adalah bagaimana mereka mencoba berjuang untuk keluar dari situasi isolasi geografis dan kemiskinan. Mereka—generasi muda ini

di dua kampung tersebut—dengan memanfaatkan kekayaan kepiting dan udang berinisiatif untuk mengelola usaha secara bersama dan mengatasi permasalahan permodalan. Kekuatan ketika mereka sadar untuk berusaha bersama, membangun organisasi bersama, dan mengembangkan secara bersama-sama pula akan meningkatkan kehidupan ekonomi mereka secara perlahan-lahan namun penuh dengan kepastian.

Daftar Rujukan

- Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni (2016). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Teluk Bintuni*, (Naskah laporan belum diterbitkan).
- Kemitraan. (2016). *Pemetaan Hak-Hak Ulayat Orang Sumuri di Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni*, (Bagian laporan penelitian belum dipublikasikan).
- LPM UI (2014). *Pemetaan Sosial Masyarakat Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni* (draft laporan penelitian tidak diterbitkan).

PEMUDA KRITIS, PEMUDA MEMBANGUN: PENDIDIKAN PEMBEBASAN KEPADA PEMUDA SEBAGAI UPAYA PEMBEBASAN DESA

Pinurba Parama Pratiyudha

Mahasiswa Jurusan Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

pppyudha@gmail.com

Abstract

This article discusses various issues relating to the alienation of rural youth in Indonesia and the presence of liberation education as a form of solution. Indonesian youth are estranged from the dimensions of social change and identity. This alienation, in turn, erodes young people's awareness of their humanity and human relationships. Liberation education is one of the ways that we can use to reach the young and help them free themselves from their condition of alienation. Liberation education is a form of forefronting awareness through education that can influence youth to rise up against their alienation. This paper first draws on literature to problematise the forms of alienation experienced by rural youth in Indonesia. It then discusses the possibilities of liberation education as a solution, using as examples a comparison of the worker education programmes in the United Kingdom and the United States, liberation education in South Africa in the era of political apartheid, and liberation education as practiced by the Area Youth Foundation in Jamaica.

Keywords: *Youth, Liberation Education, Development, Alienation*

Abstrak

Tulisan ini mengangkat permasalahan terkait realitas alienasi pemuda desa di Indonesia dan keberadaan pendidikan pembebasan sebagai salah bentuk solusi. Pemuda Indonesia pada realitasnya teralienasi dari dimensi perubahan sosial dan identitas diri. Alienasi ini kemudian menghadirkan pemuda yang tidak tersadarkan akan keberadaan dirinya sebagai manusia dan relasi-relasinya. Pendidikan pembebasan merupakan salah satu cara yang dapat menyentuh kaum muda dalam mengangkat mereka dari kondisi teralienasi. Pendidikan pembebasan merupakan wujud bagaimana pengedepanan penyadaran melalui pendidikan yang dapat berdampak pada usaha pemuda untuk bangkit melawan alienasi mereka. Tulisan ini menggunakan kajian literatur dengan memproblematisasi bentuk-bentuk alienasi yang terjadi pada pemuda desa di Indonesia. Setelah itu, dibahas mengenai pendidikan

pembebasan dalam penerapannya sebagai solusi dengan mendasarkan pada kajian komparasi pendidikan buruh di Inggris dan Amerika Serikat, pendidikan pembebasan Afrika Selatan pada era politik apartheid, dan pendidikan pembebasan Area Youth Foundation di Jamaika.

Kata Kunci: *Pemuda, Pendidikan Pembebasan, Pembangunan, Alienasi*

Pendahuluan

Tulisan ini mengangkat permasalahan alienasi pemuda desa di Indonesia dan keberadaan pendidikan pembebasan sebagai salah satu solusi. Pembahasan alienasi pemuda desa merupakan kajian yang masih cukup jarang disentuh dalam upaya pembangunan perdesaan. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan dan ketakutan penguasa atas penggoyangan *status quo* mereka yang kemudian membawa pada usaha-usaha represif di dalam masyarakat. Sementara itu, desa boleh dikatakan termarginalkan sejak rezim Orde Baru berkuasa.

Pada masa Orde Baru, desa mengalami proses penyeragaman oleh pemerintah pusat. UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa merupakan peraturan pertama yang mengatur dan melegalkan posisi desa pada kala itu. Dalam peraturan tersebut pemerintahan dipusatkan pada struktur hierarkis dan komando. Kepala desa dan struktur supra mereka seperti camat memiliki kuasa yang cukup besar dalam mengatur desa. Selain itu, dalam sistem legislatif desa penunjukkan perwakilan masyarakat sepenuhnya menjadi otoritas kepala desa.

Otoritas desa sepenuhnya diatur oleh struktur hierarkis tersebut dengan camat sebagai pusat komando dari pemerintahan desa (Kuncoro, 2013 :33). Karena itu, dapat disimpulkan keberadaan otonomi asli desa dilucuti dan pembangunan yang dilakukan

mengikuti arahan pusat. Gaya pembangunan dan pemerintahan desa yang terpusat kala itu memunculkan model yang seragam antara desa yang satu dengan desa yang lain. Di samping itu, penggunaan UU Nomor 5 Tahun 1979 menjadikan penggunaan istilah desa yang terkesan Jawa-sentris menginternal dalam sistem masyarakat desa yang kemudian menggeser identitas desa lokal di luar Jawa (Kusuma, 2014).

Terpusatnya wewenang atas desa semakin memarginalkan peran masyarakat dengan masih bertumpunya pemerintah pada pembangunan desa yang berpusat pada intensifikasi pertanian dan mobilisasi masyarakat dalam program pemerintah. Pertama, terkait intensifikasi pertanian, pemerintah melakukan perubahan gaya pertanian melalui Revolusi Hijau dengan menggalakan lahan pertanian dan penggunaan teknologi modern budidaya pertanian (Sumarno, 2007: 136). Walaupun sempat mengalami swasembada beras pada tahun 1984, hasil yang diberikan cenderung tidak berdampak panjang dan memasuki fase penurunan setelahnya (Anggraeni, 2013; Arifin, 2004: 5-8). Kemudian hal yang kedua adalah adanya mobilisasi masyarakat dalam program pemerintah. Kenyataan keberadaan kontrol pemerintah yang besar dalam desa memunculkan pembangunan-pembangunan yang lebih bersifat *top-down*. Hal ini menjadikan masyarakat desa hanya

sebagai objek mobilisasi program pemerintah. Tidak ada kesadaran partisipatif dan dialog dalam program pembangunan desa karena masyarakat ditempatkan sebagai objek dari pembangunan (Ali, 2007: 36-38; Mubyarto, 2000).

Pascaruntuhnya Orde Baru, bentuk-bentuk sentralistik pembangunan desa mulai sedikit demi sedikit dilucuti. Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi momen awal masyarakat desa menuju otonomi yang mandiri. Namun, permasalahan yang muncul adalah bagaimana membawa masyarakat Orde Baru menuju pasca Orde Baru. Kekuasaan yang mengungkung selama 32 tahun memberi dampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih erat dengan konsep terpusat, otokratik, dan modernisasi (Eko & Rozaki, 2005). Kecenderungan masyarakat “didikan” Orde Baru ini terbawa hingga ke lapisan paling muda, generasi muda desa. Kooptasi terhadap Karang Taruna di masa itu, menjadikan depolitisasi kaum muda yang takubahnya seperti boneka objek pembangunan (Erlina, 2011: 267). Pada akhirnya usaha ini menginternal hingga sekarang dengan fokus kegiatan Karang Taruna yang cenderung sekadar “senang-senang” dan mengadakan pelatihan yang tidak disesuaikan dengan kondisi budaya lokal (Eko & Krisdyatmiko, 2006).

Munculnya depolitisasi pemuda merupakan ironi dari apa yang diharapkan masyarakat kepada pemuda. Bukankah secara historis pemuda memiliki peranan penting dalam perubahan sosial besar di dunia. Kemerdekaan Indonesia dan Reformasi 1998 menjadi momen bagaimana peran pemuda sangat penting dalam perubahan sejarah

(Jurdi, 2011). Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan kunci dari suatu proses perubahan sosial atau politik.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi eksistensi pemuda sebagai aktor kunci dari perubahan sosial (Costanza-Chock, 2012). Pertama, keinginan dan kemampuan yang sangat kuat untuk dapat mengubah dunia. Kedua, kemampuan pemuda untuk berinovasi dalam perubahan sosial. Ketiga, kemampuan pemuda untuk dapat berkata jujur mengenai kekuasaan melalui perspektif kalangannya. Keempat, keaktifan pemuda dalam berpartisipasi pada jalur politik formal. Terakhir adalah adanya perjuangan keras yang dilakukan pemuda dalam pengembangan dan adanya koneksi yang kuat untuk perubahan sosial. Semua inilah yang kemudian membutuhkan kebangkitan kesadaran kritis pemuda dalam melawan depolitisasi.

Artikel ini akan membahas keberadaan pemuda dalam ruang pembangunan desa serta hal-hal yang mengalienasi mereka dari peran perubahan. Selain itu, akan diambil tiga contoh bentuk-bentuk pemberdayaan berbasis pemikiran Freire yang mengambil tiga studi penelitian terdahulu sebagai pembandingan dalam menumbuhkan konteks pendidikan pembebasan sebagai jalan pemberdayaan politik pemuda. Ketiga artikel ini antara lain: a) “Komparasi Pendidikan Pembebasan Buruh di Amerika Serikat dan Inggris” sebagai gambaran praktik pendidikan pembebasan di negara industri maju; b) “Studi Gerakan Anti-Apartheid di Afrika Selatan melalui Sistem Pedagogi”, sebagai bentuk pendidikan kebebasan berbasis politik di Dunia Ketiga; serta c) “Praktik Pendidikan Kebebasan oleh Area Youth

Foundation di Jamaika”, sebagai ilustrasi bentuk pendidikan kebebasan yang membangun pendekatan kepada pemuda yang termarginalkan. Refleksi atas ketiga praktik tersebut kemudian direlasikan dengan konteks di Indonesia pada saat ini. Tulisan ini membatasi penelitian pada kajian literatur yang mendukung pada pembahasan utama mengenai pemuda desa dan solusi melalui pendidikan pembebasan.

Pemuda, Perubahan Desa, dan Alienasi

Bagian ini akan mengangkat konsep pemuda yang dikaji dalam studi ini dengan pertanyaan utama, siapa pemuda yang ingin dibebaskan? Sebelum memulai menjawab, perlu diketahui seperti apa dan bagaimana definisi pemuda yang diciptakan oleh otoritas pemerintahan. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa pemuda adalah mereka yang berada pada usia 15-29 tahun. Sementara dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah mereka yang berusia 16-30 tahun. Masih dalam peraturan yang sama, istilah pemuda dalam terminologi kepemudaan didefinisikan sebagai berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Hal ini masih dijelaskan lagi dalam tujuan pembangunan kepemudaan yang berwujud pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengambil dasar definisi tersebut, pemuda dapat diartikulasikan sebagai kelompok masyarakat yang belum memasuki masa usia tertentu, tetapi di sisi lain mereka merupakan generasi yang dipenuhi dengan ekspektasi. Senada dengan pendapat Taufik Abdullah (1971: 1) bahwa pemuda merupakan generasi yang sangat erat akan konsep-konsep nilai kultural dan ideologis. Karena itu, pada dasarnya keberadaan pemuda tidak akan lepas dari nilai-nilai yang diembankan kepada mereka. Namun, pada perspektif lain, pemuda tidak dapat didefinisikan pula dalam rentang waktu tertentu. Selama sebuah individu masih pada kondisi pasca anak-anak dan pradewasa, individu tersebut masihlah dapat disebut pemuda (Honawa, 2014; Mohajer & Earnest, 2009; White, 2012). Sementara itu, pada sisi lain, terjadi perdebatan akan nilai-nilai yang melekat pada pemuda yang kemudian membentuk identitas mereka. Bahwa identitas pada dasarnya merupakan bentuk proses pengalaman sosial dan historis yang dirasakan pemuda itu sendiri (Androutopoulos & Georgakopoulou, 2003), pada akhirnya pemuda jugalah yang memiliki konsepsi identitas masa muda mereka sendiri (Naafs & White, 2012: 91). Semua ini kemudian menarik pertanyaan lagi. Ketika konsepsi nilai cenderung memberi kontradiksi atas definisi kepemudaan, lantas apa yang terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini secara mudahnya adalah perubahan sosial.

Perubahan sosial pada dasarnya merupakan sebuah perbedaan dalam dimensi waktu di antara keadaan sistem yang sama

(Sztompka, 2011: 3). Perbedaan sosial semacam ini berdasar pada kajian ke-pemudaan dan sangat lekat dalam dimensi keberadaan dan identitas pada pemuda sendiri. Perbedaan pengalaman historis antara generasi lama dengan generasi muda memunculkan kegentingan antargenerasi (Abdullah, 1971: 3). Karenanya, perubahan itu terjadi ketika nilai generasi muda telah berubah dari yang diharapkan generasi tua sehingga kemudian aktor mudalah yang menimbulkan adanya arus urbanisasi serta deagrarianisasi (Naafs & White, 2012: 90). Namun, perlu diketahui juga pemaknaan perubahan dalam definisi pemuda sebenarnya cenderung disalahartikan sebagai bentuk transisi fisik dan psikis belaka. Pemuda cenderung dipandang sebagai peralihan dari anak-anak ke orang tua, mereka yang berpendidikan menuju mereka yang bekerja, dari keluarga asal menuju keluarga tujuan (Naafs & White, 2012: 89). Pada dasarnya makna transisi yang dibawa oleh generasi muda berwujud pada hal yang lebih luas. Transisi tersebut dimaknai sebagai perubahan dari satu nilai sosial menuju nilai sosial yang lain sehingga pada dasarnya pemuda merupakan generasi transisi yang membawa arus perubahan sosial (Furlong & Cartmel, 2007; Wyn & Woodman, 2006) dan pemaknaan perubahan sosial telah menjadi sebuah identitas yang lekat pada pemuda dalam bentuk istilah *agent of change*, pelaku perubahan. Hanya saja, dimensi perubahan sosial ini tidak akan pernah muncul ketika terjadi alienasi dalam diri pemuda.

Alienasi pada dasarnya merupakan bentuk isolasi, pemisahan, serta pengasingan individu dari dunia (McInerney, 2009;

Newman, 1981). Secara lebih rinci lagi kemudian dijelaskan oleh Marx (1959) sebagai bentuk pemisahan individu dari sifat asli manusia dalam bentuk pengalaman natural, relasi sosial, dan bentuk-bentuk kegiatan sosial yang lain. Pemisahan ini kemudian menurut Freire memunculkan degradasi panggilan ontologis dan partisipasi manusia dalam dunia (Freire, 1991; Frymer, 2005) yang dalam pandangan lain menciptakan bentuk ketidakberdayaan dan kehilangan arti kemanusiaan (Travis, 1986). Karenanya, boleh dikatakan dalam konteks pemuda, alienasi terjadi ketika pemuda tidak memiliki akses relasi sosial dan kebebasan dalam mencari pengalaman. Bentuk alienasi ini kemudian menghilangkan wujud asli pemuda sebagai aktor utama perubahan sosial melalui hegemoni baik secara psikologis, kedewasaan, serta pembangunan individu (Lesko, 2012). Setelah itu, pemuda menjadi terpisahkan dari konsepsi relasi kuasa dan dominasi serta dalam menciptakan perubahan sosial sendiri (Frymer, 2005). Oleh sebab itu, menjawab pertanyaan pada bagian awal tentang siapa pemuda yang ingin dibebaskan, pemuda yang dibebaskan adalah mereka yang teralienasi dari identitas manusia mereka dan potensi mereka dalam memunculkan perubahan sosial.

Alienasi Pemuda Desa di Indonesia

Alienasi pada dasarnya dimunculkan dari sistem otoritas atau sistem yang lebih besar dalam memberi batasan, pemisahan, serta penghilangan identitas kepada masyarakat kelas bawah (dalam istilah Marx adalah kelas pekerja). Alienasi pemuda desa, dapat dilihat melalui berbagai bentuk. Tulisan ini

mengangkat dua aspek alienasi kepada pemuda desa berdasarkan siapa yang melakukannya. Pertama adalah aktor pemerintah dan kedua adalah aktor kapitalis. Perlu diperhatikan pula bagaimana kedua aktor ini saling interseksional bentuk alienasinya satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perbedaan keduanya tidaklah dilihat sebagai aspek yang terbatas penuh.

Oleh aktor pemerintah alienasi diwujudkan dan nampak saat pemerintahan Orde Baru, walaupun pada akhirnya bentuk alienasi tersebut hadir hingga saat ini. Bentuk alienasi yang pertama adalah dalam sistem pendidikan. Melihat posisi pemuda sebagai generasi transisi dan aktor perubahan sosial itu sendiri, memunculkan pola relasi kekuasaan yang berusaha mempertahankan posisi pemuda agar tidak mengganggu *status quo* penguasa. Pada perkembangan di Indonesia, ini dicontohkan oleh keberadaan rezim Orde Baru yang menjaga kepentingan rezim mereka dengan mengatur pemuda melalui pendidikan (Margono, 2011: 10-12). Pada kala itu rezim Orde Baru mengalami ketakutan akan runtuhnya ideologi Pancasila oleh kebangkitan Islam. Pemerintah kemudian dengan dalih menumbuhkan generasi toleran dan berjiwa Pancasila memunculkan penyeragaman kurikulum yang mendukung tujuan tersebut. Pada akhirnya pendidikan (seperti yang dikatakan Althusser, 2001) menjadi alat aparatus negara dalam mengatur warga masyarakatnya. Kenyataan inilah yang kemudian berkembang hingga pendidikan saat ini. Walaupun sempat diberikan kelonggaran dalam kurikulum KTSP, kehadiran evaluasi yang terpusat menjadikan pendidikan yang terpusat pada standarisasi pemerintah

(Sarnoto, 2012). Lebih dari itu, pada kecenderungan kontemporer pendidikan telah menjadi alat bagi kapital dalam merepresentasikan kepentingan mereka.

Kondisi demikian tidaklah lantas memunculkan sebuah gerakan pendidikan nonformal dalam melengkapi aksi pendidikan terstruktur ala negara. Pada hakikatnya ketika negara gagal memberikan pendidikan yang memberi identitas kemanusiaan yang bebas, pendidikan nonformal merupakan jalan yang paling rasional dalam menciptakan itu (Illich, 1971). Akan tetapi, harapan ini cukup susah diwujudkan ketika institusi pendidikan nonformal (khususnya keluarga) tidak mampu melawan bentuk-bentuk pengekangan dalam pendidikan formal. Pada kenyataannya, keluarga di Indonesia sudah terkonstruksi logika modernisasi dan developmentalisme yang cenderung mengejar sebuah kondisi modern dan sejahtera secara ekonomi (Koning, 2004). Keberadaan pendidikan melalui organisasi seperti Ornop pun baru muncul pasca-Orde Baru lengser (Gordon, 1998), sehingga keterbukaan barulah muncul setelah itu. Penetrasi Orde Baru dalam persepsi kaum muda baik itu di desa sendiri menumbuhkan semacam kesadaran semu yang dikonstruksikan oleh penguasa hingga saat ini. Pemuda dikonstruksikan oleh pendidikan formal pemerintah sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹.

¹ Hal ini berdasarkan pada tujuan pendidikan dan kepemudaan yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Konstruksi normatif semacam inilah yang kemudian membangun sebuah kesadaran semu akan konsep pemuda ideal.

Bentuk alienasi yang kedua adalah keberadaan Karang Taruna dalam dinamika pemuda desa. Pada dasarnya menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna, keanggotaan Karang Taruna tidaklah terbatas pada desa, tetapi juga pada institusi setingkat seperti kelurahan. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Dalam peraturan tersebut tidak disebut jelas interseksional dengan kepemudaan walaupun disinggung dalam Pasal 17 bagian (2) yang menjelaskan salah satu tugas pembina fungsional yaitu melakukan pembinaan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku Orsos kemasyarakatan Kepemudaan di desa/ kelurahan. Karena itu, di sini Karang Taruna dapat didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan bentukan pemerintah yang berfokus pada kepemudaan.

Keberadaan Karang Taruna menjadi sebuah permasalahan pada dasarnya. Seperti yang dijelaskan dalam Pendahuluan. Karang Taruna pada dasarnya merupakan bentuk usaha pengendalian pemerintah kepada pemuda sejak Orde Baru. Karang Taruna telah menjadi semacam organisasi yang mampu memberikan dukungan pada pemilu dengan mobilisasi subsidi dari pusat untuk

memfungsikan Karang Taruna sebagai pendukung rezim. Bahkan lebih dari itu, muatan Mars Karang Taruna membawa semangat kekitaan dan nasionalisme dalam rangka berbakti kepada negara (Eliana, 2011: 273). Kondisi ini tidak lepas dari posisi Karang Taruna sebagai organisasi masyarakat yang hierarkis hingga ke pemerintah pusat sampai saat ini. Alih-alih menjadi bentuk pendidikan alternatif dalam menumbuhkan identitas pemuda, Karang Taruna justru menjadi semacam alat kekuasaan dan tidak dapat lepas dari itu. Kehadiran Karang Taruna justru menjadi bentuk alienasi alternatif penguasa kepada pemuda selain melalui pendidikan formal.

Selain bentuk alienasi dari aktor pemerintah, bentuk alienasi kedua hadir dari sektor kapitalisme. Berbeda dengan aktor pemerintah yang cenderung dapat dilihat kehadiran bentuk-bentuk alienasinya, aktor kapitalisme cenderung tidak terlihat secara jelas karena pada dasarnya berbasis sistem dan berjalan secara perlahan-lahan.

Bentuk alienasi yang pertama adalah melalui liberalisasi desa itu sendiri. Masuknya sistem pertanian dengan teknologi yang maju pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an memunculkan kelas kapitalis baru dalam bidang pertanian di desa (Rutten, 1999). Munculnya informasi asimetris seperti adanya penguasaan sistem teknologi pertanian menjadikan hanya beberapa kalangan petani beruntung yang dapat mengakses informasi terkait pengembangan pertanian. Keberadaan informasi yang asimetris inilah kemudian berdampak pada redistribusi dalam pertanian dan juga faktor produksi dalam pertanian (Svensson & Yanagizawa, 2009). Karenanya, kehadiran

informasi yang tidak sempurna ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem pertanian baik antara investor dengan para petani maupun antara pemilik lahan dengan buruh tani (Greenwald & Stiglitz, 1990).

Kehadiran kapitalisme pertanian ini juga memunculkan adanya penguasaan lahan pertanian oleh beberapa individu dan kelompok tertentu. Hal ini tidak lepas dari keberadaan lahan subsisten kolektif yang hilang dengan adanya privatisasi lahan. Modernisasi sistem pertanian pada akhir 1960-an dan awal 1970-an juga mendorong adanya kepemilikan lahan yang jelas sebagai upaya pemberian kebijakan yang efektif. Kebijakan ini pula yang memperlihatkan secara jelas penguasaan tanah yang sejak dahulu dikuasai oleh beberapa golongan tertentu (Suseno & Suyatna, 2006; Husken, 1998; Rasyadian, 2013) yang berujung pada ketimpangan penguasaan lahan. Karena itu, tidak perlu disangkal hal ini menjadikan permasalahan di era modern ini ketika terjadi konversi lahan pada skala industri pabrik. Bentuk-bentuk informasi asimetris dan ketimpangan penguasaan tanah menjadikan seluruh masyarakat desa termasuk pemuda desa sendiri termarginalkan dan teralienasi dari sektor produksi mereka. Lebih dari itu, liberalisasi desa juga meruntuhkan identitas desa sebagai sebuah komunitas asli, sebuah masyarakat, melalui pendegradasian komunalisme dalam sistem pertanian.

Alienasi yang lain juga tercipta melalui pembangunan budaya konsumerisme yang pada dasarnya muncul dari tumbuhnya globalisasi. Adapun globalisasi cenderung menciptakan dunia yang mudah digenggam dan menjadikan fenomena sosial yang semakin

mudah diraih antaraktor lintas global (Thernborn, 2000). Kecepatan yang kuat dari globalisasi juga mendorong terciptanya arus investasi yang besar (Deacon, 2007) hingga pada akhirnya pasarlah yang kemudian memanfaatkan (atau bahkan mengendalikan) arus globalisasi itu. Pasar kemudian menggunakan globalisasi sebagai promosi budaya-budaya konsumsi melalui harga barang yang murah dan pemberian akses yang luas dan cepat pada sumber daya (Chinta & George, 2012) yang kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai konsumerisme. Dalam konteks pemuda, sudah sejak tahun 1970-an pemuda menjadi sasaran empuk arus konsumerisme. Kaum muda kelas menengah ke atas di Indonesia cenderung dapat membeli barang-barang yang berharga mahal hanya untuk tampil trendi dan bergaya (Naafs & White, 2012: 99). Sementara itu, di sisi lain budaya konsumtif juga memunculkan bentuk globalisasi murah melalui berbagai komoditas bajakan (Bayat & Herrera, 2010: 17 dalam Naafs & White, 2012: 99).

Melalui budaya konsumerisme ini pada akhirnya pemuda dibentuk menuju segala nilai-nilai yang dikonstruksikan oleh pasar. Identitas pemuda kemudian menjadi identitas yang merupakan gambaran dari yang diinginkan pasar (Hill, 2011). Segala bentuk dari yang diinginkan pasar terhadap konsumen pemuda kemudian dikonstruksikan kembali oleh pasar melalui media dengan menampilkan gambaran-gambaran dari pemuda idaman dan *trendy* (Valkenburg, 2000). Kehilangan identitas melalui tekanan media ini yang membentuk pemuda teralienasi dari identitas yang sebenarnya secara bebas adalah otoritas mereka. Intervensi

pasar yang halus juga menyebabkan timbulnya kesadaran yang semu. Hal ini menjadikan pemuda secara tidak sadar diarahkan oleh pasar dalam budaya konsumtif yang lebih menguntungkan pasar. Pada pemuda di desa sendiri faktor konsumerisme menimbulkan tergesernya budaya-budaya pertanian bahkan kembali lagi menggeser identitas pemuda secara umum karena konsumerisme pada dasarnya menjadikan penurunan produktivitas individu (Bauman, 2005).

Bentuk alienasi kapitalisme yang terakhir adalah perpindahan masyarakat desa ke kota atau urbanisasi. Urbanisasi sendiri menurut Harvey (1985; 2012) muncul atas kehadiran revolusi industri di Eropa pada akhir abad ke-19. Munculnya pusat industri menjadikan kebutuhan tenaga kerja sangat tinggi yang kemudian menarik arus penduduk dari desa ke kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Karenanya, kemudian kaum muda yang merupakan kelompok angkatan kerja baru berpindah dari daerah asal mereka menuju pusat industri. Selain itu, hal ini juga ditengarai karena adanya spekulasi kesejahteraan yang dijamin baik dalam pendidikan dan ekonomi ketika berpindah di pusat industri (Malammasam, 2016; Rye, 2011). Kehadiran urbanisasi inilah yang berdampak pada penurunan kualitas pertanian dan budaya perdesaan sendiri. Hal ini juga semakin diperparah ketika sektor pertanian mulai diambil alih oleh teknologi (White, 2012) melalui liberalisasi perdesaan. Kondisi ini yang kemudian mendesak pemuda keluar dan tidak bisa memilih untuk bekerja di sektor pertanian. Pemuda dipaksa oleh

kondisi untuk bertahan hidup dengan melakukan urbanisasi.

Belajar dari Tiga Kasus

Pendidikan Pembebasan Buruh (Kasus Amerika dan Inggris)²

Pada dekade 1980-an Amerika Serikat menerapkan pendidikan lepas kepada buruh di luar jam kerja. Tujuan dari proses pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan *skill* buruh secara teknis. Berbeda dengan Inggris yang memulai pendidikan kaum buruh dalam wadah Trade Union Congress, Amerika Serikat melakukan pendidikan kaum buruh di luar organisasi buruh mereka. Perkembangan kemudian di kedua negara ini muncul wacana menghapus peran pemerintah dalam menyediakan pendidikan kepada buruh. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi organisasi buruh. Efektivitas peran pemerintah memberi alasan yang cukup logis dalam menghapus keberperanan pemerintah dalam program pendidikan buruh. Namun, di sisi lain keberadaan program pendidikan semacam ini mendorong berkembangnya gerakan kaum pekerja. Dalam praktiknya program pendidikan kepada buruh bisa dikatakan ‘disusupi’ ideologi dan metodologi pendidikan pembebasan.

Dalam penelitian yang dilakukan David Hakken ini digambarkan sistem pendidikan untuk buruh dengan fokus pada praktik belajar-mengajar yang dilakukan. Dua perguruan tinggi yang diteliti adalah Sheffield University dan Cornell University. Sheffield University mewakili sistem belajar-me-

² David Hakken (1983)

ngajar program pendidikan buruh di Inggris, sementara Cornell University menggambarkan program serupa di Amerika Serikat. Dalam sistem pendidikan untuk buruh terdapat beberapa prinsip sebagai berikut.

1. Tidak ada status dalam pendidikan, dalam arti pekerja tidak akan kehilangan gaji dalam menempuh pendidikan yang dilakukan pada hari kerja.
2. Kelompok pelajar digolongkan dalam kelas-kelas berdasarkan sektor industri mereka dan siswa ditunjuk oleh tutor.
3. Kelas disetujui dalam kerjasama pengawasan antara organisasi buruh dan pihak manajemen pendidikan.
4. Silabus dikontrol secara akademis dan disetarakan dengan level pendidikan di fakultas.
5. Konten pendidikan yang bebas pada kualitas yang lebih tinggi.
6. Pendidikan pedagogi sebagai basis utama dalam pengajaran.

Sementara itu, pendidikan di Cornell University (Amerika Serikat) menerapkan sistem yang hampir sama dengan sistem di Inggris. Sekiranya terdapat beberapa prinsip utama dalam pendidikan buruh di Amerika Serikat yang sebagai berikut:

1. Ada status pada pendidikan, dengan waktu pendidikan di luar jam kerja dengan biaya yang sudah ditentukan.
2. Siswa bebas untuk memilih kelas tanpa melihat latar belakang mereka.
3. Kelas dibentuk oleh staf Cornell.
4. Arah dan isi pembelajaran ditetapkan juga oleh staf dari Cornell dengan

mencampurkan pendidikan liberal dengan teknis.

5. Konten silabus dikontrol dan diatur oleh instruktur yang merupakan pekerja *part-time*.
6. Gaya pembelajaran berdasarkan pada keinginan dari instruktur yang biasanya terdiri dari berbagai latar belakang.

Dalam pendidikan untuk buruh yang diterapkan di Inggris, para tutor secara eksplisit memasukan konsep-konsep pendidikan partisipatif dan kesadaran penuh. Para buruh sebagai siswa didorong dan dibangun kepercayaan diri mereka untuk aktif dalam kegiatan masyarakat, partai politik, dan pergerakan buruh. Para tutor membangkitkan kesadaran siswa dengan menciptakan suasana kelas yang menyerupai kehidupan nyata para pekerja. Para tutor cukup leluasa pula untuk membuat topik diskusi yang hampir sebagian besar diisi mengenai permasalahan umum kaum buruh.

Berkebalikan dengan Inggris, di Amerika Serikat ketatnya sistem pendidikan yang diberikan memberi dampak tidak cukup berkembangnya gaya pendidikan pembebasan. Sistem persyaratan yang ketat serta konten yang bersifat teknis membatasi bentuk transfer ilmu yang pedagogis. Peran pendidikan untuk pekerja juga tidak berpengaruh pada aktivisme dalam politik. Keberadaan partai politik yang menerima kader internal dari kalangan pengusaha menjadi hambatan dari luar.

Mencari Pedagogi Pembebasan di Afrika Selatan³

Kekuasaan berbasis rasial di Afrika Selatan dekade awal abad ke-20 hingga tulisan Jonathan Jansen diturunkan memberi dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan pendidikan di Afrika Selatan. Dikuasainya sistem pendidikan oleh kelompok kulit putih menjadikan munculnya marginalisasi guru-guru dan siswa-siswa kulit hitam di Afrika Selatan. Karena itu, upaya pembangunan legitimasi penguasa kulit putih melalui pendidikan terwujud secara nyata. Melalui salah satu buku pelajaran berusaha dibangun stereotip buruk kepada kulit hitam. Namun, menjadi awal yang menarik adalah bagaimana pergerakan melawan sistem pendidikan otoriter muncul dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para siswa kulit hitam. Mereka dengan berani membakar buku-buku pelajaran buatan rezim penguasa dan mengacungkan perlawanan kepada polisi.

Dalam penelitian yang dilakukan Jonathan Jansen, pola pendidikan perlawanan kulit hitam terbagi menjadi tiga. Pola-pola ini dibangun dari pengalaman mengajar Jansen di tiga sekolah berbeda di Afrika Selatan. Pola pertama merupakan pola pengenalan terhadap politik. Jansen melakukan penelitian partisipatoris dengan mengintervensi siswa sebuah sekolah di perdesaan pinggiran Cape Town dengan metode pembelajaran konvensional tanpa memberi dialektika dalam ruang kelas. Pada akhirnya kemudian terjadi pemboikotan sekolah oleh siswa-siswa serta pergerakan politik dengan membuka ruang-ruang diskusi di kelas. Pada

titik ini, Jansen melihat sebuah gambaran kontradiksi bagaimana siswa yang dia lihat tidak kritis dan pasif mampu membuat pergerakan politik walaupun serampangan dan cenderung berbahaya.

Pola yang kedua, dari protes politik menuju program penyadaran. Pada pola ini Jansen mengambil kegiatan partisipasinya dalam mengajar sebuah sekolah di jantung kota Cape Town. Sekolah tempat Jansen mengajar ini merupakan sekolah kulit hitam pertama yang menjadi basis pergerakan politik perlawanan rezim *apartheid*. Sistem pendidikan yang didesain di sekolah tersebut berbasis program penyadaran. Siswa mulai memiliki kontrol terhadap pembelajaran yang dilakukan. Konten yang diberikan menyesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jansen memulai pembelajaran pedagogi bagi dirinya. Guru (Jansen) secara tidak langsung mulai menginternalkan sistem pedagogi yang belum dia kenal dalam cara mengajarnya sehingga dalam lingkungan pendidikan semacam itu guru mengalami pembelajaran dalam metode pembelajaran.

Pola yang ketiga, dari program penyadaran menuju pendidikan untuk kekuatan masyarakat. Pada masa pola yang ketiga ini pula pergerakan politik pelajar mencapai titik yang cukup tinggi. Jansen mengembangkan pola pembelajaran yang merupakan bentuk pemberian kesadaran politik melalui mata pelajaran yang dia ajarkan. Ia memberi stimulus seperti mempertanyakan *mengapa pendidikan biologi hampir dipengaruhi persepsi orang kulit putih? Bagaimana orang kulit putih juga mampu menumbuhkan semangat rasial yang menurun dari faktor genetikal?* Upaya yang

³ Jonathan Jansen (1990)

dilakukan Jansen ini merupakan sebuah fokus lanjutan dalam pendidikan kaum kulit hitam untuk menanamkan semangat-semangat *people power* dalam mendukung perjuangan mereka kala itu.

Berdasarkan penelusuran dalam ketiga pola pendidikan yang didapat, Jansen melihat terjadinya perkembangan dari yang awalnya berbasis protes kemudian berubah menjadi pergerakan yang terorganisasi. Kemudian Jansen juga mengambil pesan refleksi ketika guru berinteraksi dengan perubahan dan tuntutan pembebasan dari pelajar, dia lama kelamaan akan berusaha belajar dan memahami apa yang terjadi dan diinginkan anak didiknya. Karena itu, pada akhirnya, tidak hanya siswa yang belajar, namun guru juga sekalipun.

Pedagogi Seni Teater untuk Keadilan Sosial, Studi Kasus *Area Youth Foundation* di Jamaika⁴

Pascamerdeka dari Inggris pada tahun 1962, kondisi sosial ekonomi masyarakat Jamaika seakan menyambut sebuah modernisasi dan perubahan menuju arah yang lebih baik. Namun, menjadi permasalahan ketika kebijakan pendidikan dan ekonomi belum mampu mengurangi angka buta huruf serta mengangkat garis kemiskinan menuju arah yang lebih baik. Kondisi politik yang tidak terlalu mendukung upaya perbaikan kondisi dan permainan para mafia narkoba menjadikan tidak adanya tujuan yang jelas dalam kebijakannya. Hal ini memperparah kondisi, khususnya pendidikan. Masih jauh dari kata baik. Kegagalan fungsi pemerintah ini kemudian memunculkan aksi dari masyarakat

dalam memberdayakan diri mereka sendiri. Salah satu yang muncul adalah Area Youth Foundation (AYF) yang didirikan oleh Sheila Lowe Graham.

AYF merupakan sebuah gerakan yang berfokus pada pendidikan kaum marginal dengan basis seni teater. Berdiri pada tahun 1997, AYF memiliki dua latar belakang. Pertama, pada kenyataannya kondisi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan tidak hanya karena tidak ada keadilan serta munculnya eskalasi konflik politik. Kedua, gerakan ini berusaha menjadi alternatif dari keberadaan sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat lokal. Secara umum AYF bertujuan: “...to give youth in rival zones of the city an opportunity to work together—to create understanding across chasms of misunderstanding that were literally deadly: cross the street and you could be dead...” AYF secara garis besar berusaha membentuk pemuda yang mampu bekerja sama dengan sesamanya dan membuat keberpahaman yang meruntuhkan ketidakpahaman.

Pada praktik lapangan AYF menggunakan seni teater dengan mengangkat topik kehidupan sehari-hari para partisipan untuk menumbuhkan harapan menumbuhkan harapan. AYF juga mengangkat nilai solidaritas melalui diskusi mengenai kehidupan (cara respek kepada orang lain, bagaimana menumbuhkan cinta sesama). Diskusi yang dilakukan AYF membangun sebuah dialog yang bertujuan menciptakan ruang multipemikiran. Selain itu, AYF memberi bantuan kepada anak muda untuk mengartikulasikan pengalaman mereka menjadi sebuah ide-ide kreatif.

⁴ Hickling-Hudson (2013)

Membangun Pembebasan Pemuda Desa

Gambaran situasi di masing-masing negara dalam ketiga kasus tersebut relevan dengan perkembangan pemuda Indonesia khususnya di perdesaan. Hal ini dapat dilihat juga ada kemiripan dengan beberapa bentuk alienasi pemuda desa Indonesia yang dijelaskan sebelumnya. Pertama, kita melihat bagaimana kondisi masyarakat perdesaan di Afrika Selatan yang mengalami pendidikan yang diskriminatif (Jansen, 1990) dan menimbulkan keresahan masyarakat desa di pinggiran Cape Town. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Tidak hanya di desa karena secara umum pendidikan Indonesia masih belum bisa terlepas dari konsepsi kekuasaan. Lebih parah lagi, pendidikan nasional Indonesia sejak zaman Orde Baru sudah diinternalisasi oleh nilai-nilai yang mendukung *status quo* rezim (Sarnoto 2012: 34). Kondisi ini hingga sekarang masih terasa terutama dengan pendidikan yang tak kunjung memberi ruang demokrasi secara luas.

Kasus di Jamaika memberi ilustrasi kondisi pendidikan di tengah kondisi literasi dan melek huruf yang rendah di tengah carut marut politik (Hickling-Hudson, 2013). Kondisi ini hampir sama dengan kondisi di Indonesia. Walaupun tingkat masuk pendidikan dan melek huruf cenderung menunjukkan kenaikan tiap tahunnya (BPS, 2017), angka tingkat pendidikan antara desa dan kota masih timpang. Berdasarkan data tahun 2011 masih ada sekitar 8,87 persen masyarakat desa tidak merasakan jenjang pendidikan dan 19,98 persen

tidak selesai sekolah dasar. Berbanding besar dengan penduduk perkotaan dengan 4 persen tidak mengenyam pendidikan dan 10,29 persen tidak selesai sekolah dasar (OECD/ Asian Development Bank, 2015). Kondisi ini juga masih didukung dengan adanya konflik-konflik sosial serta munculnya tensi-tensi identitas akhir-akhir ini.

Kasus perbandingan antara Amerika Serikat dan Inggris memberi gambaran kondisi masyarakat dalam gempuran neoliberalisme seperti halnya terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Bermula dari pemerintahan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan, Inggris dan Amerika Serikat menghadapi sistem perekonomian yang baru (Antonio, 2012). Kondisi ini kemudian menghentikan kebijakan *full-employment* Keynes dan dimulainya privatisasi dan investasi besar-besaran (Palley, 2005) serta membuka arus pasar bebas (Fakih, 2003). Hal ini kemudian memunculkan kebijakan sekolah bagi buruh di Amerika Serikat dan Inggris sebagai respon terhadap perubahan kebijakan yang tidak lagi berfokus pada penyediaan lapangan kerja.

Kondisi tersebut menjadi relevan terutama dalam melihat kondisi perdesaan Indonesia yang sekarang telah menjadi lahan dari dampak penerapan kebijakan neoliberalisme. Hal ini nampak dengan semakin besarnya arus kapitalisasi perdesaan terutama pada sektor agraria di Indonesia (Bernstein 2004; Rutter, 1999). Masuknya arus kapitalisasi dan liberalisasi secara besar-besaran inilah yang kemudian menimbulkan konflik-konflik sosial. Bahkan menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (2016) penyebab konflik

sebagian besar adalah dari sektor perkebunan (sektor pekerjaan primer yang nota benenya berada di desa) dengan jumlah 163 pada tahun 2016.

Berdasarkan tinjauan dari tiga penelitian tersebut didapat sekira empat butir inti pokok-pokok pendidikan pembebasan secara empirik. Pertama, membentuk suatu pembebasan yang masif melalui pendidikan merupakan hal yang tidak dapat diraih dalam waktu singkat. Kecenderungan yang terjadi proses tersebut tidaklah terencana, tetapi mengalir sesuai dengan dinamika yang berkembang. Pendidikan pembebasan di Afrika Selatan pada dasarnya adalah proses belajar antara murid dan guru yang berjalan panjang. Mereka sama-sama mengalami pengalaman-pengalaman natural yang kemudian membentuk identitas mereka sebagai masyarakat Afrika yang ingin bebas. Hal inilah yang kemudian berkorelasi dengan butir inti kedua, adanya pengalaman bersama dalam pendidikan. Pada kasus di Jamaika wujud ini diperlihatkan dengan adanya representasi pengalaman para murid dalam teater dan diskusi-diskusi kelompok. Bentuk pendidikan melalui teater di Jamaika juga menjadi bentuk menghadapi masalah serta refleksi dari pengalaman belajar para murid dalam kehidupan mereka. Hal ini juga ditiru pada tahun 1980-an oleh para buruh di Inggris dalam usaha memunculkan kesadaran walaupun hanya melalui diskusi kecil.

Kemudian butir inti ketiga adalah munculnya inovasi dalam melakukan pendidikan pembebasan, liberalisasi ekonomi, dan kebijakan di Inggris pada tahun 1980-an serta represi pemerintah di Afrika Selatan pada masa politik *apartheid* justru tidak menjadi halangan dalam pengembangan

pendidikan yang membebaskan. Dalam kasus di Inggris asosiasi buruh mampu membentuk kesadaran buruh melalui kebijakan pendidikan buruh dengan ditutupi dalih pemajuan kualitas buruh. Sementara itu, di Afrika Selatan justru pendidikan pembebasan dimulai dari para murid (yang nota benenya para pemuda dari desa miskin dan terbelakang) melalui ruang-ruang diskusi yang berujung pada perlawanan atas represi rasial. Semakin menarik lagi, pada kegiatan AYF di Jamaika yang menerapkan media pembelajaran melalui seni teater sebagai bentuk pembebasan kepada kaum muda di sana. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan pembebasan tidaklah terbatas pada ruang dialog sehari-hari namun juga melalui penerapan pada seni atau media lain. Adapun inti pokok yang terakhir (keempat) mengenai kondisi kesadaran dan sosio-kultural masyarakat. Pada perbandingan masyarakat Inggris dan Amerika Serikat, terlihat jelas bagaimana bentuk komunisme pada kala itu sudah mulai terkikis⁵ sehingga pendidikan pembebasan yang diterapkan tidak sepenuhnya mendukung solidaritas sosial yang kuat⁶. Bahkan di Amerika Serikat, potensi penerapan pendidikan pembebasan tidak akan berjalan dengan baik sebab tidak didukung oleh sistem birokrasi dan sosial.

⁵ Setidaknya setelah kemunculan neoliberalisme, tingkat individualisme masyarakat Barat (terutama Amerika Serikat) kian meningkat (lihat Putnam, 2000). Namun, memang pada kondisi kontemporer ada hipotesa bahwa terjadi kebangkitan komunisme terutama dengan adanya krisis pengungsi di Eropa.

⁶ Dalam kata lain tetap terjadi alienasi dalam relasi sosial antarindividu.

Membentuk pendidikan pembebasan bagi pemuda desa merupakan hal penting untuk menghilangkan alienasi-alienasi dalam desa dan pemudanya. Pendidikan pembebasan sendiri bertujuan menciptakan manusia yang sadar secara kritis, yaitu sadar akan marginalisasi dalam dirinya (Freire, 1974). Lebih dalam lagi pendidikan pembebasan berusaha menciptakan manusia yang mengada atas dirinya sendiri (Freire, 1991). Manusia yang mampu belajar dan mengenal akan dirinya lebih dalam dengan melihat realitas yang terjadi dari sebuah fenomena. Mereka yang terbebas kemudian mampu menjadi manusia seutuhnya dan mampu memanusiakan yang lainnya⁷ hingga pada akhirnya pembebasan sendiri merupakan penghilangan alienasi yang bertujuan pada penciptaan hakikat manusia yang utuh. Pada konteks pemuda desa, pembebasan dapat diartikan sebagai penghilangan alienasi-alienasi yang membatasi mereka dari identitas mereka sebagai manusia. Manusia, dalam hal ini, bukanlah hanya sebagai manusia yang memiliki pilihan dan makna atas pribadinya, melainkan juga menjadi manusia yang memiliki keterikatan sosial (Martin, 2004). Pembebasan dalam tulisan ini juga berusaha memunculkan semangat perubahan dalam diri pemuda.

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, terdapat beberapa pertanyaan kritis. Pertama, seperti apa perubahan yang diharapkan kepada pemuda desa Indonesia? Kedua, seperti apa saja upaya pembebasan yang harus dilakukan kepada pemuda desa

⁷ Pemanusiaan tidaklah terbatas pada mereka yang senasib namun kepada manusia secara keseluruhan, termasuk mereka yang memarginalkan sesama manusia (Freire, 1991)

Indonesia berdasarkan konteks tiga kasus di atas? Sebelum masuk pada jawaban pertanyaan tersebut, perlu diketahui dahulu apa saja konten pembebasan menurut Paulo Freire. Menurut Susanto (2016) setidaknya ada tiga unsur penting dalam pendidikan pembebasan Paulo Freire. Pertama bahwa pada dasarnya manusia memiliki kapasitas untuk mengubah dirinya dan menjadi subjek. Hal ini berdekatan dengan apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketika manusia mampu sadar akan siapa dirinya maka secara langsung dirinya telah menjadi subjek independen. Pendidikan pun kemudian haruslah mengedepankan kesetaraan antarsesama aktor baik guru maupun murid (Freire, 2007: 51).

Unsur penting kedua adalah mengedepankan pendidikan menghadapi masalah sebagai unsur praktis. Pendidikan hadap masalah pada hakikatnya merupakan pendidikan dengan mengenalkan murid kepada kondisi lingkungan dan situasi yang melekat pada kehidupannya (Freire, 1991). Titik tolak pendidikan kemudian haruslah pada konteks kekinian, eksistensial, dan konkret yang mencerminkan aspirasi-aspirasi rakyat (Nata, 2003: 49-53 dalam Susanto, 2016: 90). Unsur yang ketiga adalah dialog sebagai esensi utama dalam pendidikan itu. Terciptanya pola hubungan yang setara akan menjadi kuat ketika dialog dicanangkan dalam relasi hubungan tersebut. Dialog memunculkan kodifikasi pokok yang membawa pada munculnya rasa totalitas atas kesadaran diri yang nyata (Freire, 1991: 113).

Dari pembahasan terkait pendidikan pembebasan ini, dapat digambarkan bahwa pendidikan adalah bentuk transformasi dari mereka yang tidak sadar menjadi sadar.

Dewey (1939 dalam Pezone & Singer, 2003: 146) melihat pembebasan pendidikan menjadikan adanya kesadaran yang menuntut pada distribusi kekuasaan. Kekuasaan yang kemudian juga dibahas Freire (1991, 1995) sebagai upaya kaum tertindas melakukan klaim atas apa yang terenggut dari mereka. Pada konteks pertanyaan pertama, perubahan sosial pemuda yang diharapkan secara sederhana adalah upaya sadar atas alienasi dan mengklaim berbagai basis kuasa pribadi yang terenggut. Bentuk-bentuk alienasi baik dari pemerintah dan kapitalisme sendiri yang harus dilawan oleh pemuda dengan tujuan yang lebih jauh, yaitu menjadikan desa sebagai kekuatan otonomi yang kuat.

Lalu bagaimana membentuk kesadaran-kesadaran tersebut berdasarkan tiga kasus sebelumnya? Setidaknya terdapat tiga bentuk rekomendasi. Pertama, membentuk komunitas kepemudaan yang setara dan independen. Pewujudan hubungan guru dan murid yang setara juga harus diterapkan dalam hubungan antarmurid atau antarguru. Setiap pemuda dalam praktiknya memiliki posisi yang setara dan tidak ada semacam pengguruan bahkan di dalam struktur yang administratif. Kasus di Afrika Selatan serta pengajaran buruh di Inggris menjadi contoh ketika posisi antarmurid setara dan gurumurid pun setara. Selain itu, bentuk independensi terutama dari pendidikan formal menjadikan terbukanya ruang untuk mengeksplorasi pengalaman.

Kedua, membangun kesadaran atas pentingnya inovasi dan strategi perlawanan dalam setiap bentuk pendidikan. Praktik pembebasan di Jamaika serta modifikasi asosiasi buruh dalam menciptakan ruang dalam kebijakan neoliberal pada tahun

1980-an menjadi bentuk upaya mereka dalam menerapkan inovasi dan strategi pendidikan pembebasan. Tanpa adanya inovasi dan strategi semacam itu niscaya pendidikan pembebasan dapat mengikuti perubahan sosial sendiri.

Ketiga, menciptakan ruang diskusi yang penuh bahasan lokalitas dan realitas dari pemuda itu sendiri. Penciptaan ruang diskusi semacam ini mendorong adanya kesadaran kritis yang kuat. Pemuda desa di Afrika Selatan menciptakan ruang diskusi sebagai basis dari kesadaran mereka atas kondisi lokal dan realitas mereka sendiri yang mengalami represi. Pada akhirnya ini akan muncul tingkat kritisme yang tinggi atas dasar solidaritas sebagai komunitas desa yang otonom. Hal inilah yang kemudian juga menghadirkan masyarakat yang partisipatif dan mau *melek* atas segala fenomena yang terjadi. Melalui bentuk-bentuk semacam ini kemudian dapat dibentuk usaha pembebasan pemuda bersama masyarakat desa atas kondisi yang mengalienasikan.

Penutup

Pendidikan pembebasan merupakan salah satu cara yang dapat menyentuh kaum muda dalam rangka mengangkat mereka dari kondisi teralienasi. Memang kemudian pada realitasnya alienasi tersebut cukup menekan pemuda dari peran perubahan. Bentuk-bentuk alienasi tersebut dihadirkan oleh pemerintah maupun kapitalisme. Pemerintah memberi tekanan melalui kebijakan pendidikan formal yang terpusat serta kebijakan Karang Taruna. Sementara itu, bentuk alienasi kapitalisme secara halus terwujud

melalui budaya konsumerisme, liberalisasi desa, serta urbanisasi. Hal inilah yang kemudian memberi hambatan pula untuk menciptakan desa yang otonom dan mampu mandiri. Pembelajaran dari penelitian di Jamaika, Afrika Selatan, serta perbandingan Inggris dan Amerika Serikat memberi gambaran bahwa pendidikan pembebasan dapat diwujudkan dalam konteks pemuda di Indonesia, khususnya di perdesaan. Dengan membuat komunitas pemuda yang setara dan independen dari pendidikan formal, mengedepankan inovasi dan strategi, serta melalui proses ruang diskusi yang kritis dapat mendorong penerapan praktik pembebasan pemuda desa di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa perwujudan segala bentuk ini masih membutuhkan aktor eksternal dalam melakukan intervensi sehingga aktor eksternal inilah yang kemudian juga harus mengikuti semangat dari pendidikan pembebasan.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Taufik. (1974). Pemuda dan Perubahan Sosial. Dalam Abdullah, Taufik (Ed.). *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Althusser, Louise. (2001). *Lenin and Philosophy and Other Essays*. NYU Press. Diakses dari: <http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qgh9v>
- Androutsopoulos, Jannis & Alexandra Georgakopoulou. (2003). Discourse Constructions of Youth Identities: Introduction. Dalam Androutsopoulos, Jannis & Alexandra Georgakopoulou (Eds.). *Discourse Constructions of Youth Identities*. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Ali, M. (2007). *Orang Desa Anak Tiri Pembangunan*. Malang: Averroes Press bekerjasama dengan Prakarsa.
- Anggraeni, R. (2013). Politik Beras di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1969-1998): dari Subsistensi Swasembada Pangan Hingga Ketergantungan Impor. *Thesis*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Antonio, Robert J. (2012). After Neoliberalism: Whither Capitalism? dalam Ritzer, George (Ed.). *The Wiley-Blackwell Companion to Sociology* (pp. 567-587). New Jersey: Wiley-Blackwell.
- Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: KOMPAS.
- Badan Pusat Statistik. (Diupdate pada 22 Maret 2017). Indikator Pendidikan, 1994-2016. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1525>. Diakses pada 2 April 2017.
- Bauman, Zygmunt. (2005). *Work, Consumerism and the New Poor*. Berkshire: Open University Press.
- Bernstein, Henry. (2004). Changing Before Our Very Eyes: Agrarian Questions and the Politics of Land in Capitalism Today. *Journal of Agrarian Change*, 4 (1 & 2), 190-225.
- Chintha, Sam Sundar & Babu George. (2012). Globalization, Mobility, Identity, and Consumerism: An Analysis of

- the Genesis of Unsustainable Consumption. *Palermo Business Review* No. 6, 41-52.
- Costanza-Chock, Sasha. (12 Desember 2012). Youth and Social Movements: Key Lessons for Allies. <https://cyber.harvard.edu/node/97244>. Diakses pada 30 Maret 2017.
- Deacon, Bob. (2007). *Global Social Policy & Governance*. London: SAGE Publication Ltd.
- Eko, Sutoro & Abdur Rozaki (eds.). (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, Sutoro & Krisdyatmiko (eds.). (2006). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. Yogyakarta: IRE.
- Erlina, Erlin. (2011). Karang Taruna Pasca Orde Baru: Di Manakah Geliat Partisipasi dan Aspirasi Kaum Muda?. Dalam Azca, Najib et. al (Eds.). *Pemuda Pasca Orba, Potret Kontemporer Pemuda Indonesia* (pp. 3-19). Yogyakarta: Yousure.
- Fakih, Mansour. (2003). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Furlong, Andy & Fred Cartmel. (2007). *Young People and Social Change: New Perspectives*. Berkshire: Open University Press.
- Freire, Paulo. (1991). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Freire, Paulo. (2007). *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: ReaD bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Frymer, Benjamin. (2005). Freire, Alienation, and Contemporary Youth: Toward a Pedagogy of Everyday Life. *InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies*, 1(2), Article 3.
- Gordon, Joshua. (1998). NGOs, the Environment and Political Pluralism in New Order Indonesia. *A Journal of the Southeast Asian Studies Student Association*, 2(2), 47-68.
- Greendwald, Bruce C. & Joseph E. Stiglitz. (1990). Asymmetric Information and The New Theory of The Firm: Financial Constraints and Risk Behavior. *Working Paper No. 3359*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Hakken, David. (1983). Impact of Liberation Pedagogy: The Case of Worker's Education. *The Journal of Education*, 165(1), 113-129.
- Harvey, David. (1985). *The Urbanization of Capital*. Maryland: John Hopkins University Press.
- Harvey, David. (2012). *Rebel City: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London & New York: Verso.
- Hickling-Hudson, Anne. (2013). Theatre-Arts Pedagogy for Social Justice: Case Study of the Area Youth Foundation in Jamaica. *Current Issues in Comparative Education*, 15(2), 15-34.
- Hill, Jennifer Ann. (2011). Endangered Childhoods: How consumerism is impacting child and youth identity. *Media, Culture & Society*, 33(3), 347-362.

- Honawa, A. (2014). Waithood: Youth transitions and social change. In D. Foeken, T. Dietz, L. de Haan, & L. Johnson (eds.). *Development and Equity: An interdisciplinary exploration by ten scholars from Africa, Asia, and Latin America*. Leiden: Brill.
- Husken, Frans. (1998). *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980*. Jakarta: Grasindo.
- Illich, Ivan. (1971). *Deschooling Society*. New York: Harper & Row.
- Jansen, Jonathan. (1990). In Search of Liberation Pedagogy in South Africa. *The Journal of Education*, 172(2), 62-71.
- Jurdi, Syarifuddin. (2012). Dinamika Politik Kaum Muda Indonesia: Dialektika Politik Nasional dan Lokal. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 6(2), 29-41.
- Koning, J. (2004). *Generations of Change: Migration, Family Life and Identity Formation in a Javanese Village During the New Order*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2016). *Catatan Akhir Tahun 2016 “Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan”*. https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/laporan_akhir_tahun_2016_final_pri. Diakses pada 29 Maret 2017.
- Kuncoro, B. (2013). *Hubungan Desa dan Negara Studi Relasi Kekuasaan Kepala Desa dan Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pasca Orde Baru*. Desertasi. Surabaya: Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga.
- Kusuma, M. K. (2014). Negaranisasi Desa: Studi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pacul dan Desa Kasiman Kabupaten Bojonegoro Pascaotonomi Daerah. *Jurnal Politik Muda*, 3(2), 129-139.
- Lesko, Nancy. (2012). *Act Your Age!: A Cultural Construction of Adolescence*. New York & London: Routledge.
- Malamassam, Meirina Ayumi. (2016). Youth Migration in Indonesia: Decision to Move and to Choose Destination Areas. *Indonesian Journal of Geography*, 48(1), 62-71.
- Margono, Subando Agus. (2011). Pemuda dan Transformasi Pasca Orba. dalam Azca, Najib et. al (Eds.). *Pemuda Pasca Orba, Potret Kontemporer Pemuda Indonesia* (pp. 3-19), Yogyakarta: Yousure.
- Martin, Jonathan. (2004). *Freire vs. Marx: The Tension Between Liberating Pedagogy and Student Alienation*. Dipresentasikan pada 7 April 2004 dalam 1st Annual Conference-Workshop of the Social Theory Forum, UMass Boston.
- Marx, Karl. (1959). *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*. Moscow: Progress Publishers.
- McInerney, Peter. (2009). Toward a Critical Pedagogy of Engagement for Alienated Youth: insights from Freire and school-based research. *Critical Studies in Education*, 50(1), 23-35.
- Mohajer, Nicole & Jaya Earnest. (2009). Youth Empowerment for the Most

- Vulnerable: A model based on the pedagogy of Freire and experiences in the field. *Health Education*, 109(5), 424-438.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Naafs, Suzanne & Ben White. (2012). Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 1(2), 89-106.
- Newman, F. (1981). Reducing Student Alienation in High Schools: Implications of theory. *Harvard Education Review*, 51(4), 546-564.
- OECD/Asian Development Bank. (2015). *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. Paris: OECD Publishing.
- Palley, T. I. (2005). Labour Standards, Democracy and Wages: Some cross-country evidence. *Journal of International Development*, 17(7), 883-898.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77/Huk/2010 tentang Pedoman dasar Karang Taruna. 21 September 2010 Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Pezone, Michael & Alan Singer. (2003). Education for Social Change: From Theory to Practice. *Workplace No. 10*, 145-151.
- Sztompka, Piötr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Rasyadian, Yuda. (2013). Merajut dengan Tanah, Menjejak dengan Sekolah (Gerakan Perlawanan atas Neoliberalisme di Desa Pertanian Sarimurti). *Jurnal Ranah*, Tahun III (1), 12-38.
- Rutten, Mario. (1999). Rural Capitalists in India, Indonesia, and Malaysia: Three Cases, Two Debates, One Analysis?. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 14(1), 57-97.
- Rye, Johan Fredrik. (2011). Youth Migration, Rurality and Class: A Bourdieusian approach. *European Urban and Regional Studies*, 18(2), 170-183.
- Sarnoto, Ahmad Zain. (2012). Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia. *Jurnal EDUCHILD*, 1(1), 30-40.
- Sumarno. (2007). Teknologi Revolusi Hijau Lestari untuk Ketahanan Pangan Nasional di Masa Depan. *Jurnal Iptek Tanaman Pangan*, 2(2), 131-153.
- Susanto, A.B. (2016). Pendidikan Penyadaran Paulo Freire. *Jurnal At-Ta'dib*, 4(1), 81-100.
- Suseno, Djoko & Hempri Suyatna. (2006). *Quo Vadis Petani Indonesia: Terhempasnya Anak Bangsa dari Sektor Pertanian*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Svensson, Jakob & David Yanagizawa. (2009). Getting Prices Right: The Impact of The Market Information Service in Uganda. *Journal of the European Economic Association*, 7(2-3), 435-445.
- Thernborn, G. (2000). Globalizations: Dimensions, Historical Waves, Regional Effects, Normative Governance. *International Sociology*, 15(2), 151-179.
- Travis, Robert. (1986). On Powerlessness and Meaninglessness. *The British Journal of Sociology*, 37(1), 61-73.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4308. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Valkenburg, Patti M. (2000). Media and Youth Consumerism. *Journal of Adolescent Health*, 27S, 52-56.
- White, Ben. (2012). Agriculture and the Generation Problem: Rural Youth, Employment and the Future of Farming. *IDS Bulletin*, 43(6), 9-19.
- Wyn, Johanna & Dan Woodman. (2006). Generation, Youth and Social Change in Australia. *Journal of Youth Studies*, 9(5), 495-514.

PEMUDA DESA DAN KARANG TARUNA: BERTANI KOLEKTIF DI KULON PROGO

Hanny Widjaya

Peneliti Samadhya Yogyakarta

hannywidj@gmail.com

Ben White

Profesor Emeritus Sosiologi Perdesaan, Institute of Social Studies (ISS)

white@iss.nl

Aprilia Ambarwati, Charina Chazali

Peneliti AKATIGA-Pusat Analisis Sosial

apriliambarwati@gmail.com, charinachazali@gmail.com

Abstract

Karang Taruna (KT) is Indonesia's only youth organisation with branches at local level nation-wide. Opinions about KT's character and potential differ widely: while some consider it a potential vehicle of young people's critical expression of their aspirations, others see it as a tool of the state for depoliticisation of rural youth, and an important factor in their contemporary alienation. In this article we present an illustrative case of a relatively dynamic KT organisation at neighbourhood (dusun) level, in Kulon Progo District (Yogyakarta), focusing on the following questions. How far is the heterogeneity among KT members (by gender, age and class) reflected in its internal organisation and the interactions among its members? Do the KT's activities reflect the interests of particular sub-groups, while marginalising those of others? Does the KT's recent collective cultivation project have any impact on young people's apparent dislike of farming and farming futures? What constraints does the KT face in expanding its economic activities? And finally, as the only available youth organisation, does KT have any role as a channel for young people's aspirations and participation in village-level decisions?

Keywords: *Karang Taruna (KT), Rural Youth, Young Farmer*

Abstrak

Karang Taruna (KT) merupakan satu-satunya organisasi pemuda di Indonesia yang secara nasional menyebar hingga ke tingkat lokal. Ada banyak ragam pendapat tentang sifat dan potensi yang dimiliki KT. Sebagian melihatnya sebagai kendaraan yang sangat potensial sebagai sarana untuk mengekspresikan aspirasi-aspirasi kritis kelompok muda; sebagian yang lain melihatnya sebagai alat negara untuk mendepolitisasi pemuda perdesaan dan sebagai faktor penting atas terjadinya alienasi kelompok muda saat ini. Dalam artikel ini kami menyajikan satu kasus ilustratif berupa satu organisasi KT yang relatif dinamis dan berada pada level dusun, di Kabupaten Kulon Progo (Yogyakarta). Artikel ini fokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, melihat dinamika intern KT: sejauh mana keragaman/ diferensiasi antarpemuda di dalam KT (menurut gender, umur, dan kelas) tercermin dalam organisasi internnya dan interaksi antaranggota KT? Apakah kegiatan KT lebih menjawab/ mencerminkan minat dan kepentingan kelompok tertentu sehingga kelompok lainnya relatif termarginalkan? Kedua, melihat anggapan umum bahwa generasi muda perdesaan tidak tertarik untuk bertani, atau untuk tinggal di desa, sejauh mana proyek penyewaan sawah berhasil mendorong semangat pemuda/ pemudi untuk turun ke sawah, dan mengubah sikap negatif mereka tentang prospek menjadi petani? Ketiga, setelah keberhasilan proyek penyewaan sawah di tahun pertama, bagaimana masa depan bertani kolektif di tahun-tahun selanjutnya? Kendala apa yang mereka hadapi? Keempat, sejauh mana KT sebagai satu-satunya organisasi generasi muda desa memiliki (atau bisa memiliki) tempat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa (misalnya tentang penggunaan Dana Desa)?

Kata Kunci: Karang Taruna, Pemuda Desa, Petani Muda

Pengantar

Karena alasan sejarah, boleh dikatakan pemuda Indonesia tidak memiliki gerakan atau organisasi yang signifikan (lihat artikel pengantar jurnal ini). Di tingkat desa, satu-satunya organisasi pemuda yang ditemukan adalah Karang Taruna (KT). Setelah KT pertama didirikan di Jakarta tahun 1969 di bawah naungan Gubernur Ali Sadikin, berkembangnya KT menjadi lembaga formal yang (seharusnya) berada di setiap desa/ kelurahan di seluruh Indonesia adalah produk rezim Soeharto, yang diatur pertama kali oleh Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/I/1981 tentang Susunan Orga-

nisasi dan Tata Kerja Karang Taruna. Selama zaman pemerintahan Soeharto, keberadaan KT ditandai kooptasi, dengan bantuan yang relatif melimpah untuk menjalankan kegiatan pemuda di tingkat lokal secara *top-down*. Subsidi mengalir dari pusat sampai ke tingkat desa untuk mengaktifkan KT sebagai pendukung pemerintah, dalam rangka depolitisasi pemuda sebagai bagian *floating mass* (Erlina, 2011: 267-8, 272-3).

Pada awal masa reformasi, KT sebagaimana organisasi korporatis lainnya mengalami masa lesu, kemudian diaktifkan kembali dalam Rakernas KT pertengahan tahun 2005. Peraturan terakhir yang

menentukan azas/ tujuan, keanggotaan, kepengurusan, pengorganisasian, tugas dan fungsi KT adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/ 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Menurut Permen tersebut, tugas pokok KT meliputi (antara lain):

- mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda
- menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda
- meningkatkan usaha ekonomi produktif

Selanjutnya siapa yang menjadi anggota KT ditetapkan dengan menganut sistem “stelsel pasif” yang berarti: “setiap anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun [...] merupakan Warga Karang Taruna” (*ibid.*, Pasal 9 [1]). Hal ini mencerminkan kecenderungan perluasan konstruksi “pemuda” oleh negara, sampai meliputi golongan usia yang sebenarnya sudah lama menjadi “dewasa” menurut kriteria obyektif (lihat artikel pengantar edisi JAS ini).

Melihat ketentuan ini, jelaslah bahwa pertama, KT mempunyai tugas yang cakupannya sangat luas. Kedua, anggota KT merupakan sejumlah besar masyarakat desa (50% atau lebih) dan bersifat cukup heterogen, dari anak Sekolah Menengah Pertama kelas 1 sampai bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bekerja dan mempunyai

anak (dalam beberapa kasus bahkan memiliki cucu), lelaki maupun perempuan, kaya maupun miskin. Kedua aspek ini mendukung anggapan bahwa setiap KT akan kesulitan mencari fokus yang bisa melayani kebutuhan dan kepentingan seluruh anggotanya.

Ada pula pengamat yang baranggapan bahwa Karang Taruna, seperti halnya lembaga korporatis lainnya, tidak mungkin berfungsi merangsang kedewasaan politik dan kreativitas warganya, dan malah justru lebih mendukung depolitisasi atau bahkan infantilisasi warga muda dengan mengarahkan mereka pada “kegiatan-kegiatan yang bernuansa *fun* seperti olah raga, rekreasi, dan lain sebagainya [yang] tidak menyentuh ranah politik” (Sutoro & Krisdyatmiko, 2006: 317). Sementara itu, menurut Erlina, biarpun sekarang masing-masing KT diberi pertanggungjawaban untuk menetapkan program kerjanya, “implementasi program dan kegiatan KT selama lebih dari satu dekade ternyata setali tiga uang dengan cara dan pendekatan Orba” sehingga KT masih bersifat “organisasi pemanis dan pelengkap yang dipergunakan pemerintah desa” (Erlina, 2011: 276 & 283). Pinurba dalam artikelnya di jurnal ini berpendapat bahwa KT justru menjadi bentuk alienasi pemuda desa:

Kondisi ini tidak lepas dari posisi Karang Taruna yang merupakan organisasi masyarakat yang hierarkis hingga ke pemerintah pusat hingga saat ini. Alih-alih menjadi bentuk pendidikan alternatif dalam menumbuhkan identitas pemuda, Karang Taruna justru menjadi semacam alat kekuasaan dan tidak dapat lepas dari itu. Kehadiran Karang Taruna justru menjadi bentuk alienasi alternatif penguasa kepada pemuda selain melalui pendidikan formal (Pinurba, dalam edisi jurnal ini).

Pendapat berbeda disampaikan oleh Vandy dalam artikel di jurnal ini yang setelah mengamati kegiatan pemuda desa di pinggir wilayah industri di Tuban berkesimpulan bahwa:

Karang Taruna di wilayah industri tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi bagi pemuda tapi juga menjadi fasilitator masyarakat untuk menyampaikan banyak aspirasi baik kepada pemerintah maupun industri. Lebarnya ruang sosial yang diberikan kepada pemuda ini sekaligus menjadi pemicu hadirnya pertarungan antara kelompok muda dan kelompok tua dalam pengelolaan pembangunan desa. [...]

[Karang Taruna] berhasil menjadi tempat yang cukup efektif untuk melakukan pertukaran informasi, ide dan gagasan kaum muda di sana. Kecenderungan umum bagi pemuda yang berpartisipasi dalam kepengurusan Karang Taruna ialah aktif mengkritisi kinerja aparat desa dan mengawal aktivitas industri di sana, meskipun di antara mereka juga terdapat anggota struktur pemerintahan desa maupun yang bekerja sebagai buruh di industri yang dikritisi kehadirannya.

Pandangan terakhir ini mewakili ide bahwa betapapun sifat korporatis dan *top-down*-nya, KT dalam kasus-kasus tertentu dapat “bersifat *otonom*, sosial, [dan] terbuka” sesuai dengan diskursus Permensos 77. Dalam hal ini, menarik untuk melihat lebih jauh kasus KT yang berhasil menggunakan otonominya untuk memperjuangkan kepentingan pemuda/ pemudi desa, termasuk untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan melobi kepentingan pemuda/ pemudi desa di tingkat lokal.

Dalam artikel ini kami mendalami satu kasus KT pada tingkat paling lokal (*dusun*) yang relatif dinamis, sebagai kasus ilustratif tentang organisasi KT yang menggunakan ruang otonominya untuk memperjuangkan

kepentingan kelompok muda di tingkat lokal. KT Buana Muda (BM) di dusun Kepuh, desa Kaliloro (sebelah utara Kulonprogo, Yogyakarta)¹ dianggap paling maju di antara 26 KT tingkat dusun di desa penelitian, antara lain karena mengambil inisiatif untuk ikut lelang sawah Kas Desa untuk disewa dan dikelola bersama. Ini juga menarik untuk dilihat dalam konteks perdesaan masa kini di mana generasi muda sering dianggap “tidak mau menjadi petani” dan “tidak mau turun ke sawah membantu orang tuanya”.

Selain menguraikan kasus inisiatif penyewaan sawah tersebut, artikel ini mengangkat beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, melihat dinamika internal KT: sejauh mana keragaman/ diferensiasi antarpemuda di dalam KT (menurut gender, umur, dan kelas) tercermin dalam organisasi internalnya dan interaksi antaranggota KT? Apakah kegiatan KT lebih menjawab/ mencerminkan minat dan kepentingan kelompok tertentu sehingga kelompok lainnya relatif termarjinalkan? Kedua, melihat anggapan umum bahwa generasi muda perdesaan tidak tertarik untuk bertani atau untuk tinggal di desa, sejauh mana proyek penyewaan sawah berhasil mendorong semangat pemuda/ pemudi untuk turun ke sawah, dan mengubah sikap negatif pemuda/ pemudi tentang prospek menjadi petani? Ketiga, setelah keberhasilan proyek penyewaan sawah di tahun pertama, bagaimana masa depan bertani kolektif di tahun-tahun selanjutnya? Kendala apa yang mereka hadapi?

¹ Desa Kaliloro (bukan nama sebenarnya) adalah lokasi serangkaian penelitian oleh Ben White, Ann Stoler dan berbagai peneliti lainnya sejak tahun 1972. Nama KT yang disoroti, dan semua nama orang dalam artikel ini bukan nama mereka sebenarnya.

Keempat, sejauh mana KT sebagai satu-satunya organisasi generasi muda desa memiliki (atau bisa memiliki) tempat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa (misalnya tentang penggunaan dana desa)?

Lokasi penelitian adalah desa Kaliloro, sebuah desa di pinggir sungai Progo, di bagian utara Kabupaten Kulon Progo. Keempat penulis melakukan penelitian kualitatif di dusun Kepuh pada tahun 2017. Wawancara dilakukan dengan anggota Karang Taruna (tua dan muda, laki-laki dan perempuan, pengurus dan anggota biasa), beberapa tokoh tingkat dusun, dan pamong desa. Selain itu, kami dibantu pengurus KT mengadakan diskusi santai malam hari tentang kegiatan KT dan visi ke depan, yang dihadiri oleh sekitar 20 anggota KT.

Di bagian depan kami telah memberi sedikit informasi dasar tentang desa penelitian dan dusun yang dijadikan studi kasus. Di bagian selanjutnya akan dibahas secara berturut-turut tentang organisasi, kepengurusan dan kegiatan KT BM, proyek penyewaan sawah Kas Desa, dan visi KT ke depan. Bagian penutup mengangkat beberapa dilema yang dihadapi pemuda desa pada umumnya, dan KT khususnya, dalam mendukung dan memperjuangkan kepentingan dan permasalahan generasi muda desa.

Organisasi Internal: Diferensiasi dan Dinamika

Buana Muda (BM) merupakan Karang Taruna level dusun. Perjalanan BM sebagai organisasi kepemudaan mengalami pasang surut, terdapat masa aktif dan masa sama

sekali tidak memiliki kegiatan apapun. Saat ini sudah hampir tiga tahun BM kembali aktif di masa kepengurusan Boniman yang menjabat sebagai ketua lebih dari 10 tahun lalu. Boniman (laki-laki, 34 tahun) merupakan petani pemaro dan mempunyai usaha pengolahan hasil bumi minyak kelapa skala rumah tangga. Di tahun 2015, dia menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian diangkat pula menjadi ketua KT level desa di tahun 2016. Menurut Boniman, menjadi ketua KT dusun sekaligus desa merupakan satu tantangan tersendiri mengingat kurang aktifnya KT di hampir seluruh dusun. Di sisi lain, tingginya angka pengangguran dan urbanisasi pemuda desa—yang menurut Boniman merupakan salah satu masalah utama perdesaan—memerlukan solusi yang bersumber dari keaktifan dan kreativitas para pemuda. Secara formal seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 - 45 tahun dalam lingkungan desa merupakan warga KT. Sedangkan pengurus KT adalah mereka yang berumur 17 - 45 tahun (Permensos 2013, Pasal 1, Pasal 13). Selain Boniman (Ketua), beberapa pengurus aktif BM adalah laki-laki dan perempuan yang berumur 20-30an, bahkan ada yang berumur 41 tahun. Boniman tidak permasalahan ini, dan mengatakan “keberadaan orang-orang tua di KT tetap dibutuhkan... mereka didengar dan dihormati oleh yang lebih muda.” Selain itu, terdapat pandangan dari pengurus KT yang relatif lebih tua bahwa mereka yang lebih muda belum mampu mengurus beberapa hal agar kegiatan benar-benar berjalan, seperti dilonarkan oleh salah satu pengurus yang bernama Ardi (laki-laki, 21 tahun). Baginya anak-anak KT yang lebih muda darinya

kurang siap menjalani kewajiban dan membutuhkan waktu lama untuk melakukan tindak lanjut. Oleh karena itu pengurus BM kebanyakan adalah mereka yang lebih tua dan dianggap lebih siap.

Pengurus aktif BM kebanyakan berasal dari keluarga petani pemilik dan pemaro, buruh pabrik di kota, wiraswasta kecil, PNS, dan militer. Sedangkan kegiatan utama/pencaharian pengurus aktif di antaranya adalah petani pemaro, peternak ayam, satpam, dan mahasiswa. Dari delapan pengurus aktif, terdapat dua orang perempuan berumur 20 dan 21 tahun yang masih kuliah. Pemilihan pengurus aktif bukanlah berdasarkan proses pencalonan, voting atau musyawarah resmi, tetapi melalui proses yang lebih cair. Siapa dari mereka yang memiliki waktu dan bersedia mengurus kerja-kerja

untuk KT, maka secara otomatis dia yang terpilih, misalnya sekretaris, bendahara, dan koordinator lapangan. Jabatan koordinator lapangan biasanya dipilih untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya temporer, misalnya dalam kegiatan hari jadi desa, perayaan kemerdekaan dan bertani kolektif.

Anggota aktif KT saat ini ada 45 orang yang sering ikut pertemuan bulanan, membayar iuran, mau membantu kegiatan KT, mengumpulkan massa untuk memeriahkan kegiatan, dan juga datang memeriahkan acara-acara yang diselenggarakan KT. Bandingkan jumlah tersebut dengan jumlah warga dusun yang memenuhi kriteria keanggotaan KT (berumur 13 – 45 tahun) yang berjumlah 121, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1 Komposisi Pemuda di Dusun Kepuh

Umur	Perempuan	Laki-laki
13-18	14	7
19-30	21	20
31-45	30	29
Total	65	56

Sumber: Hasil sementara survei rumah tangga Kaliloro, Desember 2016 - Januari 2017

Tingkat partisipasi ini bisa dianggap rendah (jauh di bawah 50%). Tetapi mengingat bahwa perempuan umur 30–45 boleh dikatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan KT, dan sebagian laki-laki berumur 30 tahun ke atas mengatakan terlalu sibuk untuk menjadi anggota aktif, tingkat par-

tisipasi warga yang betul-betul muda di KT sebenarnya tidak serendah itu.

Mayoritas dari 45 anggota aktif ini adalah laki-laki sebanyak 30 orang dan 15 perempuan. Banyak di antara mereka yang duduk di SMP dan SMA/ SMK (jadi, dalam golongan umur kurang-lebih 13 s.d. 18

tahun). Keaktifan seseorang bisa dilihat dari kerajinan mengikuti pertemuan rutin (bulanan) dan membayar iuran. Anak SMP membayar iuran sebesar Rp1.000, SMA membayar Rp2.000, dan usia di atasnya atau sudah bekerja sebesar minimal Rp2.000.

Pertemuan rutin lebih banyak dipimpin oleh Ketua KT. Terdapat dua pengurus laki-laki lain yang aktif mengkoordinir setiap kegiatan KT, yaitu Sekretaris KT (21 tahun) dan Koordinator Olahraga (25 tahun). Selain mereka, ada seorang laki-laki (40 tahun) yang aktif terlibat sebagai anggota. Meskipun laki-laki ini sudah tinggal di desa tetangga, namun dia lahir di dusun Kepuh dan merasa memiliki hubungan erat dengan pemuda/ pemudi di sana dibandingkan desa tempat dia tinggal saat ini. Kolaborasi mereka berempat adalah kunci utama di hampir semua kegiatan KT. Mereka merasa anggota lainnya banyak yang masih berusia sekolah sehingga belum memiliki cukup pengalaman dalam berkegiatan.

Keaktifan dan partisipasi laki-laki dalam keseharian organisasi lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini sangat terlihat misalnya dalam kegiatan voli untuk anggota laki-laki yang rutin dilakukan setiap hari mulai pukul 16.30 sore hingga menjelang magrib, kecuali ketika ada kegiatan mendadak, misalnya acara pernikahan atau *sripah* (meninggal dunia). Kegiatan voli ini digunakan sebagai ajang rekreasi/ *refreshing* oleh anggota laki-laki atau sebagai latihan rutin menghadapi pertandingan antardusun, desa, maupun kecamatan. Adapun yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah laki-laki mulai dari anak usia 5 SD hingga 51 tahun. Dari sini dapat dilihat bahwa sesungguhnya usia keanggotaan KT bersifat fleksibel dan

terbuka, tidak sepenuhnya tunduk pada aturan pemerintah sebagaimana disebut di atas.

Akan tetapi, bisa dikatakan hampir tidak ada kegiatan rekreasi harian yang dikhususkan untuk anggota perempuan, baik usia remaja hingga dewasa-tua sebagaimana dimiliki anggota laki-laki. Absennya keaktifan anggota perempuan usia dewasa-tua mungkin juga disebabkan karena adanya organisasi perempuan tingkat dusun seperti dasawisma dan PKK yang dianggap sudah cukup mewakili kepentingan para perempuan dusun. Namun, sebenarnya cakupan usia keanggotaan PKK tidak mengikutsertakan perempuan remaja sehingga peluang untuk menyampaikan aspirasi dan menyalurkan kreatifitas perempuan muda desa (seharusnya) masih bertumpu pada organisasi KT.

Sebenarnya anggota KT perempuan juga memiliki jadwal rutin berlatih voli, yakni setiap Jumat sore dan Minggu pagi. Terdapat 11 anggota perempuan yang rutin berlatih namun bukan di lapangan dusun, melainkan di kecamatan lain. Namun, klub voli ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan KT baik tingkat dusun maupun desa. "Klub ini terbuka untuk siapa saja, laki-laki dan perempuan, mulai dari anak SD hingga usia lulusan SMA. Cakupan anggota juga luas, bisa lintas desa dan kecamatan", ujar Yana (18 tahun) salah satu anggota aktif KT yang baru saja lulus SMK. Ia mengatakan alasan mengapa anggota perempuan enggan berlatih voli di lapangan kampung bersama dengan laki-laki.

Sebenarnya kami ditawarkan juga untuk latihan voli khusus perempuan, tapi jamnya terlalu mepet dengan jam pulang sekolah, 15.30 sampai 16.30, baru dilanjut anggota

laki-laki. Tapi, jam segitu kami semua masih capek karena baru pulang sekolah.

Alasan lain adalah karena perasaan malu. “Malu, karena kan semuanya laki-laki”, ujar beberapa perempuan muda yang kami wawancarai.

Menurut anggota perempuan lain, Yana merupakan satu-satunya anggota perempuan yang berani menyuarakan pendapat di forum KT. Sedangkan anggota perempuan lain, khususnya mereka yang masih SMP dan SMA, relatif enggan menyampaikan pendapatnya secara terbuka. “Kita malu kalau ngomong di forum. Lagi pula (anggota-anggota) yang lain sudah kasih pendapat, kita sih nurut saja”, terang Sinta (20 tahun).

Keengganan untuk urun pendapat bukan hanya terjadi pada anggota perempuan muda, tetapi juga pada anggota laki-laki usia remaja (SMP dan SMA). Yana menjelaskan kecenderungan ini terjadi lantaran cara pikir para remaja yang menganggap bahwa pendapat anggota laki-laki yang lebih tua (dalam KT sekitar 20 tahun ke atas) sudah benar adanya. “Ya memang sepertinya kalau anak kecil harus nurut dengan yang lebih tua.”

Meskipun dalam aturan tertulis keanggotaan KT menganut sistem ‘stelsel pasif’, pada nyatanya tetap ada pilihan bagi orang muda untuk ikut/ tidak ikut dalam KT. Para pengurus KT merasa telah aktif mendatangi orang-orang muda di desa untuk terlibat tetapi beberapa memutuskan tidak ikut dengan alasan sibuk sekolah, bekerja baik siang dan malam, hingga malas berkegiatan di luar rumah.

Salah satu yang merasa selama ini tidak aktif di KT adalah pasangan suami istri yang

bernama Tuminah (perempuan, 31 tahun) dan Wahudin (laki-laki, 30 tahun). Bahkan Tuminah merasa bukan anggota KT karena kegiatan KT lebih banyak mengutamakan dan diikuti laki-laki, seperti voli dan sepak bola. Tuminah juga memiliki kegiatan lain seperti mengurus anak, berjualan es, menjadi buruh tanam dan panen, dan mengelola sawah bersama suaminya. Sedangkan Wahudin merasa dirinya anggota KT namun tidak aktif karena waktunya lebih banyak dipakai bekerja. Dia bersama istrinya menggarap sawah yang diberikan ayahnya; menjelang musim tanam bekerja sebagai buruh traktor; dan di saat senggang bertani beralih menjadi buruh bangunan.

Ketidaktifan di organisasi akibat sibuk bekerja juga dialami oleh Pardi, pemuda semi-petani usia 24 tahun. Dia berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki tanah (sawah). “Bapak dan ibu hanya buruh maro, luasannya juga sangat tidak seberapa... saya sejak dulu harus ikut cari uang. Selain untuk biaya sekolah sendiri juga suka bantu biaya sekolah adik-adik.” Pardi sudah terbiasa mencari uang sejak kelas dua SD mulai dari berjualan es keliling hingga menjadi buruh tani sampai ke desa tetangga. Dia menggunakan semua upah untuk membayar uang sekolahnya dan kedua adiknya. Selama tiga tahun belakangan, banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Pardi. Pardi telah tiga tahun ini mencoba bertani sayuran dan cabai. Pardi memilih menjual hasilnya langsung ke warung-warung makan ketimbang menjual ke tengkulak. Alasannya sederhana, untungnya lebih besar. Lalu, dia menjual kelapa kecil-kecilan, buruh katering jika ada panggilan, beternak kambing dan hasilnya

dibeli sapi untuk digemukkan. Memelihara sapi mengharuskan Pardi meluangkan dua jam sehari untuk mencari pakan.

Selain bekerja, saat ini Pardi adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan pendidikan guru di salah satu universitas swasta di ibukota kabupaten. Ini berarti keaktifannya di organisasi terkendala oleh keharusannya mencari uang guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk untuk biaya kuliah. Mungkin kasus serupa juga bisa kita jumpai pada warga lain yang mendahulukan mencari uang ketimbang aktif di KT. Tentu saja pilihan ini dapat dimaklumi mengingat konsekuensi aktif di organisasi ialah berkurangnya waktu kerja yang berarti berkurangnya pendapatan.

Selain berkomunikasi melalui pertemuan rutin, KT juga berkomunikasi melalui *Whatsapp*, yang dibagi menjadi 3 grup: khusus anggota perempuan, khusus anggota laki-laki yang duduk di SMA ke atas (disebut grup laki-laki dewasa), dan untuk semua anggota (perempuan/ laki-laki segala usia). Jafar (laki-laki, 26 tahun) yang terhitung aktif mengatakan bahwa memang ada kebutuhan dan obrolan yang berbeda antara kelompok laki-laki dan perempuan sehingga penting untuk membuat kelompok komunikasi seperti di atas: “kalau masalah yang ‘berat-berat’ biasanya dibahas di grup laki-laki dewasa.” Adapun masalah “berat” yang dimaksud adalah seputar persiapan turnamen olahraga yang kaitannya dengan dana. Sedangkan perempuan berkomunikasi di grup untuk membagi tugas dan obrolan-obrolan ringan lainnya. Grup bersama (perempuan/ laki-laki segala usia) biasanya digunakan pengurus KT untuk menyampaikan undangan dan koordinasi persiapan

acara. Komunikasi dalam grup *whatsapp* dinilai lebih cair karena sering juga berisikan kelakar, kiriman gambar, video, dan berita ringan.

Ragam Kegiatan Karang Taruna Buana Muda

Kegiatan rutin KT BM adalah bermain/ latihan voli, turnamen olahraga, perayaan lomba hari kemerdekaan, takbiran keliling, dan mengumpulkan dana untuk orang sakit dan menikah. Bermain voli sudah berjalan sejak 20-25 tahun yang lalu. Ketika ada turnamen olahraga—baik voli ataupun sepak bola—perempuan tidak ikut serta. Perempuan mendapatkan tugas untuk mengurus konsumsi. Tapi, pada turnamen voli tingkat kecamatan di 2016, sebagian perempuan bertugas menjadi anak bola, sebagian lagi menjadi penjaga karcis parkir. Sedangkan laki-laki bertukar tugas menangani konsumsi.

Acara lain seperti lomba hari jadi desa, peringatan 17 Agustus, dan takbiran keliling diikuti baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Dampak kerap diikutsertakannya KT-KT dalam lomba desa bisa dilihat dari dua sisi yang saling berlawanan. Jafar, misalnya, mengatakan bahwa ajang lomba tersebut bersifat positif karena mendorong pemuda untuk aktif dalam kegiatan desa serta jadi ajang perkenalan bagi pemuda. Meskipun ia tidak memungkiri bahwa ada semacam perasaan “selalu ingin tampil lebih” dari KT lain. Di sisi lain, kebiasaan pemerintah desa (Pemdes) mengompeticikan KT-KT mencerminkan sifat *top-down* dari kedudukan KT dalam struktur desa, sebagai warisan Orde Baru; organisasi yang “otonom”

seharusnya tidak boleh disuruh, dan bebas memilih mau berkompetisi atau tidak. Acara perlombaan tersebut memunculkan semangat kompetisi antar KT karena bagi mereka perlombaan tingkat desa merupakan ajang bergengsi. Salah satu contoh adalah lomba *bregodo*²—baris-berbaris meniru pasukan prajurit Keraton Yogyakarta—yang rutin diselenggarakan. Pada tahun 2017, KT BM menduduki juara ke-2 dan mendapat hadiah sebesar Rp700.000.

KT juga memiliki kegiatan berkesenian seperti bermain rebana pada saat hajatan. Anak muda laki-laki bermain musik dan anak muda perempuan menyanyikan sholawatan. Meskipun tidak mendapatkan bayaran, mereka senang karena bisa menyalurkan hobi dan melestarikan kesenian yang telah diwariskan oleh orang tua. Akan tetapi, tidak banyak perempuan yang bergabung dalam kelompok *sholawatan*. Alasannya adalah hajatan yang sampai larut malam sehingga anak perempuan yang terlibat *sholawatan* minimal duduk di SMA.

Sementara itu, anggota KT laki-laki/perempuan mendapatkan porsi yang sama pada saat lomba 17 Agustus. Bahkan ada dua cabang perlombaan yang diperuntukkan khusus untuk perempuan, yaitu tarik tambang dan menangkap belut. Dalam kegiatan ini KT menjadi panitia inti untuk semua cabang perlombaan yang diikuti orang tua dan muda. Diakui oleh KT di dusun lainnya, kegiatan peringatan 17 Agustus di dusun Kepuh merupakan

peringatan kemerdekaan yang paling kompak dan meriah.

Yuni (perempuan, 17 tahun) mengatakan dia tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembahasan rencana, melainkan banyak diam dan bercerita dengan sebayanya tentang sekolah. Akan tetapi, dia mengakui aktivitas KT adalah satu-satunya peluang yang ia miliki di dusun untuk bergaul, berkegiatan, dan mengobrol dengan teman-temannya. Dia aktif di KT sejak 2015 namun saat ini waktunya tersita untuk menyiapkan ujian SMK Pertanian. Setelah sekolah pagi, hampir sebagian waktu sorenya dihabiskan di warnet dan tempat jasa *print* karena harus mencari bahan tugas sekolah. Ditambah dengan jadwal les tambahan menjelang ujian. Sesampainya di rumah ia sudah merasa lelah dan istirahat.

Kami menjumpai beberapa anggota perempuan yang jelas memiliki semangat dan potensi dalam mengembangkan organisasi, namun memilih enggan berpartisipasi. Misalnya Yuni, dengan latar belakang sekolahnya, memiliki ide untuk mencoba membudidayakan durian montong sebagai kegiatan ekonomi KT. Namun hingga kini ide tersebut bahkan belum pernah disampaikan baik di forum formal maupun informal. Rina (perempuan, 19 tahun) lulusan SMK tata busana kerap dimintai tolong pengurus KT untuk menjahit atribut-atribut yang digunakan saat takbir keliling. Potensi ini bisa ditularkan pada remaja perempuan lainnya. Yana (18 tahun), lulusan SMK ini memiliki kecakapan dalam teknik komputer jaringan. Dia adalah siswa berprestasi di sekolahnya dan memiliki pengalaman menjadi ketua OSIS dan ter-

² Bregodo adalah pasukan prajurit Kraton yang sering mengiringi dan mengawal arak-arakan acara yang digelar Kraton (Festival Bregodo: Ribuan Prajurit Rakyat Menyerbu Malioboro, Kompasiana, 19 Januari 2014. Diakses 7/9/2017).

masuk aktif di KT. Yana juga menyukai olahraga seperti voli, futsal juga *hockey*. Begitu lulus, Yana pun mendapat tawaran beasiswa penuh di Sekolah Tinggi Kedirgantaraan Yogyakarta.

Besarnya potensi yang dimiliki para anggota muda perempuan (dan juga laki-laki muda) seharusnya dilihat oleh ketua dan anggota lainnya sebagai peluang memajukan organisasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki ide-ide segar untuk kemajuan organisasi. Minimnya rasa percaya diri pada hampir seluruh anggota muda—laki-laki dan perempuan—lebih karena kurangnya ruangnya ekspresi dan kesempatan yang diberikan pada mereka.

Kegiatan Bertani Kolektif

Selain ragam kegiatan yang disebutkan di atas, KT BM juga memiliki kegiatan ekonomi yang dimulai tahun 2016. Ada tiga kegiatan ekonomi yang dilakukan: menjual kalender bertema organisasi ke warga dusun, *menggaduhkan*³ kambing, dan bertani kolektif. Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, kegiatan ekonomi mandiri juga mesti ditempatkan dalam kerangka menjawab kebutuhan warga dusun yang rata-rata mengalami kesulitan ekonomi.

Secara umum, baik ketua KT maupun para anggota mengatakan tujuan menjalankan kegiatan ekonomi ialah untuk mengisi kas secara mandiri tanpa meminta sumbangan ke pihak-pihak luar yang biasanya diajukan lewat proposal, misalnya pemilik usaha di desa, perangkat desa, warga

dusun, termasuk mereka yang sedang di perantauan, dinas-dinas, hingga anggota dewan. Menurut Boniman itu adalah proses yang rumit, melelahkan, dan tidak menjamin akan selalu berhasil mendapatkan dana. Uang kas selama ini digunakan untuk menyelenggarakan beragam kegiatan kampung yang diikuti KT. Boniman juga merasa berkegiatan ekonomi (termasuk bertani kolektif) bisa mengurangi ketergantungan akan sumbangan. “Lama-lama kami malu kalau harus selalu minta pada orang lain. Mereka juga kasihan toh kalau dimintai uang terus”, ujar Boniman.

Selain itu, Boniman menyatakan alasan khusus mengapa harus bertani kolektif. Berulang kali dia mengungkapkan keprihatinannya mengenai tingginya urbanisasi dari tahun ke tahun yang bisa menyebabkan matinya pertanian di desa. Dengan bertani kolektif, dia berharap bisa memperkenalkan anggota KT yang lebih muda—yang kebanyakan berasal dari keluarga petani kecil—tentang apa dan bagaimana bertani. Meskipun kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga petani, namun sebagian besar anggota KT mengaku belum pernah terlibat membantu orangtuanya mengolah sawah. Boniman dan anggota lain seusianya membandingkan anak-anak usia sekolah sekarang dengan mereka sendiri di waktu kecil yang terbiasa membantu orang tua di sawah. “Kalau tidak punya pengalaman sama sekali, bagaimana nanti dia bisa bertani? Bertani itu tetap pilihan orang desa kalau sudah tidak ada pekerjaan lain.” Kami juga melihat para perantau seringkali memilih pulang kampung di masa tua untuk

³ Menggaduhkan adalah menyerahkan usaha pertanian (peternakan) kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

kembali bertani.⁴ Begitu pula perantau yang memiliki pekerjaan lain, biasanya memilih menjadi petani. Dari kalimat Boniman, kita dapat menangkap kesan betapa pertanian sesungguhnya begitu diandalkan meskipun mulanya ia ditinggalkan.

Menurut Boniman, pergi merantau tidak serta merta menjadikan masa depan warga desa lebih baik. Dia mengisahkan dirinya dan beberapa teman sekampungnya yang akhirnya memilih kembali ke kampung. Hal ini dikarenakan betapa sulitnya mencari pekerjaan di kota. Beberapa informan mengaku pernah merantau ke Jakarta hanya dalam waktu satu atau dua bulan saja dan memutuskan untuk pulang kampung. “Di Jakarta saya hanya menganggur. Tempat kerja yang dijanjikan ternyata tidak ada. Padahal saya sudah bayar hampir Rp2.000.000. Di sana juga harus bayar sewa kost dan makan”, terang Tarno (laki – laki, 34 tahun) yang pernah jadi korban calo tenaga kerja di desanya. Tarno mengatakan kisah penipuan/ calo tenaga kerja sudah menimpa beberapa orang muda di desanya.

Selain itu, perantau pulang kampung juga karena kontrak kerja yang tidak diperpanjang perusahaan dan kesulitan mencari pekerjaan pengganti. Selama di perantauan, kebanyakan gaji yang didapat habis untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari dan mengirim untuk keluarga di kampung. Kebanyakan para perantau ketika kembali ke desa tidak memiliki cukup tabungan (modal) untuk membeli sawah atau membuka usaha. Kebanyakan dari mereka mampu menabung dalam bentuk hewan ternak dalam jumlah relatif kecil. Meski

⁴ Laporan penelitian *Becoming Young Farmer* (forthcoming)

demikian, merantau tetap menjadi pilihan utama orang muda di desa begitu mereka lulus sekolah. Daya tarik kota memang begitu memikat apabila dibandingkan dengan keadaan desa, yang menurut kebanyakan informan tidak mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu.

Memang tidak semua perantau pulang dengan tangan kosong. Ada juga para perantau, yang menurut banyak informan telah menjadi orang sukses di perantauan. Kesuksesannya dilihat dari kemampuan mereka membeli rumah, mobil, bahkan tanah. Biasanya mereka adalah orang muda dari keluarga mampu yang sempat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, sehingga punya kesempatan mendapat pekerjaan yang layak pula.

Cerita ini menunjukkan bahwa perbedaan kelas sosial juga seringkali menentukan tujuan serta nasib orang muda di perantauan. Berangkat dari kenyataan ini menjadi masuk akal ketika Boniman mengatakan “lebih baik mengusahakan hidup di desa, toh di perantauan juga hanya jadi buruh, diupah kecil sedangkan biaya hidup tinggi”. Kenyataan di atas membuat Boniman berpikir kembali tentang desanya: apa-apa saja yang bisa dikerjakan di desa untuk mendapat hidup layak tanpa harus pergi ke kota. Ketika itulah Boniman memiliki ide untuk menyewa sawah kas desa oleh kelompok KT yang dia pimpin.

Ketika Boniman menyampaikan ide tersebut dalam pertemuan rutin, ada beberapa anggota yang tidak sepenuhnya setuju, terutama anak-anak yang masih usia sekolah, laki-laki maupun perempuan. Mereka menganggap pilihan turun ke sawah adalah bersentuhan dengan panas matahari, lumpur,

kotor, gatal, dan capai. Itu adalah reaksi spontan karena sebagian besar keseharian mereka yang masih sekolah jarang sekali bahkan tidak pernah ke sawah. Meski begitu, ide menyewa tanah kas desa kemudian disepakati.

Pemdes tidak langsung menyambut baik keinginan KT mengakses tanah kas desa dengan alasan administrasi karena yang bisa ikut lelang tanah kas desa harus memiliki Kartu Keluarga (KK). Jafar, Boniman, dan Aris—orang-orang kunci pengambil keputusan KT—lalu menghadap Kepala Desa mencari solusi setelah sebelumnya berkonsultasi dengan kepala dusun Kepuh. Dalam pertemuan itu Boniman lebih banyak bicara dan menyampaikan kegelisahannya melihat pengangguran pemuda desa dan semakin tingginya tingkat urbanisasi (yang ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup), serta kekhawatiran tentang *mandegnya* regenerasi petani. Kepala desa menanggapi dengan baik dan memuji keaktifan KT Kepuh. Jafar mengatakan, “meskipun tidak ada aturannya (sewa tanah khas desa oleh pemuda) kami tetap mencoba. Dan, pasti kami akan tanggung jawab dengan lahan tersebut”.

Rencana bertani kolektif KT juga didukung oleh Sunarto (laki-laki, 38 tahun), Sekretaris Desa baru Kaliloro yang tergolong muda. Semangat Sunarto tampak dari caranya bergaul dan berkomunikasi dengan warga muda KT, juga dari visinya ke depan soal keterlibatan anak muda dalam memajukan desa. Boniman juga telah jauh-jauh hari menceritakan niatnya menggalakkan pertanian untuk anak muda. Sunarto berjanji akan membantu KT merealisasikan niatnya tersebut. Terbukti, setelah berhasil mengelo-

la sawah selama satu tahun (dua kali tanam padi), Sunartolah yang menjamin agar KT tetap bisa mengakses tanah kas desa untuk ditanami secara kolektif.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak desa, KT bisa menyewa sawah tanpa melalui mekanisme lelang seperti biasa. KT telah diberi sawah seluas kurang lebih 1.500 m² tipe kelas B⁵ untuk dikelola selama dua musim tanam/ tahun dengan membayar harga standar sewa sawah luasan dan kategori serupa, yaitu Rp830.000. KT menggunakan uang kas untuk membayar sewa, meski dari mereka sendiri sempat ada kekhawatiran apakah kegiatan bertani kolektif dapat mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan selama ini. Dari hitung-hitungan sederhana dan juga tekad mengelola sawah dengan baik, akhirnya mereka yakin bahwa bertani kolektif tidak akan mendatangkan kerugian bagi organisasi.

Setelah berhasil mendapatkan tanah kas desa, pengurus KT membahas kegiatan yang akan dan sudah dilakukan di setiap pertemuan bulanan. Maka ditunjuklah seorang koordinator lapangan (Korlap) bernama Alfian (laki-laki, 31 tahun) yang bertanggung jawab mengordinasikan pembagian tugas dan memastikan tiap-tiap proses (mulai dari tanam sampai panen) berjalan dengan baik dan dilakukan secara kolektif. Alfian termasuk salah satu petani termuda di dusun Kepuh yang sepenuhnya menyandarkan hidupnya pada pertanian sejak 13 tahun yang lalu. Alfian tidak pernah migrasi

⁵ Lahan tipe B atau kelas 2 merujuk pada jenis tanah perengan dan relatif berbatu. Jenis tanah semacam ini agak menyulitkan lantaran tidak bisa ditaraktor sehingga harus dikerjakan secara manual (dicangkul).

ke kota dan membantu mengelola sawah milik orang tuanya seluas 2.500 m².

Tanggung jawab Korlap sebenarnya sangat cair. Sedari awal Alfian mengatakan ia bersedia mengelola sawah kolektif bilamana pekerjaan di sawahnya sendiri sudah rampung. Dalam praktiknya ia kerap membagi waktu mengurus sawah sendiri di waktu pagi dan sawah KT di sore hari. Jika Alfian sedang sibuk, pengurus lainnya menggantikan kerja-kerja sawah. Alfian juga sering mengajak anggota lainnya untuk ikut ke sawah agar semua tahu bagaimana perkembangan padi yang mereka tanam.

Dua anggota lain yang berperan besar dalam mengawal proyek bertani kolektif ini adalah Boniman dan Legiman, yang memang bekerja sebagai petani. Bersama Alfian, mereka bertiga menentukan urusan teknis produksi: kapan tanah ditraktor dan dicangkul, bibit apa yang digunakan dan kapan waktu semai, tanam, memupuk, dan panen.

Dalam proses mengolah lahan (mencangkul), ada 11 laki-laki yang terlibat yang diharuskan membawa cangkul masing-masing. Mencangkul berlangsung selama satu minggu, dimulai pukul 7 pagi hingga 12 siang. Waktu yang dihabiskan cukup lama karena ini kali pertama bagi kebanyakan pemuda yang ikut. Mereka merasakan lelahnya mengurus persiapan tanam. Untuk membuat galengan ada 17 orang yang terlibat dengan waktu kerja yang sama dengan mencangkul.

Menanam padi (*tandur*) merupakan tahapan yang paling banyak diikuti anggota, baik laki-laki dan terutama perempuan. Setidaknya ada 37 anggota yang turun ke

sawah. “Waktu tanam kemarin seru sekali, laki-laki dan perempuan semuanya ikut turun (ke sawah)”, ujar Yuni. Masing-masing membawa makanan dan minuman untuk dibagikan bersama. *Menandur* juga dibantu oleh beberapa perempuan tua, meskipun mereka tidak aktif di KT. Misalnya, Ibunda Boniman banyak membantu karena sudah paham betul tentang menandur dan memberikan arahan bagi anak muda yang ikut saat itu. Yuni menambahkan waktu *nandur* adalah “...capek, panas tapi enak kalau dilakukan sama-sama. Kalau ada yang salah, disuruh ulang sama ibunya Mas Boniman, tapi nandur gak susah karena dulu-dulu juga sudah pernah.” Tanam selesai dalam satu hari. Bibit yang digunakan berasal dari pemberian warga kampung: Mekongga, IR 64, dan Ciherang. Sebenarnya mereka telah melakukan pembibitan secara mandiri tapi rusak dimakan tikus. Untuk menghemat pengeluaran, pengurus KT minta bantuan dari petani lain yang masih memiliki sisa bibit. “Semua yang kami minta bantuannya dengan senang hati memberi. Sepertinya mereka juga senang dengan kegiatan bertani kolektif ini”, kata Boniman. Untuk menyiangi rumput, mereka mengupah buruh perempuan dari kampung. Alasannya anggota muda belum paham cara menyiangi rumput, sedangkan semakin lama dideiamkan rumput semakin banyak.

Ongkos yang dikeluarkan selama tanam berkisar Rp230.000 yang terdiri dari Rp100.000 untuk traktor dan Rp130.000 untuk pupuk. Untuk memupuk, anggota KT yang memang petanilah yang melakukannya. Reva (perempuan, 21 tahun) yang menjabat sebagai bendahara mengatakan

semua modal produksi berasal dari sisa kas KT dari takbir keliling. Reva juga sering mengunjungi lahan bersama dua atau tiga teman perempuan lain. Mereka mengaku sangat senang begitu melihat tanaman padinya mulai berkembang. “Ternyata yang kami tanam tumbuh. Tadinya kami tidak yakin, soalnya sebelumnya belum pernah menanam padi”, ujarnya.

Setelah menunggu kurang lebih 110 hari, padi siap dipanen. Panen pertama KT ada di musim tanam pertama, sehingga disebut panen raya. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu anggota, terutama mereka yang baru kali pertama terjun langsung bertani. Panen dimulai pukul 7 pagi. Ada sekitar 25 orang, laki-laki dan perempuan muda yang ikut dalam panen tersebut. Panen diawali dengan upacara *wiwiti*, yakni semacam memberi sesajen kepada Dewi Sri untuk mengucapkan syukur atas keberhasilan panen. Boniman mengatakan *wiwiti* sengaja diadakan untuk memperkenalkan kembali kepada orang muda tentang salah satu kearifan lokal yang sudah hampir hilang itu.

Para orang tua di dusun Kepuh, baik yang tergabung di KT (anggota usia 40-45 tahun) maupun orang tua dari anggota KT, mendukung proyek bertani kolektif ini. Mereka cukup heran melihat anak-anaknya mau turun ke sawah bersama-sama. Padahal, selama ini anak-anaknya cenderung tidak mau membantu orang tuanya ke sawah. Boniman mengatakan, karena KT adalah organisasi pemuda maka retorika seperti membangun kekompakan, kemandirian, dan “harus beda dengan KT dusun lain” cukup berhasil menarik minat anak muda untuk bertani.

Lahan seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ itu menghasilkan gabah basah 8.5 kuintal (5.7 ton/ha). Ini tidak kalah dengan hasil panen petani-petani lain di dusun tersebut. Ini berita gembira bagi anggota yang pertama kali mengusahakan bertani padi. Pengurus juga puas, meskipun harga gabah saat itu sedang rendah, yaitu Rp3.300/ kg gabah basah. Boniman yang mencarikan pengumpul di Kepuh untuk membeli gabah mereka. Total pendapatan yang mereka dapatkan adalah Rp2.825.000.

Sempat ada perdebatan tentang pembagian uang panen ke seluruh anggota yang dikonversikan dari jumlah *bawon* yang berhasil didapatkan. Akan tetapi, para anggota sendiri yang menolak karena tujuan awal bertani kolektif bukan untuk pendapatan pribadi. Akhirnya, uang masuk kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan KT, dan juga menjadi modal tanam musim depan.

Keberhasilan bertani kolektif di musim pertama membuat KT tetap semangat kembali menanam di musim kedua. Dengan proses kerja dan keterlibatan anggota yang kurang lebih sama di musim kedua, hasil panen yang mereka dapatkan kini lebih baik: panen menghasilkan 8.5 kuintal dengan harga jual Rp3.800 per kg dengan pembeli yang sama di musim pertama.

Ada sedikit perbedaan antara panen perdana dan kedua, yakni jumlah yang hadir lebih sedikit, kali ini ada 18 orang laki-laki dan perempuan, mulai dari usia 8 tahun hingga di atas 40 tahun. Ini karena dilakukan pada hari sekolah/ kerja, berbeda dengan panen sebelumnya yang jatuh pada hari Minggu. Menurut beberapa warga kampung, panen di sawah KT memang lebih cepat dari waktu yang seharusnya karena padi belum

betul-betul menguning. “*Mestinya sekitar 10 hari lagi baru dipanen,*” ujar seorang warga. Namun, ketua dan beberapa pengurus mempertimbangkan fluktuasi harga padi. Minggu itu harga padi sedang tinggi dan belum tentu bertahan di minggu depan.

Keputusan memanen lebih awal dapat menjelaskan bahwa harga jual merupakan variabel yang sangat penting bagi petani dalam mengambil keputusan. Hal ini mesti menjadi perhatian ketua KT beserta pengurus dan anggota, agar bertani sungguh bisa menjadi sumber penghidupan orang desa di masa depan. Hampir seluruh anggota KT yang kami wawancarai mengeluhkan harga jual panen yang cenderung rendah. Apalagi bagi petani pemaro (buruh penggarap) yang jumlahnya mayoritas di Kepuh. Semua pengeluaran bertani ditanggung oleh penggarap dengan segala resikonya: entah gagal panen karena serangan hama ataupun harga jual yang jatuh.

Menjadikan pertanian sebagai kegiatan yang *fun* telah berhasil mendorong warga muda dusun Kepuh untuk ikut terlibat dalam beberapa kegiatan pertanian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan persoalan pertanian sebagai sumber penghidupan yang menjanjikan secara ekonomi bagi orang muda desa?

Masa Depan Bertani Kolektif

Meskipun bertani kolektif mendapat respon positif dari semua pihak, ternyata keberlanjutannya bukan tanpa soal. Kekhawatiran terutama muncul dari Pemdes. Meskipun KT menyewa dengan harga standar lelang tanah kas desa, Pemdes khawatir mereka dianggap mengistimewakan

KT. Pemdes yang sebagian besar merupakan generasi tua meragukan kemampuan KT untuk bertani, mengingat selama ini anggota KT tidak banyak terlibat atau membantu pertanian yang dilakukan oleh orang tua mereka. Masalah lain, bagaimana jika 25 KT di dusun lainnya juga meminta kesempatan yang sama mengelola tanah kas desa? Mereka harus memikirkan keberpihakan kepada KT atau warga desa—para petani kecil—yang selama ini menjadi peserta lelang.

Boniman dan Jafar mengatakan bahwa berita KT BM yang mendapat jatah kas desa telah tersebar ke dusun-dusun lain, setidaknya ada tiga KT dusun lain yang punya keinginan serupa namun tidak direspon Pemdes. Jafar bercerita,

Alasannya mungkin mereka masih dipandang sekedar ikut-ikutan, padahal untuk kegiatan lain mereka tidak seaktif KT di Kepuh. Ketakutan dari (pemerintah) desa sekalipun tanah diberikan yang menggarap bukan pemuda, tapi individu (banyak pakai tenaga upahan). Selain itu memang yang utama adalah ketersediaan tanah yang minim. Warga desa pasti protes kalau jatah tanah untuk pemuda terlalu banyak.

Salah satu isu penting yang jarang dibahas adalah, betapapun anak muda tertarik untuk bertani, mereka dihadapkan pada masalah akses tanah yang makin menyempit ataupun tidak ada sama sekali, yang sebagiannya disebabkan oleh akumulasi kepemilikan lahan oleh kelompok bukan petani (White, 2016: 1). Sejak 1973 hingga 2016, pola kepemilikan dan penguasaan lahan di desa ini tidak mengalami banyak perubahan. Lebih dari sepertiga rumah tangga tidak memiliki sawah sama sekali; 40 persen lainnya memiliki sawah kurang dari

0,2 hektar; sementara 6 persen rumah tangga menguasai lebih dari separuh dari total sawah yang ada (Abdullah & White, 2001). Data ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tersedia atau tidaknya lahan pertanian, melainkan timpangnya struktur penguasaan tanah pertanian yang terjadi sejak dulu dan masih berlangsung sekarang. Kondisi inilah yang menyebabkan terbatas atau hilangnya akses pemuda desa yang ingin menggarap lahan pertanian. Dalam konteks dinamika pemuda desa yang tertarik bertani, minimnya lahan garapan menyebabkan persaingan antar pemuda dusun. Kesan ini muncul dari beberapa wawancara yang kami lakukan ketika Boniman dan beberapa anggota lain justru merasa khawatir dengan keinginan KT lain untuk bertani kolektif. Diberikannya akses tanah kepada KT lain berarti menngancam akses mereka terhadap tanah kas desa.

Untuk mengangkat masalah sulitnya akses tanah bagi pemuda ke rapat BPD, menurut Boniman sama sekali bukan hal mudah. Meskipun dia perwakilan pemuda di BPD, hingga saat ini pemuda belum memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan tingkat desa, termasuk dalam penggunaan anggaran dana desa. Boniman mengutarakan dua alasan: sistem kekuasaan yang berjalan sekarang masih *status quo* dan kepercayaan generasi tua ke generasi muda masih sangat kurang. Menurutnya, untuk soal nomor dua yang perlu dilakukan adalah pembuktian dengan cara “anak muda diberi kesempatan” (untuk membuktikan diri). Persoalannya, dengan sistem kekuasaan yang berlaku sekarang sejauh mana pemuda akan diberi kesem-

patan? Apakah kesempatan ditunggu atau diperjuangkan?

Kenyataan persoalan pengangguran, tingginya urbanisasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup, keinginan bertani kembali oleh pemuda desa, sebenarnya sudah disadari Boniman. Keluwesannya dalam bergaul, kekritisannya melihat masalah sekaligus mencari solusi semestinya dijadikan modal untuk merangkul kelompok muda di dusun-dusun lain. Semakin banyak pemuda yang menyadari persoalan dan berani bersuara tentu akan memperkuat posisinya sebagai perwakilan pemuda di BPD. Boniman menyampaikan pentingnya keterlibatan pemuda untuk berpartisipasi dalam salah satu pertemuan antar KT. Pertemuan antar KT juga bisa dimanfaatkan sebagai forum menganalisis persoalan masalah khas pemuda berikut mencari solusi atasnya. Semangat solidaritas dan kolektif mesti diperluas dari sesama anggota KT satu dusun ke sesama anggota KT lingkup desa.

Dalam sebuah diskusi, beberapa anggota KT BM sempat membahas kemungkinan mengakses sawah lebih luas yang bisa melibatkan lebih banyak pemuda dari dusun-dusun lain. Plot-plot sawah tidak harus berada dalam satu kawasan, tetapi menyebar di beberapa titik. Kekhawatiran pihak desa yakni jatah tanah kas desa yang semestinya digarap para petani kecil akan berkurang sekitar 3.5 ha ketika dibagikan ke-26 KT. Dengan mekanisme pengelolaan kolektif tentu jumlah luasan tidak perlu sebesar itu. Dengan luasan 1 ha saja, namun dikelola dengan baik hingga pascapanen (mencari pasar dan menjual langsung ke konsumen), pendapatan dari pertanian akan meningkat.

Hal ini juga sekaligus bisa menjawab persoalan harga panen yang selalu rendah karena hasilnya langsung dijual ke tengkulak dan mengikuti harga “pasar”. Dengan menciptakan pasar sendiri peluang hidup dari bertani akan lebih menjanjikan.

Penutup

Tulisan ini telah menunjukkan tegangan yang terdapat dalam KT sebagai organisasi warisan Orde Baru. Di satu sisi ciri korporatis—kentalnya budaya patriarki dan gerontokrasi dan depolitisasi pemuda melalui kegiatan-kegiatan olahraga dan lomba-lomba demi menjaga *status quo* – terlihat jelas mewarnai keseharian organisasi. Dalam hal ini kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak muda dipangkas sedemikian rupa dengan pengarahan mereka ke kegiatan-kegiatan bernuansa *fun* seperti disebutkan di atas. Anak muda seolah-olah hanya bertanggung jawab memeriahkan kampung dan desanya manakala ada perayaan tertentu.

Masalah utama desa seperti pengangguran dan makin tingginya urbanisasi tidak dicarikan jalan keluarnya secara serius. Tidak heran sampai hari ini desa masih dilihat sebagai sumber/ kantung tenaga kerja murah baik untuk sektor formal/ informal perkotaan. Warga desa, terutama mereka yang muda, merasa tidak memiliki alternatif lain tentang bagaimana menghidupi dirinya secara layak selain menjadi buruh di kota. Cara pikir semacam ini berimplikasi pada diabaikannya potensi dan kesempatan di desa yang sebenarnya bisa mereka kembangkan.

Akan tetapi, di sisi lain, apa yang dilakukan KT Buana Muda merupakan

permulaan yang baik dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat desa terhadap kinerja orang muda. Agensi pemuda dalam mengaktualisasikan otonominya juga bisa dilihat dari cairnya keanggotaan, inisiatif menggalang dana, dan pilihan mereka menyelenggarakan kegiatan ekonomi bertani kolektif. Meskipun begitu, legitimasi sosial dan kultural dari perangkat desa memang sangat diperlukan KT dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat yang lebih luas. Anggapan yang cenderung meremehkan kemampuan anak muda dalam menganalisis masalah sekaligus mencari solusinya memang masih terjadi dalam kultur masyarakat perdesaan.

Budaya patriarki dan gerontokrasi juga terlihat dalam dinamika interaksi antar anggota, yakni dominannya anggota laki-laki dewasa-tua (20 tahun ke atas) atas anggota perempuan (segala usia) dan laki-laki remaja (usia SMP dan SMA), baik dalam hal gagasan maupun pilihan kegiatan, nampaknya merupakan hasil reproduksi struktur kekuasaan yang secara umum berlaku di desa. Hal ini sebenarnya juga dialami oleh KT sendiri yang tersubordinasi oleh generasi tua dalam konteks relasi sosial di desa sebagaimana telah disampaikan Boniman yang menjabat sebagai ketua KT desa sekaligus perwakilan pemuda di BPD. Ia mengatakan dengan jelas minimnya peran pemuda dalam menentukan kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran desa akibat masih berlangsungnya sistem kekuasaan *status quo*.

Dalam beberapa literatur dan penelitian tentang pemuda dijelaskan bahwa kesempatan yang diberikan pada anak muda akan menghasilkan ide-ide brilian karena se-

mangat eksplorasi dan kecenderungan berani ambil resiko yang ada pada diri mereka. Tentu saja segala upaya menumbuhkan semangat kreatifitas dan percaya diri anggota muda mesti mendapat dukungan dari anggota yang lebih tua. Melihat gaya kepemimpinan ketua KT yang cukup terbuka (*open-minded*) pada ide-ide baru, nampaknya mencari solusi atas persoalan ini bukan hal yang terlampau sulit. Kultur baru seperti dialog yang egaliter, yang memberi ruang pada aspirasi anggota yang lebih muda bisa mulai dibangun secara perlahan. Semangat kompetisi dan dominasi antar anggota, terlebih antargenerasi, mesti dibuang jauh-jauh karena hanya akan merusak semangat solidaritas dan soliditas yang menjadi modal utama organisasi.

Meskipun dari cerita-cerita di atas terlihat bahwa KT BM cenderung didominasi oleh laki-laki, sesungguhnya KT memiliki potensi mengakomodasi peran perempuan lebih banyak. Itu bisa dilihat dari beberapa kegiatan, yakni kesenian rebana, kepanitiaan peringatan 17 Agustus, dan keterangan Yuni di atas. Mendorong aspirasi dan kreativitas anggota perempuan dan anak muda-remaja (baik laki-laki dan perempuan) mestinya menjadi kebutuhan organisasi, dan mestinya dilakukan ketua dan anggota dewasa-tua lainnya. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara menciptakan ruang-ruang pertemuan khusus dan eksplorasi bakat dan minat anggota muda, khususnya perempuan. Budaya pasif yang kental dan diterima begitu saja oleh para anggota perempuan dan remaja-muda usia SMP-SMA akan menjadi kerugian bagi organisasi karena akan melewatkan potensi anggota yang bisa menjadi kekuatan orga-

nisasi baik masa kini maupun di waktu mendatang.

Studi ini juga menemukan bahwa ruang partisipasi yang diberikan kepada kelompok muda tidak akan berarti banyak apabila hanya mengandalkan jalur-jalur formal prosedural yang didominasi oleh corak berpikir dan kepentingan generasi tua perdesaan. Dalam hal ini pemuda mesti memperjuangkan ruangnya sendiri dalam rangka menemukan masalah sekaligus jalan keluar yang *khas* pemuda. Peluang Boniman untuk mengorganisir kelompok muda desa cukup besar mengingat kecakapan personal dan kemampuan memimpin yang dimilikinya. Salah satu syarat untuk merealisasikan hal ini adalah dengan cara meluaskan lingkup solidaritas dan semangat kolektivitas yang melampaui dusunnya sendiri.

Dari kasus ini nampaknya keputusan pengurus dan anggota KT BM menjadikan KT sebagai wadah bereksperimentasi dalam membangun kemandirian ekonomi sudah tepat dan perlu terus dikembangkan. Namun, dalam beberapa kali wawancara, Boniman dan anggota lain mengatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan ekonomi mandiri adalah agar KT memiliki dana mandiri (tidak melulu minta sumbangan melalui proposal) dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kampung. Sedangkan menurut kami, visi menjadikan KT sebagai wadah ekonomi mandiri mestinya juga merupakan jawaban atas kesulitan ekonomi yang dihadapi para anggotanya. Selain itu eksperimen ekonomi mandiri juga bisa dijadikan wadah memupuk solidaritas, soliditas, dan kolektivitas ekonomi pemuda desa di tengah era yang serba kompetitif, tanpa mengabaikan pentingnya kemampuan manajemen dan cermat dalam

berhitung. Untuk tujuan ini nampaknya prinsip kolektif sebagaimana telah diterapkan dalam kegiatan bertani juga mesti digunakan KT dalam kegiatan ekonomi lainnya. Pengalaman Pardi yang beberapa kali sukses bertani cabai dan sayuran dan dipasarkan secara mandiri bisa dijadikan sumbangan penting bagi organisasi KT yang sedang menjalankan kegiatan bertani kolektif.

Lalu, sejauh mana pengalaman bertani kolektif sungguh dapat membangkitkan semangat dan minat anak muda untuk bertani di masa depan, ternyata tidak cukup hanya dengan menjadikan bertani sebagai kegiatan yang menyenangkan. Banyak anggota KT yang mengaku masih enggan memilih profesi petani di masa mendatang karena pengalamannya melihat kehidupan orangtua mereka (yang juga petani) cenderung tidak menguntungkan. Bagi mereka, menjadi petani berarti hidup pas-pasan dan sulit menjadi sejahtera. Ada dua persoalan yang kiranya menjadi kendala. Pertama, persoalan akses tanah; kedua, rendahnya harga jual panen. Kedua masalah ini yang membuat pemuda berpikir ulang untuk menyandarkan penghidupannya pada sektor pertanian. Untuk masalah tanah—yang merupakan masalah laten perdesaan Jawa—cukup sulit dicari jawaban instan.

Salah satu kemungkinan ialah mendorong terbitnya peraturan desa (Perdes) yang memberikan akses pemuda atas tanah garapan⁶. Namun, yang perlu diingat adalah peraturan tersebut mesti diperjuangkan oleh segenap kelompok pemuda desa. Meluaskan inisiatif bertani kolektif ke dusun-dusun

lain—sebagaimana dibahas sebelumnya—bisa menjadi ajang “berlatih menjadi petani di masa depan”, selain juga menjadi ajang pembuktian diri pada generasi tua terkait kemampuan bertani yang lebih kreatif dan inovatif.

Untuk menjawab persoalan rendahnya harga panen, meluaskan perspektif bertani “bukan hanya di lahan” tapi juga mencakup manajemen pascapanen juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan harga jual. Dalam diskusi kami dengan beberapa anggota KT BM, baik laki-laki maupun perempuan; tua dan muda, ketertarikan mereka untuk memasarkan hasil pertanian berbasis *online* layak diujicoba dengan menjalin kerjasama dengan pemuda di perkotaan. Agar usaha ini kelak berumur panjang yang perlu dilakukan di tahap pertama adalah menjadikan ide ini milik seluruh anggota, baik tua-muda serta laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan serangkaian diskusi internal, dan jika dianggap perlu mengundang kelompok muda perkotaan bertukar pikiran sekaligus mencari bentuk kolaborasi yang cocok berbasis solidaritas dan kebutuhan. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahan diskusi tidak hanya meliputi potensi dan analisis usaha tetapi juga mesti membahas persoalan sosial ekonomi petani perdesaan (misal: mengapa perdesaan erat dengan predikat ‘miskin’; dalam hal apa saja petani perdesaan ‘dimiskinkan’; dll). Semakin cermat warga desa memahami situasi dan persoalan mereka, semakin baik pula solusi yang bisa mereka hasilkan.

Terakhir, persoalan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi yang erat

⁶ AKATIGA, catatan lapangan dari penelitian *Becoming a Young Farmer*, Juli 2017.

dengan kultur patriarki dan gerontokrasi yang berlaku umum di perdesaan. Regenerasi kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan dinamika internal organisasi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya diferensiasi keanggotaan—usia, kelas sosial dan gender—adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari karena aturan pemerintah tentang organisasi KT mengharuskan demikian. Diferensiasi ini ternyata menghasilkan pola dan bentuk hubungan asimetris yaitu kelompok dewasa-tua-laki-laki cenderung mendominasi kelompok lainnya (perempuan dan anak-anak remaja) baik dalam hal gagasan maupun pilihan kegiatan (berikut pembagian kerjanya). Akibat kentalnya dua kultur di atas yang juga telah terinternalisasi sedemikian rupa oleh segenap anggota KT, anggota muda akhirnya lebih memilih sikap pasif dan cenderung ‘menggugu’ pada anggota yang lebih tua. Akibatnya, pendapat dan potensi anggota muda akan terlewat begitu saja tanpa pernah didiskusikan apalagi diujicobakan.

Betapapun ketua KT BM saat ini merupakan sosok yang kharismatik, kreatif, akomodatif, dan memiliki visi yang baik tentang masa depan pemuda perdesaan, regenerasi kepemimpinan dan pembaruan kultur yang lebih egaliter merupakan syarat mutlak apabila KT diharapkan menjadi organisasi yang sungguh bermanfaat bagi keberlangsungan hidup pemuda desa kini dan masa depan. Menciptakan ruang diskusi dan kegiatan rekreasi bagi kelompok usia remaja laki-laki dan perempuan mungkin perlu ditempuh untuk membiasakan diri mereka berpendapat dan berekspresi. Ketua dan pengurus KT perlu memberikan dorongan

agar kelak anggota muda laki-laki dan perempuan memiliki kepercayaan diri mengelola organisasi dan menjadi pemimpin KT tingkat dusun maupun desa.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Irwan and Ben White. (2006). Harvesting and house building: decline and persistence of reciprocal labour in a Javanese village, 1973-2000. Dalam J. Koning and F. Hüsken (red.), *Ropewalking and Safety Nets: Local Ways of Managing Insecurities in Indonesia* (pp.55-78). Leiden and Boston: Brill.
- Erlina, Erlin. (2011). Karang Taruna pasca Orde Baru: di manakah geliat partisipasi dan aspirasi kaum muda? Dalam M. Najib Azca, Subando Agus Margono dan Lalu Wildan (red.), *Pemuda Pasca Orba: Potret Kontemporer Pemuda Indonesia*, (pp. 267-285). Yogyakarta: YouSure (Youth Studies Centre) Fisipol UGM.
- Permensos. (2010). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/ HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Permensos. (2013). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Pratiyudha, Pinurba Parama. (2016). Pemuda Kritis, Pemuda Membangun: Pendidikan pembebasan kepada pemuda sebagai upaya pembebasan desa. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 20 (1&2).

- Sutoro Eko dan Krisdyatmoko (eds.). (2006). *Kaya Proyek, Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. Yogyakarta: IRE/TiFA.
- Swara, Vandy Yoga. (2016) Pemuda desa dalam wilayah industri. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 20 (1&2).
- White, Ben. (2012). Changing Childhoods: Javanese village children in three generations. *Journal of Agrarian Change* 12 (1), 81-97.
- White, Ben. (2016). *Generational Issues in Smallholder Agriculture: Exploring the social reproduction of agrarian communities*. CIADS Seminar Series, College of Humanities and Development Studies (COHD), China Agricultural University, Beijing, 27 October 2016.
- White, Ben & C. Ugik Margiyatin. (2016). Teenage experiences of school, work and life in a Javanese village. In K. Robinson (ed.) *Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia*. Leiden: Brill.
- Wardhana, Hendra. (2014). Festival Bregodo: Ribuan Prajurit Rakyat Menyerbu Malioboro. https://www.kompasiana.com/wardhanahendra/festival-bregodo-ribuan-prajurit-rakyat-menyerbu-malioboro_552b0688f17e612063d62417. Diakses pada 7 September 2017.
- AKATIGA. (Akan Terbit, 2018). *Becoming a Young Farmer*, Research Report. Bandung: AKATIGA.

MIGRASI KELOMPOK MUDA DI NUSA TENGGARA TIMUR: PENGARUH DINAMIKA DESA DAN STRUKTUR SOSIAL

Viesda Desi Pithaloka

Peneliti AKATIGA-Pusat Analisis Sosial

viesda.dp@gmail.com

Abstract

The high level of out-migration in East Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur-NTT) is often associated with the limited employment opportunities for young people and by the low level of education of the youth in the province. Various capacity building programs have been delivered aiming to make the youth get a decent job or independently running a sustainable business. However, the number of out migration in NTT continues to increase. This paper uses analytical framework of rural livelihood and migration as an important context to study and how both connected to the life of NTT's people. It also uses a social structural analysis to see the relationship between social class and the youth's choice for migrating or for their decision to live in villages. Using qualitative method, the research is conducted in three major islands of NTT. The data collected through indepth interviews with 96 young people, parents, and those who understand the context of the villages and districts. The research shows that the youth decision to migrate is not solely shaped by the individual youth but rather comes as a combination of families' influence and social-cultural conditions where the youth live. These three aspects have direct influence on the youth's motivation and intention to migrate which in turn would also influence their migration behaviour. The migration itself becomes part of youth life cycle in NTT. These migration patterns should be considered in formulating the right policies to support the youth and, in a broader sense, economic development in NTT.

Keywords: *Youth, Internal Migration, East Nusa Tenggara (NTT), Livelihood, Social Structure*

Abstrak

Tingginya tingkat migrasi ke luar di NTT sering dikaitkan dengan keterbatasan kesempatan kerja yang bisa diakses oleh kelompok muda dan juga rendahnya tingkat pendidikan kelompok muda NTT. Berbagai program peningkatan kapasitas kelompok muda telah dilakukan dengan tujuan agar kelompok muda dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai keinginannya atau mampu menciptakan usaha mandiri dan berkelanjutan. Meskipun demikian, jumlah migrasi keluar NTT terus mengalami peningkatan. Tulisan ini menggunakan pendekatan analisis mata pencaharian di desa dan migrasi sebagai konteks yang penting untuk dikaji serta bagaimana keduanya terhubung dengan kehidupan masyarakat di NTT. Sudut pandang struktur sosial digunakan untuk melihat hubungan antara

kelas sosial dengan pilihan kelompok muda dalam bermigrasi maupun keputusan untuk tetap tinggal di desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di tiga pulau besar di NTT. Data diperoleh dari wawancara mendalam kepada 96 anak muda, orang tua, dan berbagai pihak yang memahami konteks desa dan kabupaten. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk bermigrasi tidak semata-mata dilakukan secara individu, melainkan merupakan kombinasi dari pengaruh keluarga dan kondisi sosial budaya masyarakat tempat mereka tinggal. Ketiganya memiliki pengaruh langsung terhadap motivasi dan niat bermigrasi yang kemudian berdampak pada perilaku migrasi yang dilakukan oleh kelompok muda di NTT. Penelitian ini juga menemukan bahwa bermigrasi menjadi bagian dari siklus hidup kelompok muda di NTT. Pola-pola migrasi ini penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan yang tepat untuk kelompok muda dan pembangunan ekonomi di NTT.

Kata kunci: *Kelompok muda, NTT, Migrasi, Struktur sosial, NTT*

Pendahuluan

Tulisan ini membahas proses dan dinamika migrasi kelompok muda dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Pembahasan mengacu pada pertanyaan bagaimana pergerakan geografis merupakan bagian dari siklus hidup mereka dan bagaimana situasi sosial di desa dan sekitarnya memengaruhi praktik migrasi yang terbentuk. Setiap keputusan dan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan refleksi dari perhitungan dan keputusan dalam keseharian hidup kelompok muda, baik secara sadar maupun tidak. Keputusan bermigrasi yang dilakukan oleh kelompok muda dipengaruhi oleh kontemplasi informasi yang dimilikinya sebagai individu, posisi dalam keluarga, dan dinamika komunitas tempat dia tinggal.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi di NTT berada pada level 3-4 persen per tahun sehingga

menjadikannya provinsi termiskin ke-3 di Indonesia. Dari perspektif kesejahteraan di NTT, rata-rata 65 persen rumah tangga di NTT berada di bawah garis kemiskinan dengan ketimpangan antardistrik yang tajam (UN, 2016). Jumlah penduduk miskin mencapai 23% dari total 5,1 juta penduduk di Provinsi NTT (Pusdatin, 2016).

Saat ini, pertanian menjadi sektor andalan masyarakat untuk hidup dan menjadi penyerap jumlah tenaga kerja terbesar di NTT. Kondisi dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lahan dan iklim di NTT yang didominasi oleh lahan kering dan curam dengan iklim kering. Hal ini berimplikasi pada minimnya mayoritas hasil produksi pertanian bagi keluarga di NTT. Selain itu, di banyak daerah, sistem pertanian berpindah dengan membakar lahan masih dilakukan akibat ketidakjelasan kepemilikan dan penguasaan lahan jangka panjang (khususnya lahan adat) yang menyebabkan semakin menurunnya kualitas lahan pertanian dan perkebunan di NTT. Meskipun demikian, sektor pertanian masih

memiliki kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto yang mencapai 30 persen lebih, di saat sektor lain seperti pariwisata, peternakan, dan perikanan masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut.

Kelompok muda di NTT (15-29 tahun) berhadapan dengan situasi kehidupan desa yang dinamis dan dipengaruhi oleh aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Kelompok muda di NTT mencapai 25% dari total populasi. Saat ini, banyak di antara mereka yang melakukan migrasi ke luar provinsi. Migrasi yang dilakukan sering dikaitkan dengan upaya untuk bisa memperoleh pekerjaan dan pendidikan terkait peningkatan ekonomi. Di sisi lain, banyak kajian yang telah menekankan pada kekhususan karakteristik kelompok muda yang mengkaji kelompok muda sebagai individu pengambil keputusan dan tidak serta merta setiap keputusannya selalu terikat dengan faktor ekonomi.

Pertanian, Migrasi, dan Perannya dalam Perekonomian Perdesaan

Terdapat sejarah panjang studi agraria yang menstereotipkan penduduk desa hidup dan bekerja di satu tempat (Hugo, 1982:52; Rigg, 1998: 497-498) sehingga tidak relevan dengan isu peningkatan mobilitas, urbanisasi, dan diversifikasi mata pencaharian penduduk desa yang tidak hanya di bidang pertanian.

Berbagai penelitian saat ini menekankan pada beragamnya pekerjaan yang menjadi bagian dari mata pencaharian di desa, dengan pendapatan dari nonpertanian mencapai 30-50% dari pendapatan rumah tangga di Asia Tenggara (Rigg, 1998:500).

Dalam banyak contoh, masyarakat mengombinasikan pertanian padi dengan pekerjaan buruh bangunan di ibu kota provinsi, atau pekerjaan di bidang perdagangan, transportasi, dan industri manufaktur. Hal ini dapat juga terlihat di NTT, ketika pertanian tetap merupakan sektor ekonomi utama, tetapi migrasi dan sektor jasa (perdagangan dan pariwisata) terus tumbuh.

Dalam melihat tren mengenai diversifikasi mata pencaharian perdesaan, terdapat perbedaan alasan dan tujuan dari setiap kelompok masyarakat. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menekankan pada tiga pola utama: bagi elite perdesaan, keragaman pekerjaan merupakan strategi ekonomi untuk mengakumulasi kesejahteraan di masa depan; bagi kelompok menengah merupakan strategi untuk konsolidasi; bagi kelompok miskin perdesaan, diversifikasi pekerjaan merupakan strategi untuk bertahan hidup sebagai respon dari minimnya pendapatan pertanian (Rigg, 1998: 503; White dan Wiradi, 1989). Dengan kata lain, dilakukannya (migrasi sirkular untuk mencari) pekerjaan nonpertanian tidak selalu dijelaskan sebagai respon dari minimnya pendapatan dan kesempatan di bidang pertanian.

Kelompok menengah dan kelompok elite yang sudah memiliki kemampuan ekonomi juga terikat dengan pekerjaan nonpertanian, tetapi dengan alasan yang berbeda dari kelompok miskin. Perbedaan tujuan tersebut juga berimplikasi pada jenis pekerjaan nonpertanian yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan nonpertanian bagi kelompok miskin merupakan jaring pe-

ngaman ketika kelompok lain memanfaatkannya sebagai strategi untuk meningkatkan mobilitas (Rigg, 1998:503-505). Pada kenyataannya, dengan adanya pilihan untuk bermigrasi, bisa jadi pilihan pekerjaan dan pendapatan yang diterima lebih beragam dari ketiga kategori tersebut.

Pada waktu yang sama, menjadi penting untuk mengingat bahwa diversifikasi pekerjaan nonpertanian lebih dari sekadar strategi ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya implikasi pada budaya yang terikat dengan pekerjaan nonpertanian serta hubungan dengan modernitas (Mills, 1999; Warouw, 2016; Wolf, 1992). Dari sisi kelompok muda, mereka terekspos pada berbagai macam gambaran mengenai kehidupan modern dan kemungkinan masa depan. Sekolah sering mengajarkan kelompok muda perdesaan untuk memiliki cita-cita masa depan di luar pertanian. Di saat bersamaan perjalanan harian ke kota terdekat untuk sekolah meningkatkan otonomi kelompok muda dan berpotensi menggambarkan pandangan mengenai kemungkinan migrasi di masa mendatang (Warouw, 2016: 4-5; White & Margiyatin, 2015: 57).

Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah adanya peningkatan mobilitas (*commuting*, migrasi sirkular) dalam konteks nasional, yaitu saat terdapatnya ketidakseimbangan pola investasi modal dan penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai wilayah di Indonesia, pekerjaan nonpertanian banyak terbentuk dengan jarak geografis yang lebih luas. Konsekuensinya, matapencarian multilokal menjadi umum dilakukan (Elmhirst, 2012). Pilihan bisa dilakukan dengan menetap permanen atau tetap menjaga hubungan dengan kedua

lokasi (Hugo, 1982:4). Hal ini mungkin dilakukan dengan adanya peningkatan pembangunan jalan, biaya transportasi yang murah, serta kemajuan di bidang sistem komunikasi dan transfer uang (Kelly, 2011: 484).

Poin ketiga adalah pergeseran dari pekerjaan nonpertanian yang terjadi antargenerasi. Dalam hal ini, kelompok muda pergi untuk sekolah dan terikat dengan pekerjaan nonpertanian saat generasi yang lebih tua tetap terikat dengan lahan. Kelompok muda juga sering dikaitkan dengan struktur pekerjaan yang mampu memberi bayangan prospek masa depan mereka. Selain itu, peningkatan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh kelompok muda dibandingkan orangtua mereka membuat ekspektasi terhadap pekerjaan di sektor modern menjadi sangat tinggi (Keyfitz, 1989).

Ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadikan banyak tenaga kerja, umumnya adalah kelompok muda, untuk bekerja di bawah kualifikasi pendidikan mereka sehingga mereka bermigrasi keluar dari provinsi dengan tujuan mencari pekerjaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelompok muda akan mengambil kesempatan kerja apa pun hanya agar mereka menjadi bagian dari tenaga kerja, sekalipun ini berarti mereka harus pindah ke daerah lain. Berbagai insentif yang akan diperoleh juga menjadi pertimbangan dalam berpindah.

Poin terakhir yang muncul dari literatur mengenai diversifikasi mata pencaharian di desa adalah, mengingat berbagai tren yang dijelaskan di atas, menjadi sulit dan tidak

tepatnya untuk berusaha mempertahankan batas-batas yang jelas antara “perdesaan” dan “perkotaan”. Di Asia Tenggara, migran perdesaan berpindah ke perkotaan dan daerah pinggiran kota. Kota meluas ke wilayah perdesaan dan wilayah metropolitan, dan mata pencaharian “perdesaan” menjadi lebih beragam (Kelly, 2011:490). Banyak tempat, baik yang disebut “perdesaan” maupun “perkotaan” kemudian berada pada keduanya. Acapkali, kelompok muda bergerak antartempat-tempat yang berbeda antara keduanya, bergantung pada waktu untuk mereka mempertimbangkan adanya kesempatan untuk pendidikan dan pekerjaan, dan bergantung pada hubungan kekeluargaan serta pengaturan hidup (Gough et al., 2013: 96-97).

Di NTT, temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur (jalan, penerbangan) mengembangkan sektor pariwisata, perdagangan, dan pendidikan. Hal ini berimplikasi pada gaya hidup kelompok muda. Migrasi yang dilakukan oleh kelompok muda kemudian memiliki karakteristik tersendiri. Akhirnya, keputusan bermigrasi mereka sering dihubungkan dengan pentingnya *life transition*, seperti meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memulai pekerjaan baru, atau menikah (Williams, 2005). Migrasi internasional maupun internal dapat memberikan dampak positif bagi kelompok muda dengan membuka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, dan pengembangan diri dengan membentuk kepercayaan diri. Pada saat yang bersamaan, temuan penelitian di NTT ini juga menunjukkan

bahwa migrasi tidak hanya dari desa ke kota, tetapi juga terdapat migrasi desa-desa (contohnya orang yang bekerja di perkebunan sawit).

Gender juga merupakan komponen penting pada beberapa hal, misalnya berhubungan dengan ekspektasi orang-tua terhadap pekerjaan dan kontribusi terhadap rumah tangga antara anak laki-laki dan anak perempuan; begitupun dengan izin dari orangtua untuk bermigrasi, Jones et. al. (1998:74) menulis mengenai kelompok muda *educated underemployed* di Timor Timur¹, NTT. Di sana terlihat dengan jelas perbedaan sikap dan ekspektasi terhadap anak laki-laki dan anak perempuan ketika mereka menjadi *underemployed*. Dijelaskan bahwa anak laki-laki cenderung mempertimbangkan diri mereka siap bekerja, tetapi tidak berharap memperoleh pekerjaan dan tidak berusaha memperoleh pekerjaan. Anak laki-laki justru “berkeliaran” dan meminta uang untuk memenuhi kebutuhan hidup harian pada orangtuanya. Di sisi lain, anak perempuan diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan rumah tangga setelah menyelesaikan sekolahnya (khususnya jika mereka tidak menghabiskan waktu seharian penuh untuk bekerja atau sekolah).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keputusan migrasi dan masa depan kelompok muda tidak dapat dijelaskan dengan hanya melihat sektor pertanian di desa sendiri, melainkan perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas mengenai ‘urbanisasi perdesaan’, perbaikan infrastruktur dan teknologi komunikasi, perluasan

¹ Sebelum terpisah antara NTT dengan Timor Leste

pendidikan, migrasi sirkuler, jejaring yang terbentuk di daerah perdesaan maupun daerah tujuan migrasi, serta perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang memengaruhi dalam penggabungan pertanian dengan berbagai kegiatan nonpertanian.

Pekerjaan nonpertanian, migrasi sirkuler, dan mata pencaharian multilokal telah terintegrasi ke dalam kehidupan orang-orang perdesaan di seluruh latar belakang kelas yang berbeda (miskin, menengah, dan kelompok elite). Berbagai kelompok mempertahankan 'beragam portofolio' yang mencakup pertanian dan pendapatan dari kegiatan lain yang mencakup di daerah perdesaan dan perkotaan. Skala dan keragaman mobilitas masyarakat mengalami peningkatan dengan kegiatan nonpertanian yang tersebar di jarak geografis yang lebih luas dan berimplikasi pada keputusan bermigrasi, khususnya bagi kelompok muda.

Metodologi

Penelitian yang menjadi dasar tulisan ini mendefinisikan kelompok muda dengan usia antara 15-29 tahun. Dalam siklus hidup, rentang usia tersebut merupakan fase ketika seseorang akan terdorong untuk mencari identitas diri, mencari kesempatan mengembangkan diri, dan memutuskan apa yang menurutnya baik². Beberapa informan di penelitian meliputi juga beberapa laki-laki dan perempuan muda yang sudah menikah atau sudah memiliki anak dan masuk dalam kategori dewasa menurut lingkungannya. Penelitian tetap memasukkan mereka sebagai informan dengan pertimbangan bahwa

² Panduan Migrasi Kelompok Muda NTT, AKATIGA, 2016

sangat baik untuk menganalisis keputusan migrasi kelompok muda dan pengalamannya terkait dengan siklus hidup.

Dalam proses wawancara, dilakukan pemilahan antara jumlah laki-laki muda dan perempuan muda walaupun jumlah informan berdasarkan gender tidak sama persis. Selain itu, dipilah pula strata dari masing-masing informan untuk melihat pengaruh dari perbedaan kelompok sosial dalam pola migrasi yang terbentuk. Pemilahan berdasarkan strata dilakukan dengan mengidentifikasi posisi keluarga dalam kehidupan desa. Pemilahan berdasarkan pada penguasaan lahan pertanian produktif, penghasilan kumulatif keluarga, dan posisi keluarga dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan di desa.

Dalam pendekatan gender, kami ingin melihat kesempatan dan akses sekolah, pekerjaan, dan migrasi. Selain itu, dilakukan pendalaman mengenai beban tanggung antara laki-laki muda dan perempuan muda dalam lingkungan keluarga, tempat bekerja dan dalam masyarakat terkait dengan posisi kelompok sosialnya.

Berdasarkan pengalamannya bermigrasi, informan juga dipilah menjadi beberapa bagian, yaitu (1) kelompok muda yang belum atau tidak pernah bermigrasi; (2) kelompok muda yang telah melakukan migrasi; dan (3) kelompok muda yang sedang bermigrasi. Pemilahan dilakukan untuk melihat pola dan hal-hal yang memengaruhi keputusan bermigrasi pada setiap kelompok muda.

Lokasi penelitian mengambil enam desa di tiga kabupaten yang tersebar di tiga pulau besar NTT, yaitu kabupaten Manggarai

Barat di pulau Flores, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di pulau Timor, dan Kabupaten Sumba Barat di Pulau Sumba. Di masing-masing kabupaten dipilih dua desa dengan tingkat migrasi rendah dan tinggi³. Meskipun secara keseluruhan sampel yang diambil berada di lokasi desa di NTT, tetapi perbedaan konteks masing-masing desa memengaruhi pengalaman migrasi kelompok muda serta realitas pasar tenaga kerja yang memengaruhi tinggi-rendahnya tingkat migrasi pada lokasi tersebut. Sumba Barat dan Manggarai Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor wisata. Selain itu, Manggarai Barat juga menjadi sentra produksi beras di NTT. Timor Tengah Selatan dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak program pengembangan kelompok muda.

Siapakah Kelompok Muda di NTT?

Definisi kelompok muda berdasarkan usia perlu disandingkan dengan posisi kelompok muda dalam siklus hidup mereka. Hal ini berkaitan dengan peran dan tanggung jawab yang memengaruhi setiap pengambilan keputusan mereka, termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Bagi masyarakat NTT, yang dianggap kelompok usia muda adalah yang belum menikah, yaitu sekira di atas 15 tahun dan berakhir pada saat menikah. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Pada saat menikah, berakhirilah masa mudanya dan menjadi kelompok dewasa, meskipun masih

dalam rentang usia 15-29 tahun. Salah satu bentuk pengakuan kedewasaan misalnya dengan perolehan hak atas tanah/ aset keluarga bagi laki-laki di hampir seluruh wilayah NTT kecuali di Ngada, perempuan mendapatkan hak milik dan pengelolaan atas tanah orang tua.

Fase sebelum menikah dianggap fase transisi, yaitu setelah menamatkan pendidikan dan sebelum menikah. Kelompok muda cenderung ingin mencoba hal baru dan mengeksplorasi seluruh kesempatan yang dimilikinya. Dengan akses dan jejaring, kelompok muda pada fase ini, laki-laki maupun perempuan ingin melakukan uji coba dan mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman. Pada fase ini, kelompok muda telah mulai dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menabung bagi masa depannya. Meskipun demikian, sebelum memiliki pekerjaan tetap, kelompok muda khususnya laki-laki akan didorong untuk membantu orangtua di pertanian dan sebagai kompensasi akan dipenuhi kebutuhan pokoknya.

Beberapa kelompok muda khususnya yang berasal dari keluarga menengah atas juga masih difasilitasi “uang jajan” untuk memenuhi kebutuhan tersier (rokok, biaya nongkrong, pulsa hp, kosmetik, biaya pesta, dll.). Meskipun demikian, sudah muncul rasa malu meminta orangtua untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu, apalagi yang cukup besar seperti motor dan HP. Hal inilah yang mendorong anak muda mencari cara untuk bisa memperoleh penghasilan, seperti sekali-kali mencari ikan di laut bagi laki-laki. Bagi kelompok muda perempuan yang berasal dari kelompok marjinal, keinginan membantu orangtua juga merupakan alasan kuat

³ Tidak ada data tertulis mengenai jumlah migrasi internal dan internasional, khususnya yang menata mobilitas kelompok muda. Data migrasi diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, kecamatan, dan kelurahan.

untuk mencari pekerjaan berpenghasilan tinggi.

Bagi kelompok muda di semua strata sosial, pertanian bukan menjadi pilihan utama, dengan alasan yang berbeda-beda. Bagi anak muda dari kelompok elite, pertanian dianggap melelahkan, apalagi jika posisinya hanya membantu orangtua. Meskipun demikian, bagi anak muda elite yang telah mendapatkan hak penuh pengelolaan lahan hortikultura meskipun belum menikah, pertanian dianggap sektor yang menjanjikan dengan tingginya pendapatan yang diperoleh. Seperti Karsi dari strata elite (Desa Tubuhue, TTS) yang saat ini telah mendapatkan hak penuh pengelolaan lahan dan hasilnya. Meskipun belum menikah, ia kemudian termotivasi untuk menjadi petani sukses, dimulai dengan 240 meter lahan miliknya yang saat ini ditanami hortikultura.

Bagi kelompok menengah, posisi sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar membuat pertanian dianggap tidak menguntungkan. Apalagi jika lahan yang dimiliki keluarga terbatas dengan banyaknya jumlah saudara yang akan dibagi lahan. Mereka akan berupaya untuk bisa memperoleh kegiatan lain yang lebih prospektif di masa kini dan masa depan, baik di desa maupun di luar desa, seperti bekerja sebagai tukang bangunan atau supir bagi laki-laki dan penjaga toko atau pembantu rumah tangga bagi perempuan. Di sisi lain, anak muda dari kelompok marjinal terkendala dengan minimnya lahan milik orangtua. Beberapa informan bahkan berasal dari keluarga yang tidak memiliki lahan untuk diwariskan karena lahan yang saat ini

dikelola orangtuanya bukan merupakan lahan milik⁴.

Di sisi lain, pada fase ini peran orangtua dalam menentukan masa depan anak masih terlihat kuat. Keputusan besar menyangkut sekolah, pekerjaan (khususnya migrasi), dan pernikahan harus mendapat izin orangtuanya karena masih berkaitan dengan peran orangtua. Dalam hal pendidikan, orangtua masih merasa bertanggung jawab untuk dapat membiayai pendidikan hingga SMA atau sesuai kemampuan dan perspektif orangtuanya mengenai pendidikan⁵. Sedangkan pada fase pernikahan, orangtua lah yang akan menanggung biaya terbesar untuk proses yang dilalui.

Melewati masa transisi, kelompok muda memasuki masa persiapan menikah dan fase hidup setelah pernikahan. Dengan berbagai pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan, upaya mencari pekerjaan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Keuntungan dan modal yang harus dikeluarkan dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan merupakan bagian dari strategi kelompok muda untuk melanjutkan hidup.

Fase pernikahan merupakan tahapan seorang anak muda memasuki jenjang

⁴ Dengan sistem kawin masuk, bagi laki-laki yang belum melunasi *belis* tidak boleh membawa istrinya ke daerah asalnya. Laki-laki tersebut harus tinggal dengan keluarga istrinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, saudara laki-laki istri akan meminjamkan sebagian lahannya untuk dikelola, tetapi lahan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik maupun keturunannya.

⁵ Terdapat orangtua yang merasa bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga perguruan tinggi, khususnya dari kalangan elite.

kedewasaan. Setelah menikah, kelompok muda laki-laki dianggap dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri. Di lokasi penelitian, sistem patriarki masih sangat kental. Hal ini memengaruhi kegiatan perempuan setelah menikah yang mengharuskan keputusannya diizinkan oleh suami dan keluarganya. Mekanisme *belis*⁶ dalam pernikahan menjadikan perempuan bagian dari keluarga suaminya, dan seluruh keputusan serta tindakannya harus disetujui oleh suami dan keluarga besar suaminya. Sebagai contoh, Margarita (marjinal) berkeinginan untuk migrasi ke Sabah untuk bisa memperoleh penghasilan, tetapi suaminya memilih tinggal di desa dan tidak mengizinkan ia pergi sehingga ia memilih untuk mengurus keluarganya saja.

Setelah menikah, keputusan hidup diambil sendiri karena dianggap telah dewasa. Berbagai keputusan pekerjaan akan mempertimbangkan aspek ekonomi karena ada keperluan keluarga yang harus dipenuhi. Pilihan pekerjaan mempertimbangkan risiko dan penghasilan yang akan diperoleh. Pada saat ada kesempatan bermigrasi, kelompok muda, baik laki-laki maupun perempuan, akan mempertimbangkan penghasilan yang diperoleh dibandingkan dengan penghasilan yang diterima saat ini. Perempuan biasanya tidak akan meninggalkan desa untuk merantau dan bekerja jika suaminya tidak pergi kecuali karena harus memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Mereka juga telah disibukkan dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga.

⁶ Sejumlah uang, perhiasan, ternak, yang diberikan keluarga pengantin pria pada keluarga pengantin wanita dalam pernikahan.

Harapan dan Motivasi Kelompok Muda di NTT

Harapan dan motivasi kelompok muda merupakan kontemplasi pemikirannya berdasarkan berbagai informasi yang diterima dan juga dipengaruhi modal⁷ yang dimiliki. Informasi tersebut bisa diperoleh dari berbagai media, cara pandang anggota keluarga, kelompok pertemanan, lingkungan, dan juga pengaruh kondisi komunitas, baik secara sumber daya maupun adat dan budaya. Di desa penelitian, kontemplasi mengenai harapan dan motivasi direfleksikan dengan keinginan untuk memperoleh peningkatan kapasitas diri agar mampu memiliki masa depan ekonomi yang lebih baik dengan mengakses pekerjaan sesuai dengan keinginannya.

Fase hidup anak muda memiliki pengaruh utama terhadap harapan dan motivasi yang disampaikan. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, anak muda pada fase transisi lebih memiliki rasa keingintahuan terhadap sesuatu yang baru dan menantang. Istilah “mencari pengalaman” menjadi andalan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk untuk bermigrasi. Pada fase ini, risiko akan ditempuh atau bahkan tidak dipertimbangkan pada saat mengambil keputusan untuk mencapai harapannya. Harapan dan motivasi juga acapkali bukan merupakan harapan jangka panjang melainkan respon dari hal yang dianggap tekanan atau merupakan keinginan untuk bisa berpartisipasi.

⁷ Baik itu yang sudah dimiliki seperti tingkat pendidikan, jejaring pertemanan, maupun modal yang diprediksi akan dimiliki, seperti akses pada tanah atau kemungkinan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Pengalaman Shanti (marjinal) ketika pertama kali bermigrasi sangat mengandalkan jejaring yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan risiko. Ia ditelantarkan ketika akan bermigrasi pertama kali ke Kalimantan dari tawaran temannya yang meminta ia pergi sendiri. Saat transit di Surabaya, temannya sama sekali tidak bisa dihubungi. Beruntung Shanti memiliki teman di Surabaya yang dapat menjemput dan memberikan tempat tinggal sementara. Ia juga tidak mungkin pulang karena sudah kabur dari rumah. Teman di Surabaya akhirnya memberikan informasi pekerjaan dan Shanti bekerja di Surabaya sebagai pembantu rumah tangga selama satu tahun sebelum akhirnya berpindah kerja ke Bali.

Motivasi dan harapan pribadi ini berbeda dengan kelompok lain dalam fase hidup kelompok muda yang telah menikah. Bagi kelompok ini, kemungkinan motivasi yang mengarah pada berbagai pertimbangan ekonomi ketika bermigrasi lebih akurat dibandingkan untuk mencari pengalaman. Hal ini didasari oleh pertimbangan terhadap risiko-risiko yang mereka akan hadapi mengingat risiko yang akan terjadi tidak hanya berimplikasi pada diri sendiri melainkan juga pada keluarganya. Redy, dari strata menengah, memilih bermigrasi setelah menikah karena menilai pendapatan yang akan diperoleh di Kalimantan akan lebih besar dibandingkan yang diperolehnya di Kupang. Di Kalimantan, ia bisa membawa serta anak dan istrinya sehingga menganggap kehidupan mereka akan lebih terjamin dan tidak perlu berjauhan.

Di sisi lain, peran dan dukungan keluarga berpengaruh besar pada harapan dan motivasi yang dimiliki oleh kelompok

muda. Dukungan ini masuk ke dalam pertimbangan kelompok muda terkait dengan kapasitas dan informasi yang dimiliki. Sumber daya dan dukungan keluarga yang bisa diakses kelompok muda menjadi modal utama dalam penentuan masa depan kelompok muda.

Sebagai contoh, Lafi dari strata elite di Manggarai Barat telah menyelesaikan kuliah D3 Kebidanan, harapannya adalah mendapatkan kerja sebagai bidan sesuai dengan pendidikan yang ia ambil. Dia rela menunggu hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai dibandingkan dengan mendapatkan pekerjaan di luar bidang kuliahnya. Sebagai anak dari strata elite, kesediaan menunggu hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai dipengaruhi oleh kepastian sistem dukungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokoknya saat itu. Lafi tidak terdesak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun membiayai keluarganya.

Di sisi lain, Seti yang berasal dari strata marjinal di Manggarai Barat memutuskan bermigrasi ke Labuan Bajo untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di saudaranya pada usia dua belas tahun. Ia tidak melanjutkan sekolahnya karena keterbatasan biaya. Tujuannya adalah ingin membantu orangtua yang kondisinya sangat pas-pasan. Niat ini pula yang menjadi dasar harapan Seti untuk bisa memperoleh gaji yang dapat dikirimkan pada orangtua ketika bermigrasi. Tanpa pengalaman dan modal, ia hanya mengandalkan peran jejaring untuk membantunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Berbagai harapan yang mengacu pada ekspektasi ekonomi dipicu juga oleh posisi kelompok muda dalam keluarga. Bagi anak

pertama laki-laki, di satu sisi mereka memiliki kepastian untuk mengelola lahan milik keluarga setelah menikah, tetapi di sisi lain telah diarahkan sebagai “om” yang akan turut bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga besarnya, baik dari sisi materi maupun nonmaterial. Bagi kelompok elite, tuntutan tersebut belum terlalu kentara, bahkan di satu sisi sudah dipersiapkan oleh orangtuanya, seperti kepemilikan lahan atas nama anaknya. Namun, bagi kelompok menengah dan marjinal, orangtua memiliki keinginan agar anaknya berpenghasilan pasti, minimal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan lebih baik lagi bisa membantu ekonomi keluarga. Hal inilah kemudian yang membuat anak muda memiliki harapan dan motivasi untuk bisa kuat secara finansial.

Keputusan Migrasi Kelompok Muda

Praktik migrasi dimulai ketika keputusan bermigrasi yang diambil oleh masing-masing individu. Keputusan bermigrasi dilatarbelakangi oleh kaitan antara dinamika ekonomi desa sebagai konteks sosial ekonomi, posisi dan dukungan keluarga, serta karakteristik individu.

Di desa penelitian dengan tingkat migrasi tinggi, yaitu Lamboya di Sumba Barat, Binaus di TTS, dan Ngancar di Manggarai Barat, terdapat konteks wilayah yang membuat keputusan bermigrasi menjadi salah satu pilihan hidup yang patut dipertimbangkan oleh anak muda. Meskipun secara tingkat kesejahteraan dan penguasaan lahan tidak berbeda dengan tiga desa penelitian lainnya dengan tingkat migrasi

rendah, tetapi secara keseluruhan terdapat momen ketika pengeluaran besar untuk biaya pesta diperlukan. Di Lamboya dan Binaus, tidak ada masa panen besar yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Komoditas yang saat ini diusahakan tidak terlalu memberikan banyak keuntungan besar untuk ditabung kecuali bagi elite yang menguasai lahan luas. Di Ngancar, terdapat masa panen komoditas jangka panjang seperti kopi, cengkeh, kemiri, dan jahe, tetapi masa panen bersamaan dengan masa pesta dan uang hasil panen biasanya dihabiskan untuk berjudi dan mabuk pada masa tersebut.

Di desa dengan tingkat migrasi tinggi ini, perputaran uang lebih banyak terjadi untuk kegiatan konsumsi dibandingkan menyokong kegiatan produksi untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Tingginya biaya untuk pesta tanpa adanya momen perolehan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut menuntut warga untuk bisa menabung atau memenuhi kebutuhan pesta dengan cara lain. Hal yang biasanya terjadi adalah dengan menggadaikan lahan yang telah dimiliki atau menjual lahan. Sistem gadai lahan ini melibatkan elite yang memiliki banyak sumber daya, kelompok menengah, dan marjinal yang membutuhkan uang. Elite akan menerima lahan gadai dengan memberikan uang pinjaman dan menguasai lahan sampai pinjaman lunas. Dalam sistem hutang, hutang orang tua menjadi hutang anak sehingga anak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang orangtuanya, termasuk gadai.

Di sisi lain, kelompok menengah dan marjinal justru menjadi kehilangan sumber pendapatan karena tidak menguasai lahan yang biasanya mereka garap. Hal ini

kemudian berpengaruh kepada semakin lebarnya ketimpangan antara kelompok elite dan kelompok menengah. Anak muda dari kelompok menengah dan marjinal kehilangan kesempatan untuk menggarap lahan yang sebelumnya dimiliki oleh orangtuanya.

Di desa penelitian dengan tingkat migrasi rendah, seperti Habowawi di Sumba Barat, Tubuhue di TTS, dan Liang Ndara di Manggarai Barat, meskipun dibutuhkan biaya besar dalam momen-momen tertentu untuk pesta, tetapi terdapat sistem dukungan di tingkat keluarga dan komunitas yang membantu pembiayaan. Di Liang Ndara, terdapat sistem arisan untuk kebutuhan-kebutuhan pesta dan membangun rumah, sistem arisan ini menjadi tabungan untuk persiapan pesta yang akan dilakukan nanti. Selain itu, di Habowawi, anak muda dapat terlibat dalam tahapan kegiatan pertanian di luar menjadi tenaga keluarga, seperti bagi laki-laki menjadi pengumpul mete bekerja sama dengan tengkulak, atau terlibat dalam panen untuk laki-laki dan perempuan.

Beragamnya pekerjaan yang bisa diakses oleh anak muda di desa penelitian dengan tingkat migrasi rendah juga menyebabkan anak muda dapat terserap dalam kegiatan-kegiatan di desa tanpa perlu bermigrasi. Jejaring sebagai supir, penjaga toko, pegawai hotel, hingga tukang bangunan membuat anak muda memiliki kesempatan memilih pekerjaan sesuai dengan keinginannya.

Yohan (29 tahun, SMA, sudah menikah) dari strata menengah di Sumba Barat mendapat kesempatan berpindah-pindah pekerjaan di desa. Informasi dan akses pekerjaan diperoleh dari kerabat dan ayahnya. Pekerjaan pertama Yohan adalah

sebagai operator rental komputer milik pamannya ketika ia sekolah SMA di Waikabubak. Setelah lulus sekolah, ia bekerja sebagai *housekeeping* di hotel Nihiwatu dengan bantuan ayahnya yang telah lebih dahulu bekerja di sana. Setelah satu tahun, ia kemudian menjadi guru PAUD setelah ditawarkan pekerjaan oleh temannya yang merupakan pengelola PAUD. Bertahan setahun, Yohan kemudian pindah menjadi pegawai TU di SD berdasarkan rekomendasi temannya yang telah lebih dahulu bekerja di sana. Sekarang Yohan bekerja sebagai rohaniawan dengan tunjangan sebesar Rp.500.000/ bulan. Selain itu, dengan keahlian mengoperasikan komputer yang dimilikinya dari pekerjaan pertamanya, ia ditawarkan oleh keluarganya, merangkap menjadi operator komputer desa dengan gaji Rp.600.000/ 6 bulan dan KPMD sebesar Rp.1.200.000/ tahun. Yohan tetap mengelola lahan pertanian miliknya di sela kegiatan lainnya. Menurut Yohan, pekerjaannya sebagai rohaniawan sesuai dengan keinginannya sejak lama karena menjadi merasa lebih dekat dengan Tuhan dan terhindar dari perbuatan buruk yang sering dilakukan laki-laki.

Keinginan mencoba hal baru sebagai tambahan pengalaman menjadi dasar bagi kelompok muda dalam melakukan aktivitas. Pengalaman yang dicari oleh kelompok muda di NTT sebenarnya terbalut oleh persoalan entitas diri yang ingin dimunculkan kelompok muda sendiri. Sebagai kelompok muda yang sedang mencari jati diri dan peran, dinamika lingkungan sangat memengaruhi keputusan hidupnya. Dengan demikian, merantau atau tidak merantau bukanlah tujuan dari kelompok muda,

melainkan merupakan salah satu cara yang digunakan kelompok muda untuk mencari pengalaman hidup, yaitu pengalaman dalam mengembangkan diri dan belajar hidup termasuk belajar memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dari perspektif anak muda sendiri terdapat beberapa hal yang memengaruhi keputusan untuk akhirnya bermigrasi. Latar belakang keputusan-keputusan tersebut dibalut dengan alasan mencari pengalaman yang tidak bisa diperoleh di desa dan sekitarnya. Latar belakang keputusan bermigrasi bagi anak muda pada umumnya tidak tunggal, misalnya 1) keinginan mencoba hal/ kegiatan baru, 2) pola migrasi intergenerasi sebagai jaminan di lokasi migrasi, 3) perspektif gaji tinggi dengan kerja yang ringan, 4) adanya akses ke pendidikan tinggi yang bisa dilakukan sambil bekerja, 5) dan kesempatan untuk mencari calon/pasangan hidup.

Di desa dengan tingkat migrasi rendah, kelompok muda memiliki berbagai pilihan pekerjaan untuk diakses dan dicoba. Pekerjaan ini berkaitan dengan perpaduan berbagai sektor selain pertanian yang berkembang di desa tersebut. Sebaliknya, desa dengan tingkat migrasi tinggi tidak banyak menyediakan perpaduan pekerjaan pertanian dan nonpertanian yang bisa diakses oleh kelompok muda. Karena itu, ketika kelompok muda tidak terserap ke pekerjaan yang ada di desa, mereka akan mencari pekerjaan lain dengan bermigrasi.

Akses ke pekerjaan yang ada di desa dan sekitarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jejaring yang dimiliki. Bagi strata elite dan menengah atas yang memiliki tingkat pendidikan tinggi,

mereka umumnya terserap dalam pekerjaan formal seperti PNS, perawat, bidan, guru, atau bekerja di hotel bagi wilayah dengan perkembangan sektor pariwisata. Akses terhadap lahan bagi laki-laki maupun bantuan modal untuk usaha juga sudah mulai diberikan oleh orangtuanya sehingga bisa mendapatkan keuntungan nyata dengan aktif di sektor pertanian. Bagi kelompok marjinal, dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan dukungan permodalan dari keluarga, peran jejaring sangat kuat menentukan pekerjaan yang akan diperoleh, misalkan sebagai buruh bangunan bagi laki-laki ataupun penjaga toko bagi perempuan.

Gary (laki-laki, 23, belum menikah) memperoleh pekerjaan pertamanya sebagai asisten tukang bangunan pamannya. Meskipun tidak menamatkan SMP, tetapi pengalaman dan keahliannya selama lima tahun dapat menjadikan Gary berprofesi sebagai kepala tukang saat ini dan menentukan harga maupun pekerjaan yang akan dilakukannya. Gary menilai bahwa pekerjaannya saat ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan berangkat bermigrasi.

Di desa dengan tingkat migrasi tinggi, jejaring migran di lokasi tujuan sudah terbentuk cukup kuat, bahkan berbasis desa dan kecamatan. Migran dari desa penelitian Sumba Barat tergabung dengan Ikatan Keluarga Lamboya, sedangkan di Liang Ndara, Manggarai Barat, terdapat komunitas Canai. Di Binaus, TTS, informasi *peer group* sangat baik bahkan meliputi jejaring pertemanan di group *Facebook* tingkat desa. Di tingkat provinsi sendiri terdapat kelompok Flabomora, yang merupakan persatuan seluruh warga NTT yang sedang merantau di berbagai daerah, seperti Jakarta,

Surabaya, Makassar, Bali, dan Papua. Jejaring inilah yang kemudian membantu informasi pekerjaan, kebutuhan sementara di lokasi migrasi, dan sistem dukungan ketika migran membutuhkan bantuan. Tidak ada keterkaitan antara strata sosial kelompok muda dengan posisinya di jaringan migran, semua saling membantu sesuai dengan kapasitasnya.

Koneksi antara calon migran, mantan migran, dan bukan migran di lokasi asal dan tujuan terikat dalam kekerabatan, pertemanan, dan komunitas asal. Koneksi ini dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan, risiko yang dihadapi, dan meningkatkan harapan atas keuntungan bermigrasi. Sekalinya terbentuk, migrasi menopang dirinya melalui proses difusi sampai semua orang yang ingin bermigrasi dapat melakukannya.

Di negara berkembang, migrasi tersebut akhirnya dapat menjadi suatu ritus peralihan menjadi dewasa bagi anggota masyarakat, dan hanya memiliki hubungan yang minim dengan perekonomian (Weeks, 2008). Hal tersebut juga terjadi di NTT. Berbagai ikatan dan jejaring migran terbentuk dengan sangat kuat dan membangun siklus migrasi, khususnya di desa-desa dengan tingkat migrasi tinggi. Calon migran juga pada umumnya merasa aman jika akan bermigrasi dengan kerabatnya. Hal inilah yang menjadi dasar mereka tidak terlalu memikirkan risiko, baik itu risiko ketika perjalanan, risiko perolehan pekerjaan, dan risiko lainnya ketika bermigrasi.

Faktor penarik lainnya ketika memutuskan bermigrasi adalah gaji yang tinggi dengan pekerjaan yang tidak berat. Hal ini diceritakan oleh para migran yang telah lebih dahulu pergi merantau. Besarnya gaji

dibandingkan dengan gaji yang diperoleh di desa/ sekitarnya untuk pekerjaan yang sama.

Dengan keterbatasan pekerjaan yang bisa diakses, di desa-desa dengan tingkat migrasi tinggi, cerita pengalaman memperoleh uang secara cepat dan berjumlah besar tanpa beban kerja yang berat tentu merupakan daya tarik tersendiri. Penjelasan tentang hal positif dan kenyamanan kerja yang selalu kelompok muda dengar dari teman atau saudara yang merantau itulah menjadi salah satu faktor penentu. Di sisi lain, kenyamanan yang diceritakan juga merupakan strategi migran untuk menceritakan kisah suksesnya. Kegagalan dan hal-hal negatif selama merantau tidak diceritakan karena khawatir tidak diizinkan kembali merantau serta dapat dianggap gagal oleh komunitasnya.

Bagi kelompok elite, keinginan bermigrasi untuk mendapatkan keuntungan besar kemudian direspon oleh orangtua yang memiliki lahan luas dan sumber daya finansial. Kelompok muda akan didorong terlebih dahulu untuk menempuh kuliah agar bisa bekerja di sektor formal maupun diberikan hak pengelolaan lahan pertanian dan/ atau diberikan modal usaha agar tidak bermigrasi. Bagi kelompok muda yang tidak memanfaatkan kesempatan dari orangtua, orangtua mereka cenderung membiarkan migrasi dengan alasan untuk pendewasaan. Meskipun demikian, kelompok muda tetap menyadari bahwa dirinya memiliki dukungan di desa dan dapat kembali sewaktu-waktu untuk mengembangkan lahan milik orangtua.

Bagi kelompok muda dari strata menengah, cerita sukses dan kemudahan memperoleh gaji besar tentu sangat

menggiurkan di tengah kebutuhan memperoleh pendapatan. Hal ini menjadi dasar ketika memutuskan migrasi. Kelompok muda cenderung akan mencoba berbagai hal bahkan dengan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya jika menemui kendala. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan yang lebih kuat agar memperoleh pendapatan tinggi yang belum tentu bisa mereka peroleh di desa.

Migrasi juga dianggap bisa memenuhi keinginan kelompok muda untuk dapat memperoleh pendidikan setinggi mungkin. Pilihan migrasi untuk sekolah dimiliki oleh kelompok elite maupun kelompok menengah. Di NTT sendiri saat ini mulai muncul dorongan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan semakin mudahnya akses ke infrastruktur sekolah menengah dan munculnya kesadaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap bersaing.

Tidak semua orangtua mampu membiayai kebutuhan kuliah anaknya. Bagi kelompok elite dan menengah, biaya kuliah dapat dipenuhi dari penghasilan yang dimiliki. Meskipun demikian, keinginan anak muda untuk berkuliah cukup kuat sehingga jika orangtua tidak sanggup membiayai, menabung kuliah atau bekerja sambil kuliah menjadi pilihan yang sangat rasional bagi mereka. Namun, keterbatasan akses untuk bekerja di desa dan sekitarnya membuat menabung biaya kuliah tidak memungkinkan dilakukan di desa. Begitu pun untuk kerja sambil kuliah karena tingkat pendapatan yang diterima tidak akan mencukupi. Pilihannya adalah dengan melakukan migrasi ke kota yang

memungkinkan hal tersebut dilakukan seperti ke Bali dan Surabaya. Contohnya, seperti apa yang dilakukan Lazuardi (laki-laki, 25 tahun, marjinal). Ia memilih untuk bekerja terlebih dahulu di Kalimantan sebagai buruh sawit dan mengumpulkan uang untuk kuliah. Setelah terkumpul, ia memilih kuliah di Surabaya agar bisa sambil bekerja sebagai sales penjualan motor yang waktunya lebih fleksibel.

Kesempatan mencari pasangan hidup juga menarik kelompok muda untuk bermigrasi. Beberapa informan anak muda laki-laki dari TTS dan Sumba Barat berharap mendapatkan pasangan dari luar NTT. Hal ini disebabkan oleh anggapan mereka tentang biaya pernikahan sesama warga NTT sangat tinggi, terutama untuk memenuhi tuntutan adat. Sebagian anak muda laki-laki Sumba Barat misalnya, tertarik kepada perempuan Jawa karena tidak membutuhkan biaya tinggi. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan untuk pernikahan dengan perempuan Sumba atau perempuan NTT lainnya, bisa mencapai ratusan juta rupiah meliputi *belis*, biaya untuk lepas susu ibu, kebutuhan pesta adat, dan lain-lain.

Meskipun demikian, anak muda laki-laki di Manggarai Barat, cenderung tertarik dengan pasangan satu etnis (Manggarai). Berdasarkan penuturan orangtua (anak perempuan) dan informan perempuan, memiliki pasangan di luar etnis berdasarkan pengalaman, tidak bertanggung jawab, pulang ke daerahnya. Jadi, mereka merasa lebih nyaman apabila bisa menikah dengan etnis Manggarai. Anak muda laki-laki juga menilai perempuan Manggarai telah mengetahui posisi perempuan dalam

keluarga sesuai dengan kebiasaan/ adat Manggarai.

Berbagai faktor yang memengaruhi keputusan migrasi kelompok muda bukanlah penyebab tunggal. Sebagai contoh, ketika kelompok muda belajar dan bekerja, mereka tetap membuka kesempatan terhadap calon pasangan hidup yang potensial, menikmati kehidupan perkotaan, serta minimnya pengawasan orangtua dibandingkan dengan di desa.

Karakteristik demografi digabungkan dengan norma sosial dan budaya mengenai migrasi membentuk nilai-nilai dan cara pandang, khususnya anak muda, mengenai migrasi serta keuntungan yang diharapkan mereka peroleh dengan bermigrasi. Keuntungan tersebut merepresentasikan motivasi untuk berpindah, meliputi keinginan terkait kesejahteraan, status, kenyamanan (kehidupan dan kondisi pekerjaan yang lebih baik), stimulasi (meliputi hiburan dan rekreasi), kebebasan individu, dan afiliasi (kebersamaan dengan teman dan keluarga).

Pada saat yang sama, norma dan sifat personal (seperti misalkan menjadi pengambil risiko) digabungkan dengan peluang dan dukungan keluarga serta kondisi komunitas/ wilayah tempat tinggal yang menyediakan banyak pilihan pekerjaan dapat memengaruhi keputusan kelompok muda hingga akhirnya tidak bermigrasi. Hal ini terbukti dengan kasus di desa-desa dengan tingkat migrasi rendah.

Jumlah informasi dan pengalaman hidup yang dimiliki oleh masing-masing anak muda berkontribusi juga terhadap harapan dan motivasi dalam bermigrasi. Dari

informasi dan pengalaman hidup ini, sebagian anak muda akan membandingkan manfaat dengan biaya (materil maupun nonmateril) yang dikeluarkan. Jika manfaat lebih besar daripada biaya, kelompok muda akan memutuskan untuk bermigrasi atau sebaliknya. Contoh Gary di atas menunjukkan bahwa Gary memiliki pertimbangan untuk meneruskan karier sebagai buruh bangunan dibandingkan bermigrasi tanpa kejelasan di perantauan.

Dampak Migrasi bagi Individu Kelompok Muda, Keluarga, dan Komunitas

Dampak migrasi sendiri dirasakan cukup kuat di level individu. Penguatan kapasitas diri, seperti tingkat kedewasaan, gaya hidup, dan kepercayaan diri memengaruhi cara pandang ketika kembali ke desa. Pengalaman kerja juga berpengaruh pada peningkatan keahlian, seperti keahlian *entrepreneurship* bagi yang bekerja di sektor jasa pertokoan, maupun memunculkan ide-ide untuk peluang usaha yang bisa dikembangkan di desa. Meskipun demikian, masih perlu dukungan nyata dari berbagai pihak untuk mendorong ide-ide tersebut terlaksana dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ide untuk dikembangkan di desa sangat dipengaruhi oleh strata sosial kelompok muda. Bagi strata elite, pengalaman dan ilmu yang diperoleh ketika bermigrasi menjadi cara untuk bisa mengakumulasi modal keluarga. Di Manggarai Barat, Sari (perempuan, elite) memiliki rencana untuk mengembangkan *homestay* milik keluarga setelah menamatkan pendidikannya di jurusan

manajemen perhotelan dan berdasarkan pengalamannya bekerja di sebuah hotel di Bali. Akan tetapi, bagi kelompok marjinal seperti Maria Mademeti, ide pengembangan usaha kios bisa jadi tidak terlaksana akibat minimnya modal yang dimiliki, tetapi itu merupakan hal yang paling memungkinkan untuk diupayakan agar bisa terwujud dibandingkan memiliki harapan lain yang lebih tidak pasti.

Secara ekonomi, keluarga memperoleh dampak dari adanya *remittance* rutin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penelitian, mayoritas kelompok muda dari strata menengah dan marjinal yang mengirimkan *remittance* ke keluarga. *Remittance* dengan jumlah cukup besar akan digunakan untuk biaya sekolah, pesta, membeli ternak, maupun direncanakan untuk membeli rumah di desa.

Meskipun demikian, rata-rata pendapatan yang diperoleh di perantauan bisa habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena, dalam banyak kasus, anak muda tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Hal ini berdampak pada uang kiriman yang menjadi tidak terlalu besar bahkan tidak dapat ditabung untuk dibawa pulang. Seperti Navi (Laki-laki, 23 tahun, elit) yang bekerja sebagai *debt collector* di Jakarta. Ia sebenarnya memperoleh gaji yang sangat besar untuk pekerjaannya, dalam seminggu ia bisa memperoleh Rp. 8.000.000⁸ / penagihan yang berhasil. Namun, uang tersebut habis untuk foya-foya minum minuman keras dan main perempuan. Tidak ada tabungan yang dibawa pulang, ia bahkan hanya mengirimkan uang jika orangtuanya

⁸ Upah Minimum Kota Jakarta 2017 adalah Rp.3.350.000/ bulan

meminta. Hal ini menyebabkan ketika sakit, orangtuanyalah yang menanggung beban biaya pengobatan di desa. Navi tidak bercerita mengenai kondisi pekerjaan sebenarnya karena memiliki rencana untuk bisa bermigrasi lagi setelah sehat.

Bagi keluarga, adanya satu anak bermigrasi berpotensi membuka jalur migrasi aman bagi adik-adik atau saudara terdekat dengan menjadi pemberi informasi mengenai adanya pekerjaan. Selain itu juga menjadi jaminan pertama dalam hal penjemputan menjemput dari pelabuhan, tempat tinggal sementara, dan kemudian penolong untuk mencarikan pekerjaan, terutama saat anak yang akan bermigrasi adalah perempuan.

Bagi komunitas dengan tingkat migrasi tinggi, migrasi merupakan cara anak muda untuk bisa berkembang dan memperoleh peningkatan taraf hidup. Khusus bagi anak muda laki-laki, migrasi menjadi cara untuk pendewasaan diri dan mencari kegiatan dibandingkan dengan menjadi biang masalah di desa karena sering mabuk-mabukan dan berbuat onar.

Keberhasilan anak muda di perantauan kemudian menyumbang untuk pembangunan infrastruktur di desa dan gereja, selain, tentu saja memengaruhi perspektif komunitas dalam memandang migrasi. Hal ini disebabkan oleh pengumuman yang disampaikan ke seantero desa sehingga semua orang mengetahui sumbangan yang diberikan. Dari satu sisi, hal ini memberikan kebanggaan bagi keluarganya dan di sisi lain membuat anak muda di desa memiliki perspektif bahwa migrasi dapat meningkatkan harga diri dan posisi keluarganya di komunitas.

Dampak lainnya yang terjadi di tingkat komunitas, khususnya di desa dengan tingkat migrasi tinggi, adalah menguatnya ikatan kekerabatan yang mendorong semakin terbukanya migrasi aman. Perkumpulan orang yang berasal dari satu wilayah semakin kuat di lokasi migrasi dan dijadikan sebagai bagian dari keamanan sosial. Kelompok ini bisa membantu anggotanya saat mengalami kesulitan di lokasi migrasi.

Simpulan

Pemahaman mengenai dinamika desa, kelas sosial, dan karakteristik kelompok muda diperlukan untuk memahami logika keputusan migrasi kelompok muda. Pengambilan keputusan untuk bermigrasi atau tetap tinggal di desa sangat erat kaitannya dengan perspektif mereka mengenai “kehidupan desa” dan alternatif yang tersedia.

Keputusan migrasi yang dilakukan oleh kelompok muda harus dipahami sebagai bagian dari proses aktualisasi diri kelompok tersebut untuk memilih “bagaimana menjadi” dan “bagaimana bertindak”. Namun, pada waktu yang bersamaan, struktur sosial yang berbeda memengaruhi strategi yang dipilih kelompok muda. Meskipun pilihan bermigrasi merupakan pilihan sendiri, tetapi kebebasan pilihan tersebut merupakan kebebasan yang terstruktur, dipengaruhi oleh posisi kelas sosial dan gender yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mereka.

Daftar Rujukan

- Elmhirst, Rebecca. (2012). Displacement, Resettlement, and Multi-Local Livelihoods. *Critical Asian Studies*, 44(1), 131-152.
- Gough, Katherine, Thilde Langevang and George Owusu. (2013). Youth Employment in a Globalizing World. *International Development Planning Review*, 35(2), 91-102.
- Hugo, Graeme. (1982). Circular Migration in Indonesia. *Population and Development Review*, 8(1), 59-83.
- Jones, W. Gavin, et.al. (1998). The expansion of High School Education in Poor Regions: The Case of East Nusa Tenggara, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34(3), 59-84.
- Kelly, Philips F. (2011). Migration, Agrarian Transition, and Rural Change in Southeast Asia. *Critical Asian Studies*, 43(4), 479-506.
- Mills, Mary Beth. (1999). Migrant Labor Takes a Holiday: Reworking Modernity and Marginality in Contemporary Thailand. *Critique of Anthropology*, 19(1), 31-51.
- Pusdatin. (2016). www.pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file...NTT...2016. Diakses pada 8 Agustus 2016.
- Warouw, Nicolaas. (2016). Negotiating Modernity: Women Workers, Islam and Urban Trajectory in Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 27, 283-302.

- Rigg, Jonathan. (1998). Rural-urban Interactions, Agriculture and Wealth: A Southeast Asian Perspective. *Progress in Human Geography*, 22(4), 497-522.
- Weeks, John R. (2008). *Population: An Introduction to Concepts and Issues*. Thompson Wadsworth.
- White, Ben & Gunawan Wiradi. (1989). Agrarian and Nonagrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages. In Hart, Gilian. Andrew Turton, and Ben White (eds), *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia* (pp. 266-302). Berkeley: University of California Press.
- United Nations. *Livelihood Challenges*. <http://www.un.or.id/en/where-we-work/geographic-focus/nusa-tenggara-timur#gkBottom1-2>. Diakses pada 7 September 2016.
- White, Ben dan C. Ugik Margiyatin. (2016). Teenage Experiences of School, Work, and Life in a Javanese Village. Dalam *Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia* (pp.50-68). KITLV.

ADAPTASI STRATEGIS DAN KEWIRAUSAHAAN PARA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA ASALNYA¹

Paulus Rudolf Yuniarto²

*Peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(P2SDR-LIPI)*

rudolfyuniarto@gmail.com

Abstract

This paper explores and examines return migrant entrepreneurship from Taiwan in Malang, East Java. High outmigration is a result of the irregular nature of work afforded by the agrarian economic structure. Furthermore return migrants maximize revenues/ saving and social remittances for entrepreneurship associated with self-transformation and changes in their home villages. Return migrants undergo 'rebirth' by acquiring new knowledge and following new occupations, utilizing their economic experiences and mobility, and reintegrating themselves into the society both socially and economically. The combination of financial and social remittance of migrant workers is a valuable asset for becoming a home village entrepreneur. However, entrepreneurship and economic reintegration is particularly difficult for return migrants, especially, when village infrastructures are not well developed.

Keyword: *Return-migrant, Entrepreneurship, Reintegration.*

Abstrak

Tulisan ini mengeksplorasi dan mengkaji kewirausahaan TKI yang pulang kampung dari Taiwan ke Malang, Jawa Timur. Tingginya tingkat migrasi ke luar negeri adalah akibat dari sifat kerja takpasti yang tersedia pada struktur ekonomi agraria yang ada. TKI yang pulang kampung dapat memaksimalkan penghasilan/ tabungan dan remitan

¹ Naskah ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Rasmus Budhyono, pengajar Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.

² Paulus Rudolf Yuniarto adalah peneliti muda di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, LIPI (P2SDR-LIPI). Yuniarto mengepalai rumpun penelitian mengenai Migrasi Asia, Kajian Cina, dan Pembangunan Masyarakat di P2SDR-LIPI. Ia menuntaskan studi doktoralnya di Departemen Antropologi, Tokyo Metropolitan University, Jepang dalam rentang 2013-2016 dan menulis disertasi berjudul "Bridging People, Seizing the Future: Indonesian Migrant Entrepreneurs in Taiwan and Return Migrant Entrepreneurship in Malang, East Java". Yuniarto dapat dihubungi melalui alamat surel: rudolfyuniarto@gmail.com.

sosial kewirausahaan yang diasosiasikan dengan transformasi diri dan perubahan di kampung halaman. TKI yang pulang kampung mengalami “kelahiran kembali” lewat pengetahuan baru, dan pekerjaan baru yang diperoleh, pemanfaatan pengalaman ekonomi dan mobilitas mereka, dan reintegrasi secara sosial maupun ekonomi ke dalam masyarakat. Kombinasi remitan finansial dan sosial TKI merupakan aset berharga dalam upaya menjadi pewirausaha di kampung halaman. Meski demikian, kewirausahaan dan reintegrasi ekonomi ternyata sulit bagi TKI yang pulang kampung, terutama jika infrastruktur desa belum terbangun dengan baik.

Kata kunci: *TKI yang pulang kampung, Kewirausahaan, Reintegrasi*

Pendahuluan

Tulisan ini pertama-tama membahas keadaan pertanian perdesaan dan mengapa migrasi menjadi pilihan bagi laki-laki dan perempuan muda, kemudian bagaimana pekerja migran muda yang pulang kampung mempraktikkan strategi pribadi dan memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka dalam kegiatan kewirausahaan sepulang mereka ke kampung halaman.

Lokasi lapangan yang saya pilih, yakni desa AW dan DM di Malang, Jawa Timur merupakan daerah agraria yang menyediakan lapangan kerja musiman bagi dua-pertiga warga. Dalam pengamatan Khoo dkk. (2015) dan Syafitri (2014), kondisi kerja di perdesaan Jawa Timur, termasuk daerah di mana penelitian ini dilakukan, didominasi oleh kegiatan pertanian. Petani pada umumnya menghasilkan beras, jagung, dan tapioka. Lahan yang ada juga banyak ditanami tebu dan tanaman hortikultura lainnya seperti salak dan semangka, yang merupakan buah musiman. Petani menjual sebagian panen (terutama daun tebu atau jagung

yang kemudian biasanya diproses sebagai makanan sapi atau ayam) kepada perantara, yang memperoleh laba dengan menjualnya kembali kepada perusahaan-perusahaan besar dan para pedagang desa (Khoo, 2015; Syafitri, 2014; Yuniarto, 2016). Di kedua desa yang diteliti, sebagian penduduknya bekerja untuk para pemilik tanah sebagai buruh harian (*mburuh*). Pekerjaan ini lazim bagi mereka yang tidak memiliki tanah pertanian atau yang bekerja sementara di pertanian untuk menyiangi sawah dengan tangan (*matun*) atau membajak (*mluku*), memupuk (*ngabuk*) dan memanen (*manen*), serta memelihara ternak (*ngerumat*) milik tuan tanah. Pekerja semacam ini dibayar dengan upah rendah. Upah untuk kegiatan buruh tani, misalnya, biasanya berkisar antara Rp30.000 dan Rp35.000 untuk kerja selama enam jam. Pekerjaan lain yang umumnya tersedia bagi pengangguran adalah kerja bangunan, kerja keliling, dan menjadi kernet bus/truk (kerja musiman), yang memberi mereka penghasilan sekitar Rp50.000 hingga Rp75.000 per hari. Beragam

pekerjaan bergaji sebagai guru, PNS, dokter, atau tentara (TNI/ Polri), pegawai desa, hanya terbuka bagi lulusan SMA/ Sarjana, yang kebanyakan berasal dari luar desa.

Selain bercirikan sebagai daerah pertanian, desa AW dan DM di Malang, Jawa Timur, juga merupakan daerah asal migran yang bekerja di luar negeri. Kegiatan migrasi didorong oleh kondisi pertanian yang tidak bersahabat dan terbatasnya ketersediaan pekerjaan layak di desa. Menurut Ibu JT, ketua SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia-Malang), migrasi dipicu oleh kondisi ekonomi dan pertanian yang menjadi kekhasan kehidupan warga bukit dan pegunungan di sana: musim tanam yang pendek dan kemarau yang panjang, sistem panen, dan pengangguran pertanian. Selain itu, tingginya migrasi ke luar juga diakibatkan oleh sifat tak tetap pekerjaan yang tersedia dalam struktur ekonomi pertanian Malang (Khuo, 2015; Syafitri, 2014) dan oleh kenyataan bahwa mereka juga belum bisa menjadi petani. Selain mencari kerja sebagai migran, warga AW dan DM juga mencari kerja di luar desa (Jakarta, Surabaya, atau Kalimantan) sebagai tukang bakso, pegawai administrasi, pekerja bangunan, pekerja kayu, dan buruh di sektor informal. Pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan yang tetap, bersifat kontrak untuk periode tertentu saja. Observasi menunjukkan bahwa sebagian warga pulang pergi dari desa ke daerah sekitar untuk bekerja di beberapa proyek

pembangunan dan kembali ke desanya ketika pekerjaan proyek telah selesai.

Dalam penelitian saya, kegiatan ekonomi (kewirausahaan) migran yang pulang kampung (*return migrant*) sudah mulai marak. Data dari lokasi studi lapangan di Malang, yakni kantor kelurahan AW, menunjukkan bahwa hingga 2015, sekitar 3.000 warga desa bekerja sebagai pekerja migran, dan 10% di antara mereka mungkin pulang kampung sebagai pe-wirausaha. Sementara itu, data dari kantor desa DM menunjukkan angka yang relatif lebih kecil: sejak 2010 hingga 2013, 355 warga bekerja sebagai pekerja migran, dan sekitar 83 kewirausahaan industri rumahan serta usaha perdagangan dan pertanian di desa tersebut dimiliki oleh keluarga migran. Saya menemukan bahwa kewirausahaan membawa dampak terhadap kegiatan ekonomi dan sosial warga desa. Dampak tersebut dapat mengarah pada terciptanya peluang kerja, pemberdayaan ekonomi keluarga migran, dan terbentuknya koperasi eks migran yang dapat memberi dukungan finansial bagi para pekerja migran yang mudik sembari mengembangkan usaha mereka. Hingga titik tertentu, pekerja migran yang mudik menjadi panutan bagi calon pekerja migran, sebagai mantan pekerja migran yang sukses menjadi pengusaha.

Berdasarkan tiga kondisi di atas, yang belum tergalai adalah bagaimana para pekerja migran tersebut setelah pulang kampung—berbekal pengalaman dan visi mereka—berhasil mempertahankan kon-

disi ekonomi dan kebertetapan diri mereka. Misalnya, belum diketahui apakah pengalaman kerja migran di luar negeri memberi mereka wawasan kultural, dan apakah etika kerja mereka dapat meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Migran yang pulang kampung setelah bekerja di luar negeri mengalami penyesuaian strategis secara struktural dan individual atau mengembangkan pemerolehan pengetahuan kewirausahaan mereka. Dengan berfokus pada kegiatan kewirausahaan para migran yang pulang ke kampung halaman mereka, studi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana migran muda yang pulang kampung menyesuaikan diri dengan keadaan desa dan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh sebagai migran ke dalam kegiatan kewirausahaan di kampung halaman mereka? Kondisi-kondisi struktural dan individu apa saja yang berdampak pada kewirausahaan mereka? Bagaimana kewirausahaan dan kegiatan wirausaha mempengaruhi reintegrasi ekonomi migran seke-pulangan mereka ke kampung halaman?

Studi lapangan yang saya lakukan berlangsung dari 4 Agustus hingga 4 September 2015. Wawancara di lapangan dilakukan terhadap: (1) sepuluh pe-wirausaha mantan migran yang pulang kampung dan menjalankan setidaknya satu usaha di AW; dan (2) sebelas pe-wirausaha mantan migran yang pulang kampung dan menjalankan setidaknya satu usaha di DM. Wawancara dilakukan

kepada para individu yang menangani kegiatan usaha serta suami atau istri mereka. Sebagian besar migran pulang-kampung yang diwawancarai di kedua desa berusia antara 30-40 tahun, dan sampel yang dilibatkan mencakup laki-laki dan perempuan yang pulang kampung. Sebagian besar informan pernah menuntaskan pendidikan dasar. Ada pula yang lulusan SMA. Semua informan berstatus menikah. Sebagian besar para informan yang berstatus menikah tersebut tinggal di kedua desa dan memiliki satu atau dua anak, sementara sebagian lagi memiliki tiga anak. Informan yang dipilih dalam studi lapangan saya adalah migran pulang kampung yang berhasil membangun, memulai, dan meneruskan kegiatan kewirausahaan di rumah. Studi ini menekankan pentingnya pengetahuan, relasi sosial, dan kendala yang mereka hadapi, dan hasilnya dapat diterapkan untuk membantu reintegrasi pekerja migran yang pulang kampung karena kehabisan modal finansial/ sosial saat di luar negeri. Saya memilih informan yang masuk pada kategori tersebut. Dengan demikian, studi ini dapat menunjukkan perbedaan antara mereka yang memilih untuk migrasi lagi sebagai pekerja migran (TKI) di luar negeri sehingga dapat memanfaatkan secara produktif keahlian/ pengalaman baru serta tabungan mereka di luar negeri, dan mereka yang dapat mempertahankan keberlangsungan ekonomi lewat kegiatan kewirausahaan.

Tabel 1. Jenis-Jenis Usaha TKI Pulang Kampung yang Diwawancara

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Penggilingan (gabah, kopi, jagung, kakao, rempah-rempah, kelapa, dll.)	2
2	Toko bahan bangunan	1
3	Percetakan, fotokopi, foto/video pernikahan	1
4	Toko kelontong (termasuk jual pulsa)	3
5	Berjualan daging ayam	1
6	Berjualan telur	3
7	Salon	2
8	Kolam ikan	2
9	Pertanian	3
10	Lain-lain (ternak cacing, warung internet/game, usaha eceran)	3
	Total informan	21

Sumber: Studi Lapangan, Agustus-September 2015, Rudolf.

Temuan

Kondisi Desa, Migrasi, dan Kewirausahaan

RM (40 tahun), seorang petani tembakau dan pengusaha ayam berskala kecil di desa DM, berbagi cerita tentang kondisi rumah dan pengalamannya sebagai pekerja migran. Rumahnya terletak di tengah lahan perkebunan desa di sisi bukit yang didiami oleh hanya beberapa penduduk.

Sejak kecil, desa kami selalu miskin; sawah umumnya tadah hujan, dan kami bergantung pada musim hujan. Hasil panen yang utama biasanya adalah tebu, singkong, kokoa, cabe merah, dan semangka. Namun, para petani di sini kebanyakan tidak punya pertanian yang luas. Ada pula yang menjadi buruh tani yang tidak memiliki tanah. Keluarga kami adalah kelas pekerja. Sulit memperoleh uang banyak dari bertani. Saat musim kemarau setelah panen tebu, warga pergi ke kota untuk mencari kerja. Pada

sekitar tahun 80an, dimulailah migrasi pekerja ke Saudi Arabia dan Malaysia. Setelah saya menikah, dari tahun 2000 hingga 2004, saya bekerja di Malaysia sebagai PRT dan pelayan toko. Tabungan yang saya sisihkan dari gaji cukuplah untuk membangun rumah. Lalu pada 2005 saya pergi lagi sebagai TKI ke Taiwan hingga 2010. Selain menjadi PRT, di sana saya juga bekerja merawat orang lansia. Kali itu tujuan saya adalah mencari modal usaha. Hasilnya, saya dapat membeli lahan pertanian di luar desa. Bagi kami (DM dan suami), memiliki tanah itu penting agar bisa tetap bertani. Kami punya latar belakang sebagai petani. Yang saya tahu ya cuma bertani. Sejak empat tahun lalu, kami menanam tembakau sebagai mitra 'Perusahaan Rokok Sampoerna'. Selain bertani, kami juga memelihara beberapa kambing dan ayam sebagai bentuk tabungan. Misalnya, kami membeli anak kambing dan anak ayam seharga Rp1.000.000 juta. Lalu kami memeliharanya hingga setahun kemudian kami bisa menjualnya seharga Rp2.000.000.

Di desa DM, saya juga mendapati mantan TKI yang bergelut membangun keberlanjutan ekonomi dan memilih migrasi sebagai solusi. SQ (laki-laki, 35 tahun), pemilik dan pengelola toko bahan bangunan, menjelaskan bahwa alasannya bermigrasi menjadi TKI di luar negeri adalah untuk mencari modal dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut pengakuannya:

Istri saya pernah bekerja tiga kali di Taiwan sebagai PRT (1999–2008); sementara saya bekerja dua kali di sana di sebuah pabrik pemintalan benang (2002–2008). Bagi kami bermigrasi menjadi TKI di luar negeri berarti menaikkan standar hidup di daerah perdesaan. Menjadi TKI sudah menjadi semacam tradisi. Ibu mertua saya bekerja di Malaysia pada tahun 80an, dan tetangga-tetangga saya pergi ke berbagai tempat seperti Kalimantan, Brunei, atau Saudi Arabia. Sekarang generasi kedualah yang kena giliran bekerja di luar negeri. Kami ini sekarang seperti mengganti posisi mereka. Seperti pada jaman orang tua kami, migrasi didorong oleh kondisi pertanian yang tidak menguntungkan dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang layak di desa. Pertama, kami menggunakan uang yang kami peroleh untuk merenovasi rumah agar kami dapat hidup terpisah dari keluarga kami. Lalu, kami menggunakan modal untuk memulai usaha. Kami harus berkorban bekerja untuk menabung. Kami perlu kegiatan ekonomi yang bisa langgeng saat kami pulang dan kami tidak ingin terusterusan bermigrasi gara-gara kami tidak punya tanah untuk digarap. Oleh karena itu kami harus jadi TKI dulu untuk mencari modal dan membuka usaha. Kepergian kami tiga kali ke Taiwan untuk mencari modal itulah yang memungkinkan kami sekarang memiliki kegiatan ekonomi keluarga.

Ada tiga hal yang dapat dipetik dari kisah RM dan SQ: pertama, migrasi sebagai strategi individu/ keluarga untuk mencari uang dan modal usaha; kedua, proses

migrasi kaum muda yang di kemudian hari pulang dan menggunakan tabungan mereka dengan menanam modal pada tanah dan kegiatan usaha, yang juga banyak dilakukan setidaknya oleh generasi sebelumnya. Strategi inilah yang dijalankan oleh kelas menengah perdesaan untuk mereproduksi (*reproduces*) diri dan kelas menengah selanjutnya, di posisi kelas menengah yang sama di masyarakat. Ketiga, kewirausahaan menjadi pilihan karir kerja bagi pekerja migran yang pulang kampung. Kisah-kisah di atas menunjukkan kepada kita bagaimana migrasi diterapkan sebagai strategi untuk mengakumulasi modal hidup dan bagaimana remitan yang dibawa pulang dimanfaatkan sebagai alat kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja bagi diri sendiri dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang produktif. Baik migrasi maupun remitan dapat menguatkan keberlanjutan kehidupan dan kegiatan ekonomi para TKI yang pulang kampung.

Proses migrasi, kondisi desa, dan kegiatan ekonomi bisa menjadi jalan tersendiri bagi setiap orang. Simak saja tuturan TT (30 tahun), TKI perempuan asal AJ tentang bagaimana ia menyesuaikan diri kembalinya ke kampung halaman:

Keluarga saya berlatar belakang sebagai petani dan TKI. Ketika saya masih kecil (pada tahun 80an), ayah saya hijrah ke Malaysia dan bekerja di sana sebagai buruh pabrik minyak. Saat pulang, ayah membeli 1 ha lahan pertanian dan menjalankan kegiatan bertani: menanam tebu, ubi jalar, dan sayuran, sambil di sela-sela waktu memelihara dua, tiga ekor sapi atau kambing. Sapi atau kambing merupakan sumber utama tabungan petani. Ternak akan

dijual untuk biaya pendidikan anak atau renovasi rumah sementara hasil panen tani digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya menggarap tanah. Saya sendiri bekerja sebagai TKI di Taiwan pada tahun 2000 dan lanjut dari 2003 hingga 2010 di Hong Kong. Awalnya saya berinvestasi tanah dan rumah dengan uang tabungan dari gaji yang disisihkan saya dan suami. Suami saya juga TKI di Korea. Setelah membangun rumah, kami mulai berusaha. Pertama, kami menginvestasikan uang dengan membeli sawah dan menanaminya dengan sistem tumpang sari. Maksudnya, kami menanam padi yang diselangi dengan sayur-sayuran. Untuk mengelola usaha, kami meniru mekanisme ayah kami, yakni mencari investasi lain untuk mendukung keberlangsungan kegiatan bertani. Suami saya membuka peternakan ayam pedaging dengan tabungan yang dikumpulkannya saat bekerja di Korea Selatan. Sementara saya sendiri membuka usaha salon. Begitulah cara kami menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi di kampung. Kami mendiversifikasi produk pertanian dan pekerjaan kami. Saya mengikuti cara ayah saya menggarap beberapa bidang usaha. Dengan cara inilah kami dapat bertahan di kampung halaman.

Beberapa informan lain juga berbagi kisah tentang penyesuaian ekonomi yang mereka lakukan. SP (36 tahun), TKI perempuan yang pulang kampung ke DM, memilih mengikuti dan beradaptasi dengan jalur kewirausahaan tradisi usaha jual-beli. Saudara-saudara laki-lakinya adalah beberapa dari perantara pertanian di desa. Selain itu mereka juga membeli mobil atau motor bekas, lalu memperbaiki, memodifikasi, atau mendandani, kemudian menjualnya kembali di pasaran lokal. Dari kegiatan jual-beli ini mereka memperoleh laba. Kasus serupa juga terjadi pada WG (perempuan, 30 tahun) dan SW (laki-laki, 32 tahun), pasangan yang

beternak ayam dan menanam cabai dan semangka. Mereka mengembangkan kegiatan ekonomi mereka dengan mengikuti pola dan belajar dari anggota keluarga yang terlebih dulu menjadi pewirausaha sukses. Kakak laki-laki SW berpengalaman 25 tahun sebagai petani, dan ia paham sekali dengan diversifikasi produk dan menggarap pertanian. Mereka tidak menjual hasil tani di pasar setempat, namun mencari pembeli dari luar desa. Pembeli dari desa setempat tidak punya banyak uang, sehingga mereka harus menjual ke perantara.

Selain jual-beli, diversifikasi produk, dan bertani, tradisi kampung juga mempengaruhi pekerja migran yang pulang kampung (*return migrant*) dalam mengembangkan kegiatan usaha mereka. Warga kampung terus mempraktikkan ritual tradisi, seperti upacara nikah (*mantenan*), ritual tahunan untuk leluhur, festival bersih desa, peringatan hari kemerdekaan nasional (tujuh-belasan), perayaan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), dan acara sekolah (kemah dan perayaan kelulusan). Semua peristiwa tersebut biasanya diramaikan dengan pertunjukan kesenian tradisional setempat, seperti musik, tari, atau nasyid. Praktik-praktik ritual ini bisa berlangsung dari dua hari hingga sepekan, dari siang sampai malam, melibatkan seluruh warga kampung, tidak saja sebagai peserta, namun juga sebagai penyelenggara.

Banyak ide bisnis muncul dari tradisi tersebut. Misalnya, saat pesta pernikahan atau tujuh-belasan, warga desa menyediakan layanan seperti katering, percetakan,

penyewaan perangkat tata suara dan alat musik, penyewaan pakaian pengantin nasional/ tradisional, salon rias dan rambut, alat pesta, penjahit pakaian, rekaman video, dan pernak-pernik souvenir. Dengan demikian, tradisi lokal di desa membangun lingkungan tempat pewirasaha, pedagang, dan TKI yang pulang kampung dapat menciptakan inovasi bisnis, atau meramaikan acara-acara tersebut dengan produk-produk usaha mereka.

Berdasarkan gambaran di atas, TKI yang pulang kampung menyesuaikan diri dengan kondisi kampung dan mengembangkan kegiatan usaha dengan dua cara. Pertama, TKI pulang kampung menyesuaikan diri dengan kondisi kampung halaman dengan mengkooptasi tradisi tani keluarga dan memaksimalkan pasar kerja di desa. Pola penyesuaian ini sangat terkait dengan kehidupan dalam kondisi yang ada di desa dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi desa. Pola ini juga merupakan respon terhadap kondisi kehidupan (tantangan ekonomi) yang dihadapi sekepulungan ke kampung halaman, dan sebagai cara untuk mencari titik temu antara struktur ekonomi desa dan kebutuhan rumah tangga. Tipe penyesuaian kewirausahaan TKI pulang kampung yang kedua terkait dengan aspek tradisi di kampung halaman. Mereka cenderung menggiatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tren ekonomi desa saat ini. Masih banyaknya warga yang mempertahankan ritual tradisi membuat tradisi tersebut pun lekat dengan kehidupan warga desa. Dengan demikian, selalu ada permintaan terhadap produk atau jasa terkait

perayaan tradisional yang dapat disediakan dan diteruskan oleh para TKI yang pulang kampung jika mereka mengambil peluang yang diciptakan oleh struktur ekonomi desa ini.

Produksi Pengetahuan

Berkenaan dengan penerimaan dan penyebaran pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh imigran, Levitt (1998) mengusulkan untuk menyebut bahwa gagasan, perilaku, pengetahuan, dan pengalaman pribadi baru yang diperoleh imigran sebagai “remitan sosial”. Levitt (1998) mengelompokkan tiga jenis remitan sosial: struktur normatif (gagasan, nilai, dan keyakinan), sistem praktik (tindak yang dibentuk oleh struktur-struktur normatif), dan modal sosial (yang diperoleh secara individual melalui keterlibatan dalam jejaring informal, organisasi resmi, dan berbagai perkumpulan dan gerakan sosial). Berdasarkan pengamatan saya, pekerja migran pulang kampung menerapkan remitan sosial melalui pelibatan diri dalam kewirausahaan, yang dimungkinkan oleh keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperoleh selama di luar negeri.

Kesadaran diri dan pembelajaran sosial

Sebagaimana diakui para pekerja migran, pertama kali mereka bekerja di mancanegara mereka menerima upah yang mereka sebut uang kaget, upah yang di luar dugaan ternyata tinggi atau setidaknya lebih tinggi dari upah atau pendapatan minimum di kampung halaman mereka. Pengalaman pertama semacam ini umum di kalangan

imigran, dan biasanya mereka membelanjakan pendapatan mereka dengan belanja konsumtif secara berlebihan. Meski demikian, ketika uang mereka mulai menipis, atau mereka pulang ke rumah dengan membawa hanya sedikit uang hasil usaha, mereka pun cenderung sadar bahwa mereka sebenarnya tidak punya cukup uang. Mereka banyak yang hijrah kembali dengan tujuan mengumpulkan investasi produktif atau mencari uang yang lebih banyak. Pekerja migran yang berangkat bermigrasi untuk kedua atau ketiga kali biasanya mulai berpikir untuk berwirausaha atau mempersiapkan diri agar bisa menjadi majikan bagi diri sendiri kelak. Inilah pola dasar migrasi pekerja migran. Menurut pola dasar ini, tak lama setelah mereka mulai berpikir tentang investasi finansial untuk masa depan, mereka mulai mengalami rasa “kesadaran diri akan masa depan”. Kesadaran baru ini adalah titik awal komitmen untuk meningkatkan gaya hidup pekerja migran dan merupakan langkah penting ke arah reintegrasi ekonomi pekerja migran yang pulang kampung (atau dengan kata lain ke arah kemandirian finansial di tengah kondisi ekonomi kampung halaman). Dalam prosesnya, migran yang pulang kampung mengalami pencerahan melalui pengalaman kerja dan hidup. Selain itu, pengetahuan yang mereka miliki juga memperkuat cara mereka mengelola usaha mereka.

Proses mencapai kesadaran diri dan kewirausahaan dipengaruhi secara positif oleh keterbukaan pikiran dan kegigihan yang dibangun pekerja migran sejalan dengan proses mereka memperoleh pengetahuan dari

kerja dan pengalaman di mancanegara dan setelah pulang kampung. Di kedua desa yang diamati, para migran yang telah kembali yang kisahnya telah dibebaskan di atas menjelaskan mengenai pelajaran yang mereka dapatkan saat bekerja di Taiwan dan tentang bagaimana mereka mengenal budaya kerja Taiwan. Misalnya, mereka merasakan hal baru seperti kepedulian terhadap orang lain, interaksi sosial yang seimbang, etika kerja yang lebih tinggi terkait produktivitas, seperti disiplin, ketepatan waktu, keseimbangan antara kerja dan istirahat, kerajinan, dan kerja keras. Mereka juga mengalami perbaikan dalam kebiasaan konsumtif, yang diwujudkan melalui menabung, alih-alih menghamburkan uang untuk belanja. Semua nilai yang mereka peroleh dari bekerja di luar negeri tersebut mempengaruhi perilaku usaha para TKI yang pulang kampung. Berkat pengalaman sosial dan kultural yang diperoleh, para TKI yang pulang kampung belajar bagaimana menyelesaikan masalah finansial yang mereka alami di kampung halaman. TKI yang pulang kampung mengakumulasi gagasan, perilaku, dan pengalaman di negara tempat mereka bekerja dan menerapkan semuanya saat mengembangkan usaha. Remitan sosial memberikan umpan balik positif yang bermanfaat bagi kewirausahaan TKI yang pulang kampung.

SW (laki-laki, 35 tahun) mengutarakan contoh kewirausahaan yang dibangun melalui proses ini. Mulanya, ia adalah buruh pabrik dan pekerja bangunan di Sabah dan Sarawak Malaysia dari 1991 hingga 1999. Sejak 2004 hingga 2010, ia

bekerja di pabrik pipa Hsinchu City. Di Malaysia ia menandatangani kontrak kerja dua tahun, dan di Taiwan ia terikat kontrak selama tiga tahun. Untuk menambah penghasilan, ia kerja lembur, kadang dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Secara singkat, ia menggambarkan kondisi kerjanya sebagai berikut: “Waktu adalah kerja dan kerja adalah uang.” Ia menyadari bahwa saat itu ia bekerja hanya untuk uang dan oleh karena itu ia mencari uang sebanyak yang ia mampu agar kelak dapat membangun rumah atau membuka usaha saat ia pulang kampung. Dibandingkan dengan bekerja di kampung, bekerja di luar negeri jauh lebih berat dan melelahkan. Namun karena ia terbiasa bekerja keras, ia merasa bahwa ia akan terbiasa. Rekan-rekan kerjanya di Malaysia dan Taiwan semangat dan terampil (*practical*), patuh pada hirarki dan atasan, serta saling menghormati. Meskipun awalnya SW tidak memiliki banyak pengalaman kerja dan relatif tidak mendapatkan pelatihan/ pendidikan soal pabrik, ia memperoleh pelajaran berharga dari rekan-rekan kerjanya di luar negeri tentang disiplin dan kegigihan. Pelajaran mengenai etika kerja dan pengalaman bersosialisasi di tempat kerja membuka pemikiran SW dan kemudian menjadi landasan bagi dirinya untuk membangun pekerjaan sendiri kembalinya ke kampung halaman. Menurut SW:

Berdasarkan pengalaman saya, sisi negatif kerja adalah kurangnya fasilitas. Namun, pengalaman bekerja di Malaysia atau Taiwan cukup baik karena kondisi dan layanan kerjanya baik, dan setidaknya upahnya cukup lumayan. Saya berkomunikasi

dengan pengawas dan rekan-rekan kerja mengenai tanggung jawab dan hak pekerja, standar upah, situasi kerja, dan disiplin agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bekerja. Dengan bekerja di luar negeri, saya benar-benar belajar bagaimana melakukan kerja apapun dari mulai pengoperasian, pola pengemasan, hingga pengangkutan barang, mengamati perilaku bisnis orang-orang, dan mengeksplorasi hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Berangkat dan bekerja di luar negeri membuka sisi lain diri saya terkait bagaimana kelak saya membangun masa depan diri.

Akhirnya SW memutuskan untuk berwirausaha dengan menciptakan kerja bagi diri sendiri ketika pulang. Keputusannya dipengaruhi oleh kondisi keluarga: kedua orang tuanya sudah lanjut usia, dan ia ingin agar anak-anaknya tumbuh dan berpendidikan layak dengan cara memaksimalkan lahan pertanian yang dimiliki keluarganya. Untuk memulai pekerjaan sendiri, ia memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya, terutama tanah pertanian dan rumahnya. Ia membangun peternakan ayam di halaman rumah orang tuanya. Ia menghabiskan Rp5.000.000 juta untuk membuat kandang berkapasitas 500 ayam petelur. Peternakan ayamnya ternyata tidak menguntungkan karena biaya dan tenaga yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk menambah penghasilan keluarga, ia menggarap tanah pertanian dengan menanam cabe dan semangka. Strategi usahanya adalah mendiversifikasi produksi pertanian dan menanamkan keuntungannya di beberapa bidang usaha, yang akhirnya memungkinkannya untuk meningkatkan

peternakan ayamnya sehingga berkapasitas 1000 ekor.

Untuk menutup pengeluaran sehari-hari, misalnya untuk makan, ia juga memanfaatkan halaman rumah untuk menanam sayuran dan rempah-rempah. Ia juga membeli beras dari salah satu anggota keluarga besarnya sendiri. Dengan strategi ini, ia dapat memperoleh makanan gratis atau murah. Terkait kebutuhan-kebutuhan lain, keluar-gannya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Mereka jarang membeli minyak karena mereka memasak dengan kayu bakar. Mereka tidak perlu membeli air. Listrik digunakan hanya untuk televisi dan lampu penerangan. Pulsa telepon digunakan khusus untuk keperluan usaha dan berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Strategi yang terbukti paling baik adalah menabung uang. Terkait strategi kewirausahaan dan bertahan hidup, SW menerapkan jenis-jenis strategi koping (*coping*) yang disebut Snel dan Staring (2001) sebagai strategi maksimalisasi pendapatan dan minimalisasi konsumsi. Strategi koping rumah tangga yang digunakan SW untuk menopang kegiatan bisnisnya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dari beragam sumber, termasuk halaman rumah dan anggaran ketat, di saat usaha masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis kegiatan koping kewirausahaan ini disebut Snel and Staring (2001) sebagai “produksi subsisten”—yakni kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan berupa uang dan mengurangi pengeluaran —yang berperan penting dalam mempertahankan kehidupan keluarga TKI yang pulang kampung.

Dalam situasi seperti yang dihadapi SW, pengeluaran bulanan cenderung digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, misalnya untuk membeli pakan ternak, memelihara kebersihan kandang, membeli bibit, memproses hasil pertanian, dan pendidikan anak. Dalam situasi seperti ini tidaklah mungkin untuk meningkatkan tabungan karena pada titik ini penting untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas panen. Selain itu, tidak ada dukungan dari bank setempat atau subsidi pemerintah untuk pewirausaha desa berskala kecil seperti SW. Yang ada adalah kredit berbunga tinggi dari lembaga-lembaga kredit mikro. Menurut SW, untuk memperoleh kredit bank diperlukan surat jaminan, seperti sertifikat kepemilikan rumah atau kendaraan. Di perdesaan, bank umumnya mensyaratkan kreditor untuk menyerahkan surat jaminan dan melakukan pembayaran bulanan secara tetap. Keluarga SW hanya memiliki sertifikat rumah dan mereka tidak ingin mengagunkan apapun kepada bank demi pemasukan yang belum jelas. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tidak meminjam uang dari bank.

Fluktuasi harga merupakan faktor lain yang menghambat keberlanjutan usaha karena inflasi mempengaruhi harga pasar produk pertanian. Saat harga tinggi, laba pun tinggi, namun saat harga anjlok, risiko naik. SW mengatasi isu ini dengan membuka rekening tabungan di bank dan meminjam dari kakak laki-lakinya saat ia perlu bantuan modal atau pasar. Selain itu, ia juga menjalin hubungan dengan seorang perantara hasil pertanian dari luar desa. Lewat perantara tersebut SW memasarkan hasil pertaniannya

ke pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, ia menghasilkan rata-rata penghasilan kotor sebesar Rp5.000.000 per bulan dari usaha telur, penghasilan kotor Rp15.000.000 setiap tiga bulan dari cabe, dan penghasilan bersih Rp3.000.000 setiap dua bulan dari panen semangka. Ia juga mempekerjakan buruh paruh waktu untuk membantunya menjalankan usaha. Setelah mampu mengatasi masalah yang dihadapinya saat membangun usaha di desa, SW bersimpulan bahwa “Sekarang, setelah usaha mulai stabil dan kami memperoleh penghasilan cukup, saya sama sekali tidak tertarik bekerja lagi di luar negeri sebagai TKI. Menjadi pewirausaha lebih baik dari bekerja.”

Penyesuaian struktural (adaptasi di desa)

Usaha para TKI yang pulang kampung bergantung pada, bahkan dikendalikan oleh, ekonomi yang sudah terstruktur secara tradisional baik di AJ maupun DM. Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, fluktuasi harga menghambat keberlanjutan usaha. Pada sistem pertanian subkontrak di kedua desa, kondisi usaha sering ditentukan oleh fluktuasi harga pasar, pihak perantara, dan/ atau kontrak kerja sementara. Petani setempat biasanya adalah pekerja pada lapis hirarki terbawah yang posisinya tidak stabil pada sistem pertanian subkontrak. Perubahan tren pasar dan iklim serta menurunnya daya beli mempengaruhi kemampuan TKI pulang kampung untuk mengelola atau meningkatkan kondisi usaha mereka. Tidak ada jaminan bagi usaha komersial apapun untuk bertahan lama atau

meraup laba. Pengalaman ibu RM dengan usaha tembakaunya dari 2014 hingga 2015 merupakan contoh dampak harga produksi yang takstabil. Menurut penuturannya:

Harga daun tembakau kering berbeda setiap harinya. Harga berkisar antara Rp. 25.000 hingga 35.000 (USD 1,7 hingga 2,4), dan bahkan pernah anjlok ke Rp5.000 (USD 0,4) pada 2011. Harga dikendalikan oleh pabrik rokok dan pengumpul. Biaya produksi untuk satu hektar bervariasi dari paling rendah Rp20.000.000 (USD 1.356) untuk menghasilkan sekitar 1,2 ton tembakau kering.

Laba kami setiap panen berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 (USD 678 hingga 1,017) per lima bulan kerja, atau di atas Rp3.000.000 (lebih dari USD 204) per bulan.

Pada usaha ternak ayam ceritanya lain lagi. Pada tahun 2010, Ibu SS, misalnya, pengusaha pembibitan dan peternakan ayam petelur di DM, terpaksa mengubah sistem produksi individual menjadi kemitraan akibat krisis finansial yang menyulitkan dan kebergantungan pada perantara sebagai penyedia bahan-bahan keperluan peternakan. Pada awal 2010, krisis finansial mengakibatkan lonjakan kurs mata uang asing, yang berdampak pada Indonesia di tingkat nasional. Peternak gurem (peternak ayam skala kecil) tidak mampu bertahan dihantam fluktuasi. SS menceritakan bahwa “keuntungannya terlalu sedikit dan kami tidak mungkin menabung,” setelah ia beralih ke sistem subkontrak. Dengan sistem ini, mereka hanya bertanggung jawab untuk memberi makan ayam hingga usia 36 hari, menyediakan fasilitas kandang dan peralatan penetasan, dan menjual ayam ke perusahaan

mitra. Total laba kotor yang diperoleh per bulan dengan sistem ini adalah sekitar Rp4.000.000 (USD 271), sebelum dipotong biaya listrik, air, dan gas.

Menurut JT, ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di kota Malang³, hambatan utama yang dihadapi TKI pulang kampung di antaranya adalah pengalaman usaha mereka yang masih minim dan keterbatasan modal, yang merupakan kendala yang paling sering mereka temui. Selain itu, mereka biasanya menjalankan usaha di lokasi yang jauh dari akses ke jalan utama desa, yang menyulitkan mereka mencapai sumber-sumber primer perdagangan, pasar, dan pasokan lokal. Untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, perangkat keras, seperti kendaraan dan peralatan, menjadi hal penting. Akan tetapi, tentunya untuk itu perlu modal dan para pengusaha dapat (atau harus) hijrah dan bekerja demi mengumpulkan modal usaha. Masalah-masalah ini semua berakibat pada lambannya pertumbuhan usaha pertanian. Menyadari hal ini, sebagian besar TKI yang pulang kampung masuk ke ranah usaha sebagai produsen atau pengecer yang pada gilirannya akan bergantung pada perantara yang bekerja di balik layar. Pada kasus JT, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan TKI pulang kampung

³ SBMI adalah lembaga non pemerintah yang khusus melakukan advokasi persoalan buruh migran, dari permasalahan perlindungan, penanganan kasus, hingga pemberdayaan mantan buruh migran. SBMI Malang, khususnya, aktif mengkampanyekan migrasi internasional aman dan pemberdayaan mantan buruh migran agar dapat melakukan reintegrasi di kampung halamannya.

(pemerintah daerah dan asosiasi imigran) harus menghargai kerja keras para TKI pulang kampung dengan bantuan kredit finansial untuk mendongkrak kegiatan usaha mereka. Dukungan dapat berwujud pameran produk usaha untuk mempromosikan dan memperluas pasar mereka. Upaya dukungan harus dimulai karena semakin banyak TKI pulang kampung yang menghadapi kendala yang sama.

TKI pulang kampung yang beralih menjadi pewirausaha umumnya mengalami penurunan pendapatan sekitar 20 persen. Di Taiwan, mereka dapat meraup penghasilan sebesar TWD15.580-20.000, atau setara dengan sekitar Rp6.500.000-8.000.000 (USD 475-600). Dengan demikian, di antara sejumlah kerisauan para TKI yang pulang kampung, isu terkait pendapatan ada pada urutan teratas. Meski demikian, banyak di antara mereka yang lebih suka bekerja di kampung halaman agar dekat dengan keluarga. Sebagian besar informan yang diwawancarai memandang hal ini secara positif. Misalnya, “Biarlah upah kecil; yang penting masih bisa hidup. Tinggal bisabisanya saja kami kerja keras dan panjang akal.” Namun demikian, masalahnya adalah TKI yang pulang kampung terpaksa menjalankan strategi usaha yang berisiko untuk mempertahankan geliat wirausaha dan keuangan keluarga mereka. Mereka mengoptimalkan dukungan dan sumber daya dari anggota keluarga untuk menambah penghasilan mereka. Misalnya, mereka menjual pupuk kandang serta bumbu/rempah dan tanaman yang mereka tanam sendiri, mensubstitusi pemasukan (seperti

pinjaman dari penghasilan anggota keluarga atau membagi laba usaha untuk menopang usaha mereka sendiri) sebagai dukungan usaha, membolehkan suami atau istri mengembangkan usaha mandiri, atau melakukan kegiatan lain untuk menghasilkan pendapatan.

Pendekatan yang umum dilakukan oleh pewirausaha untuk membangun usaha adalah menabung dan membeli barang untuk menambah aset produksi atau merenovasi tempat usaha dengan desain yang lebih baik. Berdasarkan penelitian lapangan yang saya lakukan, warga cenderung menganut prinsip arisan (kredit berputar) untuk mengumpulkan uang. Petani dan peternak meminimalkan biaya usaha dan menaikkan pendapatan dengan menggunakan atau menjual pupuk organik yang diperoleh dari hewan ternak. Pemilik toko grosir atau toko lainnya memanfaatkan sistem kredit pembelian dan warga yang ada di sektor jasa menerapkan sistem proaktif. Mereka membentuk kelompok atau perkumpulan tempat mereka dapat berbagi informasi dan pekerjaan. Untuk mempromosikan usaha mereka, pewirausaha di sektor publik cenderung menawarkan barang dengan harga murah dan dalam bentuk paket-paket produk. Petani dan peternak menjual dengan harga eceran kepada pedagang lokal dan perantara langsung. Sebagian pewirausaha meluaskan prospek usaha mereka dengan menawarkan jasa yang dapat digunakan oleh program-program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur. Jasa seperti ini mencakup penyediaan bahan bangunan murah atau penyediaan layanan katering. Sejumlah

strategi lain diterapkan untuk mengembangkan usaha dan memantapkan keberlanjutan.

Kisah dan pengalaman pewirausaha di atas mencerminkan jalur dan hambatan yang dihadapi TKI dalam melakukan adaptasi struktural setelah pulang kampung untuk berwirausaha. Jenis kehidupan berkelanjutan yang dikembangkan setelah pulang kampung (koping kewirausahaan) bergantung pada tingkat kesadaran dan kreativitas masing-masing. Keberhasilan dalam menerapkan remitan sosial di kampung halaman jelas menunjukkan bahwa TKI yang pulang kampung dapat memetik manfaat dari pengalaman saat bekerja di dalam atau luar negeri guna mengembangkan kewirausahaan, kegiatan usaha strategis, dan pengendalian belanja keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TKI yang pulang kampung dapat mengembangkan usaha dengan berhasil jika: (1) mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan layak, (2) mereka dapat membangun kegiatan ekonomi produktif atau memperbaiki situasi finansial mereka, dan (3) mereka dapat mengembangkan usaha secara mandiri. Sayangnya, TKI yang pulang kampung tidak memiliki akses ke kredit, misalnya pinjaman bank, untuk menopang kegiatan wirausaha mereka. Jika TKI pulang kampung memiliki pengetahuan mengenai penciptaan lapangan kerja sendiri dan kemampuan alih pengetahuan, mereka biasanya akan menjadi pewirausaha yang berhasil di kampung halaman. Selain itu, seiring proses penciptaan lapangan kerja sendiri dan tumbuhnya usaha, mereka mungkin akan perlu untuk mempekerjakan orang di luar keluarga

mereka. Contoh para TKI pulang kampung yang dibahas di atas menunjukkan tingkat penghasilan dan pembelajaran yang dapat diperoleh TKI pulang kampung melalui kewirausahaan.

Dampak

Sebagian besar TKI yang pulang kampung dan menjadi pewirausaha mengakui bahwa mereka senang pulang ke kampung halaman, meskipun tingkat keyakinan mereka umumnya rendah saat memulai usaha karena mereka selalu membandingkan kondisi hidup dan kerja di desa dengan yang mereka alami di luar negeri. Daya tarik gaji tetap bulanan dan kemampuan mengirim uang untuk keluarga yang ditinggalkan terkadang mendorong mereka untuk bermigrasi kembali ke luar negeri. Namun, sebagaimana digaribawahi oleh semua informan, setelah usaha mereka terbangun dan mapan, mereka lebih suka tinggal di kampung. Mereka umumnya memulai usaha sesegera mungkin alih-alih bekerja sampai terkumpul uang banyak karena pilihan yang kedua dapat mengarah pada usaha yang gagal. Memulai usaha dari bawah melalui proses ini merupakan pendekatan kewirausahaan yang lazim diambil, kecuali bagi mereka yang memiliki akses terhadap dukungan finansial yang memadai.

Berdasarkan kisah beberapa informan, seperti SW dan RM, migrasi bukanlah sebuah strategi untuk keluar dari sektor pertanian. Alih-alih demikian, migrasi (jika berhasil) memungkinkan TKI yang pulang kampung untuk memiliki usaha pertanian

dengan (a) membeli sepetak tanah atau dengan (b) mendirikan usaha pertanian inovatif (misalnya peternakan sapi, ayam, cacing, berkebun buah, dll.). Kepemilikan lahan mungkin tercapai dengan pendapatan dari bekerja di luar negeri. Mereka yang membuka usaha menggunakan pendapatan mereka untuk menambah modal usaha. Sebagian besar TKI yang pulang kampung terus terlibat dalam pertanian sebagai petani bagi hasil, penyewa bagi hasil, pemilik tanah, atau buruh tani semata. Mereka juga melakukan kerja lain yang terkait pertanian, misalnya menjadi bandar sayuran, pemanen, atau perantara dalam jual-beli produk pertanian. Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti ini juga mengubah status mereka dari buruh harian atau buruh bangunan menjadi pewirausaha.

Secara keseluruhan, berhasilnya pengembangan kegiatan kewirausahaan oleh para TKI yang pulang kampung memiliki tiga implikasi, yakni transformasi diri, perubahan ekonomi, dan peralihan profesi dari TKI menjadi pewirausaha melalui kegiatan usaha mandiri yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi hidup mereka dan memfasilitasi reintegrasi ekonomi mereka di kampung halaman.

Keseluruhan kisah di atas mengulas proses transformasi diri, proses pasca adaptasi, dan motivasi/ dorongan untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang lebih baik setelah kepulangan ke kampung halaman. Setidaknya ada tiga jenis transformasi diri migran dalam hal migrasi dan status perubahan ekonomi. *Pertama,*

terjadi perubahan mentalitas dari mentalitas “kuli” di negara asal menjadi mental teknisi pabrik, awak kapal, pengurus rumah, dan pelaku rawat. Keadaan ini juga mengubah paradigma TKI dari seseorang yang sampai kapanpun akan tetap menjadi TKI karena suatu saat nanti mereka memiliki peluang untuk pulang membawa keahlian kerja yang lebih tinggi. *Kedua*, mereka bertransformasi dari “*wong ndeso*” menjadi orang berilmu (“orang kota”) karena mereka pernah pergi jauh, menghabiskan sebagian besar waktu untuk bekerja, dan tinggal kebanyakan di kota besar di luar negeri. Mereka mempengaruhi budaya migrasi di masyarakat asal mereka. *Ketiga*, mereka bertransformasi dari orang bercara hidup tradisional menjadi orang modern karena dengan ke luar negeri mereka berkesempatan melihat dunia dengan lebih luas dan belajar mengenai realita hidup. Perubahan ini memberikan kontribusi penting dan terus-menerus bagi pembangunan desa. Kisah-kisah di atas merefleksikan apa arti pengalaman bermigrasi bagi TKI dan merasionalkan langkah-langkah yang perlu mereka ambil saat pulang ke kampung halaman.

Implikasi terhadap Karir Kaum Muda

Kewirausahaan pekerja migran yang pulang kampung (*return migrant entrepreneurship*) merupakan strategi yang diikuti oleh para migran yang pulang dan menata kehidupan kembali secara ekonomi dan sosial di kampung halaman. Strategi ini dipandang sebagai cara bertahan hidup yang

dapat diikuti oleh TKI yang pulang kampung namun kurang beruntung secara ekonomi. TKI yang pulang kampung membangun kehidupan berkelanjutan sebagai pewirausaha dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang mereka miliki, seperti uang remitan, pengalaman migrasi, kesadaran diri, produksi pengetahuan, dan penyesuaian strategis. Karena mereka membawa pulang berbagai bentuk modal, mereka dapat melibatkan diri dalam pasar kerja (menjual produk atau jasa) dengan mengandalkan lapangan kerja yang mereka ciptakan sendiri dan kewirausahaan. Dari kegiatan kerja sendiri dan kewirausahaan, usaha mereka berpotensi untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja lain. Dengan demikian, kegiatan wirausaha TKI yang pulang kampung dapat dipahami sebagai respon, cara penyesuaian, atau strategi yang bertujuan untuk mengatasi relasi ekonomi tak seimbang dengan cara menciptakan pekerjaan di lingkungan (atau di luar) kampung halaman.

Dalam memulai langkah masa depan ekonomi mereka, para TKI yang pulang kampung dihadapkan pada tantangan yang sungguh berat. Dalam kenyataannya, tanpa dukungan, seperti bantuan finansial, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pengetahuan di bidang kewirausahaan, tidak mungkin keahlian dan kegiatan kewirausahaan mereka tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, terkait peningkatan kapasitas, mereka perlu bantuan dari pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, akademisi, teman, dan keluarga untuk memberdayakan kegiatan ekonomi dan sosial mereka di

kampung halaman. Dalam studi ini, kami mengklarifikasi bahwa TKI yang pulang kampung untuk menjadi pewirausaha dapat membangun kehidupan dan karir yang berkelanjutan dengan memaksimalkan jejaring sumber daya individu atau kelompok mereka.

Keseluruhan kegiatan sosial dan ekonomi yang dikembangkan oleh TKI yang pulang kampung membuat mereka layak disebut pahlawan oleh keluarga dan tetangga. Terbangunnya solidaritas sosial pada komunitas migran merupakan dampak positif. Selain itu, salah satu dampak jangka panjang keberhasilan kewirausahaan TKI yang pulang kampung adalah turunnya tingkat remigrasi karena para migran yang tidak memiliki pekerjaan setelah pulang kampung biasanya cenderung berpikir untuk bermigrasi kembali.

Dapat kami simpulkan bahwa migrasi pulang, kewirausahaan, dan kegiatan sosio-ekonomi kalangan migran muda di desa melalui tiga pola—tiga R, *return*, *remittance*, *rebirth* (pulang, remitan, kelahiran kembali)—merupakan unsur krusial dalam proses pemahaman bagaimana mobilitas migran menciptakan keberlanjutan ekonomi di kampung. Pada kasus ini, TKI yang pulang kampung adalah aktor karena mereka membawa remitan dari ikhtiar mereka di mancanegara. Selain mengirim uang, mereka membawa remitan berupa pola nilai, perilaku, dan praktik baru dari pengalaman mereka di luar sana. Mereka memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mempersepsi bagaimana migrasi kerja internasional

dapat berdampak pada orang lain dan melihatnya dalam konteks yang lebih luas dari hanya kontribusinya terhadap ekonomi nasional semata. Di antara rentetan proses migrasi internasional, muncul usaha-usaha kecil yang, selain peluang kerja lain, juga merupakan sumber kehidupan penting bagi TKI yang pulang kampung. Dengan demikian, seorang TKI yang pulang kampung dapat secara literal mengalami kelahiran kembali. Dengan mempertimbangkan kondisi sebelum kepergian, pengalaman di luar negeri, kepulangan, dan pasca kepulangan, pola migrasi 3R tadi mencerminkan suatu proses sosial yang dinamis yang terdiri dari pengembangan individu sebagai pekerja migran, peran penting mereka dalam membawa perubahan sosial dan ekonomi, serta keberhasilan reintegrasi mereka ke masyarakat.

Simpulan

TKI yang pulang kampung mengembangkan kewirausahaan untuk menjamin kehidupan berkelanjutan dengan menerapkan remitan sosial yang mereka peroleh melalui migrasi. Dalam pendapat saya, mereka lebih memilih berwirausaha daripada bekerja upahan karena kualifikasi mereka yang membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan layak di desa. Kurangnya keahlian, keterbatasan jejaring, dan rendahnya pendidikan memaksa mereka mencari cara alternatif untuk bertahan di kampung halaman. Studi ini mengidentifikasi atribut-atribut individu dan sosial yang mempengaruhi kewirausahaan dan penyesuaian

strategis yang dilakukan para TKI pulang kampung untuk bertahan di kampung halaman, yakni kesadaran diri, produksi dan alih pengetahuan, serta penyesuaian ekonomi di kampung. Melalui berbagai paduan atribut-atribut tersebut, TKI yang pulang kampung mampu menyesuaikan diri dan membangun relasi kewirausahaan yang sesuai dengan kondisi desa, sehingga mereka dapat membangun kemapanan, mengembangkan lahan sekitar, dan bertani di kampung halaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Ben White dan para peserta Workshop Jurnal Analisis Sosial pada 13 Maret 2017 atas diskusi yang menggugah pemikiran mengenai rancangan awal studi ini. Riset untuk studi ini didukung oleh hibah dari Konoksuke Matsusita Memorial Foundation untuk tahun fiskal 2016-2017.

Daftar Rujukan

- Khoo, Choon. Y, et al. (2015). *Structural conditions and agency in migrant decision making: A case of domestic and construction workers from Java, Indonesia*. Sussex: Migrating out of Poverty Research Programme Consortium.
- Levitt, Peggy. (1998). Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion. *International Migration Review*, 32(4), 926-948.
- Snel, Erik, & Staring, Richard. (2001). Poverty, migration, and coping strategies: an introduction. *Focal: European Journal of Anthropology* 38, 7-22.
- Syafitri, Wildan. (2014). *Determinants of Labour Migration Decisions: The case of East Java, Indonesia*. Doctoral thesis faculty of Economics and the faculty of Organic Agricultural Sciences of the University of Kassel.
- Yuniarto, Paulus, Rudolf. (2016). *Bridging People, Seizing the Future: Indonesian Migrant Entrepreneurs in Taiwan and Return Migrant Entrepreneurship in Malang, East Java, Indonesia*. Ph.D. Dissertation, Dept. of Social Anthropology, Graduate School of Humanities, Tokyo Metropolitan University.

PEMUDA DESA DI WILAYAH INDUSTRI: STUDI KASUS PADA WILAYAH INDUSTRI SEMEN DI KABUPATEN TUBAN

Vandy Yoga Swara

Peneliti di Pusat Studi Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada

vandyogas@gmail.com

Abstract

This article uses two perspectives to describe the characteristics of rural youth in an industrial area, based on a case study of a cement factory in Tuban district, East Java. Regions of extractive industry always present a complex variety of social conditions. This complexity relates to the issues arising, and the diversity of actors involved in, the emerging relationship between the local community and industry. One of the elements that deserves to be taken into account in the construction of civil society in new industrial areas is youth. Given the specific sociological and psychological characteristics of youth, young people should be recognized as putting their own stamp on the dynamics of social life in industrial zones. The first perspective explores the character of youth institutions at the village level in the immediate surroundings ('Ring 1') of the company. One of the elements driving the growth and development of youth activity is the active Karang Taruna (KT) youth organization at village level. Karang Taruna not only serves as a communication space for the youth but also becomes an important facilitator to convey aspirations of the whole society to both government and industry. The social space given to these youth also triggers tensions between younger and older generations in the management of rural development. The second perspectives focuses on the relationships built between youth and industry. The results of the research suggest that young people are one of the actors who have influence in determining the company's "social license to operate". This is apparent from the young people's lively, multi-village networking to demand their rights. Three constructions of the rights of youth emerge in this study: the right to obtain employment, the right to a healthy living environment, and the right to access the beneficial effects of industrial investment on rural development. This tendency has made youth have an important role in safeguarding the growth of the cement industry.

Keywords: *Youth, Industrial Area, Social License to Operate*

Abstrak

Tulisan ini hendak memberikan gambaran tentang karakteristik kepemudaan di wilayah industri dari dua sudut pandang sebagai temuan atas studi kasus di wilayah industri salah satu perusahaan semen di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Wilayah industri selalu menyuguhkan kompleksitas kondisi sosial yang bervariasi. Kompleksitas itu menyangkut isu dan beragamnya aktor yang muncul dari relasi yang dibangun antara masyarakat lokal dan industri. Salah satu unsur pembentuk masyarakat sipil di wilayah industri yang patut untuk diperhitungkan ialah pemuda. Dengan segala karakter yang melekat di dalam diri mereka, baik dalam tinjauan psikologis maupun sosiologis, pemuda harus diakui telah memberikan warna tersendiri terhadap dinamika kehidupan sosial di wilayah industri. Sudut pandang pertama melihat karakter institusi kepemudaan di tingkat desa di ring satu perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu unsur pendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas kepemudaan di sana disebabkan oleh aktifnya Karang Taruna (KT) sebagai sebuah organisasi di tingkat desa. Karang Taruna di wilayah industri tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi bagi pemuda tapi juga menjadi fasilitator masyarakat untuk menyampaikan banyak aspirasi baik kepada pemerintah maupun industri. Lebarnya ruang sosial yang diberikan kepada pemuda ini sekaligus menjadi pemicu hadirnya pertarungan antara kelompok muda dan kelompok tua dalam pengelolaan pembangunan desa. Sudut pandang kedua melihat relasi yang dibangun antara pemuda dengan perusahaan. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa pemuda merupakan salah satu aktor yang berpengaruh dalam menentukan social license to operate perusahaan. Hal ini mengemuka dari fakta hidupnya jejaring antarpemuda multidesa di wilayah perusahaan untuk menuntut hak mereka. Terdapat tiga konstruksi hak kaum muda yang dibangun berdasarkan hasil penelitian ini; hak untuk memperoleh kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat untuk hidup, dan hak untuk memperoleh dampak aktivitas bisnis terhadap pembangunan desa. Kecenderungan ini telah membuat pemuda memiliki peran penting dalam mengawal aktivitas industri di sana.

Kata kunci: *Pemuda, Social License to Operate*

Latar Belakang

Mengingat hampir setiap situasi konflik yang mengarah kepada aktivitas industri terdapat kontribusi anak muda di dalamnya, tulisan ini disajikan untuk memahami karakteristik pemuda desa di wilayah industri. Selain itu, tulisan ini juga menyajikan temuan penelitian tentang peta relasi pemuda dan industri ekstraktif di wilayah operasi sebuah pabrik semen di Tuban Jawa Timur. Dengan latar ini, penelitian juga akan diarahkan untuk memahami konstruksi pemuda dalam memandang aktivitas perusahaan serta lebih lanjut memetakan *social license to operate* dari kelompok pemuda di sana.

Thomson dan Boutilier (2011:1779) menjelaskan bahwa *social license to operate* merupakan kepercayaan, persepsi, dan opini komunitas lokal dan *stakeholder* lainnya yang dapat memengaruhi aktifitas bisnis perusahaan tambang. Definisi itu memberikan implikasi bahwa *social license to operate* tidak bersifat permanen (Thomson & Boutilier, 2011: 1779) dan tidak mengacu kepada izin legalitas perusahaan untuk beroperasi (Costanza, 2016: 98).

Salah satu topik yang kerap muncul di media akhir-akhir ini ialah menguatnya peran masyarakat sipil dalam menolak laju perkembangan industri. Ada dua kemungkinan motif yang mengemuka tentang hal ini. *Pertama*, sikap kritis itu muncul karena kesadaran masyarakat sipil yang cermat menggunakan era demokrasi sebagai saluran menyampaikan pendapat. *Kedua*, adalah buah dari persaingan pasar bebas yang membuat masyarakat rentan ditunggangi kepentingan kekuatan bisnis maupun aktor

politik lainnya untuk menguasai sumber-sumber produksi. Hal ini mengindikasikan dinamika sosial pasca Orde Baru memang berlangsung tanpa henti akibat dibukanya keran berdemokrasi. Persoalan ini dirasa sangat berat oleh para pelaku industri skala besar seperti minyak, gas, dan kelompok industri ekstraktif lainnya. Laporan SKK Migas 2015 juga memuat hal serupa, bahwa tantangan sosial menjadi hambatan terbesar yang dialami oleh seluruh bisnis produksi dan eksplorasi migas di seluruh wilayah Indonesia. Betapa tidak, hampir setiap industri mengemukakan hal seragam ketika dihadapkan dengan faktor eksternalitas yang penuh dengan ketidakpastian.

Tidak ada makan siang gratis bagi setiap industri yang mengharapkan hadirnya *social license to operate*. Aktor bisnis perlu merangkai suatu titik perjumpaan yang manis antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat (Savitz, 2006). Sayangnya hal ini tidak dikelola secara baik dan tidak menjadi instrumen penting dalam siklus produksi. Wajar jika sikap kritis masyarakat sipil terhadap aktivitas industri mulai mengakar. Semakin lama industri beraktivitas justru akan membuat ekspektasi masyarakat terhadap industri semakin tinggi. Tentu ini sangat bertolak belakang sehingga harus ada jalan tengah yang diambil sebagai komitmen moral perusahaan. Jalan tengah tersebut kerap disalahartikan oleh banyak pelaku bisnis, di satu sisi memberi di sisi lain tidak mengindahkan tanggung jawab lingkungan. Persoalan ini agaknya kian memanas ketika *civil society* terbentuk dengan baik karena pada prinsipnya *civilization* lahir dari serangkaian proses interaksi nilai dan kesamaan rasa. Ketika mereka merasakan ada

entitas yang mengganggu dan melenyapkan keharmonisan yang lahir sebelum fase Industri, sudah barang tentu masyarakat angkat bicara dengan berbagai saluran yang ada.

Dalam merangkai dinamika antaraktor di arena masyarakat industri, dalam banyak kajian seputar *anthropology, business and society*, sering dipergunakan istilah *community based organization* atau *civil society organization*. Termasuk dalam terminologi tersebut kelompok-kelompok kepentingan; seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koalisi Masyarakat, Himpunan atau Serikat Kerja, Kelompok Agama, Media dan Kelompok Pemuda. Keseluruhan entitas tersebut merupakan salah satu unsur pembentuk hadirnya kecerdasan dan kesadaran masyarakat sipil di wilayah industri. Dalam studi gerakan sosial, kecenderungan hadirnya sebuah pergerakan di masyarakat industri akan semakin kuat bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bahkan, berdasarkan beberapa fakta industrial belakang, hampir dapat dipastikan bahwa agresivitas industri selalu berdampak pada bermunculannya banyak gerakan sosial. Berdasarkan fenomena di Indonesia, salah satu entitas yang cukup aktif dalam menyoal persoalan industri adalah pemuda.

Tidak sulit rasanya untuk menemukan pemberitaan menyangkut pemuda dan industri. Di awal tahun 2016, pemuda di Aceh melakukan protes terhadap berlangsungnya aktivitas pabrik PT Lafarge Semen karena dinilai merusak lingkungan melalui pencemaran air. Sekelompok pemuda menutup aliran sungai dengan tanah di sana.¹ Di

¹ Zamzami, Daspriani Y. Kompas. 2016. 'Protes Pencemaran Pabrik Semen, pemuda Tutup Aliran Sungai dengan Tanah'.

Tuban berlangsung hal serupa, pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Ring I PT Semen Indonesia protes besar-besaran akibat ditutupnya kesempatan kerja bagi mereka.² Kejadian serupa juga ditemukan di Rembang, penolakan yang dilakukan pemuda terhadap dikeluarkannya izin operasi PT Semen Indonesia di sana oleh Pemerintah Daerah setempat.³ Tindakan penolakan bahkan telah mengarah pada pengrusakan. Hal ini menandakan izin beroperasi secara formal belum tentu akan mendatangkan izin secara sosial (*social licence to operate*), meski keabsahan hukum untuk beroperasi telah dijelaskan di dalam hitam di atas putih.

Serangkaian fakta yang berangkat dari ragam pemberitaan beberapa waktu terakhir telah menggambarkan kompleksitas persoalan industri dalam tinjauan sosiologis yang semakin lebar. Lebih-lebih saat mulai bermunculannya basis kekuatan sipil yang kritis terhadap kinerja lingkungan, hak asasi manusia, kesempatan bekerja, etika maupun isu kearifan lokal, meskipun telah banyak perusahaan yang mulai melibatkan diri dalam penciptaan *general welfare* di wilayah industrinya (May *et al.*, 2007). Fakta lain

<http://regional.kompas.com/read/2016/01/30/16061491/Protes.Pencemaran.Pabrik.Semen.Pemuda.Tutup.Aliran.Sungai.dengan.Tanah>. Diakses 10 April 2017.

² Fauzi, Ikhsan. Tribunnews Surabaya. 2015. 'Pemuda dari 10 Desa di Tuban Demo ke Pabrik PT Semen Indonesia'. <http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/08/pemuda-dari-10-desa-di-tuban-demo-ke-pabrik-pt-semen-indonesia>. Diakses 13 April 2017.

³ Fachrudin, Fachri. Kompas Nasional. 2017. 'SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir'. <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/20244191/sk.pencabutan.pabrik.semen.di.rembang.dianggap.multitafsir>. Diakses 17 Januari 2017.

yang menarik untuk diulas ialah tentang tingginya kepekaan dan potensi sosial pemuda untuk menuntut kebenaran yang sesuai dengan prinsip moralitasnya terhadap industri di wilayah tempat mereka hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa ada karakteristik yang berbeda antara pemuda di wilayah industri dengan pemuda yang hidup di wilayah yang tidak memiliki industri.

Metode

Penelitian ini ialah studi kasus di wilayah operasi salah satu industri semen di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Sebagai upaya untuk memperoleh sajian data yang kompleks tentang dinamika pemuda, dilakukan interview mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan perwakilan pemuda laki-laki maupun perempuan di wilayah operasi ring satu yang berusia 16 hingga 35 tahun. *Setting* wilayah ring satu dipusatkan pada enam desa yang memiliki dampak langsung dari aktivitas industri.

Adapun populasi pemuda yang kemudian dijadikan *purposive sampling* pada penelitian ini ialah mereka yang menjadi pengurus aktif Karang Taruna maupun kelompok pemuda lainnya dan yang berusia 16 sampai 30 tahun sebagaimana batasan yang dijelaskan dalam UU Kepemudaan. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan data lain di luar konteks kepemudaan, *interview* mendalam juga dilakukan kepada kelompok tani/ nelayan, aparat desa dan masyarakat ring satu yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kepentingan dan kekuatannya di dalam struktur masyarakat desa. Aktor lain di luar pemuda tersebut juga berperan sebagai subjek *triangulasi* untuk menambah

argumentasi dan menguji keabsahan data mengenai fenomena kepemudaan dan industri di lokasi penelitian.

Studi Terdahulu tentang Pemuda di Wilayah Industri

Identitas pemuda sebagai bagian otonom dalam struktur diri seorang manusia barangkali berbeda dengan konsep dan definisi yang selama ini dibangun oleh negara dan beberapa organisasi internasional. Hal ini terjadi karena konsep kepemudaan pada dasarnya erat kaitannya dengan perspektif dominan yang digunakan dalam melihat fakta seputar anak muda sehingga pen-*definisian* tunggal atas kata *pemuda* hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Aspek rentang usia, misalnya, antara WHO dan UU Kepemudaan saja terdapat perbedaan yang mencolok. Di satu sisi WHO memberikan batas usia 10 hingga 24 tahun, di sisi lain UU Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun. Perbedaan ini sangat bergantung pada kepentingan tertentu yang menengarai hadirnya ambang batas terhadap usia seseorang.

Di Indonesia kajian seputar pemuda sangat bergantung pada bidang yang jauh lebih luas dari kajian kepemudaan itu sendiri (Naafs & White, 2012: 90). Karena itu, penting bagi kita untuk mengangkat kembali kajian yang mengungkap definisi pemuda sebagai subjek utama dari berbagai penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sebagai subjek, unsur kepemudaan melekat dalam kondisi dan perubahan sosial yang terjadi. Bergesernya pola hidup komunal kepada sikap-sikap individualistis

misalnya, sangat memengaruhi perkembangan generasi muda hari ini (Mawardi & Hidayati, 2000). Pemuda dijelaskan sebagai individu yang dinamis, bergejolak dan cenderung optimis meski tidak pada kondisi stabil secara emosional (Abdullah, 1974: 6).

Definisi tersebut sangat memungkinkan pemuda selalu dihadapkan pada perubahan sosial dan budaya yang hadir di tengah-tengah mereka sehingga potret antargenerasi pada prinsipnya memiliki corak yang beragam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa setidaknya ada dua hakikat kepemudaan yang penting untuk dipahami. *Pertama*, bahwa perkembangan manusia ialah proses yang fragmentaris, tidak berkelanjutan, dan pada setiap fragmen memiliki arti masing-masing. *Kedua*, interaksi antara pemuda dan lingkungannya akan memiliki nilai tersendiri untuk mendukung dan menggerakkan kehidupan sosial. Dua hakikat kepemudaan ini memberikan gambaran penting dalam memetakan pemuda sebagai subjek yang tidak hanya praktik budaya, tetapi juga pencipta budaya (Jones dalam Naafs & White, 2012: 89). Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa perkembangan pemuda selalu tidak lepas dari konteks ruang dan waktu. Tempat ia hidup dan berkembang akan memberikan pengaruh signifikan terhadap watak yang dibangun. Tulisan ini mencoba mengerucutkan fenomena kepemudaan pada wilayah industri ekstraktif.

Kecenderungan yang menarik dari Indonesia ialah industri yang mengolah sumber daya alam yang mayoritas merupakan wilayah tempat hidup masyarakat perdesaan yang nilai-nilai kebersamaan, lokalitas, dan homogenitasnya masih terbilang kental (Roucek, S.J & Warren, L.R, 1984).

Karakteristik ini memperjelas komponen perubahan sosial yang terjadi pasca-transformasi menuju masyarakat industri. Pola kehidupan masyarakat yang lambat laun berubah secara tidak langsung menggeser tatanan modal sosial yang ada sehingga muncul sesuatu yang berbeda pada aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan narasi tentang perubahan konteks sosial politik dan budaya dari kajian sosiologi industri, terdapat tali penghubung yang dapat dikaitkan dengan salah satu entitas penting dalam masyarakat sipil, yakni pemuda. Bourdieu (1993) menjelaskan aspek kepemudaan sebagai sebuah hasil refleksi terhadap nilai-nilai sosial, politik, dan moral yang eksis di zamannya. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa secara sosiologis pemuda adalah entitas yang rentan melakukan konstruksi atas kondisi sosial yang ada sehingga setiap zaman akan melahirkan konstruksi yang berbeda-beda tentang pemuda.

Dijelaskan Wyn dan Woodman (2006), implikasi atas perubahan sosial, ekonomi dan budaya berikut proses transisi atas perubahan tersebut dialami secara beragam oleh masing-masing generasi. Karenanya, saat memetakan watak dan karakteristik pemuda tiap generasi barangkali akan ditemukan titik inkonsistensi satu sama lainnya. Sikap kritis terhadap industri yang ditampakkan oleh pemuda di wilayah industri di Indonesia saat ini sangat berbeda secara intensitas di masa Orde Baru. Setiap pemberitaan yang menempatkan kelompok pemuda sebagai pihak yang aktif menyampaikan narasi hak warga lokal telah menjadikan pemuda di wilayah industri menjadi salah satu aktor masyarakat sipil

yang patut diperhitungkan oleh pelaku bisnis.

Studi Seyfrit dan Hamilton (1992) mengenai dampak aktivitas industri tambang terhadap pemuda di lima belas desa di Northwest Arctic dan Bristo Bay menunjukkan terdapat karakter kepemudaan yang berbeda antara pemuda asli dan pemuda yang berasal dari keluarga pendatang. Kecenderungan yang paling umum tampak pada praktik sosial pemuda dalam aspek pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pekerjaan. Dalam hal ini, pemuda yang dilahirkan dari keluarga yang asli menempati wilayah industri akan lebih menutup diri untuk melakukan migrasi (kaitannya dengan aspek pendidikan dan pekerjaan) dibandingkan pemuda pendatang. Hal ini ditengarai oleh pemaknaan yang dibangun oleh generasi sebelum pemuda (orang tua), terutama yang berkaitan dengan konteks historis keberlangsungan aktivitas industri, seperti kepemilikan lahan dan eksistensi modal sosial pada periode sebelum industri.

Studi Bank Dunia tentang *social impact* aktivitas industri tambang di dua lokasi tambang PT Kaltim Prima Coal di Kutai Timur dan Bengalon Provinsi Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa sikap pemuda di lingkungan tambang terhadap perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh konstruksi yang dibangun oleh keluarga mereka (Dutt & Mahy, 2007). Selama industri tambang beroperasi besaran kontribusi yang telah diberikan kepada keluarga secara akumulatif dari masa lampau akan menentukan sikap pemuda terhadap industri. Kecenderungan lainnya pada pemuda lokal di wilayah industri ialah hadirnya kondisi kemiskinan ekstrem di tengah kekayaan industri dan deras arus kas di

sana. Hal tersebut terjadi karena *lack of financial capital* antara pemuda dengan aktor lain di wilayah industri. Oleh sebab itu, fenomena ini linear dengan semakin meningkatnya angka anak muda yang frustrasi lalu melarikan diri pada narkoba, aktivitas ilegal, perjudian, dan menjadi aktor yang mendesain konflik berkepanjangan dengan pihak perusahaan.

Temuan Bank Dunia ini memberikan gambaran bahwa konflik antara kaum muda dan industri pada dasarnya ialah persoalan struktural yang telah lama mengakar. Implikasinya ialah agresivitas pemuda terhadap industri akan terus menjadi tren sampai dengan industri berhenti beroperasi. Namun unsur ketidakpastian, dinamika, dan perubahan sosial dapat berakibat semakin meningkatnya kualitas konflik dan beragamnya tuntutan yang “diperjuangkan” kelompok pemuda di wilayah industri.

Potret Pemuda di Dalam Kehidupan Desa di Wilayah Industri Kabupaten Tuban

Golongan usia 16-35 tahun di enam desa wilayah industri di Kabupaten Tuban yang menjadi area studi menggeluti empat jenis aktivitas, sebagai pelajar, pekerja, wirausahawan, dan penganggur musiman. Meski terkotakkan ke dalam aktivitas yang beragam, kelompok pemuda mampu membangun pola komunikasi intensif karena memiliki kecenderungan pola permukiman yang tidak terpisah jauh. Mereka hidup dalam kondisi sosial yang guyub meski terdapat corak modernitas di dalamnya. Mayoritas pemuda memiliki jenjang pendidikan menengah (setara SMA). Di antara mereka yang lulus SMA ada yang menggunakan jalur Paket C.

Salah satu media yang dapat menyediakan ruang komunikasi bagi pemuda desa di sana ialah organisasi Karang Taruna (KT). Organisasi tersebut tidak dibangun atas dasar profesionalitas pengelolaan, tetapi berhasil menjadi tempat yang cukup efektif untuk melakukan pertukaran informasi, ide, dan gagasan kaum muda di sana. Kecenderungan umum bagi pemuda yang berpartisipasi dalam kepengurusan KT ialah aktif mengkritisi kinerja aparat desa dan mengawal aktivitas industri di sana, meskipun di antara mereka juga terdapat anggota struktur pemerintahan desa maupun yang bekerja sebagai buruh di industri yang dikritisi kehadirannya.

Menjadi catatan penting, meskipun secara informal dapat menjadi titik pertemuan efektif antarpemuda di tingkat desa, organisasi KT tidak didukung oleh tata kelola keorganisasian yang baik. Secara formal hampir tidak terdapat pelaksanaan program kerja yang terstruktur. Hal-hal semacam ini kalah populer dengan animo mereka untuk ikut serta dalam demonstrasi, melakukan kritik atas jalannya pemerintahan desa, dan kegiatan kultural lainnya. Fenomena ini umumnya tampak pada pemuda laki-laki, sementara pemuda perempuan lebih memilih untuk tidak terlibat dalam beberapa aksi demonstrasi. Dalam beberapa kali interview pemuda laki-laki mengungkapkan bahwa Karang Taruna diprioritaskan hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada perusahaan sehingga diwajibkan ketika unsur vital dalam organisasinya belum dibenahi.

Karang Taruna hadir sebagai wadah bagi kelompok muda untuk merespons isu tertentu yang berkaitan dengan dua hal umum, yaitu pelaksanaan pembangunan desa

dan aspirasi terhadap industri. Semangat untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan organisasi pemuda yang baik dan profesional justru datang dari kelompok pemuda perempuan. Namun, mereka kalah secara rasio oleh laki-laki yang menjadi pengurus aktif sehingga hal ini belum dapat dibenahi. Tantangan institusi pemuda di tingkat desa berada pada titik mengubah kultur organisasi agar dapat melaksanakan tugas kepemudaan secara terstruktur dan profesional. Kelemahan ini dirasakan oleh aparat desa yang menganggap pemuda hanya mampu mengkritik penyelenggaraan pembangunan desa tapi tidak mampu berbenah secara organisasional. Salah satu isu yang acap kali dikritisi ialah persoalan transparansi pengelolaan keuangan Karang Taruna. Aspek ini dinilai buruk oleh pemerintah desa maupun tokoh masyarakat dan sekaligus memberikan citra negatif pemuda di mata masyarakat.

Berbeda halnya dengan masyarakat golongan pemuda yang tidak termasuk ke dalam pengurus aktif KT, mereka masih menilai KT sebagai organisasi yang dipercaya. Hal paling mendasar ialah ketika terdapat seruan untuk melakukan demonstrasi terhadap pihak industri, mayoritas pemuda ikut serta di dalam barisan massa meskipun isu yang disuarakan bukan merupakan sesuatu yang baru. Bahkan tak jarang aksi yang diserukan tersebut berbuntut pada kerusakan alat produksi yang mengakibatkan terhentinya aktivitas bisnis. Keikutsertaan dalam setiap aksi tersebut terjadi tanpa unsur keterpaksaan, bahkan beberapa keluarga yang diwawancarai menuturkan bahwa ia mendukung penuh apa yang dilakukan anaknya, terlibat dalam barisan massa

pemuda untuk melakukan demonstrasi terhadap aktivitas industri. Namun, perlu digaris bawahi, pemuda yang dimaksud ialah pemuda laki-laki. Ada pun pemuda perempuan cenderung membatasi diri mereka untuk tidak banyak terlibat dalam hal-hal seperti ini.

Perbedaan paling mencuat antara pemuda laki-laki dan perempuan berkaitan dengan institusi kepemudaan ialah persoalan bagaimana mereka memaknai organisasi KT. Pemuda laki-laki cenderung melihat organisasi ini sebagai ruang sosial bagi anak muda untuk menyuarkan aspirasinya baik kepada pemerintah maupun perusahaan. Namun, hal ini mengenyampingkan kebutuhan pengembangan organisasi secara profesional. Sementara anak muda perempuan cenderung melihat KT sebagai organisasi di tingkat desa yang dapat menjadi fasilitator bagi terlaksananya program-program sosial bagi masyarakat. Misalnya anak muda yang memiliki latar belakang pendidikan kebidanan, ia lebih memilih untuk menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan. Namun, partisipasi pemuda pada kegiatan seperti ini didominasi oleh anak muda perempuan saja.

Sebagai sebuah temuan yang barangkali jarang ditemui di wilayah lain, peranan sosial politik kepemudaan di sekitar wilayah industri tersebar di masing-masing struktur organisasi formal tingkat desa. Hal ini tampak dari hadirnya keterwakilan pemuda di struktur Pemerintahan Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Hal ini terjadi karena adanya mekanisme baru penyeleksian aparat desa yang membuka kesempatan kepada masyarakat lokal untuk turut berpartisipasi. Cara ini belakangan dijadikan

sebagai salah satu saluran baru bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa di sana. Tidak sedikit pemuda yang menjadi informan mengaku siap meninggalkan pekerjaan mereka sebagai buruh di industri untuk menjadi aparat desa. Ruang partisipasi ini sayangnya tidak dipenuhi dengan kapasitas yang mumpuni dalam pelaksanaan tugas bagi anak muda yang mengisi posisi penting di struktur pemerintahan desa. Di beberapa desa yang diteliti bahkan anak muda yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan desa tidak pernah hadir di jam kerja. Tidak hanya itu, ia tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Begitu juga di unsur pengawas (BPD) hal yang sama terjadi. Kelompok anak muda yang masuk dalam struktur BPD tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mengawal proses pemerintahan.

Fakta ini kemudian memperburuk citra anak muda di mata masyarakat yang peduli terhadap pembangunan desa. Di satu sisi pemuda getol menyampaikan kritik, di sisi lain tidak dapat menjalankan tugas sesuai mandat yang telah diberikan kepada pemerintahan desa. Hal ini sekaligus menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak desa untuk melibatkan pemuda dalam setiap usaha pembangunan desa. Potret ini memberikan gambaran bahwa pemuda ialah mereka yang memiliki semangat tinggi untuk diakui sebagai aktor penting di dalam masyarakat, tetapi tidak memiliki kapasitas adaptasi yang matang di dalam menjalankan peran kemasyarakatan. Kapasitas adaptasi ini sejalan dengan ketiadaan pengalaman bagi anak muda di desa yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada (Abdullah, 1974).

Pemuda Memaknai Aktivitas Industri

Perubahan mendasar menuju wilayah industri dialami Kabupaten Tuban dari tahun 1988 hingga 1999. Proses masuk hingga berjalannya kegiatan produksi di sana dikawal ketat oleh negara dengan menggunakan kekuatan militer yang dimiliki, mulai dari pembebasan lahan hingga izin beroperasi. Negara memobilisasi kekuatan militer dan kekuatan birokrasi untuk memuluskan laju industri meski cukup sulit mendapat dukungan rakyat kala itu. Hal inilah yang kemudian melahirkan basis gerakan perlawanan masyarakat kepada misi pembangunan industri yang cenderung *state oriented*. Beberapa informan menyebutkan mekanisme pembebasan lahan yang dilakukan secara paksa membuat masyarakat tidak berdaya berhadapan dengan misi industri.

Semangat pertumbuhan ekonomi yang diilhami pemerintahan Orde Baru memberi banyak dampak terhadap pesatnya laju industri hari ini. Namun, geliat pembangunan di banyak pusat-pusat industri kerap melupakan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan di tahap perencanaannya dan menyimpan catatan sejarah yang penuh kontroversi. Oleh karena rezim Orba cenderung melumrahkan segala upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, jalan yang acap ditempuh ialah upaya represif yang sifatnya memaksa. Mochtar (2005) menyebut hal ini sebagai strategi politik mobilisasi Orde Baru. Ia menjelaskan bahwa model pembangunan industri padat modal di era Orde Baru ialah dengan mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Cara-cara yang ditempuh tidak jarang menggunakan pendekatan militeristik dan bertentangan dengan keinginan masyarakat.

Narasi ini kemudian direproduksi oleh generasi ke generasi hingga hari ini sehingga telah menjadi pemahaman umum bagi pemuda di wilayah industri bahwa generasi terdahulu (yang merupakan keluarga mereka), adalah mereka yang kalah berhadapan dengan rezim developmentalis ala orba yang disimbolkan melalui pabrik-pabrik. Implikasi dari terbangunnya pemahaman tersebut ialah hadirnya upaya terorganisir untuk menuntut hak kesejahteraan kepada industri. Salah satu fakta umum yang kemudian muncul sebagai buntut dari terbentuknya watak kepemudaan oleh cerita dan pengalaman masa lampau ialah tumbuh dan berkembangnya organisasi Karang Taruna di tiap-tiap Desa. Organisasi ini sekaligus sebagai alat utama yang bekerja secara institusional untuk mengawal laju perkembangan industri.

Meski relasi antara pemuda dengan industri dibangun dari sikap kritis, tetapi pada prinsipnya pemuda tidak mendesain perlawanan untuk menghentikan laju industri. Persoalan ini lazim terjadi dalam bisnis pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena lonjakan ekspektasi masyarakat dari waktu ke waktu dapat dipastikan akan bertolak belakang dengan kapasitas produksi. Sudah barang tentu, industri semen tidak memiliki jaminan perihwal ketersediaan sumber produksi sehingga semakin lama proses industri berlangsung maka volume bahan baku industri akan semakin menipis. Hal tersebut sepenuhnya berbeda dengan ekspektasi yang muncul dari kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat. Bagaimana industri mengelola ekspektasi tersebut akan sangat bergantung pada posisi dan perannya di

dalam masyarakat desa. Intinya, pemuda dan industri memiliki derajat kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Pemuda sebagai aktor lokal menilai praktik bisnis tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat (termasuk kebutuhan kepemudaan) sementara industri sebagai aktor bisnis membutuhkan *social license to operate* dari masyarakat tempat mereka beroperasi untuk kepentingan keberlanjutan bisnis.

Kesimpulan

Dengan melihat fenomena perdesaan di wilayah studi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pemuda di sana ialah bagian dari masyarakat yang kritis terhadap laju perkembangan industri di tempat mereka hidup. Sikap kritis ini dibangun dan dibesarkan dari konstruksi yang dibangun oleh generasi sebelumnya tentang kondisi desa sebelum industri, saat industri mulai beroperasi, dan hari ini. Karena itu, menjadi wajar dalam sudut pandang kepemudaan, industri adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di wilayah produksi dengan berbagai macam narasi “hak” yang menjadi temuan dalam kajian ini.

Studi Thomson dan Boutilier (2011), menggambarkan empat isu penting di dalam *social license to operate*. *Pertama, economic legitimacy*. Isu ini menjabarkan keberadaan dampak ekonomi yang dapat dirasakan pemuda dari aktivitas industri. *Kedua, sociopolitical legitimacy*. Legitimasi yang melihat sejauh mana pemuda melihat cara-cara yang ditempuh industri untuk menghormati hidup masyarakat lokal, menjunjung

tinggi kearifan lokal yang ada, dan memahami peran sosial industri bagi masyarakat di sekitar wilayah bisnisnya. *Ketiga, interactional trust*. Aspek ini dititikberatkan pada kapasitas industri ekstraktif untuk mendengar, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi. *Keempat, institutional trust*. Faktor ini berperan untuk melihat pemaknaan pemuda mengenai sejauh mana relasi yang terbangun antara *stakeholder* (termasuk anak muda) dan industri merupakan hubungan relasional yang saling menjunjung tinggi kepentingan masing-masing.

Pada faktor pertama (*economic legitimacy*), pemuda yang hidup dan menetap di wilayah ring I perusahaan memaknai perusahaan sebagai mitra masyarakat yang seharusnya memberikan kesempatan khusus kepada warga lokal untuk menjadi bagian dari industri. Argumentasi ini muncul disebabkan oleh alasan penggunaan kekayaan alam masyarakat untuk kepentingan bisnis, tetapi meminggirkan masyarakat sebab jauh sebelum industri beroperasi, desa tempat ia tumbuh adalah wilayah yang serba berkecukupan lewat aktivitas pertanian penduduknya. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, semakin besarnya hak guna atas lahan yang dimiliki perusahaan, hal tersebut semakin lenyap. Dengan pergeseran ini, perusahaan dinilai menjadi pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencari alternatif pekerjaan kepada generasi selanjutnya. Keengganan industri untuk menjawab suara masyarakat ini menyebabkan narasi ini selalu berulang.

Pemuda mengakui bahwa untuk menjadi bagian dari industri skala besar,

kapasitas dan tingkat pendidikan akan sangat berpengaruh. Namun, pandangan mereka terhadap industri semen yang beroperasi di tengah-tengah kehidupan mereka sangat berbeda. Pemuda melihat keberadaan industri di wilayah tempat ia hidup dan menetap ialah keunggulan tersendiri sehingga mereka akan tetap dibutuhkan meski tidak memiliki pendidikan tinggi. Hal ini kemudian mendorong banyak anak muda untuk terlibat sebagai mitra kerja perusahaan pada perusahaan lain yang lebih kecil, tetapi menyediakan jasa inti pada industri semen. Bidang kerja yang digeluti seperti sebagai *security* wilayah tambang bagi laki-laki dan administrasi bagi perempuan. Namun, perlu menjadi catatan, mereka terlibat di perusahaan bukan sebagai pegawai, melainkan sebagai mitra kerja dari perusahaan kecil (biasanya berbasis lokal).

Pada aspek kedua, anak muda di enam desa yang menjadi wilayah studi melihat pada konteks ideal industri semen yang beroperasi di wilayah mereka ialah pendatang yang seharusnya memiliki kepekaan terhadap pola kehidupan masyarakat lokal dengan menciptakan *corporate culture* yang sejalan dengan budaya masyarakat. Agaknya hal ini menjadi catatan tersendiri lebih-lebih bagi anak muda. Pemuda yang tergabung dalam aliansi pemuda wilayah ring I memberikan jawaban yang hampir seragam, bahwa industri tidak mampu memainkan peranan sosial dengan masyarakat lokal. Salah satu pemuda yang di wilayah ring satu, misalnya, mengatakan “Perusahaan tidak tahu cara bermasyarakat yang benar, makanya sesekali harus ditegur”.

Pada aspek *interactional trust*, anak muda menempatkan industri sebagai pihak

yang seharusnya *intens* melakukan komunikasi dengan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap kebijakan dan rencana industri berkenaan dengan lingkungan atau memiliki dampak sosial bagi masyarakat. Dalam hal ini, anak muda melihat industri memiliki kekuatan untuk menahan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksi semen, tetapi perusahaan tidak melakukan itu. Adapun yang paling mendapat sorotan ialah polusi lingkungan yang ditimbulkan dan mengganggu kesehatan, getaran pemecahan batu yang merusak rumah-rumah warga dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi tanaman mengingat orangtua mereka mayoritas berprofesi sebagai petani. Perusahaan dinilai anak muda di enam desa tidak mampu mengelola dampak secara baik, juga tidak mengkomunikasikan dampak tersebut secara baik kepada masyarakat.

Kemudian mengenai aspek keempat, *institutional trust*: pemuda memaknai relasi masyarakat dan perusahaan yang selama ini dibangun hanyalah berdasarkan kepentingan perusahaan saja. Mereka memberikan beberapa contoh, salah satunya tentang rusaknya rumah warga tersebut sebab getaran yang tidak mendapat ganti rugi oleh pihak perusahaan. Kasus ini bagi pemuda menampakkan industri sebagai aktor yang tidak dapat dipercayai. Pemuda menganggap hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan industri agar dapat dinilai sebagai perusahaan yang ramah sosial dan lingkungan. Kecamatan mengenai hal ini selalu dilakukan pemuda dalam setiap forum-forum terutama yang mengikutsertakan perusahaan.

Berdasarkan pemaknaan yang anak muda simpulkan terhadap aktivitas bisnis industri ekstraktif di wilayah mereka, pemuda cenderung menempatkan perusahaan sebagai aktor yang perlu dikritik melalui jalur-jalur yang tidak populer, seperti demonstrasi maupun penghentian paksa alat-alat produksi. Hal ini pada awalnya hanya dapat dilakukan oleh satu Karang Taruna desa, tetapi atas dasar kesamaan kondisi yang terdampak akibat aktivitas perusahaan mereka menciptakan pola jejaring baru dengan mendirikan Aliansi Karang Taruna Ring I. Anak muda di sana membentuk satu tim pengawasan tersendiri untuk melihat kinerja aktivitas bisnis dan konsisten untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada perusahaan melalui aliansi tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan ada tiga ragam tuntutan hak yang selama ini diklaim anak muda yang hidup di wilayah ring satu perusahaan sebagai tuntutan masyarakat, yaitu hak untuk memperoleh kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat untuk hidup, dan hak untuk memperoleh dampak aktivitas bisnis terhadap pembangunan desa.

Mengenai persoalan pertama (ketenagakerjaan) pemuda melihat ini sebagai aspek paling krusial dan menyangkut langsung kehidupan kepemudaan. Berdasarkan golongan usia, mereka ialah golongan yang ditunggu oleh keluarganya untuk memperoleh pekerjaan dan dapat menghidupi diri. Sementara mereka melihat dan mamahami bahwa di tempat mereka hidup, berkembang dan beroperasi satu industri besar yang produknya dibutuhkan. Di lain hal sejak kecil mereka dan keluarganya hanya terkena dampak dari aktivitas industri saja sehingga muncul tun-

tutan dari pemuda untuk mempekerjakan pemuda lokal sebagai pegawai tetap pada industri tersebut. Bagi perusahaan tentu hal ini sulit untuk dipenuhi, mengingat kapasitas dan kompetensi yang dimiliki adalah mutlak diperlukan. Selain karena selektivitas tadi, menurunnya kinerja produksi justru membuat perusahaan harus bersedia melakukan pengurangan tenaga kerja. Bagi pemuda hal ini sangat memenuhi kewajiban sebuah tuntutan.

Kedua, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Bertahun-tahun anak muda dibesarkan berdekatan dengan aktivitas pabrik, dan mereka meyakini bahwa aspek lingkungan ini ialah hal yang acap kali tidak diindahkan oleh perusahaan. Hal inilah kemudian yang menengarai anak muda di wilayah industri masih terus mewacanakan pemenuhan kebutuhan lingkungan yang sehat sebagai tanggung jawab industri. Hal ini telah menjadi isu yang sangat sensitif bagi perusahaan dan masyarakat.

Ketiga ialah hak untuk memperoleh dampak dari aktivitas industri terhadap pembangunan desa. Aspek ketiga ini memperlihatkan bahwa anak muda pada prinsipnya memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan desa dan mereka melihat perusahaan atau industri merupakan mitra yang dapat memberikan hal tersebut.

Ketiga narasi hak tersebut disuarakan dalam berbagai demonstrasi. Aktivitas ini begitu cepat menyedot perhatian dan keterlibatan anak muda lain (yang berjenis kelamin laki-laki). Selain itu, getolnya anak muda menyuarakan hal ini dengan beberapa jalur komunikasi telah menjadikan hal ini

muncul sebagai isu yang memiliki intensitas yang tinggi di beberapa media.

Daftar Rujukan

- Abdullah Taufik. 1978. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Bourdieu, Pierre. (1993). *Sociology in Question*. London: Sage.
- Costanza, Jennifer N. (2016). Mining Conflict and the Politics of Obtaining a Social License: Insight from Guatemala. *World Development*, (79), 97–113.
- Dutt, K. Lahiri & Petra Mahy. (2007). *Impact of Mining on Women and Youth in Indonesia: Two Maining Location*. ANU Enterprise: Canberra.
- Zamzami, Daspriani Y. Kompas (2016). *Protes Pencemaran Pabrik Semen, pemuda Tutup Aliran Sungai dengan Tanah*.
<http://regional.kompas.com/read/2016/01/30/16061491/Protes.Pencemaran.Pabrik.Semen.Pemuda.Tutup.Aliran.Sungai.dengan.Tanah>. Diakses 10 April 2017.
- Fachrudin, Fachri. Kompas Nasional (2017). 'SK Pencabutan Pabrik Semen di Rembang Dianggap Multitafsir'.
<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/20244191/sk.pencabutan.pabrik.semen.di.rembang.dianggap.multitafsir>. Diakses 17 Januari 2017.
- Mawardi & Nur Hidayati (2000). *Ilmu Alam Dasar-Ilmu Sosial Dasar-Ilmu Budaya Dasar BD*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- May, Steve, George Cheney, & Juliet Roper (Eds.). (2007). *The Debate over Corporate Social Responsibility*. Oxford: Oxford University Press.
- Mochtar, Hilmy. (2005). *Politik Lokal Dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Naafs, Suzanne & Ben White. (2012). Generasi Antara Refleksi tentang Sudi Pemuda di Antara. *Jurnal Pemuda UGM*, 89-106.
- Roucek, S.J & Warren, L.R, 1984. Pengantar Sosiologi. Bina Aksara, Jakarta.
- Savitz, Andrew W. (2006). *The Triple Bottom Line*. New Jersey: John Wiley & Sons. Inc.
- Seyfrit, Carole L. & Lawrence C. Hamilton. (1992). Social Impacts of Resource Development on Archtic Adolescents. *Arctic Research of The United States*, 6(Fall), pp. 57-61.
- Thomson, Ian & Boutilier, R. G. (2011). Social License to Operate. In P. Darling (Ed.) *SME Mining Engineering Handbook* (pp. 1779-1796). Littleton, CO: Society for Mining, Metallurgy and Exploration.
- Fauzi, Ikhsan. Tribunnews Surabaya (2015). *Pemuda dari 10 Desa di Tuban Demo ke Pabrik PT Semen Indonesia*.
<http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/08/pemuda-dari-10-desa-di-tuban-demo-ke-pabrik-pt-semen-indonesia>. Diakses 13 April 2017.
- Wyn, Johanna & Dan Woodman. (2006). Generation, Youth, and Social Change in Australia. *Journal of Youth Studies*, 9 (5), 495-514.

PEMUDA, IDENTITAS, DAN RESILIENSI KOMUNAL: CATATAN ATAS TRANSFORMASI SOSIAL DI PERIURBAN BANDUNG

Angga Dwiartama

Pengajar di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung
dwiartama@sith.itb.ac.id

Tatang Suheri

*Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Universitas Komputer Indonesia*

Abstract

This article is an ethnographic record of an engagement with a periurban community in the northern part of Bandung, West Java. In analyzing the way in which youth organization movement is able to alleviate hardship in the community, this article uses the community resilience theoretical framework as introduced by Berkes and Ross (2013), in which resilience is defined as the ability of a community to bounce back from shocks and crises. Whereby many marginal communities in the urban areas are faced with challenges to escape from poverty trap and culture shocks, this article aims to elaborate on some of the components of community resilience that may help these communities, and particularly the youth, to transform their livelihood towards a better condition.

Keywords: *Social resilience, Vulnerability, Transformation, Marginal community, Bandung*

Abstrak

Tulisan ini merupakan catatan etnografis penulis dalam mendampingi masyarakat periurban di sisi utara kota Bandung, Jawa Barat. Di dalam menganalisis bagaimana gerakan organisasi pemuda mampu mengangkat masyarakat dari kesulitan, tulisan ini menggunakan kerangka teoretis resiliensi komunitas dari Berkes dan Ross (2013). Dalam hal ini, resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dari gangguan dan krisis ketika masyarakat marjinal di banyak tempat di daerah perkotaan mengalami kesulitan untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan gegar budaya. Tulisan ini bermaksud

menunjukkan beberapa komponen resiliensi yang membantu masyarakat dan pemuda bertransformasi ke arah yang lebih baik dari kondisi semula.

Kata kunci: Resiliensi sosial, Kerentanan, Transformasi, Masyarakat marjinal, Bandung

Pendahuluan

Kampung Sekepicung adalah wilayah permukiman dari sekitar 2.820 jiwa yang dalam empat dasawarsa terakhir terhimpit oleh pesatnya pembangunan perumahan mewah, lapangan golf, dan café di wilayah Dago atas. Dalam hal ini, transformasi dari masyarakat agraris ke kehidupan kelas buruh di balik alih fungsi dan kepemilikan lahan berpengaruh terhadap meningkatnya kerentanan masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun 2012, sebuah organisasi masyarakat, PASSER, yang dimotori oleh sepasang suami-istri berusia muda, dibangun sebagai respons terhadap permasalahan tersebut. Dalam lima tahun sejak organisasi ini berdiri, berbagai upaya telah dijalankan untuk membangun kembali identitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berhasil menarik berbagai pihak eksternal untuk turut terlibat.

Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tak terkendali acapkali berdampak pada terdesaknya kehidupan di kantong-kantong masyarakat di daerah transisi antara kota dan desa, baik dalam kaitannya dengan kondisi ekologis maupun sosial-budaya. Berbagai penelitian tentang perencanaan kota menguatkan pernyataan ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Elhadary et. al. (2013) tentang disrupti aktivitas pertanian, ataupun Vij (2014) tentang berbagai isu sosial yang saling berkaitan.

Daerah periurban yang merepresentasikan zona transisi kota-desa menun-

juukkan suatu identitas baru yang berbeda dengan kota ataupun desa secara terpisah. Sebagaimana diulas oleh Simon (2008), Asia Tenggara khususnya menampilkan wajah yang unik dari daerah transisi ini, di mana lapangan golf bisa dibangun berdampingan dengan perkampungan kumuh. Hal ini juga telah menjadi pemandangan yang tidak asing di kota Bandung.

Fenomena yang menjadi konsekuensi dari urbanisasi di zona transisi ini adalah kerentanan sosial di tengah masyarakat terpinggirkan di daerah tersebut (Vij & Narain, 2016). Konsep kerentanan banyak diangkat di dalam bidang ilmu kebencanaan (*cyndinics*) (Adger, 1999; 2006), ketika masyarakat yang memiliki akses yang terbatas pada sumber daya dan tingkat eksposur yang tinggi terhadap sumber bencana (banjir, perubahan iklim, dsb.) akan cenderung memiliki kerentanan sosial yang tinggi pula. Menurut kajian tersebut masyarakat periurban yang terpinggirkan menerima setidaknya dua dimensi dampak, ekologis dan sosial, yang keduanya saling memperburuk satu sama lain. Sebagai contoh, Adger (1999) mengilustrasikan bagaimana petambak ikan di Vietnam menjadi sangat rentan terhadap angin laut yang memporakporandakan tambak mereka, tetapi juga menjadi terikat pada lahan tersebut karena mereka kehilangan akses terhadap lokasi dan sumber daya lain yang lebih menjanjikan.

Telah menjadi catatan di banyak penelitian (Berkes, 2007; Adger, 2000) bahwa konsep kerentanan berdiri berdampingan dengan resiliensi. Resiliensi sosial didefinisikan sebagai kemampuan suatu masyarakat untuk menerima gangguan (krisis, bencana, atau guncangan) tanpa mengubah struktur, fungsi, dan mekanisme umpan balik yang ada di masyarakat tersebut (Adger, 2000). Dengan kata lain, resiliensi sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bertahan (dan beradaptasi) dari gangguan dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Resiliensi berhubungan dengan kapasitas individu dan masyarakat dalam mengorganisasi diri dan menjadi agen di dalam mengawal perubahan agar dampak dari perubahan tersebut dapat diminimalisasi (Berkes & Ross, 2013). Dalam kaitannya dengan masyarakat terpinggirkan di daerah periurban, artikel ini bermaksud mengeksplorasi bagaimana suatu masyarakat mampu membangun resiliensinya di tengah pembangunan dan bagaimana pemuda¹ berperan sebagai agen di dalam resiliensi tersebut. Untuk itu, artikel ini menggunakan catatan etnografis penulis di dalam mendampingi pemuda dan masyarakat di satu kampung di sisi utara Bandung, Jawa Barat, yang bernama Sekepicung.

Artikel ini dibagi ke dalam empat bagian. Pada bagian pertama, dipaparkan pendalaman atas kerangka teoretis yang digunakan sebagaimana diulas singkat di Pendahuluan. Bagian kedua, berisi gam-

¹ Di dalam artikel ini, kata 'pemuda' merujuk baik pada laki-laki maupun perempuan muda, kecuali disebutkan sejak awal. Pemuda sendiri tidak didefinisikan berdasarkan rentang umur, tetapi mengacu pada pandangan organisasi masyarakat di Sekepicung itu sendiri. Hal ini lebih lanjut dibahas di bagian Diskusi.

baran metodologi yang digunakan dengan titik tekan pada performativitas dan posisionalitas penulis di dalam terbangunnya pemahaman atas resiliensi masyarakat kampung Sekepicung. Pada bagian ketiga dideskripsikan secara mendalam studi empiris tentang kampung Sekepicung, yang kemudian direfleksikan ke dalam kerangka teoretis resiliensi komunitas di bagian keempat. Artikel ini menekankan pada peran pemuda di dalam membangun beberapa karakteristik masyarakat yang mendukung terkuatkannya resiliensi di kampung Sekepicung, sebagai sebuah bahan pembelajaran bagi kawasan periurban lainnya di Indonesia.

Kerangka Teoretis

Resiliensi Komunitas dan Transformasi Sosial

Resiliensi adalah konsep yang kini menjadi *buzzword* di banyak tulisan-tulisan tentang keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat dan perencanaan wilayah (Gotham & Campanella, 2010). Di sisi lain, definisi dari resiliensi masih sangat luas dan penuh perdebatan (Berkes & Ross, 2013; Dwiartama, 2016), misalnya antara pendekatan resiliensi ekologi dan resiliensi sosial. Di awal tahun 2000-an, dua kubu pemikiran tentang resiliensi ini bergabung di satu kelompok kajian besar yang disebut 'cara berpikirm resiliensi' (*resilience thinking*) (Dwiartama, 2016). Kelompok kajian ini melihat bahwa resiliensi sistem ekologi tidak dapat dipisahkan dari resiliensi sosial. Kompleks sistem ekologi-sosial menjadi satu unit analisis resiliensi, di mana faktor-faktor penentu resiliensinya tidak lagi

sebatas karakteristik fisik (keanekaragaman hayati, kompleksitas ekosistem, dsb.) atau sosial (kepemimpinan, sikap positif), tetapi gabungan dari keduanya. Berkes dan Ross (2013) membuat suatu ulasan menyeluruh tentang riset-riset di kedua kubu resiliensi

dan menyimpulkan bahwa di semua kasus yang dibahas, setidaknya terdapat karakteristik yang menjamin bahwa resiliensi masyarakat tetap terjaga, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Masyarakat yang Menjamin Terbangunnya Resiliensi Komunitas

Ikatan orang-tempat	Rasa terikat antara masyarakat dan tempat tinggalnya, baik secara fisik maupun simbolik
Infrastruktur komunitas	Kondisi fisik yang mendukung terhubungnya anggota komunitas (ruang bersama, akses jalan, air bersih, dsb.)
Sikap pandang positif	Cara pandang di antara anggota komunitas bahwa segala gangguan dapat diatasi
Kepemimpinan	Peran pemimpin dalam mendampingi anggotanya di saat krisis
Nilai dan kepercayaan	Tata nilai yang terjaga baik dan menjadi pendorong
Pengetahuan, keterampilan dan proses belajar	Sumber-sumber pengetahuan/keterampilan dan diseminasinya di antara anggota masyarakat
Tata kelola aktif	Keterlibatan semua bentuk pemerintahan, baik formal maupun informal
Jejaring sosial	Ikatan di antara anggota komunitas ataupun antara komunitas dan entitas eksternal lainnya
Ekonomi beragam dan inovatif	Berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang tidak mengandalkan pada satu sumber saja; meningkatkan nilai tambah berdasarkan potensi lokal

Sumber: Berkes & Ross (2013)

Berkes dan Ross (2013) menekankan resiliensi pada kemampuan masyarakat sebagai satu sistem untuk mengorganisasikan dirinya sehingga gangguan dapat diserap tanpa mengubah konfigurasi masyarakat secara terlalu mendasar. Di sisi lain, karakteristik masyarakat sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 juga berujung pada agensia, yaitu kemampuan masyarakat atau individu di dalamnya untuk melakukan perubahan. Agensia ini berkaitan erat dengan transformasi di dalam masyarakat. Karenanya, menjadi penting untuk melihat

bahwa di dalam resiliensi akan terdapat transformasi. Gotham dan Campanella (2010) ataupun Dwiartama (2017) menyebutnya sebagai resiliensi transformatif, dan ini menjadi kunci bagi suatu proses resiliensi yang baik dan progresif.

Pemuda dan Agen Transformasi

Kerangka teoretis di atas digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat kampung Sekepicung menghadapi tantangan utamanya, yaitu tekanan ekologis dan sosial-budaya dari pembangunan yang tak terkontrol dari zona transisi kota-desa di sisi utara

Bandung. Di dalam menggunakan kerangka teoretis ini, penulis akan menunjukkan bahwa agensia yang dimaksud terletak di tangan pemuda. Pemuda memiliki peran yang vital di dalam membangun resiliensi dari sembilan komponen karakteristik pada Tabel 1, sekaligus juga mengawal transformasi sosial yang menjamin resiliensi tersebut terjadi. Meskipun demikian, pemuda bukanlah sesuatu yang homogen (Atal, 2005; Furlong, 2012); di dalam pemuda terdapat struktur dan dinamika yang berkaitan dengan gender, usia, dan kelas – sesuatu yang juga akan dibahas pada bagian studi empiris artikel ini.

Hal yang kemudian perlu digarisbawahi adalah definisi pemuda. Di dalam dokumen UNESCO, Yogesh Atal (2005) memaparkan definisi pemuda sebagai kategori masyarakat yang berada di dalam masa transisi antara anak-anak dan dewasa, masa ketika anggota masyarakat ini membangun kemandirian dan kesadaran akan hubungannya dengan anggota yang lebih luas. Pemuda memiliki makna yang lebih luas dari remaja, meskipun secara statistik rentang umur sering digunakan sebagai pembatas seseorang dikatakan pemuda. Sebagai contoh, Indonesia menerapkan definisi pemuda di dalam keanggotaan Karang Taruna dalam rentang umur 13-45 tahun (Permensos 77/ Huk/ 2010), sementara UNESCO menetapkan rentang 15-24 tahun (Atal, 2005).

Oleh karena pemuda pada dasarnya adalah kategori sosiologis, baik batasan maupun karakteristik pemuda menjadi berbeda di setiap tempat dan waktu. Sebagaimana ditegaskan oleh Furlong (2012), pemuda adalah konstruksi sosial yang sama

sekali tidak berhubungan dengan karakteristik biologis. Dengan arah kajian ilmu sosial tentang pemuda yang difokuskan pada transisi atau pun subkultur pemuda, memahami pemuda dan dinamikanya dapat menjadi jendela dalam memahami proses perubahan sosial dan ekonomi di suatu masyarakat (Furlong, 2012: 5). Pemuda, dalam hal ini, dapat menjadi agen transformasi sosial dan resiliensi komunitas.

Metodologi

Artikel ini pada dasarnya adalah suatu refleksi atas proses etnografis yang dijalani oleh penulis saat terlibat di dalam mendampingi pemuda di kampung Sekepicung. Penulis utama memulai perannya sebagai salah seorang guru di rumah belajar yang didirikan untuk membantu beberapa anak yang putus sekolah di wilayah kampung. Seiring dengan proses belajar-mengajar di sekolah tersebut, penulis berinteraksi lebih dalam dengan para pemuda dan masyarakat luas, memahami permasalahan yang terjadi dan terlibat di dalam upaya menjawab masalah-masalah tersebut. Akses masuk penulis adalah sepasang suami istri muda, Ahmad² (38) dan Dina (36), keduanya guru di rumah belajar, dan pendiri dari satu organisasi pemuda yang memiliki peran sentral di dalam transformasi sosial di kampung. Informasi diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara terbuka dan semiterstruktur, diskusi informal, serta beberapa *Focus Group Discussion* (FGD); metode koleksi data yang mengakarakan-

² Nama-nama yang ditampilkan dalam artikel ini adalah nama samaran, atas seizin dari para narasumber.

terisasi penelitian kualitatif (Lincoln et. al., 2011).

Menjadi penting untuk dicatat bahwa artikel ini disusun atas suatu proses penelitian *performative* (Gibson-Graham, 2008; Carolan, 2016). *Performativity* berangkat dari pandangan bahwa peneliti tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari objek studinya. Apa pun yang ia tangkap dan pelajari pasti akan berdampak pada proses belajar yang serupa dari narasumbernya. Alih-alih meniadakan hal tersebut, penelitian *performative* melibatkan proses belajar dan perubahan bersama antara peneliti dan yang diteliti. Hal ini kiranya yang juga mendasari terbangunnya pemahaman tentang resiliensi dan transformasi di antara pemuda kampung Sekepicung dan penulis. Proses transformasi adalah hasil ko-eksperimentasi kedua belah pihak, saat proses belajar penulis meninggalkan jejak perubahan di masyarakat. Berikut ini adalah narasi dari proses tersebut.

Studi Empiris

Kawasan Bandung Utara dan Kampung Sekepicung

Seperti halnya di banyak tempat, pembangunan kawasan Dago dan Bandung utara telah membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Sejak awal tahun 1990, telah terjadi perubahan tata guna lahan dari pertanian (padi, palawija, dan hortikultura) menjadi perumahan. Hal ini terjadi untuk mengompensasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota Bandung yang ditopang oleh sektor pariwisata dan pendidikan. Pembangunan perumahan elite serta pendidikan restoran dan hotel untuk mengako-

modasi peningkatan turis di kota Bandung, tak pelak lagi mengurangi lahan pertanian masyarakat. Tidak hanya itu, perumahan mewah dan restoran bersaing dengan masyarakat dalam penggunaan air bersih. Kurangnya air bersih dan pencemaran limbah organik di badan perairan memperparah kondisi pertanian masyarakat. Seiring dengan konsentrasi ekonomi di wilayah tersebut, pemukiman masyarakat kampung pun memadat, meninggalkan lahan yang terbatas untuk pertanian.

Hal ini membawa ke permasalahan yang berhubungan dengan identitas dan marjinalisasi. Sebagian masyarakat terpinggirkan di Bandung utara pada awalnya adalah petani. Transformasi yang terjadi di daerah ini dalam dua puluh tahun terakhir menyebabkan banyak petani kehilangan lahannya dan beralih profesi menjadi buruh lepas. Pengetahuan bertani praktis tidak diturunkan kepada generasi muda. Akibatnya, pemuda kehilangan keterampilan dasar yang seharusnya dapat membantu mereka bertahan hidup. Hal ini diperparah dengan tingginya angka putus sekolah dan meningkatnya angka pengangguran. Jumlah pengangguran yang tinggi ini terus memberi tekanan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, pemuda juga pada akhirnya kehilangan hak dan aspirasinya di dalam proses tata kelola pemerintahan setempat.

Masyarakat di kampung Sekepicung memberikan contoh kasus yang nyata atas permasalahan ini. Masyarakat di Sekepicung merupakan masyarakat terpinggirkan yang terdesak oleh pembangunan, dengan lahan produktif yang makin menyempit akibat perumahan me-

wah, vila, hotel, dan restoran di kawasan Dago Atas. Data terkini di tingkat kelurahan menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 2.820 jiwa (580 kepala keluarga) di kampung Sekepicung (RW 05), lebih dari 50 %-nya adalah masyarakat usia produktif (di atas 17 tahun). Mata pencaharian sebagian besar laki-laki di kampung adalah buruh lepas dan karyawan kontrak (*caddy* di lapangan golf, pelayan café, atau buruh bangunan), sementara perempuan bekerja kontrak sebagai pelayan café, pembantu rumah tangga, berwirausaha (mengelola warung atau menjual makanan olahan), atau mengurus rumah tangga. Dengan rata-rata empat anggota keluarga di setiap rumah tangga dan lebih dari 80% rumah tangga berpenghasilan di bawah Rp.2.000.000 per bulan (hasil Sensus Mandiri tahun 2016), masalah ekonomi merupakan faktor yang paling menekan di Sekepicung.

Di dalam sejarahnya, masyarakat kampung Sekepicung merupakan masyarakat petani (ditunjukkan dengan sisa-sisa sawah dan kebun yang mengisi petak-petak lahan di sisi timur kampung), seniman budaya Sunda, dan perajin alat musik tradisional. Saat ini, keterampilan bertani dan *craftmanship* sudah sulit untuk ditemukan. Perubahan tata guna lahan dalam empat puluh tahun terakhir menyebabkan transformasi sosial budaya di masyarakat, di mana sebagian besar generasi muda kehilangan keterampilan untuk bercocok tanam (*agriculture*), beserta nilai-nilai budaya lokal (*culture*) yang terkandung di dalamnya. Di tengah proses urbanisasi, mata pencaharian berbasis lahan di daerah periurban seperti Sekepicung mungkin sudah tidak relevan – tergantikan oleh pekerjaan berba-

sis jasa, seperti disampaikan di atas. Tentunya tidak ada yang salah dengan itu *per se*. Akan tetapi, pembangunan yang tidak terkendali di Sekepicung mengarah pada masalah yang berujung pada kehilangan masyarakat atas akses terhadap sumberdaya alam (air, lahan) dan identitas sosial.

Paguyuban Ajen Sunda Seja Raharja (PASSER)

Titik balik dari keterpurukan sering dimulai dari menyadari identitas pribadi dan kolektif masyarakat, serta mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam lingkungan sosial dan ekosistem. Hal inilah yang disadari oleh beberapa pemuda di kampung Sekepicung. Di dalam menyikapi hilangnya akses masyarakat terhadap lahan dan kemerosotan moral dari generasi muda di wilayah tersebut, beberapa pemuda yang dimotori oleh sepasang suami-istri muda yang juga adalah guru dan ustadz/ ustadzah (guru agama laki-laki/ perempuan) mendirikan organisasi kemasyarakatan yang disebut Paguyuban Ajen Sunda Seja Raharja (PASSER) di tahun 2012. Sasaran utama PASSER di awal pembentukannya adalah menjamin anak-anak muda tidak terjebak di dalam minuman keras yang mereka sering terima di bawah tangan dari beberapa café di sekitar kampung. Seiring perkembangannya, organisasi ini memperluas tujuan untuk turut mempererat silaturahmi, mempertebal rasa sosial, melestarikan nilai budaya dan menyelenggarakan kegiatan sosial bagi warga maupun di kalangan anggotanya, yang saat ini berjumlah sekira 180 orang dengan rata-rata umur berkisar 17-40 tahun, meski ada beberapa simpangan anggota berusia lebih dari 50 tahun.

Masyarakat di kampung Sekepicung, dalam hal ini, melihat pemuda sebagai anggota masyarakat yang lebih dinamis di dalam mengawal perubahan, peka terhadap keresahan warga dan proaktif dalam bertindak. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa para orang tua cenderung pasrah terhadap dampak buruk pembangunan yang mereka rasakan dan mengambil sikap status quo. Ini secara jelas didobrak oleh PASSER. Sebagai contoh, PASSER menjadi motor dari demonstrasi warga terhadap satu café yang memperjualbelikan minuman keras tanpa izin, sekalipun demonstrasi tersebut berujung pada konflik dengan beberapa tokoh tetua kampung. PASSER tidak pernah secara eksplisit mendeklarasikan diri mereka sebagai organisasi pemuda dan tidak membatasi keanggotaan atas dasar umur. Dua orang anggota PASSER yang cukup aktif, Pak Usep dan Pak Komar, berusia di atas 50 tahun, tetapi berjalan baik dengan para pemuda karena semangat atas perubahannya yang tinggi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan usia juga menciptakan stratifikasi di dalam keanggotaan. Anggota berusia di atas 30 tahun umumnya mendominasi forum, sementara anggota usia 20-an tahun cenderung pasif di dalam forum diskusi, meskipun tetap aktif pada kegiatan-kegiatan teknis.

Meskipun begitu, ketua umum, pengurus, dan anggota PASSER mengakui bahwa organisasi ini sedikit-banyak mengambil peran dari organisasi pemuda binaan pemerintah yang telah sekian lama vakum. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan PASSER merepresentasikan kegiatan kepemudaan yang di tempat lain mungkin diwakili oleh Karang Taruna. PASSER aktif

menyelenggarakan pentas seni, kegiatan seni-budaya, dan olahraga. PASSER juga secara rutin menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, memberikan donasi bagi fakir miskin, dan menyalurkan sembako bagi yang membutuhkan. Kegiatan-kegiatan tersebut acapkali dibiayai dari kantong para anggota sendiri atau dari sedikit uang jasa yang mereka terima dari para pengelola café di sekitar kampung. PASSER juga terlibat dalam pengembangan usaha UMKM bagi masyarakat, di antaranya melalui pengembangan unit-unit jasa (perbengkelan dan perdagangan) dan pertanian (rintisan budi-daya kelinci, bebek, dan lele).

Sekalipun didirikan oleh pemuda dan pemudi, PASSER sebagai organisasi yang mewakili semangat pemuda memang sangat bias gender. Sebagian besar anggota PASSER adalah laki-laki. Tercatat sekitar 15 orang perempuan muda (8%) yang terlibat aktif sebagai pengurus. Biasanya, anggota dan simpatisan³ perempuan hadir dalam kegiatan bersama, atau menempati pos-pos yang stereotipikal perempuan, seperti seksi konsumsi, bendahara, dan kesekretariatan. Perempuan hampir tidak pernah terlibat dalam diskusi anggota yang sering mengambil waktu tengah malam hingga fajar, terutama karena norma sosial yang membatasi aktivitas di malam hari bagi perempuan.

Di dalam perkembangannya, PASSER banyak terlibat dengan organisasi eksternal dari sektor publik dan privat melalui proses pembinaan, kolaborasi, dan penyaluran

³ Simpatisan adalah orang-orang yang tidak terdaftar secara resmi sebagai anggota PASSER, tetapi turut aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PASSER.

bantuan, seperti institusi pendidikan, LSM, program CSR perusahaan dan organisasi keagamaan. Di dalam lima tahun sejak PASSER berdiri, organisasi pemuda ini telah terhubung dengan berbagai institusi se-tingkat Bandung, Jawa Barat, hingga nasional. Tentunya, tidak semua program yang difasilitasi oleh institusi-institusi tersebut berjalan baik. Beberapa institusi diduga kecewa karena luaran dari program yang mereka bawa tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Meskipun demikian, di setiap jejak program yang ditinggalkan, para pemuda belajar hal baru yang membantu mereka di dalam suatu proses transformasi sosial.

Bagian berikut ini memaparkan beberapa transformasi yang terjadi, dilihat dari sembilan komponen karakteristik masyarakat penyokong resiliensi komunitas (Berkes & Ross, 2013). Saat memungkinkan, penulis akan menunjukkan bagaimana heterogenitas di PASSER juga berpengaruh terhadap agensia ini.

Diskusi: Pemuda Membangun Resiliensi Komunitas

Ikatan Orang-Tempat (People-Place Relationships)

Narasi sejarah kampung Sekepicung dipaparkan oleh Maman (71), seorang tokoh tetua kampung. Saat beliau pindah ke daerah yang kelak menjadi kampung Sekepicung di tahun 1950, hanya terdapat tiga buah rumah di antara padang ilalang dan rumpun-rumpun bambu. Daerah tersebut bersebelahan dengan area lapangan Golf Dago, yang sudah dibangun jauh lebih awal di tahun 1917. Di tahun 1953, kampung

Sekepicung mulai merasakan pembangunan pertama saat Dago Golf melakukan pengaspalan jalan utama yang melintasi sisi kampung, saat ini menjadi Jalan Raya Golf yang menghubungkan Dago dan Cigadung.

Kampung Sekepicung yang mulai padat di tahun 1960-an sedikit banyak dipengaruhi oleh datangnya para pengunjung dari Garut, Majalaya, dan Sumedang yang lari dari tekanan DI/ TII. Sejak itu, populasi di Sekepicung meningkat, utamanya dari perkawinan di antara warga di dalam kampung tersebut. Konon, ada nilai yang menyebutkan bahwa warga kampung Sekepicung harus menikah dengan warga dari kampung itu sendiri. Hal ini mendasari mengapa sebagian besar warga di dalam kampung Sekepicung masih memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Tetua kampung ini mengingat bahwa di tahun 1953-an, kakeknya sempat meramalkan bahwa di masa yang akan datang, kampung Sekepicung akan menjadi tempat yang ramai.

Ramalan tersebut terbukti benar saat di awal tahun 1980, beberapa orang mendatangi Pak Maman untuk menawar tanah yang dimiliki. Di tahun 1990, pembangunan resort besar dilakukan, dengan dampak dibelinya sebagian besar lahan milik warga kampung. Atas desakan kebutuhan, ikatan masyarakat terhadap lahan mulai hilang. Satu orang menceritakan bahwa ia harus menjual lahannya karena kebutuhannya untuk menikahkan putrinya atau mengganti biaya berobat salah satu anggota keluarga. Dalam kasus yang berbeda, seorang tokoh pemuda, Andri (38) ditawarkan pinjaman oleh majikannya di salah satu café untuk biaya operasi kecelakaannya, tetapi kemudian

menawarkan pelunasan pinjaman tersebut apabila Hendra mau melepas lahan miliknya kepada majikannya. Di lain kasus, semenjak orangtuanya meninggal dan mewariskan tanah kepada Asep (45) dan keluarganya, seluruh anggota keluarga terus mendesak agar ia bersedia menjual lahan kolektif tersebut kepada pihak luar agar seluruh keluarga mendapatkan dana cair.

Berbagai desakan tersebut agaknya membuat jengah banyak orang, dan ini menggerakkan perlawanan di dalam para pemuda yang tergabung dalam PASSER. Mereka menyadari bahwa ikatan yang lemah antara masyarakat dan tempatnya menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai permasalahan sosial dan ekologis (alih fungsi lahan dan longsor). Para pemuda melihat bahwa masalah ini disebabkan oleh dua hal: kebutuhan akan uang tunai dan rendahnya nilai guna dari lahan. Hal ini muncul sebagai akibat dari perubahan mata pencaharian masyarakat dalam empat dasawarsa terakhir. Solusi yang diajukan: pembenahan ekonomi warga dan peningkatan nilai guna dari lahan melalui pertanian. Meskipun begitu, dua hal ini adalah solusi yang sulit diwujudkan. Tidak ada aktivitas ekonomi yang mampu menutupi kebutuhan akan uang puluhan juta dalam waktu dekat. Selain itu, pertanian di lahan kurang produktif tidak sebanding dengan nilai jual lahan.

Para pemuda menyadari hal ini. Hal yang mereka tidak duga adalah bahwa pemanfaatan lahan untuk pertanian, sekalipun tidak banyak menguntungkan, membangun kembali ikatan warga terhadap tempatnya. Mereka melihat bahwa ada nilai tak terukur dari tanahnya, nilai usaha, dan

kepemilikan yang menyadari bahwa tempat tinggalnya adalah sesuatu yang berharga yang tidak bisa dilepas semudah itu. Satu petak tanah keluarga dari anggota PASSER, Asep (45), sudah direncanakan untuk dijual dengan harga yang pantas. Pemanfaatan lahan tersebut untuk pertanian permakultur⁴, yang berlanjut ke pengembangan agrowisata skala kecil, menyebabkan keluarga Asep mengurungkan niat mereka untuk menjual lahannya, walaupun aktivitas tersebut jauh dari keuntungan.

Sikap Pandang Positif

Kisah di atas adalah satu dari sekian banyak kejadian yang membebani warga. Warga Sekepicung, seperti halnya masyarakat terpinggirkan di tempat lain, seringkali menyerah terhadap tekanan ekonomi. Banyak warga mengeluh soal biaya hidup, tuntutan kebutuhan, atau jeratan hutang. *Bangreng* (bank keliling/ rentenir) menjadi salah satu sumber masalah. Di mulut gang, para *bangreng* ini menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi kepada warga yang membutuhkan. Tidak sedikit yang tergoda untuk meminjam, hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau mungkin lebih. Karena pinjaman diarahkan untuk kebutuhan konsumtif, dapat diprediksi bahwa dalam waktu empat puluh hari setelah transaksi, warga akan gusar untuk membayar hutang beserta bunganya. *Bangreng* mendatangi rumah

⁴ Permakultur didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang didesain menggunakan prinsip dan pola yang terdapat pada ekosistem alami, seperti kombinasi berbagai jenis tumbuhan (pohon dan herba) dalam satu petak, pemanfaatan aliran air secara alami, dan lain-lain. Sistem ini dipopulerkan oleh Bill Mollison (Mollison, 1992), tetapi pola serupa telah dipraktekkan secara tradisional di Jawa Barat (Whitten dkk, 1996).

warga untuk menagih hutang, dan mengambil aset pribadi seperti TV atau lemari apabila tidak mampu membayar. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa melihat hal ini.

Ini, tentunya, sebelum PASSER aktif turun membantu. Andri (38), satu anggota PASSER yang sempat menjadi tokoh yang ditakuti di kawasan, menggerakkan anggota lainnya untuk mencegah *bangreng* ini masuk ke dalam kampung. Mereka juga mengusir *bangreng* yang tengah menyita lemari milik salah satu warga. Uang dikeluarkan oleh Hendra dan lainnya untuk membayar pokok pinjaman, sembari mengancam *bangreng* untuk tidak lagi memasuki daerahnya. Gaya *vigilante* ini tentunya bukan solusi menyeluruh. Selama tidak ada alternatif pinjaman selain *bangreng*, hal serupa akan terus terjadi. Menyikapi ini, pemuda PASSER mendirikan koperasi simpan-pinjam bagi warga Sekepicung. Dina dan Heri (35) adalah motor penggerak koperasi yang anggota aktifnya mencapai 86 orang. Animo masyarakat cukup tinggi, tetapi likuiditas acapkali menjadi masalah. Meskipun demikian, koperasi meringankan tekanan finansial dan sosial warga.

Bantuan PASSER kepada warga, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi, sedikit-banyak mengubah cara pandang warga tentang hidup – bahwa kesulitan apa pun dapat dipecahkan bila diatasi bersama. PASSER beberapa kali mengadakan pelatihan-pelatihan dan diskusi terbuka untuk warga, seperti pemberian wawasan ekonomi kreatif, pelatihan pertanian terpadu, dan pendidikan. Selain itu, satu program kerjasama pemuda PASSER dengan LSM pengembangan kapasitas menghasilkan satu film dokumenter tentang kampung yang

diputar dan ditonton bersama oleh warga. Film ini memberikan kesan tersendiri bagi beberapa warga untuk bersama-sama membangun kebersamaan.

Tata Kelola Aktif dan Kepemimpinan

Sikap apatis warga juga berhubungan dengan cara mereka memandang pemerintah. Kampung Sekepicung adalah RW terpadat di Desa Ciburial. Akan tetapi, karena karakteristik kampung yang berbeda dengan kampung lain di desa tersebut yang mayoritas masih merupakan areal pertanian, program-program desa hampir tidak pernah mencapai Sekepicung. Lebih lagi, desa Ciburial ada di dalam wilayah Kabupaten Bandung, tetapi pusat pemerintahan kabupaten terletak jauh di sisi selatan kota Bandung sementara Ciburial terletak di sisi utara. Pengurusan administrasi penduduk, BPJS, dan lainnya memakan waktu lebih dari dua jam hanya untuk perjalanan. Hal ini juga diperparah oleh minimnya kunjungan pejabat pemerintah ke kampung. Satu warga mengeluhkan bahwa harus ada kejadian bencana longsor sampai bupati mau berkunjung.

Hal ini juga terefleksi dari sikap warga terhadap aparat pemerintah di tingkat RW. Sekalipun Ketua RW, Usep (55), juga terdaftar sebagai anggota PASSER, posisinya sebagai pemimpin formal sering tidak dianggap. Program-program yang dibawa dari desa tidak pernah ditanggapi serius oleh warga. Undangan pertemuan warga jarang dihadiri. Kader penggerak PKK di kampung mengeluhkan peran aktif ibu-ibu yang sangat minim di berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Karang Taruna formal praktis tidak fungsional. Di titik ini, ketua RW akhirnya

bergantung pada Ahmad dan PASSER untuk mau aktif dalam membantu tata kelola kampung.

Penting untuk dicatat bahwa warga kampung masih merujuk pada pemimpin informal di dalam meresolusi permasalahan yang ada. Rumah Ahmad dan Dina, dalam hal ini, adalah tempat warga mengeluh dan mengadu. Keluarga Ahmad dan Dina termasuk ke dalam keluarga kelas ekonomi menengah. Mereka juga adalah dua di antara sedikit orang yang memiliki gelar sarjana dan mumpuni di bidang agama di kampung. Organisasi-organisasi eksternal seperti LSM, perusahaan, dan termasuk partai politik, juga seringkali memperoleh akses ke kampung melalui mereka. Ahmad dan Dina juga adalah kader penggerak kampung dari sebuah lembaga keagamaan. Wajar adanya jika mereka menjadi rujukan bagi warga di daerah sekitar. Tidak jarang rumah mereka diketuk tengah malam oleh warga yang memiliki masalah keuangan, berkonflik dengan warga lain, atau membutuhkan bantuan kesehatan.

PASSER sejatinya bermula dari inisiatif dua pemuda ini. Dalam membantu warga yang rumahnya rusak, Ahmad mengumpulkan laki-laki anggota PASSER untuk bekerja bakti memperbaiki rumah tersebut. Di saat ada satu warga yang membutuhkan uang, Dewi menggerakkan ibu-ibu kampung untuk menggalang arisan atau sumbangan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sentralitas sosok pemimpin menjadi faktor penting di dalam organisasi setingkat kampung. Akan tetapi, Ahmad dan Dina juga menyadari bahwa beban mereka akan semakin besar apabila mereka tidak bisa mengader anak-anak muda lainnya untuk bisa turut menjadi sosok pemimpin, atau

mengembalikan wibawa pemimpin formal seperti Ketua RW⁵.

Sebagai upaya untuk membangun tata kelola aktif bersama dengan pemimpin formal kampung, PASSER mendorong anggota-anggotanya untuk terlibat aktif dalam membangun RT dan RW setempat. Beberapa anggota PASSER kemudian menjadi ketua RT atau mewakili RW di berbagai kegiatan. Dewi kembali mendorong kader anggota PKK menjalankan program yang berbasis keluarga, serta mengajak ibu-ibu muda untuk juga aktif terlibat, tidak hanya dalam kegiatan PKK, tetapi juga dalam pengajian dan pelatihan-pelatihan keterampilan dengan mengundang pembicara dari luar. Nisa (22) adalah satu di antara sedikit pengurus PASSER perempuan yang juga aktif menggerakkan perempuan-perempuan muda seusianya. Melalui dorongan PASSER, ketua RW kini semakin percaya diri dengan kepemimpinannya. Ahmad memosisikan diri sebagai penasihat, menemani ketua RW saat bertemu dengan pihak luar yang ingin berkolaborasi. Keberhasilan PASSER di dalam tata kelola aktif ditunjukkan dengan diakuinya PASSER sebagai organisasi masyarakat yang dapat memasukkan usulan program di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di tahun 2016-2017, sekalipun PASSER bahkan belum terdaftar sebagai organisasi resmi di bawah Kemenkum HAM.

⁵ Saat tulisan ini selesai disusun, penulis mendapat informasi bahwa sempat kembali terjadi konflik antara PASSER dengan pengurus RT tertentu, yang merasa bahwa peran PASSER terlalu besar dan bersinggungan dengan pengusaha yang meminta dukungan pengurus RT. Di titik ini, legitimasi PASSER mulai dipertanyakan. Dinamika ini terjadi berulang kali, meskipun pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Regenerasi masih menjadi tantangan besar bagi PASSER. Posisi sentral Ahmad dan Dina di satu sisi bermanfaat karena mempermudah dalam menggerakkan organisasi. Di sisi lain, kebergantungan anggota pada dua orang ini menjadi sangat tinggi. Di dalam program pembinaan yang difasilitasi sebuah LSM, ketidakhadiran Ahmad dan Dina di dalam satu kegiatan menyebabkan sebagian besar anggota turut tidak hadir. Hal ini telah diantisipasi oleh organisasi. Di penghujung tahun 2016, beberapa anggota yang lebih muda seperti Jaka (30), Nisa (22) atau Agung (25) mulai menggerakkan anak-anak muda di RT masing-masing untuk aktif berkegiatan. Akan tetapi, pemimpin kharismatik seperti Ahmad tidak bisa semudah itu dibentuk.

Nilai Lokal, Pengetahuan, Keterampilan, dan Proses Belajar

Perubahan sosial-budaya di Sekepicung menyebabkan generasi muda mulai melepaskan nilai-nilai kelokalan yang semula ada. Hal ini paling mudah terlihat dari luntarnya budaya Sunda di kalangan anak muda. Sedikit sekali anak-anak muda yang mampu memainkan alat musik tradisional seperti kecapi dan kendang atau bermain pencak silat. Hal ini dikeluhkan oleh para tetua kampung karena Sekepicung di tahun 1970-an merupakan salah satu pusat kesenian Sunda di Bandung dan bahkan memiliki perguruan pencak silatnya sendiri yang bereputasi nasional. Maman (71) menyampaikan bahwa kesenian ini mulai hilang di penghujung tahun 1990-an, seiring dengan tumbuhnya daerah Dago sebagai kawasan wisata urban (café dan perumahan mewah) dan tuntutan ekonomi yang tinggi di antara

masyarakat. Para atlet pencak yang dahulu sempat melanglangbuana dalam berbagai kompetisi kini bekerja sebagai juru parkir di salah satu café. Penulis masih sempat menemui seorang perajin dan seniman alat musik biola dan kecapi di tahun 2006, tetapi setelah beliau meninggal dunia, tidak ada yang mau meneruskan usahanya. Para tetua kampung memang masih menjaga nilai-nilai ini, tetapi regenerasi dan transfer nilai-nilai lokal ini ke generasi muda hampir tidak ada.

PASSER mengambil peran penting di dalam menghidupkan kembali dan menjaga terpeliharanya nilai-nilai seni Sunda di Sekepicung. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni budaya di kampung. Anggota PASSER seperti Ani (16) adalah atlet pencak silat yang telah banyak tampil di banyak kejuaraan, Iman (36) adalah seniman calung, atau Rudi (45) adalah musisi kendang pencak. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka masih bersifat insidental, hingga tahun 2016 saat PASSER mengupayakan donasi dari organisasi luar dalam bentuk seperangkat alat musik kendang pencak. Berbasis kesepakatan komitmen untuk memanfaatkan kendang pencak ini seoptimal mungkin, anak-anak muda mulai secara rutin berlatih kendang, di bawah bimbingan tetua kampung dan ketua RW. Para pemain kesenian kendang pencak berada dalam rentang umur 16 hingga 45 tahun, meskipun sangat didominasi oleh laki-laki, sebagaimana menjadi kebiasaan dalam seni pencak. Walaupun demikian, menjadi catatan adalah Ani, perempuan muda atlet pencak silat yang menginspirasi ibu-ibu dan anak-anak perempuan di kampung untuk ikut berlatih pencak silat. Saat ini, Perguruan Medal

Pusaka Putih yang baru dibentuk di Sekepicung dipenuhi oleh murid-murid usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Perguruan (*paguron*) ini mulai aktif mengikuti kunjungan-kunjungan silat ke perguruan lain dan mempersiapkan diri untuk menerima undangan tampil di kegiatan luar.

PASSER, bekerjasama dengan sebuah LSM pengembangan kapasitas, juga mengadakan diskusi terfasilitasi yang mengundang para tetua kampung untuk duduk bersama anak-anak muda. Para pemuda mengumpulkan dokumentasi lama dari kampung dan mewawancarai para tetua tentang kondisi kampung masa lalu. Proses komunikasi intergenerasi ini tidak pernah diadakan secara terstruktur sebelumnya sehingga proses belajar sosial tidak berjalan. Melalui forum ini, anak-anak muda kembali belajar tentang kesenian, bertani, memasak, menjahit dan membuat kerajinan. Aman (30) terinspirasi untuk mengolah lahan keluarga di tengah-tengah permukiman padat untuk bercocok tanam. Perempuan muda seperti Santi (29) kini mencoba berjualan masakan Sunda buaatannya. Tetua kampung yang biasa menjahit baju pesanan seperti Nani (56) atau Maman (71) mulai menurunkan ilmunya ke perempuan-perempuan muda seperti Ira (24) atau Yanti (30). Di sisi lain, anak-anak muda ini tetap mempertahankan warna mereka dengan mengembangkan gayanya sendiri di dalam produk-produk keterampilannya.

Ekonomi Beragam dan Inovatif

Keterampilan yang mereka peroleh menjadi modal dasar bagi para pemuda untuk mengembangkan ekonomi kreatif di kalangan mereka. Sebelumnya, pemuda dan

masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, sangat bergantung pada para pengusaha café, hotel, dan manajemen golf sebagai sumber mata pencaharian. Dari sensus yang dilakukan secara mandiri oleh PASSER dan RW.05, diperoleh informasi bahwa terdapat pembagian peran di antara anggota keluarga. Kepala keluarga bekerja sebagai buruh lepas dan karyawan kontrak di lapangan golf, yang telah ada lebih dahulu dari kampung ini. Ibu rumah tangga turut menambah penghasilan dengan berjualan (*warung*), menerima pesanan jahit, atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah sekitar.

Hal yang menarik adalah anak-anak mereka yang sudah memasuki usia di atas 20 tahun (secara kategori dikatakan sebagai pemuda), yang meningkatkan diversitas mata pencaharian dengan bekerja sebagai pelayan dan juru masak (*cook*) café, mengembangkan bisnis otomotif dan pengelasan skala kecil, membuat kreasi makanan untuk dijual, atau mengembangkan kerajinan. Untuk kasus terakhir, Yanti (30) dapat diangkat sebagai contoh. Yanti adalah ibu rumah tangga dengan anak usia 5 tahun yang memiliki keterampilan membuat kerajinan. Ibu muda ini cepat menangkap ilmu baru dan bekerja dengan hasil yang rapi. Ini dimanfaatkan oleh sebuah usaha kreatif dari luar untuk memberikan pelatihan kepada Yanti dan memesan hasil kreasinya. Saat ini, pesanan diperluas ke ibu-ibu muda lainnya dengan Yanti berperan sebagai pengawas kualitas.

Unit-unit usaha lain yang dikembangkan oleh anggota PASSER meliputi ternak, pertanian, bengkel, dan percetakan. Sempat terpikir di antara anggota untuk membuka usaha bersama di bawah bendera

PASSER. Beberapa di antara usaha kolektif yang pernah dijalani meliputi bisnis kuliner, agrowisata, dan pertanian. Akan tetapi, usaha kolektif sulit untuk dikelola, dan anggota PASSER memiliki kesibukan personal lain. Alhasil, PASSER tidak lagi mengembangkan usaha berbasis komunitas. Alih-alih, organisasi menjadi konduit bagi para pelaku usaha untuk melebarkan pasarnya ke luar melalui jejaring PASSER, atau mengakses bantuan permodalan dari luar. Melalui PASSER, produk-produk olahan kebun disalurkan ke konsumen di kota Bandung melalui jejaring komunitas kota.

Berbagai usaha kreatif yang dibangun memberikan atmosfer ekonomi yang baik di antara warga kampung. Beberapa anggota PASSER memutuskan untuk keluar dari café tempat mereka bekerja untuk bisa memfokuskan diri pada pembuatan kerajinan, yang nantinya dijual melalui kerjasama PASSER dan café. Beberapa orang juga kembali mengolah lahannya dengan menanam pisang dan ubi yang merupakan kekhasan kampung Sekepicung. Ibu-ibu mulai membuat makanan olahan dan menawarkannya ke tamu-tamu yang datang dari luar melalui koperasi atau PASSER. Saat tulisan ini disusun, warga sedang bersemangat menyiapkan acara besar festival kampung yang akan menampilkan produk-produk mereka ke khalayak luas. Ekonomi kreatif yang dirintis melalui PASSER berpotensi tidak hanya memberikan tambahan pemasukan bagi keluarga, tetapi juga membangun sikap positif, ikatan kebersamaan, dan membuka ruang-ruang komunitas yang selama ini tidak terpakai.

Infrastruktur Komunitas

Masyarakat kampung Sekepicung telah memanfaatkan ruang-ruang terbuka dan infrastruktur warga sebaik mungkin, sekalipun tanpa keterlibatan para pemuda. Pengusaha dengan baik hati meminjamkan lahannya sebagai lapangan voli bagi warga. Beberapa warga juga turut meminjamkan lapangan parkirnya untuk tempat beraktivitas bagi anak-anak.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Sekepicung dalam kaitannya dengan infrastruktur adalah air (ketersediaan dan kualitas). Saat ini, dari total lima mata air yang dimiliki oleh warga, tiga di antaranya berada di atas tanah milik pihak luar (para pemilik café). Sebagai akibatnya, warga mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Aktivitas industri jasa di sekitar kampung juga berdampak pada ketersediaan dan kualitas air bersih di lokasi. Warga mencurigai pengusaha hotel dan café telah menyedot air tanah dalam jumlah besar. Dari observasi, diketahui bahwa sumur warga memiliki kedalaman yang terus meningkat dari tahun ke tahun (dari 4 meter hingga 12 meter). Air sumur yang dapat diakses pun memiliki kualitas yang buruk. Satu orang anggota, Iman (36), memberi kesaksian bahwa air untuk mandi berwarna kuning dan berminyak, dan di musim kemarau mengeluarkan bau yang menyengat.

Sebagai akibat dari aktivitas industri, warga yang ingin mengakses air bersih untuk minum harus membeli air dalam kemasan di toko-toko terdekat. Satu orang warga menjelaskan bahwa dalam seminggu, warga tersebut membutuhkan satu galon (19 Liter) air bersih untuk kebutuhan

minum dan masak. Untuk kebutuhan mandi, warga seringkali harus mengambil air dari perusahaan di sekitar secara ilegal di sore hari saat kantor manajemen tutup.

PASSER ataupun para pemuda secara individu memiliki andil di dalam memperjuangkan infrastruktur komunitas ini. Para pemuda berupaya membangun kesadaran akan nilai penting fasilitas publik ini dan bersama warga memperbaiki mata air yang tersisa. Para laki-laki khususnya menggerakkan para orang tua untuk menyumbangkan dana atau tenaga untuk pengeboran dan pembuatan sumur. Isu air menjadi salah satu isu yang diangkat saat para pemuda bertemu dengan pihak luar. Aktivitas CSR dari salah satu perusahaan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur komunitas ini. Infrastruktur ini, beserta infrastruktur lain yang telah ada, menguatkan kemampuan adaptasi warga terhadap krisis air di wilayah kampung.

Jejaring dan Ikatan Sosial

Satu hal yang membantu warga Sekepicung di dalam membangun resiliensi di tengah individualitas perkotaan adalah ikatan sosial yang kuat. Adger (2000) membagi dua bentuk modal sosial berdasarkan karakteristiknya, yaitu modal ikatan sosial (*bonding social capital*) dan modal jejaring sosial (*networking social capital*). Ikatan sosial berbicara tentang hubungan internal antar-anggota suatu masyarakat, sementara jejaring sosial berbicara tentang hubungan antara suatu masyarakat dengan entitas di luar yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut.

Tidak diragukan bahwa ikatan sosial di kampung Sekepicung telah terbangun kuat

sejak pertama kampung ini berdiri di tahun 1950-an. Warga kampung umumnya adalah keluarga besar yang acapkali terbentuk dari proses pernikahan antara pendatang dengan penduduk kampung. Di tengah kehidupan kota yang semakin individualis, kampung Sekepicung masih menunjukkan karakteristik ikatan sosial perdesaan yang kuat. Masalah yang muncul di satu anggota masyarakat dengan cepat tersebar ke ujung kampung, dan segera dapat ditanggapi oleh warga secara kolektif. Dalam setahun, hajatan sering diadakan, yang notabene dihadiri oleh sebagian besar warga kampung. Mungkin atas dasar ini, konflik sosial yang muncul dengan cepat dapat diredam oleh masyarakat.

Hal yang menjadi nilai lebih dari kehadiran PASSER justru adalah terbangunnya modal jejaring sosial. Sepuluh tahun yang lalu, interaksi masyarakat dengan pihak luar dibangun atas dasar relasi yang tidak setara antara majikan-bawahan (di lingkungan golf dan hotel) atau tuan tanah-peminjam (antara pemilik lahan yang merupakan orang luar dan warga yang memanfaatkan lahan untuk pertanian). Penulis yang hadir di kampung sepuluh tahun lalu selalu dianggap orang luar. Seiring perkembangan, warga mulai menerima kehadiran entitas-entitas dari luar.

PASSER khususnya membuka kerjasama dengan banyak institusi, dan memanfaatkan pihak-pihak yang datang untuk membangun jejaring keluar. Para pemuda (laki-laki) membuka diri kepada fasilitator yang hadir untuk memberi pelatihan pembangunan kapasitas dan manajemen organisasi. Kaum perempuan jarang terlibat dalam kegiatan tersebut, tetapi menyambut baik berbagai kegiatan pelatihan teknis yang di-

selenggarakan oleh sesama perempuan. Jejaring yang terbangun kemudian membentuk rasa percaya diri di kalangan pemuda untuk tampil dan menyuarakan aspirasinya. Dinding ketidaksetaraan mulai menipis. Para pemuda mulai meyakini bahwa pihak-pihak luar datang tidak semata-mata membantu dengan uluran tangan, tetapi atas kepentingan yang jelas, entah untuk kepentingan “proyek” ataupun publisitas. Beberapa kini dapat melihat relasi luar-dalam secara lebih setara, dan dengannya berbagai program pengembangan organisasi dapat berjalan lebih baik.

Refleksi

Sekepicung menawarkan kasus menarik ketika PASSER, suatu organisasi pemuda informal, berperan sangat besar di dalam membangun resiliensi komunitas. Dalam hal ini, pemuda menempatkan diri sebagai agen yang berfungsi menghidupkan kembali aspek-aspek resiliensi komunitas yang lemah dan menjaga yang sudah baik. Pada akhirnya, masyarakat Sekepicung menjadi lenting (*resilient*) terhadap gangguan ekonomi, sosial dan budaya karena pemuda mampu menggerakkan warga untuk beradaptasi terhadap perubahan, baik melalui sikap positif, penguatan nilai-nilai lokal, transfer pengetahuan yang baik, kepemimpinan dan tata kelola informal, serta penguatan ikatan dan jejaring sosial. Di dalam resiliensi komunitas ini, agensi pemuda mendorong suatu transformasi yang terarah dan memberi manfaat bagi banyak pihak.

Meskipun demikian, penulis juga berupaya menghindari esensialisasi pemuda.

Pemuda adalah konstruksi sosial, dan bagaimana masyarakat memandang pemuda bergantung pada konteks lokal yang ada. Salah satu tokoh pemuda menyebutkan, “*nu penting mah lain umur, tapi jiwana*” (yang penting bukanlah usia, tetapi jiwa). Hal ini mengisyaratkan bahwa di dalam konteks Sekepicung, pemuda adalah mereka yang dapat menjadi agen perubahan dan bergerak lebih dari lingkup keluarga, terutama di saat “orang-orang dewasa” nyaman dan memilih diam. Lebih lanjut, dinamika di dalam pemuda juga penting untuk diperhatikan. Stigmatisasi gender (ketidaksetaraan hak suara antara laki-laki dan perempuan) atau umur (*ageisme*; yang lebih tua memiliki suara lebih besar) di PASSER tidak bisa dilepaskan dari norma sosial yang berlaku di Sekepicung, dan mungkin lebih luas lagi di masyarakat Jawa Barat. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap komponen (laki-laki dan perempuan, tua dan remaja) memiliki peran dalam membangun kepemudaan dan resiliensi komunitas.

Daftar Rujukan

- Adger, W. Neil. (1999). Social Vulnerability to Climate Change and Extremes in Coastal Vietnam. *World Development*, 27(2), 249-269.
- Adger, W. Neil. (2000). Social and Ecological Resilience: are They Related?. *Progress in Human Geography*, 24(3), 347-364.
- Adger, W. Neil. (2003). Social Capital, Collective Action, and Adaptation to Climate Change. *Economic Geography*, 79(4), 387-404.

- Adger, W. Neil. (2006). Vulnerability. *Global Environmental Change*, 16(3), 268-281.
- Atal, Yogesh (2005). Youth in Asia: an Overview. Dalam Gale, F. dan Fahey, S. (Eds). *Youth in Transition: Challenges of intergenerational change in Asia*. Bangkok: UNESCO.
- Berkes, Fikret. (2007). Understanding Uncertainty and Reducing Vulnerability: Lessons from Resilience Thinking. *Natural Hazards*, 41(2), 283-95.
- Berkes, Fikret & Helen Ross (2013). Community Resilience: Toward an Integrated Approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5-20.
- Carolan, M. (2016). Adventurous Food Futures: Knowing about Alternatives is not Enough, We Need to Feel Them. *Agriculture and Human Values*, 33(1), 141-152.
- Dwiartama, Angga (2016). Resilience Thinking, Fluidity and the Agency of a Quasi-Actant. *Dialogues in Human Geography*, 6(1), 28-31.
- Dwiartama, Angga. (2017). Resilience and Transformation of the New Zealand Kiwifruit Industry in the Face of Psa-V Disease. *Journal of Rural Studies*. Online First.
- Elhadary, Y. A. E. Samat, N., & F. Obeng-Odoom. (2013). Development at the Peri-Urban Area and Its Impact on Agricultural Activities: An Example from the Seberang Perai Region, Penang State, Malaysia. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 37(7), 834-856.
- England, K. V. (1994). Getting personal: Reflexivity, Positionality, and Feminist Research. *The Professional Geographer*, 46(1), 80-89.
- Furlong, Andy. (2012). *Youth studies: An introduction*. Routledge.
- Gibson-Graham, J. K. (2008). Diverse Economies: Performative Practices Forother Worlds. *Progress in Human Geography*, 32(5), 613-632.
- Gotham, K. F. & R. Campanella. (2010). Toward A Research Agenda on Transformative Resilience: Challenges and Opportunities for Post-Trauma Urban Ecosystems. *Critical Planning*, 17, 9-23.
- Lincoln, Y.S. Lynham, S.A. & E.G. Guba. (2011). Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited. In K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.). *The SAGE Handbook of qualitative research*. Fourth Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publishing.
- Mollison, B. (1991). *Introduction to Permaculture*. Tasmania, Australia: Tagari.
- Simon, D. (2008). Urban Environments: Issues on the Peri-Urban Fringe. *Annual Review of Environment and Resources*, 33, 167-185.
- Vij, S. (2014). Urbanization, Common Property Resources and Gender Relations in a Peri-Urban Context. *Vision*, 18(4), 339-347.
- Vij, S. & V. Narain. (2016). Land, Water & Power: the Demise of Common Property Resources in Periurban Gurgaon, India. *Land Use Policy*, 50, 59-66.

Whitten, T., Soeriaatmadja, R.E. & Suraya
Afiff. (1996). *Ecology of Java and Bali*.
Hongkong: Periplus Limited.

ORANG BETAWI SEBAGAI KELAS PEKERJA? AUTOETNOGRAFI TRANSFORMASI PEMUDA BETAWI

Wahyudi Akmaliah

*Peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*

wahyudiakmaliah@gmail.com

Abstract

The article explores the transformation of Betawi identity, especially among the young generation, by using an autoethnographic approach, which bases itself on the experience and narratives of the writer and his family as research subjects. The article addresses three questions. What are the conditions that have led to Betawi people's marginalization in their own homeland? In the midst of this marginalization and the expansion of capital, what are their strategies to survive and gain access to economic opportunities? On the other hand, what is the position and function of the organization Forum Betawi Rempug for the Betawi people in Jakarta? The article explains that the New Order's policy in developing the capital city Jakarta, especially in infrastructural development, has led to the inability of the second generation in Betawi families to accumulate economic capital, which in turn has caused them to be dispossessed in their own homeland. This is marked by the emergence of a working class in the third generation (their children) as heritable land and property dwindle. In this context, FBR becomes a vehicle for aspirations that enable Betawi youth to find work as day-labourers in local industries by accessing the FBR's network and cultural interactions.

Keywords: *Betawi, Forum Betawi Rempug, Proletarianization, Marginalization*

Abstrak

Artikel ini menelusuri transformasi identitas orang Betawi, khususnya generasi muda, dengan menggunakan pendekatan autoetnografi, yaitu menjadikan pengalaman diri sendiri dan narasi keluarga sebagai subjek riset. Ada tiga pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini. Kondisi dan faktor apa yang membuat orang Betawi menjadi tersingkir di tanah

kelahirannya sendiri? Di tengah ketersingkirannya tersebut, strategi apa yang mereka lakukan agar bisa bertahan di tengah kepingan modal untuk mendapatkan akses-akses ekonomi? Bagaimana posisi dan fungsi Forum Betawi Rempug (FBR) bagi kebanyakan orang Betawi? Artikel ini menunjukkan bahwa selain kebijakan pembangunan yang dibuat oleh rezim Orde Baru, ketidakmampuan generasi kedua dalam keluarga Betawi untuk melakukan akumulasi kapital ekonomi membuat mereka kemudian tersingkir di tanah kelahirannya, yang ditandai dengan kemunculan kelas pekerja dengan kehadiran anak-anak mereka dan berkurangnya aset warisan tanah dan kontrakan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, FBR menjadi media aspirasi yang memungkinkan orang-orang Betawi bisa bekerja dengan masuk ke industri kerja sebagai buruh lepas harian melalui jaringan dan interaksi kultural yang dibentuk.

Kata Kunci: *Orang Betawi, Forum Betawi Rempug (FBR), Kelas Pekerja, Ketersingkirannya*

Pendahuluan

Akhir bulan, tepatnya 29 September 2016, saya ditelepon oleh Bang Iman, sepupu dari keluarga bapak saya. Saya diminta untuk mengumpulkan beberapa dokumen yang sudah difotokopi untuk dikumpulkan kepada Encang (Paman) Toing, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah. Dokumen itu digunakan untuk persyaratan jual beli tanah. Menurut Bang Iman, tanah warisan Nyak dan Engkong kami, seluas 5700 meter, yang berada di Kali Abang, Pondok Ungu, Bekasi, sudah ada pembeli. Sehari berikutnya, 30 September 2016, setelah menunaikan salat Subuh, dengan mengendarai sepeda motor dari Lubang Buaya, saya pun menembus dinginnya subuh di Jakarta menuju Cakung.

Sesampainya di rumah Encang Toing, saya kemudian memberikan beberapa salinan dokumen yang dimaksud. Dengan penuh penasaran saya bertanya kepadanya terkait dengan penjualan tanah tersebut. “Kenapa pengen dijual Ceng tanahnya? Bagus kan dibikin kapling (dibuatkan petak) dan dibagikan kepada ahli waris cucunya Engkong. Jadi, semua orang bisa punya rumah?”. Sambil bermain Poker di *Facebook* dengan

menggunakan laptop, Encang Toing yang mulai menginjak usia lima puluh tahun berbicara dengan tenang kepada saya, “Semuanya lagi pada butuh duit, Yud. Ini aja Encang butuh banget duitnya buat *benerin* rumah dan kontrakan. Lu juga bisa lihat, saudara-saudara mulai pada susah”. Meskipun berpendidikan tinggi dan bekerja di institusi riset, saya hanya menganggukan kepala mendengarkan penjelasannya tersebut. Saya tetaplah berposisi sebagai anak dari almarhum bapak saya dan cucu Engkong yang tidak memiliki hak untuk bersuara.

Narasi di atas adalah potret realitas orang Betawi, terkait dengan warisan kepemilikan tanah dan rumah kontrakan sebagai investasi terbesar dan pemasukan utama yang membuat kebanyakan mereka bisa bertahan hidup di Jakarta. Meskipun diakui, narasi tersebut tidak bisa merepresentasikan orang Betawi secara keseluruhan. Menurut sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 ada 2.701.533 orang Betawi, terdiri dari laki-laki 1.363.323 dan 1.338.210 perempuan. Sementara itu, secara lebih spesifik, jumlah orang Betawi di Jakarta Timur, termasuk Cakung Barat,

795.772, terdiri dari 400.332 laki-laki dan 395.440 perempuan (BPS DKI, 2010). Namun, narasi personal tersebut bisa dijadikan sebuah argumen bahwa alih-alih sebagai tuan tanah dengan sejumlah rumah kontrakan yang dimilikinya, dengan merujuk kepada orang-orang Betawi tahun 1970-1990-an, seiring tingginya kebutuhan hidup di Jakarta, kebijakan pembangunan secara besar-besaran era rezim Orde Baru, dan ketidakmampuan tekad yang kuat untuk mendidik anak-anak mereka ke jenjang lebih tinggi, membuat mereka kemudian menjual tanah dan kontrakan yang justru membuat mereka akhirnya tersingkir. Secara visual, narasi ketersingkiran orang Betawi ini diartikulasikan dengan baik dalam tiga cerita, film *Si Doel* (1973 dan 1976), Sinetron *Si Doel Anak Sekolah* (1994), dan Kartun Televisi *Petualangan Si Doel* (1997) serta sinetron-sinetron pascarezim Orde Baru yang menggunakan latar belakang orang dan budaya Betawi sebagai tema utama (Klarijen, 2008; Akmaliah, 2012).

Di tengah situasi tersebut, orang Betawi saat ini tidak lagi bisa dikatakan menjadi tuan tanah di daerahnya sendiri melainkan justru menjadi bagian dari kebanyakan masyarakat Jakarta; bekerja untuk mencari nafkah dalam berbagai sektor ekonomi perkotaan, baik informal maupun formal. Lebih khusus, hal ini tecermin pada generasi ketiga orang-orang Betawi, yang dialami oleh saya dan generasi sebaya saya yang terjadi dalam keluarga besar Haji Mahbub, orang Betawi Cakung. Alih-alih menikmati fasilitas, baik itu rumah dan pekerjaan, seperti orangtua kami, saudara-saudara saya justru harus bekerja keras menafkahi diri sendiri dan masuk ke sektor industri yang selama ini

justru tidak pernah dialami oleh keluarga besar ataupun masuk ke dalam sektor informal dengan bergabung sebagai anggota ormas Forum Betawi Rempug, menjadi calo Bis, atau berdagang kelontongan.

Terkait dengan Betawi, studi-studi mengenai subjek tersebut kebanyakan membahas tiga hal. Pertama, orang Betawi dan kebudayaan. Studi ini lebih memfokuskan kepada ekspresi kebudayaan orang betawi dan bagaimana mereka mempertahankannya (Kleden-Probonegoro, 1996). Kedua, orang betawi dan identitas. Studi ini lebih mencerminkan bagaimana identitas kebetawian itu dimainkan oleh orang Betawi seiring dengan munculnya pendatang maupun untuk tindakan komersil, seperti yang direpresentasikan melalui sinetron-sinetron di televisi swasta Indonesia (Akmaliah, 2012; Klarijen, 2008; Parlina, 2012). Ketiga, orang Betawi dan paramiliter. Menguatkan studi yang kedua tersebut, studi ini lebih melihat bagaimana orang Betawi memainkan politik identitas di tengah politik lokal dan nasional dengan kehadiran organisasi seperti Forum Betawi Rempug (FBR), Forkabi (Forum Komunikasi Masyarakat Betawi), dan orang Betawi yang tergabung di Front Pembela Islam (FPI) (Widyanto, 2005; Wilson, 2006).

Selain signifikan, tiga kajian tersebut memperkuat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Betawi yang dikaitkan dengan ekspresi kebudayaan, identitas, dan relasi kekuasaan dalam politik lokal serta nasional. Namun, menelusuri lebih jauh mengapa pascarezim Orde Baru justru identitas kebetawian menjadi menguat seiring dengan kemunculan ormas-ormas atas nama Betawi di ruang publik itu satu kajian yang perlu untuk dikuatkan dengan melihat

perubahan orang-orang Betawi dari tuan tanah yang kemudian beralih menuju kelas pekerja.

Artikel ini menelusuri transformasi identitas orang Betawi, khususnya generasi muda, dengan menggunakan pendekatan autoetnografi, yaitu menjadikan pengalaman diri sendiri dan narasi keluarga sebagai subjek riset. Ada tiga pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini. Kondisi dan faktor apa yang membuat orang Betawi menjadi tersingkir di tanah kelahirannya sendiri? Di tengah ketersingkiran tersebut, strategi apa yang mereka lakukan agar bisa bertahan di tengah kepungan modal? Di tengah situasi tersebut, bagaimana posisi dan fungsi FBR bagi kebanyakan orang Betawi?

Artikel ini mengartikulasi imajinasi dan representasi orang Betawi melalui transformasi identitas dan sumber-sumber ekonomi untuk memperkuat dan menghubungkan ketiga studi sebelumnya dengan melihat anak muda Betawi sebagai kategori yang didefinisikan oleh Naafs dan White (2012: 96) sebagai *generasi transisi*. Maksudnya, generasi transisi ini adalah proses perpindahan, baik secara umur, pandangan hidup, dan juga harapan dalam melihat masa depan mereka. Hal ini, khususnya lebih terkait dengan proses pendidikan, gaya hidup, dan imajinasi yang mereka bayangkan terhadap kondisi kekinian.

Metode Penelitian

Menurut Buzard (2003), setidaknya ada dua hal yang terpenting dalam riset autoetnografi. Keduanya ini memiliki pertautan dan interaksi, yaitu ruang (*place*) dan suara (*voice*). Lebih jauh, selain berfungsi untuk

menjelaskan secara sistematis, Buzard (2003) menjelaskan autoetnografi sebagai pendekatan alternatif dalam riset dan penulisan yang menarasikan pengalaman personal orang untuk memahami pengalaman kebudayaannya. Karena menekankan kepada diri, autoetnografi ini mendefinisikan ruang bukanlah sesuatu yang menetap, melainkan media yang mengalami perubahan dalam konteks tertentu, baik itu masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Sebagai metode, autoetnografi memadukan karakteristik antara autobiografi dan pendekatan etnografi. Di sini, ketika menuliskan autobiografi, penulis secara selektif menuliskan pengalaman-pengalamannya yang terkait dengan isu yang sedang dikaji, yang kemudian direfleksikan dengan konteks kekinian (Brunner, 1993; Denzin, 2004, Freeman, 2004).

Dalam autoetnografi, narasi personal menjadi bagian penting. Ini karena, sebagaimana ditegaskan oleh Waterson (2007: 2), tujuan dari penarasian adalah untuk menguji bagaimana persinggungan ataupun kesalingterkaitan antara sejarah, dinamika sosial, dan politik, dengan pengalaman personal. Lebih jauh, bagi Hinchman, sebagaimana dikutip oleh Elliot (2005; 3), narasi dimaknai sebagai “wacana dengan urutan waktu yang jelas, yang menghubungkan setiap peristiwa dalam rangkaian pemaknaan untuk menjelaskannya kepada pembaca”. Dengan demikian, lebih jauh, narasi tersebut menawarkan beragam pengetahuan mengenai sesuatu ataupun pengalaman seseorang terhadap sesuatu. Selain memberikan sebuah perspektif, definisi tersebut menekankan tiga hal penting dalam narasi. Pertama, kronologi yang direpresentasikan melalui rangkaian peristiwa. Kedua, adanya makna yang terdapat di

dalamnya. Ketiga, apa yang diproduksi secara sosial tidak bisa terlepas dari *audiens* ataupun pembacanya (Elliot (2005: 4).

Untuk memperkuat penulisan, auto-etnografi membutuhkan wawancara dan informasi terkait dengan studi yang dikaji. Dalam melakukan studi ini, selain mengandalkan ingatan masa kecil, muda, dan dewasa, serta interaksi saya dengan keluarga besar di Cakung, saya melakukan sejumlah wawancara kepada Encang (Paman) dan Encing (Tante), dan orangtua saya. Untuk memperkuat wawancara tersebut, saya juga melakukan proses dokumentasi dengan mengandalkan media massa nasional, khususnya *Kompas*, untuk membaca periodisasi isu-isu mengenai orang Betawi, baik saat rezim Orde Baru berkuasa maupun pascarezim Orde Baru. Dengan cara ini saya dapat melihat konteks kebijakan negara, di satu sisi, dan bagaimana dampak kebijakan tersebut, khususnya kepada orang-orang Betawi. Di sisi lain, saya juga melihat bagaimana organisasi-organisasi massa atas nama Betawi itu bermunculan dengan meninjau hasil-hasil riset yang selama ini sudah bermunculan pascarezim Orde Baru.

Dari Tuan Tanah Menuju Kelas

Pekerja: Narasi Tiga Generasi

Generasi 1: Tuan Tanah dan Warisannya

Seperti kebanyakan orang Betawi lainnya, saya dibesarkan dalam keluarga Betawi yang memiliki sejumlah warisan tanah yang luas dan ratusan rumah kontrakan. Properti yang dimiliki *Engkong* Haji Mahbub dan *Enyak* Hajjah Mariah tidak didapatkan dengan gratis, melainkan melalui hasil kerja-kerja keras mereka sejak tahun 1970-an. Masih

terekam dalam ingatan saya bagaimana almarhum *babeh* (bapak) bercerita kepada saya bahwa ketika muda ia mesti membantu *Enyak* untuk mengangkat alat-alat berat persewaan untuk hajatan, baik pernikahan, sunatan, ataupun perhelatan Maulid Nabi Muhammad. Dari uang persewaan tersebut, perlahan-lahan *Enyak* mengumpulkan uang. Setelah cukup terkumpul, ia kemudian membelikan sejumlah tanah dengan luas antara 200-500 meter di wilayah Cakung. Saat itu, Mursalim, *babeh* saya, tidak mengerti mengapa *Enyak* lebih banyak membeli tanah ketimbang alat-alat modern untuk transportasi, seperti sepeda motor ataupun mobil. Bahkan, di tengah banyak orang Betawi yang lainnya justru menjual tanah-tanah mereka untuk pergi ke tanah suci pada awal 1980-1990-an, *Enyak* menginvestasikan uangnya untuk membeli tanah. Ketika uang penyewaan sudah cukup terkumpul kembali, ia kemudian membangun rumah kontrakan dengan jenis *cluster*, yaitu satu rumah terdiri dari sepuluh pintu, yang masing-masing terdapat empat ruangan memanjang; depan ruang tamu, tengah ruang tidur, belakang ruang dapur. Sementara sisa tanah sekitar dua meter di depan dan belakang dibuatkan teras rumah dan kamar mandi.

Kondisi ini cukup kontras apabila dibandingkan dengan kondisi orang Betawi lainnya, khususnya mereka yang berada di pusat kota. Sejak tahun 1970-an, rezim Orde Baru melakukan pembangunan ekonomi besar-besaran yang menghasilkan sejumlah infrastruktur di pelbagai wilayah Jakarta. Akibat dari pembangunan ini banyak orang-orang Betawi menjadi korban dengan tergusur rumah-rumah mereka dan kemudian berpindah ke pinggir kota. Kondisi peng-

gusuran ini dinarasikan dengan baik oleh Firman Moentaco, sastrawan kelahiran Jakarta, mengenai perasaan mereka (Shahab, 2004: 20).

Bukan hal yang mengada-ada bila perkampungan di Jakarta dibarengi pula dengan penggusuran-penggusuran tanah dan rumah penduduk sebagai salah satu konsekuensi. Dan semua sudah maklum bahwa korban penggusuran yang terbanyak adalah penduduk asli. Untuk dan atas nama kepentingan umum, orang Betawi terpaksa harus berlapang dada menerima penggusuran terhadap rumah dan pusaknya untuk digantikan oleh berdirinya gedung-gedung pemerintah, pasar Inpres, perkantoran swasta, pertokoan, real estate, jembatan, jalan tol, jalan arteri, dan sebagainya.

Dari penggusuran tersebut, ribuan orang Betawi hijrah ke wilayah pinggiran kota dan luar Jakarta. Mereka bercerai seperti tawon yang jauh dari sarangnya. Antara sanak saudara, handai taulan, dan keluarga besar tidak lagi tinggal berdekatan. Mereka juga tidak lagi bisa memainkan alat-alat musik seperti rebana dan samrah bersama-sama. Mereka tidak duduk santai sambil mengobrol di depan rumah dan membicarakan banyak hal. Letak geografis yang jauh antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, menyebabkan mereka jarang bertatap muka untuk bertemu. Akibat kondisi ini, lambat laun mereka tidak saling mengenal.

Dalam menjelaskan kondisi tersebut, Yasmin Zakie (2004) menyebutnya sebagai *kematian obor*. Akibatnya, penggusuran dan *kematian obor* ini membuat mentalitas orang Betawi menjadi rendah diri. Perasaan rendah diri yang kemudian membuat solidaritas etnik di antara Betawi semakin memudar. Salah satu bentuk perasaan rendah diri ini

bisa dilihat dalam pembentukan organisasi mereka yang tidak menamakan, mengidentifikasi, dan melekatkan diri sebagai bagian dari etnis Betawi. Sebaliknya, mereka menggunakan nama Jakarta, seperti Ikatan Keluarga Putra-Putri Djakarta (IPPD), Ikatan Keluarga Besar Anak Djakarta (IKB Anda), Ikatan Keluarga Djakarta (IKD).

Perasaan rendah diri ini menjadi berlipat dengan stereotip orang betawi yang dipandang orang nonbetawi sebagai etnis terbelakang, malas, tukang kawin, dan suka jual tanah untuk pergi haji. Sebuah stereotip yang direproduksi secara terus menerus oleh orang luar Betawi, melalui cerita-cerita ringan sebagai bentuk pengalaman dan oleh-oleh, saat orang luar Betawi pulang kampung. Stereotip inilah yang membuat orang Betawi mengafirmasikan dirinya sehingga menjadi keyakinan bahwasanya mereka memang seperti yang dipersepsikan. Satu bentuk afirmasi tersebut terlihat pada keengganan orang Betawi yang berada di kota untuk menggunakan bahasa Betawi dalam kehidupan publik mereka. Mereka hanya menggunakan bahasa Betawi kepada sesama orang Betawi saja dan digunakan lebih pada kehidupan privat. Kondisi ini dipaparkan oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta 1966-1977, yang ketika itu bermaksud menghidupkan kembali tradisi dan kebudayaan Betawi di Jakarta. Ali Sadikin menyebut kondisi ini dengan istilah “orang Betawi sedang tenggelam dalam rumahnya sendiri” (Zakie, 2004).

Di tengah situasi penggusuran, kemiskinan, dan perasaan minder terkait dengan identitas kebetawian tersebut, *Enyak* dan *Engkong* saya mengalami nasib yang berbeda. Penghasilan *Enyak* dari menye-

wakan alat hajatan semakin bertambah. Uang tersebut kemudian diakumulasikan kembali untuk membeli tanah dan kontrakan. Saat kontrakan sudah banyak, dan, di satu sisi, bisnis persewaan hajatan makin banyak saingan, *Enyak* kemudian beralih jualan, menjadi pedagang pakaian di Pasar sambil memperkuat akumulasi kapital dengan membeli tanah dan membikin kontrakan kembali.

Generasi 2: Keistimewaan, Modal Usaha, dan Kemandegan

Meskipun rezim Orde Baru menggalakan Keluarga Berencana (KB) kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai upaya menekan laju kenaikan penduduk, bukan berarti kebijakan itu diterima begitu saja. Latar belakang budaya sebagian etnik di Indonesia menjadi faktor utama penolakan kebijakan tersebut, baik penolakan secara terbuka ataupun diam-diam. Dalam konteks orang Betawi, sama seperti etnik Jawa, mereka memiliki prinsip bahwa “banyak anak, banyak rezeki”. Semakin banyak anggota keluarga, rezekinya akan semakin bertambah. Kuatnya prinsip ini sebenarnya lebih disebabkan oleh jenis pekerjaan yang diambil, ketika orang Betawi kebanyakan adalah pengusaha dengan cara berdagang dan memiliki kontrakan.

Dengan banyaknya anak diasumsikan akan membantu dan menjadi bagian dari kepanjangan tangan orangtua mereka dalam membantu pekerjaan berdagang. Prinsip ini juga yang dipegang oleh *Engkong* dan *Enyak* saya. Hal ini terlihat dari banyaknya anak yang dimiliki oleh mereka berdua, yang memiliki sembilan orang anak, terdiri dari tiga perempuan dan enam laki-laki. Mereka,

secara berurutan dari anak pertama sampai terakhir, adalah Mursalam, Jumiah, Mursalim, Komar, Fatimah, Omar, Mardi, Marniyah, Toing. Mereka ini juga yang turut membantu usaha persewaan dan dagang pakaian di Pasar Cakung saat tumbuh dewasa.

Dengan dukungan ekonomi yang relatif kuat dan usaha yang terus maju, imajinasi untuk menyekolahkan anak-anaknya sudah ada dalam diri *Enyak* saya. Sayangnya, upaya untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang tertinggi, khususnya sarjana strata satu tidak sungguh-sungguh direncanakan secara matang. Di sisi lain, tidak ada pola pendisiplinan dengan membangun prinsip seperti kebanyakan etnik Jawa yang meyakini bahwa jenjang pendidikan tinggi merupakan syarat akses untuk mencapai perbaikan ekonomi anak-anak mereka ke depan. Dari kesembilan anggota keluarga tersebut, hanya tiga orang yang merasakan dunia kampus; satu orang selesai, dan dua yang lain tidak menyelesaikan kuliahnya hingga lulus sarjana strata satu. Mardi adalah anak yang selesai dan Omar dan Marniyah adalah yang tidak menyelesaikan sarjana strata satunya. Sementara itu, sebagian besar hanya lulus Sekolah Menengah, seperti SMA (Sekolah Menengah Atas), Madrasah Aliyah (MA), dan STM (Sekolah Teknik Menengah). Mengikuti anggota keluarga yang lain, meskipun ada yang sampai lulus strata satu, anak keluarga Haji Mahbub ini akhirnya bekerja sebagai pedagang, membantu *Enyak* dan *Engkong*.

Layaknya kebanyakan orang Betawi lainnya, saat anak-anaknya tumbuh dewasa dan kemudian menikah, *Enyak* dan *Engkong* tidak hanya membiayai ongkos pernikahan

melainkan juga memberikan rumah dan modal usaha berdagang. Saat anak-anak mereka menikah inilah masing-masing kemudian memiliki lintasan perjalanan hidup dan perekonomian yang berbeda, ada yang berhasil dan ada yang tidak. Perbedaan ini setidaknya disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, adanya pertemuan tradisi baru antara pasangan masing-masing. Hal ini terlihat dengan keluarga yang dibangun oleh Komar, anak keempat. Ia menikah dengan perempuan Betawi yang juga sama-sama orang kaya; punya banyak kontrakan dan pedagang yang sukses. Hal ini juga terlihat pada Marniyah, anak kedelapan, yang menikah dengan orang Madura yang bekerja sebagai peneliti di salah satu lembaga riset milik negara. Begitu juga dengan Komar yang menikah dengan perempuan Jawa, yang juga bekerja menjadi direktur di salah satu organisasi non pemerintah nasional.

Faktor kedua adalah faktor gender yang memengaruhi semangat *Enyak*. Dalam hal ini adalah Fatimah, anak kelima, dan Marniyah, anak kedelapan. Mengikuti semangat dan warisan etos *Enyak* saya, mereka berdua berdagang dengan ulet dan cukup berhasil. Ketiga, faktor patriarki. Tidak dipungkiri faktor patriarki dan keberanian untuk keluar dari wilayah geografis kampungnya juga turut memengaruhi sebab kebanyakan anak laki-laki tidak bisa meneruskan etos yang dibangun oleh orangtua mereka. Ini tecermin dari sisa anak-anak yang sudah saya sebutkan di atas. Ketika relatif kurang berhasil dalam mengembangkan usaha, mereka beralih, menjadi karyawan ataupun pegawai negeri sipil.

Bagi keluarga yang sukses secara ekonomi, mereka bisa merencanakan dan

membangun masa depan anak-anak mereka dengan menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang tertinggi untuk ukuran kebanyakan masyarakat Indonesia. Ini terlihat pada keluarga Komar. Dengan kapital ekonomi yang kuat, ia memiliki imajinasi untuk menyekolahkan kedua anaknya, laki-laki dan perempuan, seperti kebanyakan orang kaya Jakarta modern lainnya. Sejak Sekolah Dasar hingga SMU, kedua anaknya dimasukkan di Sekolah Al-Azhar. Ketika masuk ke jenjang kuliah strata satu, anaknya yang perempuan bisa menempuh pendidikan S1 di *London School of Public Relations* Jakarta. Sementara anaknya yang kedua, laki-laki, bisa menempuh pendidikan S1 bidang Teknologi Industri, Institusi Teknologi Bandung. Dengan pendidikan bagus tersebut, mereka berdua mendapat akses untuk bekerja di perusahaan swasta, yaitu maskapai penerbangan dan perminyakan. Sementara itu, Marniyah, dengan modal ekonomi melalui dua toko pakaian, 20 kontrakan rumah, dan penghasilan suami sebagai peneliti senior di salah satu institusi riset negara, justru bisa menyekolahkan anaknya yang pertama masuk untuk kuliah strata satu di kedokteran.

Meskipun sukses secara ekonomi, imajinasi untuk memperbaiki perekonomian melalui pendidikan ini justru tidak tertanam kuat pada Fatimah. Meskipun upaya menyekolahkan sampai jenjang selanjutnya pascalulus SMU ini sudah diusahakan, alih-alih mendapatkan hasil dari pendidikan yang ditempuh melalui D2 dan D3, di mana kelima anaknya bisa bekerja di perusahaan swasta, BUMN ataupun menjadi pegawai negeri sipil, justru semua anaknya kembali berdagang dan turut membantu usahanya yang cukup berhasil, yaitu memiliki kontrakan

20 pintu, dan memiliki dua mobil angkot. Sementara itu, dua anaknya yang lain menjadi buruh lepas di perusahaan swasta dekat rumah.

Fatimah ini persis mewarisi etos dan karakter *Enyak* saya. Melalui kemampuan mengakumulasi kapital ekonomi yang dimilikinya, ia tidak begitu saja menyediakan rumah untuk masing-masing anaknya, melainkan juga, sebelumnya harus bekerja membantu usaha yang dimilikinya. Kondisi ini satu sisi memberikan kenyamanan untuk anak-anaknya, di sisi lain, justru menciptakan ruang yang sempit untuk bergerak mencari peruntungan ekonomi dengan pengalaman dan pendidikan yang dimiliki oleh anak-anaknya.

Generasi 3: Menuju Kelas Pekerja

Meskipun tidak terbilang miskin, anggota keluarga yang tidak sukses dalam berdagang mengalami proses kemunduran, baik secara ekonomi maupun mental. Kondisi ini diperparah dengan semakin meningkatnya biaya hidup di Jakarta dari tahun ke tahun dan tidak adanya akses kesehatan dengan memiliki asuransi sebagai tindakan preventif apabila satu waktu mereka sakit. Kecenderungan pola makan yang gurih, enak, dan manis sebagai bagian dari praktik kebudayaan Betawi ini menambah daftar kemungkinan orang Betawi terkena pelbagai macam penyakit, seperti diabetes, darah tinggi, dan stroke. Akibatnya, saat anak-anak membutuhkan uang untuk sekolah dan di satu sisi, salah satu anggota keluarga ini sakit, membuat mereka kemudian harus menjual kontrakan yang merupakan warisan dari orangtuanya. Memang, tidak semua kon-

trakan dijual, hanya 1-2 pintu. Namun, semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi menjual kontrakan pun menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup. Satu persatu, harta warisan berharga yang bisa dijual akhirnya akan dijual juga.

Kondisi ini dialami oleh keluarga saya. Saat ayah saya, Mursalim, jatuh sakit terkena *stroke*, satu persatu kontrakan yang kami miliki harus dijual untuk biaya pengobatan yang tidak murah. Di sisi lain, pemasukan ekonomi melalui warung kelontongan tidaklah besar, bahkan cenderung habis karena sering dikonsumsi pribadi. Karena itu, alih-alih mempersiapkan anak-anaknya sampai ke jenjang lebih tinggi melalui pendanaan dan perencanaan yang matang, hal itu justru diabaikan. Kondisi ini dialami oleh sebagian besar keluarga besar saya. Pendidikan sebagai cara untuk mendapatkan akses pekerjaan yang lebih baik pun tidak bisa dilakukan. Akibatnya, keluarga besar saya, dan sama seperti kebanyakan orang Betawi lainnya mengalami, meminjam istilah Geertz (1963) yang saya modifikasi sebagai involusi (kepemilikan) tanah. Di sini, anak-anak mereka, yang merupakan generasi ketiga, kemudian harus merasakan pahitnya sebagai orang Betawi yang lahir dan tinggal di tanah Jakarta, tetapi kemudian tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan di tengah persaingan bursa kerja yang semakin ketat di Jakarta.

Bertolak dari penjelasan di atas, saat akses sumber ekonomi dan kapital mereka mulai menipis, bagaimana nasib mereka dan anak-anak mereka? Tidak seperti orangtua mereka sebelumnya, yang memanjakan mereka dengan kapital ekonomi yang cukup melalui sejumlah kontrakan yang diwariskan dan usaha yang diberikan, dalam konteks

keluarga besar saya, orang yang mengalami stagnasi ekonomi dan tidak adanya imajinasi untuk bergerak dalam mengakumulasi kapital yang dimiliki, anak-anak mereka pun harus bekerja di dua sektor informal dan kelas pekerja. Dalam sektor informal, generasi ketiga dari keluarga besar saya melakukan wiraswasta yang tidak lagi terbatas hanya berdagang pakaian. Dari keluarga besar, ada yang berdagang warung kelontongan dan jualan pulsa. Ada juga yang bekerja dengan modal memanfaatkan batas kekuasaan geografisnya, mereka menjadi calo di terminal bayangan menuju pintu tol masuk Cakung Barat. Misalnya, Marwan, abang saya, Bang Iman, dan Ratman, sepupu saya. Sementara itu, Toing, *encang* saya yang mengalami stagnasi dalam berdagang, kemudian masuk dan terlibat dalam aktivitas Forum Betawi Rempug (FBR). Meskipun secara ekonomi relatif berkecukupan, untuk ekspresi sosial dan aktivitas, Omar juga terlibat di FBR. Dua *encang* saya ini bergantian menjadi ketua Gardu wilayah Cakung.

Di tengah sulitnya mencari pekerjaan di Jakarta di tengah kompetisi yang membutuhkan kemampuan dan pengalaman, kehadiran dua *encang* saya ini memudahkan saudara-saudara saya untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, tidak seperti orang berpendidikan tinggi lainnya, yang mendapatkan pekerjaan layak, ruang bermesin pendingin, dan ruang kerja yang nyaman, pekerjaan yang didapatkan oleh saudara-saudara saya adalah buruh lepas harian di sebuah perusahaan yang memproduksi tembaga dan kabel listrik, yang berada di dekat rumah. Saudara-saudara saya tersebut adalah Marwan (abang saya), Sulaiman (sepupu),

Ratman (sepupu), dan Daras (sepupu). Sementara adik saya, Ragil, melalui jalur yang berbeda juga menjadi buruh harian di perusahaan swasta di wilayah Bekasi, yang bekerja di sektor otomotif. Adik tiri saya, Rafsa, menjadi tukang ojek *online Uber*.

Pada kenyataannya, meskipun mendapatkan tangguhan ekonomi sehingga mereka bisa mendapatkan gaji layaknya orang kantoran yang lain, tidak mudah menjadi kelas pekerja semacam ini. Namun, itu pilihan satu-satunya di tengah ketiadaan sandaran ekonomi yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Mereka tidak hanya berusaha mengalahkan diri sendiri di tengah imajinasi rasa kepemilikan dominan sebagai orang Betawi umumnya yang merasa memiliki Jakarta, melainkan juga harus bersaing dan "berkelahi" dengan sesama pekerja yang lainnya di perusahaan tempat mereka bekerja. Mental dan tenaga mereka benar-benar diuji tanpa sedikit pun mempertimbangkan rasa malu. Meskipun sadar di tengah kerja keras sebagai kelas pekerja terbawah, mereka menatap masa depan tanpa jaminan kepastian.

Kondisi ini yang sering dikeluhkan, salah satunya oleh Marwa Arwan, abang saya, saat saya berkunjung ke rumahnya pada 15 September 2016.

Gua sebenarnya enggak suka pekerjaan begini. Soalnya kerjanya capek banget. Apalagi gue jadi tukang bersih-bersih (*cleaning service*) yang tugasnya macam-macam. Selain ngebersihin gudang yang gede banget juga kadang harus bantu-bantu pegawai yang lain kalau butuh bantuan. Udah gitu, gue juga harus nahan diri ama orang yang kerjanya sama ama gue. Itu ada satu orang *sengak* banget ama gue. Dikit-dikit nantangin dan belagu. Gua pengen ajak berantem orangnya. Habis gua kesal banget. Tapi, ampe sekarang gua tahan-

tahan aja. Gua takut dipecat cuma gara-gara kayak begini. Habis kalau enggak kerja begini dan dipecat, gua mau ngapain?

Bertolak dari penjelasan di atas, transformasi orang-orang Betawi dari tuan tanah kemudian menjadi kelas pekerja disebabkan oleh proses involusi yang justru dialami oleh generasi kedua orang Betawi. Upaya menjadi kelas pekerja menjadi lebih mudah seiring dengan kehadiran FBR, yang menjadi wadah aspirasi masyarakat Betawi, yang salah satunya diperlihatkan oleh dua *encang* saya. Maksud wadah aspirasi masyarakat Betawi ini tidak hanya sebagai agen penyalur pekerjaan bagi orang-orang Betawi yang tidak memiliki pekerjaan, melainkan juga diberikan lebih khusus kepada orang-orang yang menjadi anggota FBR, melainkan juga kepada orang-orang yang memang telah menjadi anggotanya. Representasi media aspirasi ini yang juga dikuatkan oleh Asikin (2013: 38) dalam menjelaskan kehadiran FBR.

FBR setempat muncul sebagai jawaban dari permasalahan Orang Betawi di Pulo Gebang. Untuk saat ini, FBR adalah wadah saluran mobilitas sosial Orang Betawi Pulo Gebang bagi Orang Betawi yang sudah tidak memiliki status kepemilikan tanah dan terlebih lagi tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Kemungkinan besar, masyarakat Betawi Pulo yang sudah tidak lagi memiliki status kepemilikan tanah dan hidup di bawah garis kemiskinan, akan ikut bergabung menjadi anggota FBR di kemudian hari. FBR menjadi salah satu wadah saluran mobilitas sosial masyarakat Betawi. Tidak hanya di Pulo Gebang, melainkan di daerah Jakarta dan sekitarnya. FBR selain sebagai wadah aspirasi masyarakat Betawi juga memiliki tujuan yaitu sebagai agen penyalur pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, khususnya orang-orang yang memang telah menjadi anggotanya. Hal itu pun tercantum di dalam tujuan

didirikannya ormas FBR. Beberapa informasi keuntungan yang didapatkan setelah bergabung menjadi anggota FBR adalah keuntungan dalam usaha, keuntungan mendapatkan jaringan/ *networking*, keuntungan mendapatkan pekerjaan, keuntungan dalam segi religius, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, FBR memiliki fungsi lain alih-alih menempati posisi paramiliter yang meresahkan masyarakat dan atas nama kebetawian dan imajinasi kepemilikan tanah Jakarta, FBR dianggap sering mengganggu ketertiban umum dengan membangun kongsi dengan politik lokal dan pengusaha. Perihal ini ditegaskan oleh Wilson (2006: 275) saat melihat FBR sebagai kelompok paramiliter yang mengombinasikan ketertarikan pribadi dan ekspresi premanisme untuk menguatkan justifikasi ideologi moralnya, yang kemudian diekspresikan melalui aksi-aksi di jalan. Meskipun demikian, bagi Widyanto (2005: 129), FBR tidak bisa dilihat dari satu kacamata. Memang, FBR merupakan organisasi preman yang memiliki patronase kekuasaan dengan elite politik lokal dan para pengusaha di Jakarta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Namun, di sisi lain, harus diakui, FBR dengan menggunakan simbol etnisitas kebetawian juga menjadi pahlawan yang menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi pengangguran bagi kelas bawah dan menengah di Jakarta. Di tengah situasi tersebut, banyak anak-anak muda Betawi kemudian tertarik untuk bergabung di FBR untuk mendapatkan kepastian dan jaminan ekonomi serta jaringan sumber-sumber pekerjaan yang memungkinkan mereka bisa bertahan hidup di kampungnya sendiri.

Kehadiran FBR dan anak-anak muda yang terlibat dalam organisasi tersebut dikuatkan oleh Leksana (2008: 35-36) melalui observasi dan wawancaranya kepada anak-anak muda Betawi. Secara umum, ada tiga alasan mereka bergabung di FBR. Pertama, persoalan ekonomi dan ketiadaan akses pekerjaan. Di tengah situasi keuangan yang tidak mapan, kebanyakan anak-anak muda Betawi tidak bisa meneruskan pendidikannya sampai S1. Maksimal mereka hanya bisa menyelesaikan ke tingkat SMU. Akibatnya, mereka justru tidak bisa berkompetisi di bursa kerja yang tidak hanya membutuhkan spesialisasi kemampuan di bidang tertentu, melainkan ijazah dan gelar dari universitas, baik negeri ataupun swasta. Kedua, adanya perasaan dendam dan terancam. Pada tahun 2001, konflik antara orang Betawi dan Madura terjadi di wilayah Cakung Barat. Salah satu penyebab mengapa konflik terjadi adalah –menurut asumsi yang berkembang bagi kebanyakan orang Betawi di Cakung– ulah orang Madura yang sering berbuat kriminal dan onar bahkan sering menyerobot tanah-tanah yang dimiliki oleh orang Betawi. Dua perasaan negatif inilah yang membuat sahabat saya, Adi, yang diwawancarai oleh Leksana tersebut, kemudian bergabung dan terlibat dalam keanggotaan FBR.

Penutup

Pada pembahasan, saya menunjukkan adanya transformasi orang Betawi dari tuan tanah menuju kelas pekerja dengan menjadikan institusi terkecil, dalam hal ini keluarga, sebagai subjek riset autoetnografi. Tiga hal yang dapat disimpulkan; selain tidak adanya

imajinasi yang kuat mengenai pendidikan sehingga menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang sekolah lebih tinggi, juga disebabkan oleh gaya hidup dan upaya keluar dari zona kenyamanan geografisnya, serta pola pewarisan pengetahuan tentang kerja keras orangtua mereka sebelumnya. Akibatnya, di tengah kebutuhan hidup di Jakarta semakin mahal dan adanya persaingan kerja yang membutuhkan kecakapan yang memadai, anak-anak mereka, generasi ketiga, harus tersingkir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Kondisi ini merupakan narasi yang melengkapi pertanyaan mengapa orang Betawi tersingkir dari kampungnya sendiri. Dalam hal ini ternyata narasi yang muncul selalu melekat pada kebijakan rezim Orde Baru mengenai pembangunan yang telah meminggirkan orang Betawi.

Kehadiran dua *encang* saya, Omar dan Toing Entong, yang aktif sebagai ketua Gardu FBR di wilayah Cakung menunjukkan posisi organisasi FBR sebagai penguat solidaritas kebetawian orang Betawi pascarezim Orde Baru dan juga media penyalur pekerjaan bagi kebanyakan orang Betawi. Dari riset autoetnografi ini saya juga menunjukkan suara dari dalam (*voices from within*) orang Betawi yang mengkritik asumsi mengenai kehadiran FBR secara negatif melalui studi-studi yang selama ini muncul. Di sisi lain, dengan menggunakan anak muda Betawi sebagai *generasi transisi*, dalam artikel ini saya menunjukkan bagaimana proses pewarisan pengetahuan, imajinasi, dan pola memandang hidup dalam diri orang Betawi, telah membentuk cara mereka menghadapi dunia kerja dan interaksi sosial saat ini. Salah satunya dengan melihat FBR sebagai organisasi yang memperkuat cara

mereka dalam melihat identitas diri dan imajinasi Jakarta orang yang dahulu adalah pemilik tanah.

Daftar Rujukan

- Akmaliah, Wahyudi. (2012). Orang Betawi Dalam Sinetron. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, 14 (2), 349-366.
- Asikin, Naimah B. (2013). Studi Mobilitas Sosial Keluarga Betawi: Perubahan Status Kepemilikan Tanah Alih Generasi Keluar Betawi Di Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. *Jurnal Insani*, 15 (2), 28-44.
- Brown, David & Ian Wilson. (2007). *Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta*. Working Paper No.145. Australia: Murdoch University.
- Bruner, Jerome. (1993). The Autobiographical Process. Dalam Robert Folkenflik (Ed.), *The Culture of Autobiography: Constructions of self-representation*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Buzard, J. (2003). On Auto-Ethnographic Authority. *The Yale Journal of Criticism*, 16 (1), 61-91.
- Denzin, Norman K. (2004). The War on Culture, the War on Truth. *Cultural Studies & Critical Methodologies*, 4 (2), pp. 137-142.
- Elliot, Jane. (2005). *Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage.
- Freeman, Mark. (2014). Data are Everywhere: Narrative criticism in the literature of experience. Dalam Colette Daiute & Cynthia Lightfoot (Eds.), *Narrative Analysis: Studying the development of individuals in society*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Geertz, Clifford. (1963). *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley CA: University of California Press.
- Klarijn, Loven. (2008). *Watching Si Doel: Television, languages, and cultural identity in contemporary Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Leksana, Grace Tjandra. (2008). *Urban Youth, Maginalization and Mass Organization: Involvement in the Betawi Brotherhood Forum in Jakarta*, A Research Paper, Master of Arts in Development Studies, Institute of Social Studies, Netherlands.
- Naafs, Suzanne & Ben White. (2012). Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 1 (2), 89 -106.
- Parlina, Nina. (2012). *Representasi Identitas Orang Betawi Dalam Forum Betawi Rempug*. Tesis Program Studi Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Shahab, Alwi. (2002). *Betawi Queen of the East*, Jakarta: Republika
- Shahab, Yasmine Zakie. (2004). *Identitas dan Otoritas: Rekonstruksi Tradisi Betawi*. Jakarta: Laboratorium Antropologi FISIP UI.
- Waterson, Roxana. (2007). *Southeast Asian Lives: Personal Narratives and His-*

torical Experience. Singapore: NUS Press.

Widyanto, Untung. (2005). *Antara Jago dan Preman; Studi tentang Habitus Premanisme pada Organisasi Forum Betawi Rempug (FBR)*. Tesis Program Pascasarjana Sosiologi, Depok: FISIP Universitas Indonesia.

TINJAUAN BUKU

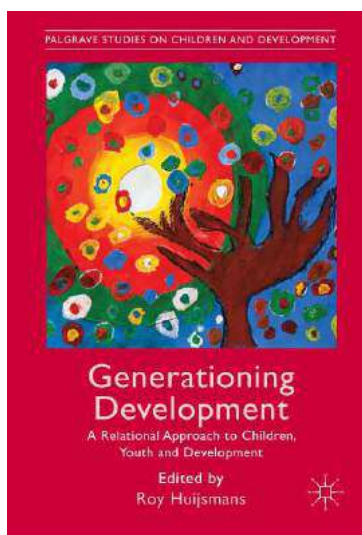
GENERATIONING DEVELOPMENT: A RELATIONAL APPROACH TO CHILDREN, YOUTH, AND DEVELOPMENT

Oki Rahadianto Sutopo

Peneliti di Youth Studies Centre, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gajah Mada (UGM)

oki.rahadianto@ugm.ac.id



Judul buku: *Generational Development: A Relational Approach to Children, Youth and Development*

Editor: Roy Huijsmans

Jumlah: xix+ 335 halaman

Penerbit: Palgrave MacMillan, UK, 2016.

ISBN 978-1-137-55623-3 (Ebook)

Buku yang dieditori oleh Roy Huijsmans, dosen senior kajian anak dan kepemudaan dari International Institute of Social Studies di Belanda ini mengeksplorasi pendekatan relasional sebagai tawaran alternatif untuk membaca keterkaitan antara

kajian anak dan kepemudaan dengan kajian pembangunan. Pendekatan relasional sebagai kerangka utama dalam buku ini selanjutnya diperkaya dengan berbagai macam kasus-kasus empiris dari negara-negara di belahan dunia utara maupun selatan. Setelah mencermati buku ini pembaca akan mendapatkan penjelasan yang komprehensif serta memungkinkan pembaca untuk melakukan perbandingan serta merefleksikan mengenai ragam pengalaman anak, pemuda dan pembangunan dalam konteks sosial budaya yang berbeda-beda. Dijelaskan dalam kata pengantar bahwa buku ini terinspirasi dari kepedulian si editor dan juga kontributor yang lain mengenai masih terpinggirkannya kajian anak dan kepemudaan dalam kajian pembangunan. Dengan kata lain, kajian pembangunan masih sangat bias perspektif orang dewasa. Buku ini mencoba menjembatani *gap* antara kedua kajian tersebut.

Dalam kajian kepemudaan, pendekatan relasional nampaknya sedang mengalami kebangkitan kembali. Hal ini tidak hanya sebagaimana diklaim oleh editor buku ini namun dalam kajian kepemudaan di Australia, Woodman and Wyn (2015) misalnya dengan menggunakan data penelitian longitudinal

mengenai pemuda Australia menekankan mengenai pentingnya pendekatan relational dengan titik masuk generasi untuk memahami mengenai perubahan dan kesenjangan sosial. Usulan dari Woodman and Wyn (2015) ini mendapatkan kritik keras dari France and Roberts (2015) terutama perlunya memasukkan unsur kelas dan infiltrasi neoliberalisme. Kajian yang lain misalnya Andres and Wyn (2010) melakukan perbandingan mengenai generasi muda di Kanada dan Australia, sedangkan dalam kajian kepemimpinan di Indonesia, Naafs and White (2012) dan Sutopo (2014) mengusulkan mengenai pentingnya perspektif generasi sebagai alternatif dalam memahami pemuda dan perubahan sosial di Indonesia.

Menurut Huijsmans (2016) dalam buku ini, pendekatan relasional terkait dengan tiga aspek yaitu: *relational modalities*, *boundary work* dan *embeddedness of the actors*. Ketiga-tiganya ingin menegaskan bahwa anak dan pemuda tidak dapat dikerangkeng dalam kategorisasi-kategorisasi yang pada akhirnya hanya akan memunculkan *gap* dan menjauhkan keterkaitan antara anak, pemuda dan pembangunan. Di sisi yang lain, Huijsmans (2016) juga menegaskan perlunya melampaui umur sebagai batasan-batasan penetapan untuk anak dan pemuda dengan mengusulkan tiga varian perspektif generasi yaitu: *kinship descent*, *life phase* dan *generation as a cohort*. Kerangka besar yang ditawarkan oleh Huijsmans (2016) ini akan ditemui dalam 12 bab yang terdiri dari tiga bagian: *theorising age and generation in young lives*, *everyday relationalities: school, work and belonging*, *negotiating development* serta satu komentar dari Nicola Ansell dalam buku ini.

Dalam bab I, Hart dengan menggunakan kasus pengungsi muda Palestina di Jordan menjelaskan bahwa umur secara kronologis masih menjadi indikator utama untuk lembaga bantuan internasional dalam melakukan intervensi terhadap para pengungsi. Namun Hart juga mengingatkan bahwa umur ini juga harus dimaknai secara lebih kompleks misalnya terkait dengan aspek sejarah para pengungsi muda tersebut dan untuk memahami kebutuhan mereka. Setelah membaca bab yang sangat intens mengenai pengungsi Palestina, pembaca disuguhi kasus yang berbeda oleh Couman mengenai pekerja seks komersial di Belanda. Menurutnya umur masih menjadi batas utama dalam pembuatan kebijakan sosial terkait dengan profesi ini dan umur tidak dapat diisolasi sebagai satu-satunya indikator namun akan selalu terkait dengan aspek yang lain misalnya gender. Keterkaitan ini juga muncul dalam studi Mills di Kanada terutama keterkaitan umur dengan kelas sosial, sedangkan Kazak menutup bab I dengan membahas keterkaitan umur sosial (*social age*) dengan *Sustainable Development Goals*. Secara umum, isi dari bab I ini mencoba mengusulkan bahwa umur masih menjadi indikator utama dalam berbagai aspek, misalnya pembuatan kebijakan, namun perlu juga digarisbawahi bahwa umur bukanlah indikator utama. Umur harus selalu dikaitkan dengan aspek-aspek yang lain dalam masyarakat seperti gender, kelas sosial maupun kesenjangan kekuasaan. Dengan mengkaitkan dengan aspek-aspek yang lain maka dalam melakukan analisa maupun memformulasi kebijakan mengenai anak, pemuda dan pembangunan akan lebih komprehensif dan tidak mereduksi kekompleksan fenomena tersebut. Dalam konteks Indo-

nesia, menurut UU no 40 tahun 2009, umur juga masih menjadi indikator utama dalam pembuatan kebijakan di mana pemuda dimaknai hanya sebagai warga negara yang berusia antara 16-30 tahun. Indikator ini terlalu menggeneralisasi kekompleksitasan realitas pemuda di Indonesia sehingga perlu dilakukan diversifikasi pemuda baik sebagai subjek kajian maupun sebagai subjek pembuatan kebijakan kepemudaan (Sutopo 2016).

Dalam bab II, Horton dengan menggunakan contoh kasus di dua sekolah di Vietnam menjelaskan bagaimana *bullying* tidak terlepas dari relasi generasi dalam organisasi sekolah tersebut. *Bullying* dalam terminologi Bourdieu (2000) digunakan sebagai instrumen untuk melakukan *symbolic violence* terhadap murid yang berada di pihak subordinat sehingga mereka yang dominan bisa mereproduksi aturan yang menguntungkan posisi mereka dalam sekolah tersebut. Sedangkan dua tulisan yang lain oleh Belay dan Sayibu menggunakan titik masuk anak jalanan di Addis Ababa, Ethiopia dan Tamale, Ghana untuk memahami mengenai adanya *relational modalities* di antara mereka. Anak-anak jalanan dalam reproduksi budaya dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari relasi generasi serta gender (kasus Ethiopia) yang secara terus menerus dinegosiasikan. Sedangkan dalam kasus Ghana, memahami anak jalanan tidak dapat hanya melalui relasi antara orang tua dan anak namun perlu memahami keterkaitannya dengan struktur yang lebih luas yang membentuk hubungan sosial mereka. Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam memformulasikan kebijakan untuk mengentaskan mereka dari *never ending risk*

sebagai anak jalanan. Bab ini ditutup oleh tulisan yang menarik mengenai pemuda dan *belonging* dengan menggunakan kasus pemuda muslim di Belanda. Secara umum, berbagai tulisan dalam bab II ingin menegaskan mengenai pentingnya menggunakan pendekatan relasional dalam memahami aspek kehidupan sehari-hari anak dan pemuda dalam konteks yang berbeda-beda.

Dalam bab III secara keseluruhan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana intervensi melalui pembangunan telah membuat anak dan pemuda melakukan negosiasi secara terus menerus dan membentuk ulang posisi mereka dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam tulisan Morarji mengenai anak dan sekolah di pegunungan India. Sekolah digunakan sebagai instrumen untuk memodernisasikan namun dalam prosesnya tidak terlepas dari aspek kelas, gender dan relasi generasi. Modernisasi sebagai instrumen mobilitas sosial ke atas dalam kasus di pegunungan India telah gagal dalam memperbesar volume kapital budaya dan kapital ekonomi yang mereka butuhkan. Sedangkan Palacio dalam tulisan selanjutnya menggunakan kasus kebijakan pemerintah CCT di Ekuador dan secara sistematis menjelaskan mengenai keterkaitannya dengan aspek lain yaitu umur, gender, negara dan masyarakat. Menurutnya anak dan pemuda sebagai subjek penerima kebijakan tersebut melakukan negosiasi secara berbeda-beda. Faktor gender dan pembangunan juga secara eksplisit dibahas oleh Srinivasan dengan menggunakan kasus kehamilan usia dini di India. Menurutnya diskriminasi gender masih sangat kuat direproduksi tidak hanya dalam budaya sehari-hari namun juga melalui instrumen kebijakan. Bab III ditutup dengan

tulisan Berckmoes dan White dengan menggunakan kasus pasca konflik di Burundi. Menurut mereka, pemuda di pedesaan tidak tertarik untuk bekerja di sektor pertanian bukan dikarenakan karena pertanian dianggap kurang menarik namun lebih karena limitasi struktural yang dihadapi oleh pemuda di Burundi. Buku ini ditutup dengan komentar dari Ansell yang kembali menegaskan bahwa produksi makna mengenai umur dan generasi selalu terkait dengan relasi kuasa, oleh karena itu sekali lagi pendekatan relasional perlu dijadikan *mainstream* dalam melakukan analisa maupun formulasi kebijakan anak, kepemudaan dan pembangunan.

Terlepas dari *scope* kajiannya dan kasus empiris yang terlalu luas sehingga kadang menyulitkan pembaca yang kurang familiar terhadap kondisi sosial budaya negara-negara lain, buku ini tetap perlu dibaca oleh para penggiat maupun peminat kajian anak, kepemudaan dan pembangunan di Indonesia. Hal ini tidak hanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman anak dan pemuda dari negara-negara lain baik di belahan dunia utara maupun selatan namun juga supaya pembaca tidak terjebak pada *inward looking* dalam melihat suatu permasalahan. Pendekatan relasional ini perlu dijadikan tawaran alternatif dalam kajian kepemudaan dan formulasi kebijakan kepemudaan di Indonesia. Dengan memahami pemuda secara relasional maka diharapkan ke depan wacana mengenai pemuda di Indonesia tidak lagi secara hitam putih terjebak pada pertanyaan: *Siapa pemuda baik dan pemuda buruk?* dan *Apa yang perlu dilakukan negara dan masyarakat untuk mengubah pemuda buruk menjadi pemuda baik?*.

Makna pemuda dalam masyarakat tidak pernah tetap namun selalu bersifat cair/ *fluid* dan selalu dalam proses kontestasi terus menerus. Menurut penulis, berikan saja kebebasan, kepercayaan dan dukungan pada pemuda untuk menjadi dirinya sendiri dan untuk menentukan masa depan yang mereka inginkan!

Daftar Rujukan

- Andres, Lesley & Johanna Wyn. (2010). *The Making of a Generation: The Children of the 1970s in Adulthood*. Toronto: University of Toronto Press.
- Bourdieu, Pierre. (2000). *Pascalian Meditations*. USA: Stanford University Press.
- France, Alan & Roberts, Steven. (2015). The Problem of Social Generations: a Critique of the New Emerging Orthodoxy in Youth Studies. *Journal of Youth Studies*, 18(2), 215-230.
- Naafs, Suzanne & Ben White (2012). Intermediate Generations: Reflections on Indonesian Youth Studies. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 13(1), 3-20.
- Sutopo, Oki Rahadianto. (2014). Perspektif Generasi dalam Kajian Kepemudaan. Dalam Azca, M Najib, Derajad S. Widhyharto & Oki Rahadianto Sutopo (Eds.), *Buku Panduan Studi Kepemudaan: Teori, Metodologi dan Isu-Isu Kontemporer*. (pp. 27-41). Yogyakarta: Youth Studies Centre FISIPOL UGM.

- Sutopo, Oki Rahadianto. (2016). Agenda Pengembangan Kajian Kepemudaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1 (2), 161-172.
- Woodman, Dan & Johanna Wyn. (2015). *Youth and Generation: Rethinking Change and Inequality in the Lives of Young People*. London: Sage.



JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol 20 No. 1 & 2,
Edisi Khusus 2016
ISSN 1411-0024



AKATIGA pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. Ada empat topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. *Pertama*, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial dengan isu sentral seputar kebijakan pengupahan, peng-organisasian buruh, dan pola-pola sengketa perburuhan. *Kedua*, masalah dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus kepada persoalan struktural yang dihadapi usaha kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mangakumulasi modal. *Ketiga*, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat yang difokuskan kepada isu struktural relasi agraria. Keempat, isu demokratisasi lokal yang bertujuan untuk memberikan pandangan kritis terhadap berbagai inisiatif di kalangan 'civil society' maupun pemerintah. Keempat topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

AKATIGA
CENTRE FOR
SOCIAL ANALYSIS

Jl. Tubagus Ismail II / 2,
Bandung 40134, Indonesia
Telp. 022-2502302,
Fax. 022 2535824

E-mail:
akatiga@indo.net.id
website:
www.akatiga.org

